

TUGAS AKHIR - KS 141501

PEMBUATAN METODE SELEKSI DAN PRIORITISASI PORTFOLIO APLIKASI LAYANAN PUBLIK BERBASIS ONLINE DI SEKTOR PEMERINTAHAN (STUDI KASUS: PEMERINTAH KOTA SURABAYA)

MAYA PREVIANA SYAFITRI 5211 100 143

Dosen Pembimbing Tony Dwi Susanto, S.T., M.T., Ph.D. Anisah Herdiyanti, S.Kom., M.Sc.

JURUSAN SISTEM INFORMASI Fakultas Teknologi Informasi Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya 2015





FINAL PROJECT - KS 141501

DEVELOPING A METHOD FOR SELECTING AND PRIORITIZING E-PUBLIC SERVICE APPLICATION PORTFOLIO IN GOVERNMENTAL SECTOR (CASE STUDY: SURABAYA CITY GOVERNMENT)

MAYA PREVIANA SYAFITRI 5211 100 143

Academic Promotors
Tony Dwi Susanto, S.T., M.T., Ph.D.
Anisah Herdiyanti, S.Kom., M.Sc.

INFORMATION SYSTEMS DEPARTEMENT Information Technology Faculty Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya 2015



PEMBUATAN METODE SELEKSI DAN
PRIORITISASI PORTFOLIO APLIKASI LAYANAN
PUBLIK BERBASIS ONLINE DI SEKTOR
PEMERINTAHAN (STUDI KASUS: PEMERINTAH
KOTA SURABAYA)

TUGAS AKHIR

Disusun untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Komputer
pada
Jurusan Sistem Informasi
Fakultas Teknologi Informasi
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Oleh:

MAYA PREVIANA SYAFITRI

NRP 5211 100 143

Surabaya,

April 2015

JURUSAN SISTEM INFORMASI

Dr.Eng. Febriliyan Samopa, S.Kom., M.Kom. NIP 19730219 199802 1 001

LEMBAR PERSETUJUAN

PEMBUATAN METODE SELEKSI DAN PRIORITISASI PORTFOLIO APLIKASI LAYANAN PUBLIK BERBASIS ONLINE DI SEKTOR PEMERINTAHAN (STUDI KASUS: PEMERINTAH KOTA SURABAYA)

TUGAS AKHIR

Disusun untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Komputer
pada
Jurusan Sistem Informasi
Fakultas Teknologi Informasi
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Oleh:

MAYA PREVIANA SYAFITRI

NRP 5211 100 143

Disetujui Tim Penguji: Tanggal Ujian : 27 April 2015

Periode Wisuda : Sept 2015

Tony Dwi Susanto, S.T., M.T., Ph.D. (Pembimbing I)

Anisah Herdiyanti, S.Kom., M.Sc. (Pembimbing II)

Dr. Apol Pribadi, S.T., M.T. (Penguji I)

Sholiq, S.T., M.Kom., M.SA. (Penguji II)

PEMBUATAN METODE SELEKSI DAN PRIORITISASI PORTFOLIO APLIKASI LAYANAN PUBLIK BERBASIS ONLINE DI SEKTOR PEMERINTAHAN (STUDI KASUS: PEMERINTAH KOTA SURABAYA)

Nama Mahasiswa : MAYA PREVIANA SYAFITRI

NRP : 5211100143

Jurusan : Sistem Informasi FTIF – ITS

Dosen Pembimbing 1: Tony Dwi Susanto, S.T, M.T, Ph.D Dosen Pembimbing 2: Anisah Herdiyanti, S.Kom, M.Sc

ABSTRAK

Integrasi layanan publik online melalui portal Surabaya Single Window (SSW) menjadi salah satu wujud komitmen Pemerintah Kota Surabaya untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan publik terhadap masyarakat. Namun, belum semua layanan publik yang dimiliki Pemkot Surabaya sudah terintegrasi dalam sistem online tersebut. Hal ini memunculkan pentingnya Pemerintah Kota Surabaya untuk dapat menyeleksi dan memprioritisasikan layanan-layanan publik yang masih bersifat offline atau belum tergabung ke dalam SSW. Selama ini, Bappeko maupun Diskominfo selaku instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, menjalankan aktivitasaktivitas dalam pengelolaan manajemen portfolio aplikasi dengan kepentingan masing-masing. menyebabkan terjadinya tumpang tindih terhadap tugas fungsi masing-masing pihak, khususnya dalam rangka seleksi dan prioritisasi.

Penelitian ini ditujukan untuk menghasilkan metode seleksi dan prioritisasi portfolio aplikasi layanan publik berbasis online untuk Pemerintah Kota Surabaya. Untuk menghasilkan luaran tersebut, penelitian diawali dengan melalukan sintesis Application Portfolio Management kemudian sintesis kerangka

seleksi proyek dari beberapa referensi. Dengan mengacu pada alur manajemen portfolio aplikasi yang diusulkan, metode seleksi dan prioritisasi baru tersebut juga dihasilkan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi yang tergambar dari isu lokalitas. Metode seleksi dan prioritisasi portfolio aplikasi layanan publik berbasis online yang dihasilkan tersebut dilengkapi dengan perangkat penilaian yang berisi kriteria, bobot, dan pedoman penilaian yang direkomendasikan dan terverifikasi oleh Pemerintah Kota Surabaya. Perangkat penilaian merupakan hal yang penting dalam rangka implementasi metode seleksi dan prioritisasi.

Hasil dari penelitian ini adalah metode seleksi dan prioritisasi portfolio aplikasi layanan publik berbasis online, yang dilengkapi dengan perangkat penilaian untuk mengimplementasikan metode yang dihasilkan. Dengan adanya metode tersebut, diharapkan dapat dijadikan referensi bagi Pemerintah Kota Surabaya dalam rangka seleksi dan prioritisasi terhadap aplikasi layanan publik berbasis online yang akan diintegrasikan ke dalam SSW.

Kata Kunci: seleksi, prioritisasi, layanan publik, sektor pemerintahan, manajemen portfolio aplikasi, perangkat penilaian

DEVELOPING A METHOD FOR SELECTING AND PRIORITIZING E-SERVICE APPLICATION PORTFOLIO IN GOVERNMENTAL SECTOR (CASE STUDY: SURABAYA CITY GOVERNMENT)

Student Name : MAYA PREVIANA SYAFITRI

Student Number : 5211100143

Department
Supervisor 1: Information Systems FTIF – ITS
Tony Dwi Susanto, S.T, M.T, Ph.D
Supervisor 2: Anisah Herdiyanti, S.Kom, M.Sc

ABSTRACT

Surabaya Single Window (SSW) is an integrated portal owned by Surabaya City Government in order to improve the quality and the accessibility of public service delivery. However, there is still a lot of public service that haven't been integrated. Nowadays, Surabaya City Government doesn't have a structured method to manage e-service application portfolio. This issue causes an overlap of formal functions within Bappeko and Diskominfo as agencies that have formal function to plan and to conduct the SSW development. So, it raises the necessity of method for selecting and prioritizing offline-based public services which will be integrated to SSW then.

This research was conducted by synthesizing several frameworks to propose a method for selecting and prioritizing and to rearrange a flow of application portfolio management. An assessment instrument was prepared to support implementation of the method, which is composed by criteria, weight, and guideline. This instrument has been verified by Surabaya City Government.

The result of this research is a proposed method which can be implemented to Surabaya City Government in order to select and to prioritize e-service application portfolio. The result of method testing is expected to be a recommendation to Surabaya City Government about listing public service which prioritized to get in online-based service application.

Keywords: selecting, prioritizing, public service, governmental sector, application portfolio management, assessment instrument

KATA PENGANTAR

Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tiada dzat yang Maha Perkasa selain Allah Swt., yang selalu melimpahkan rahmat dan ridhoNya, sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir dengan judul:

"PEMBUATAN METODE SELEKSI DAN PRIORITISASI PORTFOLIO APLIKASI LAYANAN PUBLIK BERBASIS ONLINE DI SEKTOR PEMERINTAHAN (STUDI KASUS: PEMERINTAH KOTA SURABAYA)"

sebagai salah syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Komputer di Jurusan Sistem Informasi – Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.

Tugas Akhir ini merupakan hasil perjuangan atas doa, usaha dan kehadiran berbagai pihak yang telah memberi bimbingan, bantuan, fasilitas serta motivasi selama proses pengerjaan tugas akhir. Oleh karena itu, penulis ucapkan terimakasih yang mendalam kepada:

- Bapak & Ibu tercinta, Bapak Sardjito dan Ibu Tati Widyowati, sumber kebahagiaan penulis. Tidak lupa, adik Tiara Aamana Syafitri dan Ferdiansyah Maulana Syaputra, Oma, dan keluarga besar yang selalu memberikan doa, dukungan dan kekuatan
- 2. Bapak M. Ali Rakhmadi, S.Kom, Ibu Rizka Fadillah, S.T. dan Bapak Mardi Brilian Saleh, S.Kom selaku staf Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya sekaligus pembimbing lapangan yang telah memberikan kesempatan dan bimbingan kepada penulis
- 3. Bapak Yudho Febriadi, S.Kom, M.T., selaku Kepala Seksi Aplikasi dan Database Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya
- 4. Bapak Dr. Eng. Febriliyan Samopa, S.Kom, M.Kom, selaku Ketua Jurusan Sistem Informasi ITS

- 5. Bapak Tony Dwi Susanto, S.T., M.T., Ph.D, dan Ibu Anisah Herdiyanti, S.Kom, M.Sc selaku dosen pembimbing yang telah memberikan inspirasi, bimbingan dan motivasi kepada penulis untuk selalu berusaha yang terbaik
- 6. Bapak Dr. Apol Pribadi, S.T., M.T., dan Bapak Sholiq, S.T, M.Kom., M.SA. selaku dosen penguji yang telah memberi saran dan motivasi kepada penulis demi kesempurnaan penelitian
- 7. Ibu Hanim Maria Astuti, S.Kom., M.Sc. selaku dosen wali yang selalu memberi penulis semangat dan inspirasi, serta bimbingan selama 4 tahun terakhir
- 8. Sahabat terbaik, Yusrida, Aswita, Nadine, Cynthia, dan Linda yang selalu memberi keceriaan dan kebersamaan, serta motivasi untuk bersama-sama berada di panggung wisuda 112
- 9. Teman-teman seperjuangan, keluarga BASILISK, laboran serta anggota Laboratorium PPSI yang selalu suportif hingga detik-detik terakhir di masa perkuliahan
- 10. Seluruh pihak yang secara langsung dan tidak langsung telah menyumbangkan pikiran dan tenaganya sehingga penulis dapat memperoleh kemudahan dalam penyusunan buku tugas akhir ini.

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pembaca dan menambah referensi penelitian selanjutnya khususnya terkait dengan pengembangan *e-Government*.

"Tiada Gading yang Tak Retak", begitupun dengan penelitian ini yang jauh dari sempurna. Penulis berharap untuk adanya kritik dan saran dari pembaca, sehingga kualitas penelitian dapat ditingkatkan dan dapat lebih berkontribusi lagi terhadap dunia pendidikan di Indonesia.

DAFTAR ISI

ABSTRACT.		ix
KATA PENG	ANTAR	xi
DAFTAR ISI		xiii
DAFTAR GA	MBAR	xix
DAFTAR TA	BEL	xxi
BAB I PEND	AHULUAN	1
1.1. Lata	ır Belakang	1
1.2. Run	nusan <mark>Mas</mark> alah	3
1.3. Bata	asan Masalah(()	3
1.4. Tuji	an Tugas Akhir	4
1.5. Mar	nfaat Tugas Akhir	5
1.6. Rele	evansi	5
BAB II TINJA	AUAN PUSTAKA	7
	elitian Terdahulu	
2.2. Das	ar Teori	
2.2.1.	Aplikasi	12
2.2.2.	Pelayanan publik	12
2.2.3.	Manajemen portfolio aplikasi	13
2.2.4.	Seleksi dan prioritisasi portfolio proyek .	26
2.2.5.	Kriteria seleksi portfolio	35
2.2.6.	Pemerintah Kota Surabaya	44

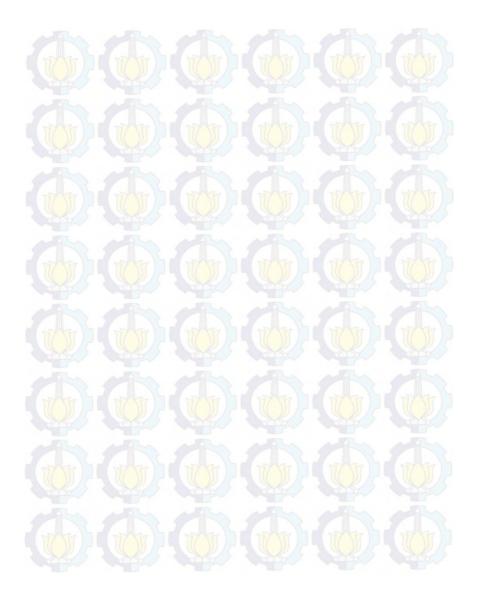
BAB III	METODOLOGI	49	
3.1.	Tahap perancangan		
3.2.	Tahap implementasi		
3.3.	Tahap pembahas <mark>an h</mark> asil	52	
3.3	1. Sintesis kerangka	52	
3.3	2. Modifikasi kriteria penilaian	53	
3.3	.3. Penentuan bobot kriteria	53	
3.3	.4. Penyusunan perangkat penilaian	53	
3.3	.5. Pengujian perangkat penilaian	54	
BAB IV	PERANCANGAN	55	
4.1.	Desk observation	55	
4.2.	Pengumpulan data	57	
4.3.	Sintesis kerangka		
4.4.	Penyusunan perangkat penilaian	63	
4.5.	Pengujian perangkat penilaian	65	
4.6.	Obyek penelitian	66	
BAB V I	MPLEMENTASI	68	
5.1.	Desk observation	68	
5.2.	Pengumpulan data	69	
5.2	1. Waktu	69	
5.2	2. Profil Interviewee	70	
5.2	.3. Hasil wawancara	71	
5.3.	Sintesis Kerangka	71	
5.4.	Penyusunan perangkat penilajan	72	

В	BAB VI HAS	SIL DAN PEMBAHASAN	73
		najemen portfolio aplikasi layanan publik aline kekinian di Pemerintah Kota Surabaya	73
	6.1.1. publik b	Alur manajemen portfolio aplikasi layanan erbasis online kekinian	80
	6.1.2. aplikasi	Isu lokalitas dalam alur manajemen portfoli layanan publik berbasis online kekinian	
		ılan al <mark>ur m</mark> anajemen portfolio aplikasi layana basis online untuk Pemerintah Kota Surabaya	
	6.2.1.	Pengumpulan data	100
	6.2.2.	Seleksi dan prioritisasi	105
	6.2.3.	Eksekusi dan pengawasan	113
	6.3. Met	tode s <mark>eleks</mark> i dan pri <mark>oriti</mark> sasi	114
	6.3.1.	Penyaringan input	123
	6.3.2.	Penilaian aspek strategis	125
	6.3.3.	Seleksi layanan	134
	6.3.4.	Penilaian aspek teknis	135
	6.3.5.	Prioritisasi pengembangan	141
	6.3.6.	Rekapitulasi dan publikasi	142
	6.4. Pera	angkat penilaian	148
	6.4.1.	Penyusunan perangkat penilaian aspek strat	
	6.4.2.	Penyusunan perangkat penilaian aspek tekn	
	6.5. Has	il pengujian perangkat penilaian	163
	6.5.1.	Penilaian aspek strategis	163

6.5.2. Penilaian aspek teknis	189
BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN	206
7.1. Kesimpulan	206
7.2. Saran	207
DAFTAR PUSTAKA	208
Lampiran A	A-1
Lampiran B	B-1
Lampiran C	C-1
Lampiran D.	D-1
Lampiran E	E-1
Lampiran F	F-1
A. Kesesuaian dengan prioritas pembangunan kota	F2
B. Kesiapan SKPD penyedia layanan	.F-10
C. Kategori jumlah pemohon layanan	.F-16
D. Pemenuhan terhadap peraturan pusat	.F-22
E. Responsi terhadap kompetisi	.F-30
F. Adanya permintaan dari SKPD pemilik layanan	.F-36
G. Relasi terhadap publik	
H. Jenis pengembangan aplikasi	.F-48
I. Kompleksitas aplikasi	.F-49
J. Potensi integrasi dengan existing system	.F-50
K. Ketersediaan fungsional SI/TI di SKPD penyedia	
layanan	
L. Ketersediaan teknologi yang dibutuhkan	.F-52
M Pencegahan risiko teknis	F-53

N. Efisiensi pengembangan	F-54
Lampiran G	G-1
BIODATA PENULIS	201

Halaman ini sengaja dikosongkan



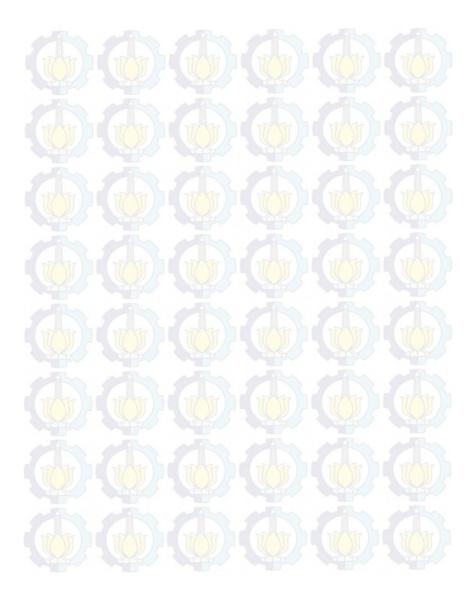
DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Daftar penelitian terdahulu	8
Tabel 2. 2 Pemetaan kesesuian proses dalam kerangka APM	24
Tabel 2. 3 Kriteria seleksi Meredit & Mantel	36
Tabel 2. 4 Kriteria seleksi Jiang & Klein	37
Tabel 2. 5 Kriteria seleksi Puthamont & Charoenngam	39
Tabel 2. 6 Pemetaan kriteria seleksi portfolio	43
Tabel 3. 1 Bahan penelitian	50
Tabel 4. 1 Deskripsi perancangan proses desk observation	55
Tabel 4. 2 Deskripsi perancangan proses pengumpulan data.	57
Tabel 4. 3 Tujuan wawancara	58
Tabel 4. 4 Kisi-kisi pertanyaan wawancara	59
Tabel 4. 5 Deskripsi proses sintesis kerangka	62
Tabel 4. 6 Deskripsi proses penyusunan perangkat penilaian	63
Tabel 4. 7 Deskripsi proses pengujian perangkat penilaian	65
Tabel 4. 8 Obyek penelitian	67
Tabel 5. 1 Implementasi Desk observation	69
Tabel 5. 2 Waktu pelaksanaan wawancara	69
Tabel 5. 3 Profil interviewee	70
Tabel 6. 1 Deskripsi pemetaan kesesuaian dengan kerangka	
APM	93
Tabel 6. 2 Penyusunan proses: pengumpulan data1	02
Tabel 6. 3 Detil tahapan proses pengumpulan data1	03
Tabel 6. 4 Penyusunan proses: seleksi dan prioritisasi 1	07
Tabel 6. 5 Detil tahapan proses seleksi dan prioritisasi 1	12
Tabel 6. 6 Eksekusi dan pengawasan1	14
Tabel 6. 7 Identifikasi korelasi proses dan kebutuhan Pemko	t
Surabaya1	16
Tabel 6. 8 Solusi hasil identifikasi korelasi1	
Tabel 6. 9 Detil tahapan penyaringan input1	25
Tabel 6. 10 Kriteria penilaian aspek strategis	27

Tabel 6. 11 Pengkuantifikasian bobot kriteria penilaian asp	oek
strategis	
Tabel 6. 12 Bobot kriteria penilaian aspek strategis	.133
Tabel 6. 13 Detil tahapan penilaian aspek strategis	.133
Tabel 6. 14 Detil tahapan seleksi layanan	.134
Tabel 6. 15 Kriteria penilaian aspek teknis	.135
Tabel 6. 16 Pengkuantifikasian bobot kriteria penilaian asp	oek
teknis	.140
Tabel 6. 17 Bobot kriteria penilaian aspek teknis	.140
Tabel 6. 18 Detil tahapan penilaian aspek teknis	.141
Tabel 6. 19 Detil tahapan prioritisasi pengembangan	.142
Tabel 6. 20 Detil tahapan rekapitulasi dan publikasi	.143
Tabel 6. 21 Pemenuhan proposisi kerangka seleksi &	
prioritisasi	.147
Tabel 6. 22 Detil penyusunan perangkat penilaian aspek	
strategis	
Tabel 6. 23 Detil penyusunan perangkat penilaian aspek te	knis
Tabel 6. 24 Contoh pengujian perangkat penilaian (1)	
Tabel 6. 25 Kategori kesiapan TI SKPD	.170
Tabel 6. 26 Contoh pengujian perangkat penilaian (2)	.171
Tabel 6. 27 Contoh pengujian perangkat penilaian (3)	.175
Tabel 6. 28 Contoh pengujian perangkat penilaian (4)	.178
Tabel 6. 29 Contoh pengujian perangkat penilaian (5)	.180
Tabel 6. 30 Contoh pengujian perangkat penilaian (6)	.182
Tabel 6. 31 Contoh pengujian perangkat penilaian (7)	.183
Tabel 6. 32 Hasil penilaian aspek strategis keseluruhan	.184
Tabel 6. 33 Pedoman kategorisasi prioritisasi aspek strateg	is
	.189
Tabel 6. 34 Hasil seleksi layanan	.189
Tabel 6. 35 Contoh pengujian perangkat penilaian (8)	.191
Tabel 6. 36 Contoh pengujian perangkat penilaian (9)	.193
Tabel 6. 37 Contoh penguijan perangkat penilajan (10)	.196

Tabel 6. 38 Contoh pengujian perangkat penilaian (11).	197
Tabel 6. 39 Contoh pengujian perangkat penilaian (12).	199
Tabel 6. 40 Contoh pengujian perangkat penilaian (13).	200
Tabel 6. 41 Contoh pengujian perangkat penilaian (14).	202
Tabel 6. 42 Hasil penilaian aspek teknis keseluruhan	203
Tabel 6. 43 Hasil prioritisasi pengembangan	203
Tabel 6. 44 Hasil seleksi layanan dan prioritisasi	
pengembangan	204
Tabel A. 1 Daftar layanan publik administratif Pemkot	
Surabaya	A-1
Tabel A. 2 Daftar layanan publik online existing	A-7
Tabel B. 1 Dasar hukum & tupoksi Bappeko Surabaya	B-1
Tabel B. 2 Dasar hukum dan tupoksi Diskominfo Kota	
Surabaya	B-2
Tabel C. 1 Daftar pertanyaan dan jawaban wawancara	C-1
Tabel D. 1 Nilai kesiapan TI SKPD oleh Diskominfo	D-3
Tabel E. 1 Standar Pelayanan Minimal	E-3
Tabel F. 1 Hasil penilaian kriteria A	F-2
Tabel F. 2 Hasil penilaian kriteria B	F-10
Tabel F. 3 Hasil penilaian kriteria C	F-16
Tabel F. 4 Hasil penilaian kriteria D	F-22
Tabel F. 5 Hasil penilaian kriteria E	F-30
Tabel F. 6 Hasil penilaian kriteria F	F-36
Tabel F. 7 Hasil penilaian kriteria G	F-42
Tabel F. 8 Hasil penilaian kriteria H	F-48
Tabel F. 9 Hasil penilaian kriteria I	F-49
Tabel F. 10 Hasil penilaian kriteria J	F-50
Tabel F. 11 Hasil penilaian kriteria K	F-51
Tabel F. 12 Hasil penilaian kriteria L	F-52
Tabel F. 13 Hasil penilaian kriteria M	F-53
Tabel F. 14 Hasil penilaian kriteria N	F-54

Halaman ini sengaja dikosongkan



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka APM Simon, et.al14
Gambar 2. 2 Cakupan proses Data Collection
Gambar 2. 3 Kerangka APM Erik van Ramshorst21
Gambar 2. 4 Kerangka seleksi portfolio proyek NP Archer &
Ghasemzadeh
Gambar 2. 5 Model rekomendasi seleksi dan prioritisasi oleh
Olivia Renanda 34
Gambar 2. 6 Tampilan SSW
Gambar 3. 1 Metode pengerjaan penelitian
Gambar 5. 1 Penyusunan hasil implementasi sintesis kerangka
71
Gambar 6. 1 Urutan perencanaan pembangunan daerah76
Gambar 6. 2 Program prioritas RPJMD Kota Surabaya 2010-
2015.
Gambar 6. 3 Skema pengelolaan portfolio aplikasi79
Gambar 6. 4 Skema pengumpulan data oleh Bappeko80
Gambar 6. 5 Skema prioritisasi oleh Bappeko
Gambar 6. 6 Skema analisis kebutuhan aplikasi oleh
Diskominfo85
Gambar 6. 7 Skema prioritisasi oleh Diskominfo
Gambar 6. 8 Skema konsolidasi pengambilan keputusan 89
Gambar 6. 9 Skema pemetaan kesesuaian dengan kerangka
APM 92
Gambar 6. 10 Alur manajemen portfolio aplikasi layanan
publik berbasis online
Gambar 6. 11 Proses-proses dalam alur manajemen portfolio
aplikasi layanan publik berbasis online Kota Surabaya 100
Gambar 6. 12 Detil tahapan proses pengumpulan data 101
Gambar 6. 13 Detil tahapan proses seleksi & prioritisasi 106
Gambar 6. 14 Detil tahapan proses eksekusi portfolio &
pengawasan

Gambar 6. 15 Fokus proses pada penelitian	
proyek	.115
Gambar 6. 17 Tahapan dalam metode seleksi & prioritisas	i 123
Gambar 6. 18 Keterhubungan proses dalam alur manajeme	en (
portfolio aplikasi dan metode seleksi & prioritisasi	.124
Gambar 6. 19 Perangkat penilaian aspek strategis	.154
Gambar 6. 20 Perangkat penilaian aspek teknis	.162
Gambar G. 1 Lembar verifikasi penelitian (1)	G-1
Gambar G. 2 Lembar verifikasi penelitian (3)	
Gambar G. 3 Lembar verifikasi penelitian (2)	
Gambar G. 4 Lembar verifikasi penelitian (5)(5)	
Gambar G. 5 Lembar verifikasi penelitian (4)	
Gambar G. 6 Lembar validasi penelitian (1)	
Gambar G. 7 Lembar validasi penelitian (2)	G-5

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah yang menyebabkan studi kasus ini diangkat menjadi penelitian, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian, serta relevansi hasil penelitian dalam tugas akhir terhadap bidang keilmuan jurusan sistem informasi dan laboratorium.

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi infomasi dan komunikasi (TIK) telah menjadi tren global yang dampaknya meluas hampir ke seluruh lini kehidupan masyarakat. Salah satu bentuk dampak positif dari perkembangan TIK adalah munculnya sistem digitalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dikenal sebagai Electronic Government (e-Government). Penerapan Government diharapkan dapat mendorong adanya kemudahan informasi oleh masyarakat terhadap serta meningkatkan transparansi dan pemerintahan. akuntabilitas lembaga publik [1].

Salah satu hasil penerapan *e-Government* adalah peningkatan kualitas dan aksesibilitas layanan publik melalui penyelenggaraan layanan publik secara online. Setiap masyarakat dapat dengan mudah untuk mengakses dan melakukan permohonan terhadap layanan publik melalui sebuah aplikasi berbasis online yang terhubung dengan sistem internal instansi yang terkait.

Surabaya Single Window (SSW) merupakan website resmi milik Pemerintah Kota Surabaya yang mengintegrasikan aplikasi-aplikasi layanan publik berbasis online. Kehadiran SSW menjadi salah satu wujud komitmen Pemerintah Kota Surabaya untuk mendorong penerapan pelayanan publik berstandar internasional (ISO) bidang investasi, sehingga dapat menciptakan penyelenggaraan layanan publik yang transparan,

efisien dan efektif. Diharapkan hal tersebut dapat memuaskan warga Kota Surabaya, serta mendorong adanya iklim investasi yang baik di kota pahlawan tersebut.

Terdapat lebih dari 85% layanan publik administratif miliki SKPD di Pemerintah Kota Surabaya yang belum terintegrasi ke dalam SSW. Hal ini memunculkan adanya suatu keharusan bagi Pemerintah Kota Surabaya untuk dapat memprioritisasikan layanan publik yang masih bersifat offline tersebut. Selama ini, pengelolaan portfolio aplikasi layanan publik berbasis online di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya dilakukan oleh 2 (dua) pihak, yaitu Bappeko dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). Dalam pengelolaan portfolio tersebut, terjadi beberapa permasalahan vang melibatkan Bappeko dan Diskominfo, diantaranya yaitu terjadinya tumpang tindih wewenang antar pihak karena tidak adanya pengaturan prosesproses dalam pengelolaan portfolio terhadap masing-masing pihak. Selama ini Bappeko dan Diskominfo melaksanaan aktivitas tertentu sesuai dengan kepentingannya masingmasing.

Seleksi dan prioritisasi merupakan hal yang penting dalam sebuah pengelolaan portfolio karena menyangkut dengan pemilihan dan kandidat yang paling signifikan memberi terhadap tercapainya tujuan, kontribusi serta memungkinkan untuk dikembangkan oleh karena sebab-sebab tertentu. Perihal batasan waktu, biaya dan hal teknis menjadi alasan lain mengapa seleksi dan prioritisasi harus dilaksanakan. Dalam penelitian serupa sebelumnya, seleksi prioritisasi terhadap proyek TI dilakukan hanya melihat aspek perencanaan dan desain. Penelitian Olivia Renanda yang berjudul "Kajian Strategis Proses Seleksi dan Prioritisasi Investasi Proyek Teknologi Informasi", hanya menyediakan prioritisasi dan seleksi dalam bentuk model konseptual dengan kombinasi kerangka teoritis dan hasil kajian empiris [2]. Sementara itu, tidak banyak literatur yang membahas metode seleksi dan prioritisasi khusus untuk lingkungan pemerintahan, termasuk

instrumen atau perangkat penilaian yang mendukung metode seleksi dan prioritisasi.

Penelitian ini berfokus kepada pembuatan metode seleksi dan prioritisasi dalam sebuah alur manajemen portfolio aplikasi layanan publik di sektor pemerintahan, yang dilengkapi dengan perangkat penilaian, serta dilakukan pengujian perangkat tersebut untuk mengetahui hasil pengujian metode secara keseluruhan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, rumusan masalah yang dijadikan acuan dalam pengerjaan tugas akhir ini adalah:

- 1. Bagaimana alur manajemen portfolio aplikasi layanan publik berbasis online kekinian di Pemerintah Kota Surabaya?
- 2. Bagaimana alur manajemen portfolio aplikasi layanan publik berbasis online yang diusulkan untuk Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan kajian literatur, isu lokalitas dan kebutuhan organisasi?
- 3. Berdasarkan alur manajemen portfolio aplikasi layanan publik berbasis online yang diusulkan, bagaimana metode seleksi dan prioritisasi di dalamnya?
- 4. Bagaimana perangkat penilaian dalam metode seleksi dan prioritisasi?
- 5. Bagaimana hasil pengujian perangkat penilaian dalam metode seleksi dan prioritisasi?

1.3. Batasan Masalah

Dalam pengerjaan tugas akhir ini, ada beberapa batasan masalah yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan manajemen portfolio yang digunakan dalam konteks penelitian ini adalah manajemen portfolio aplikasi (Application Portfolio Management (APM)). Manajemen portfolio digunakan sebagai referensi dalam rangka

- perumusan metode seleksi dan prioritisasi terhadap aplikasi layanan publik berbasis online
- 2. Kriteria yang digunakan dalam metode seleksi dan prioritisasi menggunakan kriteria dari referensi terkait yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan kepemerintahan dan telah terverifikasi oleh Pemerintah Kota Surabaya
- 3. Prioritisasi terhadap aplikasi yang dilakukan hanya sebatas tahap pengujian dengan perangkat penilaian yang dihasilkan dalam penilian
- 4. Pengujian terhadap perangkat penilaian dilakukan dengan mengikuti tahap: (1) penyaringan input, (2) penilaian aspek strategis, (3) prioritisasi 1, (4) penilaian aspek teknis dan (5) prioritisasi 2
- 5. Data yang digunakan untuk pengujian perangkat penilaian didapat dari Bappeko Surabaya, Diskominfo Kota Surabaya dan sumber terkait yang sudah disepakati oleh pihak-pihak terkait

1.4. Tujuan Tugas Akhir

Tujuan pembuatan tugas akhir ini adalah:

- 1. Mengetahui alur manajemen portfolio aplikasi layanan publik berbasis online kekinian pada Pemerintah Kota Surabaya
- Menghasilkan usulan alur manajemen portfolio aplikasi layanan publik berbasis online untuk Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan kajian literatur, isu lokalitas dan kebutuhan organisasi
- 3. Menghasilkan usulan metode seleksi dan prioritisasi yang berada di dalam alur manajemen portfolio aplikasi layanan publik berbasis online untuk Pemerintah Kota Surabaya
- 4. Menghasilkan perangkat penilaian dalam metode seleksi dan prioritisasi
- 5. Mengetahui hasil pengujian perangkat penilaian dalam metode seleksi dan prioritisasi.

1.5. Manfaat Tugas Akhir

Melalui tugas akhir ini diharapkan dapat memberi manfaat yaitu:

Bagi akademis

- 1. Memberikan sumbangsih pengetahuan mengenai penerapan manajemen portfolio aplikasi di sektor pemerintahan
- 2. Menambah referensi dalam alur manajemen portfolio aplikasi di sektor pemerintahan yang dihasilkan dengan mempertimbangkan kajian literatur, isu lokalitas dan kebutuhan organisasi
- 3. Menambah referensi dalam perancangan metode seleksi dan prioritisasi.

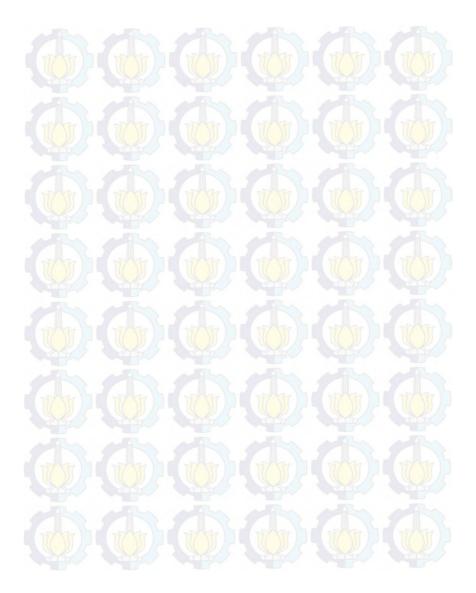
Bagi organisasi

- 1. Memberikan gambaran mengenai kondisi faktual penerapan manajemen portfolio aplikasi layanan publik berbasis online pada organisasi sehingga dapat dijadikan media refleksi untuk perbaikan selanjutnya
- 2. Memberikan gambaran mengenai metode seleksi dan prioritisasi yang dapat dijalankan dengan memperhatikan kajian literatur dan isu-isu lokalitas organisasi
- 3. Memberikan perangkat penilaian yang dapat dipergunakan untuk metode seleksi dan prioritisasi terhadap aplikasi layanan publik berbasis online.

1.6. Relevansi

Topik penelitian yang menjadi fokus dari tugas akhir ini adalah e-Government yang merupakan obyek penelitian dalam kelompok e-Government & IT Governance. Kelompok penelitian e-Government & IT Governance merupakan salah satu fokus area pengembangan laboratorium Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi, Jurusan Sistem Informasi – Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Halaman ini sengaja dikosongkan



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai referensi yang berkaitan dengan peneliti<mark>an pa</mark>da tugas akhir. Terdiri dari penjelasan mengenai studi sebelumnya dan dasar teori pendukung.

2.1. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, digunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai pedoman dan referensi dalam melaksanakan prosesproses dalam penelitian, seperti yang terdapat pada Tabel 2. 1. Informasi yang disampaikan dalam tabel berikut berisi informasi penelitian sebelumnya, hasil penelitian, dan hubungan penelitian terhadap penelitian dalam rangka tugas akhir ini.

Penelitian terdahulu yang dimaksudkan dalam bagian ini merupakan penelitian yang memiliki kesamaan konsep, tujuan, proses, dan kata kunci yang digunakan terhadap penelitian dalam rangka tugas akhir. Namun dari kesamaan tersebut, diidentifikasi pula perbedaan dan kekurangan dalam penelitian untuk memperkaya ilmu di dalam penelitian yang dilakukan penulis.

Dari hasil kajian terhadap penelitian terdahulu, dapat ditarik beberapa hal penting, yaitu bahwa penelitian terdahulu yang dibahas memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan memiliki kecukupan pengetahuan untuk menambah referensi penelitian. Penelitian dalam rangka tugas akhir dapat mengadopsi beberapa poin penting dalam penelitian terdahulu yang dinilai dapat memenuhi tujuan penelitian.

Tabel 2. 1 Daftar penelitian terdahulu Judul: Application Portfolio Management – An Integrated Framework and a Software Tool Evaluation Approach		
Nama peneliti	Daniel Simon, Kai Fischbach, Detlef Schoder	
Tahun penelitian	2010	
Hasil penelitian	 Kerangka APM (Application Portfolio Management) yang komprehensif yang dapat mengurangi tingkat kompleksitas application landscapes Deskripsi proses-proses dalam APM tersebut dan menyediakan pendekatan teknik evaluasi yang tepat. 	
Hubungan dengan penelitian	 Tidak menyediakan langkah-langkah yang mendukung setiap proses. Kerangka APM tersebut hanya menyertakan teknik dan focus masing-masing proses Kerangka ditujukan untuk perusahaan yang memiliki banyak divisi, dengan tujuan untuk mengevaluasi masingmasing aplikasi di perusahaan mengenai kontribusinya terhadap perusahaan dan divisi tersebut Kerangka APM tersebut dijadikan sebagai bahan referensi utama dalam menyusun alur manajemen portfolio aplikasi layanan publik berbasis online untuk Pemerintah Kota Surabaya yang memiliki penjelasan detil langkah-langkah yang mendukung proses di dalamnya. 	

	tfolio Management from an Enterprise Architecture Perspective
Nama peneliti	E.A van Ramshorst
Tahun penelitian	2013
Hasil penelitian	Metode APM yang dilengkapi dengan aktivitas, deliverables, roles dan responsibilities. Metode tersebut dihasilkan melalui method engineering, kajian literatur, survey ke 3 perusahaan serta konsultasi ke Deloitte.
Hubungan dengan penelitian	Kerangka APM tersebut tidak menyediakan kebutuhan informasi masing-masing aktivitas dan deliverables dalam kerangka proses Kerangka APM tersebut menjadi bahan referensi untuk penetapan aktivitas, deliverables pada masingmasing proses yang terdapat dalam usulan alur manajemen portfolio aplikasi untuk lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang dilengkapi dengan kebutuhan informasi yang disesuaikan dengan input output yang diharapkan.
Judul: Information System Project - Selection Criteria Variation within Strategic Classes	
Nama peneliti	James J. Jiang, Gary Klein
Tahun penelitian	1999
Hasil penelitian	Matriks efisiensi internal adalah hal yang paling penting bagi organisasi dengan sedikit kepentingan strategi yang melekat pada proyek-proyek saat ini

	Hasil penelitian dapat dijadikan panduan dalam menyeleksi teknik yang tepat untuk seleksi proyek sistem informasi, dengan strategic grid yang dapat digunakan untuk menentukan bobot dalam seleksi dengan pendekatan multi-kriteria.
Hubungan dengan penelitian	 Kriteria yang dikembangkan bersifat umum sehingga perlu adanya penyesuaian terhadap kondisi kepemerintahan yang memiliki keunikan tersendiri Kriteria yang dikembangkan tersebut menjadi referensi utama dalam menyusun perangkat penilaian, terutama dalam penentuan kriteria pada metode seleksi dan prioritisasi.

Judul:

An Integrated Framework for Project Portfolio Selection

Nama peneliti	Nama peneliti NP. Archer dan F. Ghasemzadeh			
Tahun penelitian	1999			
Hasil penelitian	Kerangka seleksi portfolio proyek.			
Hubungan dengan penelitian	 Tidak menjelaskan detil penilaian yang terdapat dalam kerangka tersebut Tidak menjelaskan detil input dan output yang diperlukan dari masingmasing tahapan dalam kerangka seleksi Kerangka tersebut menjadi referensi utama dalam menyusun metode seleksi dan prioritisasi portfolio aplikasi layanan publik berbasis online yang diusulkan, yang memuat dua penilaian dengan perspektif yang berbeda. 			

1	г		1		1	
	П	16	11	1	Ľ	

Kajian Strategis Proses Seleksi dan Prioritisasi Investasi Proyek Teknologi Informasi (Studi kasus: Bank Indonesia)

Nama peneliti	Olivia Renanda		
Tahun penelitian	2014		
Hasil penelitian	 Tidak ada best practice yang mendukung proses seleksi dan prioritisasi, karena pada dasarnya tiap studi kasus mempunyai environment & behavior yang khas sehingga perlu adanya penyesuaian model Model konseptual seleksi dan prioritisasi yang mengacu penelitian dengan judul "An Integrated Framework for Project Selection" oleh Archer & Ghasemzadeh yang kemudian menjadi rekomendasi untuk Bank Indonesia Aspek lokalitas yang dapat menjadi masukan dalam proses seleksi portfolio agar lebih optimal. 		
Hubungan dengan penelitian	 Tidak menyediakan perangkat penilaian pendukung model yang diusulkan Sebagai sumber referensi tentang bagaimana menggali kondisi kekinian, isu lokalitas dan kebutuhan pengembangan organisasi di masa depan khususnya terkait dengan proses seleksi dan prioritisasi Model rekomendasi menjadi referensi dalam menentukan tahapan di dalam metode seleksi dan prioritisasi yang diusulkan, serta referensi dalam menyusun perangkat penilaian. 		

2.2. Dasar Teori

Pada bagian ini, dijelaskan mengenai teori-teori yang digunakan untuk mendukung pengerjaan tugas akhir. Teori tersebut yaitu mengenai: aplikasi, pelayanan publik, manajemen portfolio aplikasi, seleksi dan prioritisasi portfolio proyek, kriteria seleksi portfolio, electronic government (e-Government) Kota Surabaya, dan Pemerintah Kota Surabaya.

2.2.1. Aplikasi

Terminologi aplikasi memiliki arti yang berbeda-beda pada tiap organisasi atau perusahaan. Aplikasi didefinisikan merupakan kelas spesifik dari sistem informasi yang mendukung bisnis secara langsung [3]. Menurut Maizlish dan Handler, aplikasi adalah sebuah agregasi dari kode perangkat lunak yang menggunakan logika bisnis dan *rule*/ kaidah, mentransformasikan input user atau sistem menjadi output, dengan tujuan untuk mengotomasikan dan optimasi fungsi bisnis, proses, tugas dan tahapan di dalamnya [4].

2.2.2. Pelayanan publik

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik didefinisikan sebagai:

"Segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundangundangan [5]."

Pelayanan yang dimaksudkan meliputi barang, jasa, dan/ atau pelayanan yang bersifat administratif. Ruang lingkup dari pelayanan publik sendiri meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata dan sektor strategis lainnya. Menurut luaran yang dihasilkan, pelayanan dibagi menjadi dua hal, yaitu perijinan dan non perijinan. Perijinan merupakan bentuk persetujuan yang

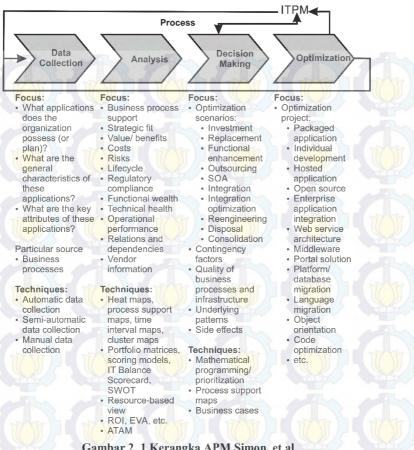
dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tertentu. Sedangkan non perijinan merupakan bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi [5].

2.2.3. Manajemen portfolio aplikasi

Manajemen portfolio aplikasi atau Application Portfolio Management (APM) berasal dari Modern Portfolio Theory (MPT) vang dikembangkan oleh Markowitz di awal tahun 1950an [6]. APM atau manajemen portfolio aplikasi menyediakan sebuah langkah untuk membuat berorientasi bisnis dalam lingkup aplikasi yang sudah ada dengan cara menghubungkan aplikasi yang existing dan komponennya, dengan biaya untuk mengatur dan menjaga kelangsungan proses bisnis, nilai bisnis dan metriks bisnis. Menurut Marcus Adamsson, APM adalah tools dan metode yang digunakan untuk menilai bagaimana solusi yang existing dengan pembangunan aplikasi untuk dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan bisnis, dan mengatur apa yang harus dilakukan, yaitu: (1) memaksimalkan nilai bisnis, (2) mengamankan architectural fit, (3) mendukung rencana transformasi dan (4) menimimasi risiko terhadap bisnis [7].

2.2.3.1. Kerangka APM oleh Simon et.al

Kerangka Application Portfolio Management yang diusulkan oleh Simon et.al didesain dengan mengkaji model yang dibuat pada penelitian-penelitian sebelumnya mengenai pengelolaan aplikasi [8]. Melalui beberapa fase, penelitian Simon ditujukan untuk mengelola portfolio aplikasi dan meningkatkan komposisi dan kualitasnya. Dalam kerangka tersebut, tidak dijelaskan tahapan detil pada masing-masing proses. Hal inilah yang menjadi kekurangan dalam kerangka yang dikembangkan pada tahun 2010 tersebut. Gambar 2. 1 merupakan kerangka APM yang dibuat oleh Simon et.al yang menjadi acuan APM dalam penelitian ini.



Gambar 2. 1 Kerangka APM Simon, et.al

Berikut merupakan penjelasan masing-masing proses dalam kerangka APM oleh Simon, et.al dilihat dari tujuan prosesnya.

- 1. Data Collection (pengumpulan data)
 Bertujuan untuk mengetahui kondisi kekinian portfolio aplikasi dan menginventarisasikan aplikasi (Application Inventorying)
- Analysis (analisis)
 Bertujuan untuk menganalisis informasi aplikasi terhadap atribut
- 3. *Decision making* (pengambilan keputusan)

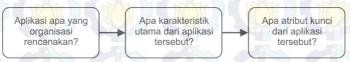
Bertujuan untuk menghasilkan perencanaan pengembangan portfolio aplikasi untuk direalisasikan

4. Optimization (optimisasi)
Bertujuan untuk mengeksekusi portfolio untuk menghasilkan produk/ layanan yang unik.

1. Data Collection

Pada fase *Data Collection* (pengumpulan data) atau yang sering disebut dengan inventarisasi aplikasi, keadaan portfolio aplikasi kekinian menjadi input untuk pengumpulan informasi aplikasi organisasi secara terpusat. Oleh karena itu, pentingnya fase pengumpulan data ini adalah hal yang penting untuk menetapkan informasi yang seragam dan detil mengenai aplikasi untuk disimpan untuk dasar analisis.

Inventarisasi aplikasi dapat dimulai dengan membuat daftar aplikasi yang benar-benar akan dioperasikan, dibangun atau direncanakan serta karakteristik umum (general characteristic) dari masing-masing aplikasi tersebut. Karakteristik tersebut termasuk nama aplikasi, versi rilis, jumlah pengguna, vendor, sistem operasi, proses bisnis yang dilibatkan, unit usaha yang terkena dampak, baris kode, dan komponen teknis lain [4]. Selain karakteristik umum, perlu diidentifikasi juga atribut kunci (key attribute) untuk mengidentifikasi biaya (cost) dan kinerja operasional (operational performance) untuk analisis lanjutan terhadap portfolio. Berikut merupakan hal yang tercakup dalam proses pengumpulan data tersebut pada Gambar 2, 2



Gambar 2. 2 Cakupan proses Data Collection

Terdapat 3 pilihan dalam teknik pengumpulan data. Pertama, automatic data collection yang merupakan kemampuan membaca source code untuk mengambil aplikasi yang ada secara otomatis. Teknik ini jarang digunakan mengingatkan

organisasi perlu Source Code Management yang canggih yang tidak semua organisasi miliki. Semi automatic data collection melibatkan pengumpulan data dari sistem TI lain melalui halaman antarmuka khusus. Meskipun informasi tidak diperoleh secara langsung dari source code, tidak ada input pengguna secara manual yang diperlukan. Sedangkan manual data collection melibatkan stakeholder untuk memperoleh data aplikasi tersebut [9]. Hal ini dapat difasilitasi dengan teknologi melalui survey online dan mekanisme pemberitahuan secara otomatis.

2. Analysis

Setelah terdapat inventarisasi aplikasi dengan data yang detil, langkah selanjutnya adalah menganalisis informasi tersebut secara menyeluruh untuk mendapatkan pemahaman mengenai 'as-is' portfolio. Informasi aplikasi dianalisis berdasarkan beberapa atribut. Daniel Simon, Kai Fischback dan Detlef Schoder dalam bukunya yang berjudul "Application Portfolio Management—An Integrated Framework and a Software Tool Evaluation Approach" menyarankan penggunaan atribut: Business Process Support, Strategic Fit, Value/Benefits, Costs, Risks, Lifecycle, Regulatory Compliance, Functional Wealth, Technical Health, Operational Performance, Relations & Dependencies, dan Vendor Information untuk menganalisisnya [8].

a. Business Process Support

Atribut business process support merupakan titik awal yang baik untuk melihat aplikasi dalam mendukung proses bisnis baik di masa sekarang dan di masa depan. Atribut ini berguna untuk memetakan range dari dukungan aplikasi dalam heat maps dan process support maps [10], atau matriks proses dan unit organisasi yang mempertimbangkan tingkat kekritisan (dan fungsi bisnis terkait) dari proses yang digambarkan [8].

b. Strategic Fit

Atribut ini melihat tingkat kepatuhan atau keselarasan aplikasi dengan arahan strategis dan dukungannya terhadap tujuan bisnis [11, 12, 9].

c. Value/benefits

Value atau nilai dari sebuah aplikasi dapat dilihat dari kemampuannya dalam mengotomatisasi proses bisnis dan memberdayakan pengguna untuk dapat menyelesaikan tugas-tugasnya dengan aplikasi tersebut [12, 13]. Nilai dari aplikasi dapat diketahui dari berbagai aspek, namun pada umumnya menggunakan aspek keuangan yang meliputi ROI, NPV dan EVA [8].

d. Cost

Untuk menganalisis aplikasi dari segi biayanya, pengeluaran TI dapat dijabarkan secara akurat di tingkat aplikasi. Pengeluaran atau atribut biaya meliputi *ongoing costs* yang digunakan untuk menjaga aplikasi agar tetap berjalan (biaya operasi, pemeliharaan, perizinan, dan depresiasi), serta biaya untuk *upgrade* atau *replacing* terhadap aplikasi [12].

e. Risk

Analisis risiko aplikasi harus berfokus pada kemungkinan kegagalan aplikasi dan efek dari kegagalan tersebut yang akan berdampak terhadap sistem itu sendiri dan bisnis secara keseluruhan. Selain itu, kemampuan aplikasi untuk memenuhi persyaratan tertentu secara terus-menerus dan adaptasi dengan kondisi yang berubah perlu dianalisis. Sejumlah atribut perlu dipertimbangkan saat mengevaluasi risiko aplikasi, karena risiko tersebut mungkin memiliki dampak yang signifikan terhadap penggunaan aplikasi secara jangka panjang dan peluang bisnis organisasi. Atribut yang di analisis mencakup vendor viability, the extent of required regulatory compliance, the application's technical specificity and conditions, the application's security and privacy capabilities [12].

f. Lifecycle

Dengan memahami keadaan *lifecycle* terkini dari aplikasi dapat menggambarkan tingkat kematangan, *life expectancy*,

future role dan upaya yang perlu dilakukan untuk menjaga agar aplikasi dapat berjalan dan selaras dengan kebutuhan bisnis.

g. Regulatory compliance

Analisis kepatuhan peraturan terhadap aplikasi didorong oleh apakah aplikasi sesuai dengan kebijakan internal dan persyarakat eksternal [14].

h. Technical health

Technical health dari aplikasi terdiri dari dua faktor, yaitu source code yang meliputi ukuran, kompleksitas dan orientasi obyek lain, serta faktor seperti pemeliharaan dan kompatibilitas, serta the degree of documentation dan architectural fit (kesesuaian dengan arsitektur yang direferensikan atau standar teknis lain seperti batasan pemrograman) [9].

i. Relations & dependencies

Analisis mengenai relations & dependencies juga disebut juga dengan neighbourhood analysis, yaitu bertujuan untuk menentukan relasi dan ketergantungan dari aplikasi terhadap aplikasi pendukung lain, vendor, atau portfolio lain yang terkait.

Pada akhirnya, untuk mendapatkan wawasan yang komperehensif tentang portfolio aplikasi, tidak cukup hanya dengan analisis dimensi demi dimensi. Teknik seperti matriks portfolio [9], model scoring [10], IT Balanced Scorecard [15], dan analisis SWOT dapat digunakan untuk menilai dua atau lebih dimensi.

3. Decision making

Fase ketiga dalam proses APM adalah *decision-making* atau pengambilan keputusan, yang mencakup perencanaan dan membentuk portfolio yang sebenarnya. Hal ini didasarkan pada analisis aplikasi yang rinci, dan secara umum melibatkan penentuan alokasi investasi pada aplikasi yang ada, tujuan investasi, prioritisasi investasi dan surat perintah investasi TI yang terkait. Terdapat 3 (tiga) opsi dalam pengambilan keputusan terhadap aplikasi, baik secara individu, maupun

keseluruhan aplikasi dalam portfolio, yaitu: *create, modify dan delete*.

a. Create

Create atau membuat terdiri dari opsi 'Investment' (untuk seluruh aplikasi baru) dan 'Replacement'. Pilihan investasi dalam aplikasi baru dapat diambil ketika proses bisnis telah berubah secara signifikan dan aplikasi yang ada tidak lagi mendukung proses tersebut. Sedangkan pilihan 'Replacement' atau penggantian akan cocok diambil ketika aplikasi yang lama tidak cukup andal dan memiliki kualitas fungsional yang tidak memadai.

b. Modify

Modify atau memodifikasi terdiri dari opsi functional enhancement [16], outsourcing [17], service-oriented architecture (SOA), integration, integration optimization dan reengineering [16]. Functional enhancement dapat digunakan untuk mengatasi kurangnya berkembangkan fungsi-fungsi dalam aplikasi. Outsourcing merupakan pilihan optimasi yang potensial karena pertimbangan keuangan, strategis dan teknologi [18]. Membangun SOA merupakan program yang digunakan untuk mencapai fleksibilitas yang lebih besar dan peningkatan pemeliharaan.

c. Delete

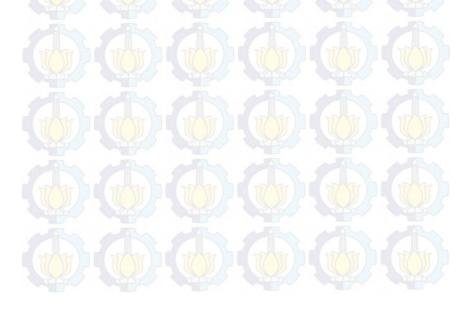
Delete atau menghapus terdiri dari 2 opsi, yaitu *disposal* dan *consolidation*. *Disposal* atau pembuangan memungkinkan aplikasi yang tidak lagi digunakan atau dikelola unit bisnis tertentu, tidak lagi dianggap secara finansial [16]. *Consolidation* atau konsolidasi adalah pengurangan berbagai aplikasi yang berlebihan karena mendukung proses bisnis yang sama [16].

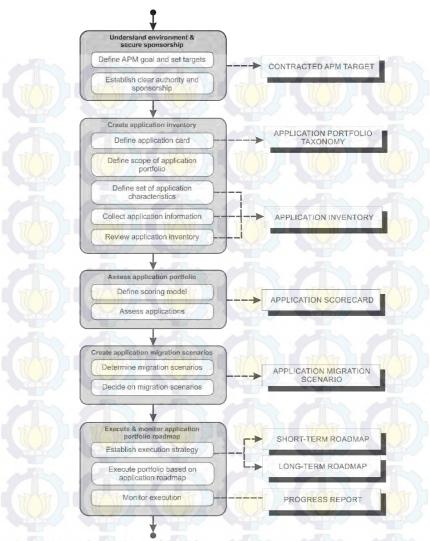
4. Optimization

Fase optimisasi menggunakan hasil dari fase *decision-making* untuk diekseskusi. Setelah menentukan aksi atau tindakan dari keputusan tersebut, perlu adanya pendefenisian yang konkret dan rinci mengenai pelaksanaan eksekusi keputusan.

2.2.3.2. Kerangka APM oleh Erik van Ramshorst

Riset yang dilakukan Erik yan Ramshorst menghasilkan sebuah kerangka dan metode APM yang baru dengan menggunakan perspektif EA (Enterprise Architect) [19]. Penelitian tersebut menggunakan Method Engineering (ME) sebagai teknik untuk memodelkan pendekatan APM yang ada sekarang (existing) dari literatur, praktis dan konsultan Deloitte. Erik van Ramshorst melakukan wawancara kepada beberapa perusahaan di Belanda, vaitu di sektor insurance, transportasi, bank, konstruksi dan supermarket untuk memahami manajemen portfolio aplikasi di masing-masing perusahaan tersebut. Metode APM yang diusulkan oleh Erik van Ramshorst menyediakan overview yang jelas dari seluruh tahapan dan deliverables yang dihasilkan. Hal inilah yang menjadi keunikan dari kerangka dan metode APM yang diusulkan oleh Erik van Ramshorst. Berikut merupakan metode APM dengan proses dan tahapannya pada Gambar 2. 3.





Gambar 2. 3 Kerangka APM Erik van Ramshorst

Terdapat 5 (lima) tahapan utama dalam kerangka tersebut, dimana masing-masing tahapan memiliki sub-tahapan yang mendetilkan tahapan tersebut sehingga mempermudah pengguna untuk mengoperasionalisasikannya.

1. Memahami lingkungan dan keamanan usaha

Tujuan dari proses ini adalah untuk menetapkan tujuan APM dan target secara jelas. Di dalamnya terdapat 2 tahapan, yaitu:

- Menetapkan tujuan APM dan memasang target
 Dalam tahapan ini, tujuan APM dan target secara jelas
 ditetapkan berdasarkan input dari konteks dan strategi
 bisnis kekinian dan sense of urgency. Hal ini dipengaruhi
 oleh rencana informasi kekinian juga
- Menyusun authority & sponsorship dengan jelas
 Manajer portfolio aplikasi menjamin adanya wewenang dan usaha yang jelas.

2. Membuat inventori aplikasi

Tujuan dari proses ini adalah untuk melakukan pendataan secara mendetil terhadap portfolio aplikasi sehingga menjadi inventori aplikasi. Di dalamnya terdapat 5 (lima) tahapan, yaitu:

- Menetapkan taksonomi aplikasi
 Menetapkan ruang lingkup inisial dari portfolio aplikasi
 yang dipengaruhi oleh sense of urgency dan tujuan APM
 yang tertuang dalam Contracted APM target.
- Menetapkan ruang lingkup portfolio aplikasi Menetapkan ruang lingkup inisial dari portfolio aplikasi yang dipengaruhi oleh sense of urgency dan tujuan APM yang tertuang dalam Contracted APM target.
- Menetapkan ruang lingkup portfolio aplikasi Menetapkan karakterisik aplikasi yang harus disebutkan dalam portfolio aplikasi.
- Mengumpulkan informasi aplikasi
 Informasi aplikasi dikumpulkan dari pemilik bisnis,
 pemilik layanan dan manager portfolio aplikasi. Pemilik
 bisnis mengumpulkan karakteristik fungsional dan pemilik
 layanan mengumpulkan informasi karakteristik teknikal.
 Hasil dari pengumpulan informasi ini dikumpulkan dalam
 Application Inventory.
- Review application inventory
 Manajer portfolio aplikasi bertanggungjawab untuk mereview konten dari application inventory secara teratur.

3. Menilai portfolio aplikasi

Tujuan dari proses ini adalah untuk menilai aplikasi sesuai dengan model penilaian yang ditentukan. Di dalamnya terdapat 2 (dua) tahapan, yaitu:

- Menetapkan model penilaian
 Pemilik fungsional dan pemilik layanan menetapkan model penilaian untuk keperluan pe-rangking-an. Hasil dari subtahapan ini adalah Application Scorecard.
- Menilai aplikasi
 Pemilik bisnis, pemilik layanan, dibantu oleh manager
 portfolio aplikasi menggunakan model penilaian untuk me rangking seluruh aplikasi dalam sebuah Application
 Scorecard.

4. Membuat skenario migrasi aplikasi

Tujuan dari proses ini adalah untuk menetapkan skenario migrasi yang tepat berdasarkan hasil pe-rangking-an skor di tahap penilaian. Di dalamnya terdapat 2 (dua) tahapan, yaitu:

- Menetapkan skenario migrasi
 Manajer portfolio aplikasi dan pemilik layanan membuat skenario berdasarkan Application Scorecard.
- Pengambilan keputusan pada skenario migrasi
 Manajer portfolio aplikasi dan pemilik layanan
 memvalidasi skenario migrasi. Hasil dari sub-tahapan ini
 adalah Application Migration Scenario.

5. Eksekusi dan pengawasan roadmap portfolio aplikasi

Tujuan dari proses ini adalah untuk menjalankan strategi eksekusi dan mengeksekusi portfolio yang sudah ditetapkan, serta mengawasi pengeksekusian tersebut. Tahapan di dalam proses ini adalah:

Menetapkan strategi eksekusi
Manajer portfolio aplikasi dan pemilik layanan serta
pemilik bisnis berkonsultasi untuk memformulasikan
Roadmap jangka panjang dan pendek untuk mencapai
tujuan masa depan. Sebuah strategi termasuk sebuah
prioritisasi untuk jangka panjang dan pendek.

- Mengeksekusi portfolio berdasarkan roadmap aplikasi
 Pemilik layanan bertanggungjawab untuk ekseskusi
 portfolio berdasarkan roadmap jangka panjang dan pendek
 untuk mencapai *future state*. Eksekusi ini akan
 menghasilkan aplikasi baru.
- Pengawasan eksekusi
 Manajer portfolio aplikasi dan pemilik bisnis mengawasi
 eksekusi roadmap aplikasi. Manajer portfolio aplikasi
 menuliskan laporan progress yang akan diserahkan pada
 pihak sponsor.

2.2.3.3. Pemetaan kesesuaian proses dalam kerangka

Untuk melihat kesesuaian proses kerangka APM yang diusulkan oleh Simon et.al dengan Erik van Ramshorst, maka dilakukan pemetaan kedua kerangka berdasarkan kesamaan proses yang ditunjukkan dari tujuannya. Selain itu, tujuan pemetaan ini adalah sebagai landasan perekomendasian tahapan yang dapat digunakan untuk pengusulan mekanisme APM di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sehingga dalam usulan mekanisme yang diberikan memiliki relevansi proses yang berasal dari kerangka-kerangka referensi.

Tabel 2. 2 Pemetaan kesesuian proses dalam kerangka APM

Proses APM	APM oleh Simon et.al [8]	APM oleh Erik van Ramshorst [19]
	A A	Memahami lingkungan dan keamanan usaha
		Tujuan proses: Menetapkan tujuan APM dan target secara jelas.
	Data collection	Membuat inventori aplikasi
1	Tujuan proses: Mengetahui kondisi kekinian portfolio aplikasi dan menginventarisasikan	Tujuan proses: Melakukan pendataan secara mendetil terhadap portfolio aplikasi sehingga menjadi inventori aplikasi.

Proses APM	APM oleh Simon et.al [8]	APM oleh Erik van Ramshorst [19]
	aplikasi (Application Inventorying).	S ets ets
	Analysis	Menila <mark>i port</mark> folio ap <mark>likasi</mark>
2	Tujuan proses: Menganalisis informasi aplikasi terhadap atribut.	Tujuan proses: Menilai aplikasi sesuai dengan model penilaian yang ditentukan.
	Decision making	Membuat skenario migrasi aplikasi
3	Tujuan proses: Menghasilkan perencanaan pengembangan portfolio aplikasi untuk direalisasikan.	Tujuan proses: Menetapkan skenario migrasi yang tepat berdasarkan hasil pe-rangking-an skor di tahap penilaian.
7 7	Optimization	Eksekusi dan pengawasan roadmap portfolio aplikasi
4	Tujuan proses: Mengeksekusi portfolio untuk menghasilkan produk/ layanan yang unik.	Tujuan proses: Menjalankan strategi eksekusi dan mengeksekusi portfolio yang sudah ditetapkan, serta mengawasi pengeksekusian tersebut.

Kedua kerangka APM yang dijadikan referensi dalam pengerjaan tugas akhir merupakan kerangka yang memiliki pendekatan terbaik terhadap obyek penelitian yang diangkat. Hal yang mendasari pemililihan APM sebagai pendekatan portfolio terbaik dalam penelitian ini adalah:

1. Obyek penelitian adalah aplikasi, yaitu aplikasi layanan publik berbasis online. Jika dibandingkan dengan pendekatan portfolio lain, yaitu PPM (*Project Portfolio Management*) atau ITPM (*IT Portfolio Management*), APM lebih spesifik menyasar pada pengelolaan portfolio aplikasi yang dimiliki sebuah organisasi atau perusahaan. Hal ini

- dinilai selaras dengan tujuan penelitian, yaitu manajemen portfolio terhadap aplikasi di sektor pemerintahan
- 2. Proses-proses yang dilakukan dalam rangka pengelolaan portfolio aplikasi di kondisi kekinian di studi kasus, menunjukkan adanya kesamaan secara konsep atau tujuan proses dengan apa yang disebutkan di dalam APM, namun dalam praktiknya memiliki penamaan proses yang berbeda
- 3. Di dalam proses yang terdapat pada APM, terdapat konteks seleksi dan prioritisasi yang menjadi luaran utama yang dihasilkan dalam penelitian.

2.2.4. Seleksi dan prioritisasi portfolio proyek

Manajemen portfolio berguna untuk memastikan bahwa proyek telah ditinjau untuk keperluan prioritisasi terhadap alokasi sumber daya, dan tahapan-tahapan dalam siklus manajemen portfolio telah konsisten dengan strategi organisasi [20]. Permasalahan dalam seleksi dan prioritisasi proyek telah disebut dalam kerangka manajemen portfolio yang luas [21]. Dalam melakukan investasi TI, prioritisasi merupakan sebuah hal yang umum dilakukan sebuah perusahaan. Pandangan umum dalam *project portfolio management* telah menganggap prioritisasi sebagai sesuatu yang vital di dalam menyukseskan proyek TI yang secara tidak langsung akan mendukung kelancaran bisnis.

Adanya keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia, biaya dan waktu memaksa adanya kondisi dimana tidak semua proyek dalam portfolio dapat dijalankan dalam waktu yang bersamaan. Dalam area kepemerintahan, hal tersebut mencerminkan pentingnya pemerintah untuk dapat memilahmilah proyek yang perlu didahulukan atau diprioritaskan, dan dikembangkan dalam waktu selanjutnya [22].

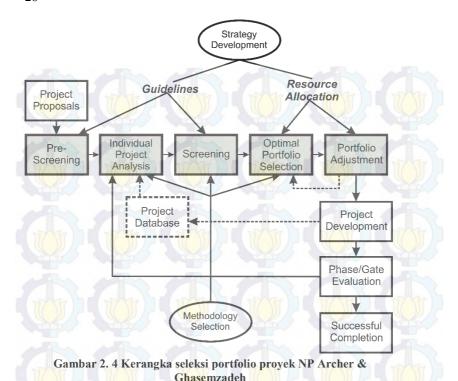
Tidak heran jika tugas utama di dalam *portfolio management* adalah untuk mengatur prioritas terhadap masing-masing proyek dan membuat model penyeleksian proyek yang paling memungkinkan dan *fit-in* dengan kondisi perusahaan atau

organisasi. Banyak metode prioritisasi proyek yang telah dibangun, tetapi tidak sedikit yang sukses diadopsi organisasi [23].

Dalam beberapa literatur mengenai prioritisasi proyek, prioritasi provek TI mewarisi banyak metode yang diciptakan dan dipromosikan oleh literatur New Product Development, Research and Development, and Project Management lite yang berfokus pada metode pemilihan dan memprioritaskan proyek dengan portofolio optimal [24, 25, 26, 27, 28]. Di saat yang organisasi banyak vang mengimplementasikan sama. mekanisme analitis yang ditujukan untuk membuat keputusan prioritas. Namun, terdapat banyak kritik yang ditujukan untuk model tersebut karena dinilai memiliki pandangan yang sempit terhadap nature dari TI. Menurut Bannister & Remenyi, keterbatasan hal tersebut menimbulkan kecenderungan para pengambil keputusan untuk lebih mengedepankan 'gut feeling' atau firasat dalam menentukan prioritas proyek [29].

2.2.4.1. Kerangka seleksi porftolio proyek oleh NP Archer & Ghasemzadeh

Pada penelitian ini, kerangka yang digunakan sebagai acuan dalam metode seleksi dan prioritisasi portfolio aplikasi adalah Integrated Framework for Project Portfolio Selection yang dibuat oleh NP Archer dan F Ghasemzadeh [30]. Kerangka yang sama juga pernah dijadikan acuan dalam penelitian Olivia Renanda dalam menentukan tahapan untuk seleksi dan prioritisasi di Bank Indonesia. Gambar 2. 4 berikut merupakan gambaran kerangka seleksi yang dikembangkan Archer & Ghasemzadeh.



Tahapan pre-screening merupakan tahapan awal yang dilakukan untuk memastikan bahwa proyek yang dipertimbangkan sebagai portfolio telah memenuhi fokus strategis. Hal ini juga dapat memastikan bahwa metodologi atau mekanisme tahapan dalam proses seleksi telah tersedia secara lengkap dan dipahami oleh seluruh pengguna maupun pengambil keputusan, termasuk kriteria penilaian dan pedoman penggunaan dari perangkat-perangkat yang mendukung setiap tahapan.

Tahapan individual project analysis dilakukan untuk menganalisis masing-masing proyek, terhadap metode perhitungan tertentu. Output dari tahap ini akan dijadikan pertimbangan utama dalam tahap seleksi selanjutnya.

Tahapan *screening* adalah melakukan pemeriksaan secara singkat terhadap atribut yang dinilai dari tahapan sebelumnya serta histori analisis pada tahapan tersebut.

Tahapan *optimal portfolio selection*, proyek dinilai menurut kriteria yang diminta, jika terdapat kriteria yang memerlukan data kuantitatif dapat diambil dari tahap analisis sebelumnya. Dalam tahapan ini, setiap kriteria memiliki bobot masingmasing yang sudah ditentukan dengan melihat perbandingan kontribusi kriteria terhadap kesuksesan proyek.

Tahapan *portfolio adjustment* adalah tahapan terakhir yang dilakukan dengan menyediakan keseluruhan pandangan terhadap karakteristik proyek yang menjadi hal-hal kritis terkait dengan optimisasi proyek.

Dalam penelitiannya, terdapat beberapa proposisi yang menunjukkan adanya kebutuhan atau tuntutan sebuah mekanisme yang terstruktur yang harus memenuhi isu-isu tersebut sehingga dapat menjamin ketercapaian tujuan mekanisme.

Proposisi 1

Keputusan strategis yang terkait dengan portfolio dan pertimbangan biaya keseluruhan harus dibuat dalam sebuah konteks yang luas, yang menggunakan faktor bisnis internal dan eksternal, sebelum portfolio diseleksi.

Justifikasi:

Metodologi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan organisasi harus dipersiapkan sebelum melakukan penyeleksian. Setiap metodologi yang digunakan organisasi memiliki keunikannya masing-masing karena membawa kultur dan pandangan organisasi mengenai kompetensi portfolio untuk dapat terpilih.

Proposisi 2

Sebuah kerangka kerja seleksi proyek harus dapat fleksibel sehingga memudahkan stakeholder agar dapat memilih teknik atau metodologi tertentu yang mereka kuasai dan anggap relevan, dalam rangka analisis data dan pembuatan keputusan proyek yang akan direalisasikan.

Justifikasi:

Proses seleksi portfolio harus dapat dilaksanakan dengan cara yang logis dan efisien untuk mengatasi paradigma mengenai tingginya kompleksitas hal-hal yang harus dijalankan dalam proses seleksi dan prioritisasi. Pengguna diharapkan tidak mengalami *overload* atau memiliki beban yang berat dalam mengolah atau menganalisis data yang diperlukan.

Proposisi 3

Untuk menyederhanakan proses seleksi portfolio, perlu adanya rangkaian tahapan yang terorganisasi, yang dapat memudahkan para pengambil keputusan untuk berpikir dan bergerak secara logis dalam mempertimbangkan proyek yang dapat direalisasikan berdasarkan model secara teoretis

Justifikasi:

Proses seleksi dan prioritisasi portfolio harus berisi tahapan atau tahapan yang runtut dan memiliki perangkat yang relevan sehingga tujuan dari tahapan dapat terpenuhi dengan baik. Dengan demikian, keberlanjutan penggunaan input dan output dari tahapan satu ke tahapan lain akan bisa terwujud.

Proposisi 4

Pengguna tidak boleh mengalami overload terhadap datadata yang tidak dibutuhkan, namun harus tetap memiliki kemudahan untuk mengakses data ketika diperlukan.

Justifikasi:

Ketersediaan data yang lengkap dan relevan dengan kebutuhan penelitian harus terjamin sehingga dapat memudahkan pengguna untuk mempergunakan data tersebut sewaktu-waktu.

Proposisi 5

Perhitungan umum harus dipilih sehingga dapat menghitung setiap proyek melalui pertimbangan tertentu secara terpisah. Hal ini dapat mewujudkan adanya perbandingan yang adil dari proyek selama proses seleksi tersebut.

Justifikasi:

Jika terdapat kebutuhan untuk penilaian proyek yang didasari oleh perhitungan matematis, maka harus diupayakan adanya metode yang *general* sehingga dapat digunakan oleh seluruh proyek.

Proposisi 6

Proyek-proyek tertentu yang telah mencapai milestone utama harus di evaluasi ulang di waktu yang sama.

Justifikasi:

Dalam proses seleksi dan prioritisasi, harus mengandung proses screening dan pemilihan berlapis sehingga dapat memfilter portfolio yang memiliki benefit dan feasibility yang besar.

Proposisi 7

Screening harus digunakan berdasarkan kriteria yang dispesifikasikan, dengan tujuan untuk menghilangkan proyek yang sudah berjalan dari daftar pertimbangan untuk pelaksanaan seleksi portfolio.

Justifikasi:

Dalam proses seleksi, harus terdapat tahapan yang dapat menghilangkan posisi proyek yang sudah direalisasikan dan mencapai *milestone* tertentu dari daftar pertimbangan. Hal ini

diupayakan agar pada saat penilaian tidak rancu dan terjadi redundansi pada obyek penilaian.

Proposisi 8

Interaksi proyek terhadap dependensi atau kompetisi sumber daya harus dipertimbangan dalam seleksi portfolio.

Justifikasi:

Perlunya mempertimbangkan dependensi antar proyek dan keterbatasan sumber daya yang harus dimaksimalkan dan dieksploitasi dengan baik, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan tujuan organisasi.

Proposisi 9

Seleksi portfolio harus mempertimbangkan ketergantungan terhadap waktu yang secara tidak langsung berdampak pada penggunaan sumber daya proyek.

Justifikasi:

Pengambilan keputusan harus memiliki justifikasi yang benar dan logis dalam mempertahankan hasil seleksi dan prioritisasi. Diharapkan dengan adanya kebutuhan ini dapat menghindarkan mekanisme terhadap intervensi dari dalam atau luar

Proposisi 10

Pengambil keputusan harus disediakan mekanisme yang interaktif, yang ditujukan untuk controlling dan overriding seleksi portfolio yang dihasilkan dari berbagai model, serta mereka harus menerima feedback sebagai konsekuensi dari perubahan tersebut.

Justifikasi:

Proses seleksi dan prioritisasi harus memiliki unsur dokumentasi untuk *controlling* dan justifikasi pada saat pengambilan keputusan, yang dapat diwujudkan dalam berbagai media.

Proposisi 11

Seleksi portfolio harus dapat diadaptasi oleh lingkungan kelompok pengambil keputusan.

Justifikasi:

Pengambil keputusan harus memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk mempergunakan perangkat seleksi dan prioritisasi dengan baik sehingga keberlangsungan proses akan terjamin dengan baik.

2.2.4.2. Model seleksi dan prioritisasi oleh Olivia Renanda

Salah satu kerangka atau model seleksi dan prioritisasi yang menjadi referensi penelitian ini adalah model yang dikembangkan oleh Olivia Renanda. Model tersebut secara spesifik ditujukan untuk Bank Indonesia yang dihasilkan dengan cara melakukan kajian empiris yang kemudian disesuaikan dengan isu lokal dan evaluasi proses seleksi dan prioritisasi yang pernah diterapkan. Pada dasarnya, model yang dikembangkan merupakan hasil adopsi kerangka seleksi portfolio proyek oleh Archer dan Ghasemzadeh, namun dimodifikasi untuk keperluan pengimplementasian di studi kasus, yaitu Bank Indonesia. Berikut merupakan tahapan dalam model seleksi dan prioritisasi yang diusulkan Olivia Renanda untuk Bank Indonesia [2].



Berikut merupakan penjelasan dari masing-masing tahapan dalam model rekomendasi seleksi dan prioritisasi.

- 1. Penilaian keselarasan strategi
 Tahapan ini menggunakan teknik scoring method untuk menilai kriteria kualitatif dan kuantitatif serta kriteria yang familier digunakan oleh peserta IT Steering Committee di Bank Indonesia. Melalui teknik tersebut, dihasilkan ketetapan nilai minimum keselarasan proyek dengan strategi Bank Indonesia untuk kepentingan eliminasi proyek yang tidak memenuhi nilai minimum.
- 2. Penilaian proyek

 Tahapan ini menggunakan teknik indepth interview untuk menggali informasi proyek, dan scoring method untuk menilai masing-masing proyek.
- 3. Filterisasi proyek

 Tahapan ini menggunakan teknik ad hoc approach as profiles dengan ketetapan batas bawah masing-masing nilai dalam spreadsheet untuk penilaian proyek. Dengan adanya batas bawah tersebut, diketahui proyek yang lolos dan tidak lolos.

4. Prioritisasi proyek

Tahapan ini menggunakan teknik *scoring method* untuk prioritisasi proyek, dan matriks 2x2 untuk pemetaan proyek dalam matriks prioritisasi.

5. Visualisasi portfolio

Tahapan ini menggunakan matrik *aggregate project plan* yang dapat merangkum keseluruhan proses dalam proses seleksi dan prioritisasi dengan simbol yang merepresentasikan atribut proyek.

2.2.5. Kriteria seleksi portfolio

Kriteria seleksi menjadi hal dasar untuk analisis dan pembandingan proyek satu dengan yang lain. Ada banyak kriteria yang direferensikan oleh beberapa ahli, termasuk kuantitatif dan kualitatif, finansial dan non finansial. Doug Wheeler telah mengusulkan kriteria-kriteria yang dibedakan menurut sektor industri, seperti sektor publik, TI, riset dan pengembangan, pertahanan, investasi dan konstruksi.

Hal yang serupa juga dilakukan oleh *The Standard for Portfolio Management* yang menunjukkan sebuah revisi yang signifikan dari edisi sebelumnya yang termasuk kriteria evaluasi yang substansial, yaitu: *organizational strategy alignment, goals and objectives; benefits, financial and non-financial; market share, market growth, costs; dependencies, internal and external; risks, internal & external; legal/regulatory compliance; human resource capabilities & capacities; technology capabilities and capacities; dan urgency* [20].

Hal itu menunjukkan bahwa pentingnya untuk menyeleksi kriteria yang dapat mendukung upaya pencapaian strategi dan tujuan organisasi. Kriteria tersebut akan dapat merefleksikan benefit contribution dalam sebuah portfolio. Setiap komponen portfolio yang diidentifikasi, akan dibandingkan dengan kriteria dan dinilai untuk kepentingan penilaian, ranking/ prioritisasi, dan seleksi diantara portfolio yang serupa.

Meredith dan Mantel mengusulkan kriteria untuk memilih sebuah model seleksi yaitu: *I) production, 2) marketing, 3) financial, 4) personnel dan 5) administratif and miscellaneous categories* [31]. Kriteria tersebut dijabarkan dalam Tabel 2. 3.

Tabel 2. 3 Kriteria seleksi Meredit & Mantel

Production factors

- Time until ready to install
- Length of disruption during installation
- Learning curve
- Effects on waste and rejects
- Energy requirements
- Facility and other equipment requirements
- Safety of process
- Other applications of technology
- Change in cost to produce a unit component
- Change in raw material usage
- Availability of raw materials
- Required development time and cots
- Impact on current suppliers
- Change in quality of output

Marketing factors

- Size of potential market for output
- Probable market share of output
- Time until market share is acquired
- Impact on current product line
- Consumer acceptance
- Impact on consumer safety
- Estimated life of output
- Spin-off project possibilities

Financial factors

- Profitability, NPV
- Impact on cash flows
- Payout period
- Cash requirement
- Time until break-even
- Size of investment required
- Impact of seasonal and cylical fluctuations

Personnel factors

- Training requirements
- Labour skill requirement
- Availability of required labour skills
- Level of resistance from current work force
- Change in size of labour force
- Inter- and intra- group communication requirements
- Impact on working conditions

Administrative and Miscellaneous factors

- Meet government safety standards
- Meet government environmental standards
- Impact on information system
- Reaction of stockholders and securities markets
- Patent and trade secret protection
- Impact on image with customers, suppliers, and competitors
- Degree to which we understand new technology
- Managerial capacity to direct and control new process

James J. Jiang dan Gary Klein dalam risetnya mengenai kriteria seleksi untuk proyek sistem informasi telah men-generalisasi-kan kriteria evaluasi dalam 6 (enam) faktor, yaitu: 1) financial, 2) organizational, 3) competing environment, 4) technical, 5) risk dan 6) management [32]. Kriteria tersebut dijabarkan dalam Tabel 2, 4.

Tabel 2. 4 Kriteria seleksi Jiang & Klein

Financial factors

- Benefit/ cost ratio
- Rate of return
- Contribution of profitability
- Growth of rate
- Payback period

Organisations factors

- Contribution to organizational goals/ objectives
- Aid the organization in competing the market
- Internal political decisions
- Importance to the organization for future success
- Importance to the functioning of the organisation
- Public relation effect
- Importance to the organisation's critical success factors

Management factors

- Political acceptance
- End-user understanding
- Cooperation
- Commitment to the project
- Top management support
- Match with users' interest/ work load
- Middle management support

Competing environment factors

- Required by regulations
- Response to competition
- Required by customer/ suppliers
- New industry standards
- Lawsuit requires information

Risk factors

- Technical risk
- Structure risk
- Risk of cost overruns
- Size risk

Tehnical factors

- Isolated, simple and modular project
- High visibility of project
- Basic subsystem for operations
- Availability of skilled IS personnel
- Availability of needed technology

Pada penelitian terbaru lainnya, Puthamont dan Charoenngam mengidentifikasi kriteria untuk seleksi proyek yang dibedakan berdasarkan jenis atau tipe proyeknya [33], seperti ditunjukkan pada Tabel 2. 5.

Tabel 2. 5 Kriteria seleksi Puthamont & Charoenngam

General project selection

Intrinsic criteria

- Project identification ability
- Resource requirements and availability
- Past experience of the organization in managing projects
- Management attitudes
- The time horizon of the project

Extrinsic criteria

- The risk/ return ration
- The market environment
- Government policies and regulations
- The socio-economic climate
- Legal and technological implications

IS project selection

- Financial
- Organizational needs
- Technical
- Risk
- Management support

Infrastructure project selection (World Bank, 2003)

- Project development objective
- Strategic context
- Project description
- Project rationale
- Project analysis
- Sustainability and risks
- Main conditions
- Readiness for implementation
- Compliance with bank policies

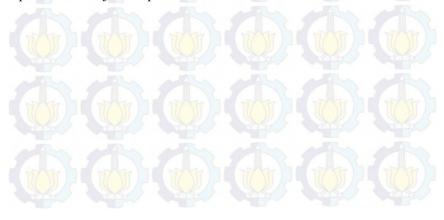
Penelitian Olivia Renanda yang mengusulkan adanya perbaikan dalam mekanisme seleksi dan prioritisasi proyek di Bank Indonesia, menggunakan 16 kriteria yang dibagi dalam 3 proses yang diusulkan [2], yaitu:

- keselarasan dengan strategi utama
- keselarasan dengan strategi TI

- kejelasan cakupan proyek
- efisiensi SDM
- efisiensi anggaran
- financial value
- biaya proyek
- mandatory proyek
- resiko proyek
- dedicated person
- ukuran proyek
- faktor tambahan
- teknologi
- kesiapan SDM
- interdependensi proyek, dan level batasan.

> Pemetaan kriteria seleksi portfolio

Dari kelima referensi mengenai kriteria seleksi terhadap portfolio dari berbagai sumber, dilakukan pemetaan untuk memudahkan penentuan kriteria untuk pengerjaan tugas akhir ini. Dengan adanya pemetaan ini, dapat diketahui kesamaan konsep dan tujuan dari kriteria tertentu sehingga membentuk kelompok-kelompok kriteria baru. Pemetaan kriteria seleksi portfolio ditunjukkan pada



Tabel 2. 6 Pemetaan kriteria seleksi portfolio

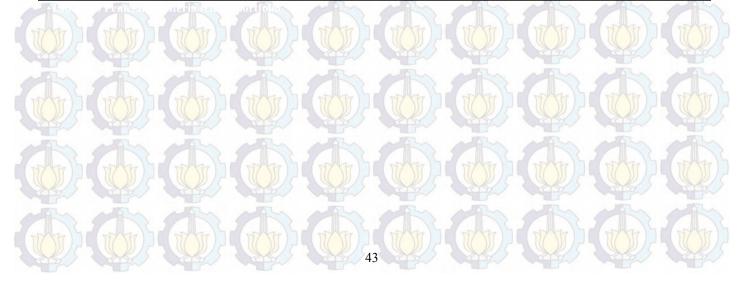
	Jiang & Klein [32]	PMI [20]	Meredith dan Mantel [31]	Olivia Renanda [2]	Justifikasi
	Financial	> Benefits, financial and non-financial	Financial	Efisiensi SDM Efisiensi anggaran Financial value Biaya proyek	Masing-masing referensi kriteria seleksi proyek memiliki perspektif bidang keuangan, yang secara tidak langsung menegaskan bahwa kriteria keuangan merupakan hal yang perlu dievaluasi dari sebuah usulan proyek.
Kriteria	Organizations	organizational strategy alignment, goals and objectives	Administrative and miscellaneous categories Personnel	 Keselarasan dengan strategi utama Keselarasan dengan strategi TI 	Masing-masing referensi kriteria seleksi proyek memiliki menilai bahwa dalam menyeleksi proyek, perlu diidentifikasi seberapa besar kesesuaian proyek terhadap nilai-nilai yang dimiliki organisasi.
	Management	> Market share, market growth, costs	Marketing	Kesiapan SDM	Masing-masing referensi kriteria seleksi proyek menilai bahwa dukungan manajemen dan sumber daya khususnya manusia harus dapat dipenuhi

Tabel 2. 6 Pemetaan kriteria seleksi portfolio

Jiang & Klein [32]	PMI [20]	Meredith dan Mantel [31]	Olivia Renanda [2]	Justifikasi
	Human resource capabilities & capacities			dalam masing-masing usulan proyek sehingga hal tersebut dijadikan kriteria penilaian.
Competing environment	> Dependencies, internal and external		Interdependensi proyek	Masing-masing referensi kriteria seleksi proyek menilai bahwa masing-masing usulan proyek berkompetisi dalam sebuah lingkungan, khususnya dalam lingkungan TI yang memiliki keterkaitan terhadap proyek baik secara internal maupun eksternal.
Risk	> Risk, internal & external		Mandatory proyek, resiko proyek,	Masing-masing referensi kriteria seleksi proyek menilai bahwa risiko adalah hal yang harus dianalisis pada masing-masing usulan proyek, karena dengan risiko proyek menunjukkan potensi kegagalan.

Tabel 2. 6 Pemetaan kriteria seleksi portfolio

Jiang & Klein [32]	PMI [20]	Meredith dan Mantel [31]	Olivia Renanda [2]	Justifikasi
Technical	Technology capabilities and capacities	Production	Teknologi	Masing-masing referensi kriteria seleksi proyek menilai bahwa faktor teknis harus diperhitungkan karena menyangkut dengan ruang lingkup dari proyek dan hal teknis lain yang perlu disesuaikan dengan ketersediaan di organisasi.



2.2.6. Pemerintah Kota Surabaya

Bagian berikut menjelaskan mengenai Pemerintah Kota Surabaya yang menjadi studi kasus penelitian tugas akhir.

2.2.6.1. Struktur organisasi

Pemerintah Kota Surabaya dipimpin oleh seorang Walikota dan Wakil Walikota dengan memiliki 18 (delapan belas) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu:

- 1. Dinas Pekerjaan Umum Bina dan Pematusan
- 2. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
- 3. Dinas Kesehatan
- 4 Dinas Pendidikan
- 5. Dinas Kebersihan dan Pertamanan
- 6. Dinas Kebakaran
- 7. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- 8. Dinas Komunikasi dan Informatika
- 9. Dinas Pertanian
- 10. Dinas Perhubungan
- 11. Dinas Perdagangan dan Perindustrian
- 12. Dinas Tenaga Kerja
- 13. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
- 14. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- 15. Dinas Sosial
- 16. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- 17. Dinas Pemuda dan Olahraga
- 18. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah

dan lembaga teknis yaitu:

- 1. Badan Lingkungan Hidup
- Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat
- 3. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Perencana
- 4. Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal
- 5. Badan Kepegawaian Diklat
- 6. Badan Arsip dan Perpustakaan
- 7. RSUD dr. Mohammad Soewandhie
- 8. Kantor Ketahanan Pangan

2.2.6.2. Visi Misi Tahun 2011-2015 Visi

Menuju Surabaya Lebih Baik merupakan kata yang memiliki makna strategis dan cerminan aspirasi masyarakat yang ingin perubahan sesuai dengan kebutuhan, keinginan, dan harapan masyarakat. Perubahan di tengah jumlah penduduk yang terus bertambah membawa tuntutan untuk meningkatkan daya dukung kota secara berkelanjutan, Karakteristik penduduk yang terus mengalami dinamika, Derajat sumber daya manusia yang harus terus didukung oleh peningkatan kualitas lingkungan kota, Pertumbuhan ekonomi yang harus diimbangi dengan penguatan struktur ekonomi lokal yang mampu bersaing di kawasan regional dan internasional, Peningkatan partisipasi masyarakat. reformasi birokrasi. peningkatan serta aksesibilitas. kapasitas. dan kualitas pelayanan publik merupakan tiga tantangan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

MENUJU SURABA<mark>YA</mark> LEBIH <mark>BA</mark>IK sebagai KOTA JASA dan PERDAGANGAN yang ERDAS, MANUSIAWI, BERMARTABAT, da

CERDAS, MANUSIAWI, BERMARTABAT, dan BERWAWASAN LINGKUNGAN

Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh organisasi, sesuai visi yang telah ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi Walikota terpilih memperlihatkan secara jelas tahapan yang penting dalam proses pembangunan di Kota Surabaya. Adapun misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

 Misi membangun kehidupan kota yang lebih CERDAS melalui peningkatan sumber daya manusia yang didukung oleh peningkatan kualitas intelektual, mental-spiritual, ketrampilan, serta kesehatan warga secara terpadu dan berkelanjutan

- 2. Misi menghadirkan suasana kota yang MANUSIAWI melalui peningkatan aksesibilitas, kapasitas, dan kualitas pelayanan publik, reformasi birokrasi, serta pemanfaatan sumber daya kota untuk sebesar-besar kesejahteraan warga
- 3. Misi mewujudkan peri kehidupan warga yang BERMARTABAT melalui pembangunan ekonomi berbasis komunitas yang mengutamakan perluasan akses ekonomi demi mendukung peningkatan daya cipta serta kreatifitas segenap warga Kota Surabaya dalam upaya penguatan struktur ekonomi lokal yang mampu bersaing di kawasan regional dan internasional.
- 4. Misi menjadikan Kota Surabaya semakin layak-huni melalui pembangunan infrastruktur fisik dan sosial secara merata yang BERWAWASAN LINGKUNGAN.

2.2.6.3. Electronic Government Kota Surabaya

Menurut dokumen pengembangan e-Government Kota Surabaya, e-Government didefinisikan sebagai proses pemanfaatan TIK sebagai alat bantu dalam menjalankan sistem pemerintahan [34]. Umumnya, e-Government dipengaruhi dua aspek sekaligus, yaitu aspek internal terhadap perangkat atau tata kerja kerja sumber informasi, dan aspek eksternal yang dilihat dari tingkat kepuasan dari penerima layanan yaitu publik atau masyarakat.

Tujuan dari implementasi e-Government adalah:

- Meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan TIK dalam proses penyelenggaraan pemerintahan
- Meningkatkan pemerintahan yang bersih, transparan dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif
- Sebagai sarana perbaikan organisasi, sistem manajemen dan proses kerja pemerintahan.

Sasaran pembangunan e-Government adalah:

- Terbentuknya jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang berkualitas dan terjangkau

- Terbentuknya hubungan interaktif dengan dunia usaha dan dunia industri untuk meningkatkan dan memperkuat kemampuan perekonomian daerah
- Terbentuknya mekanisme komunikasi antar lembaga pemerintah serta penyediaan fasilitas bagi partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan
- Terwujudnya sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi antar instansi pemerintah dan layanan kepada publik.

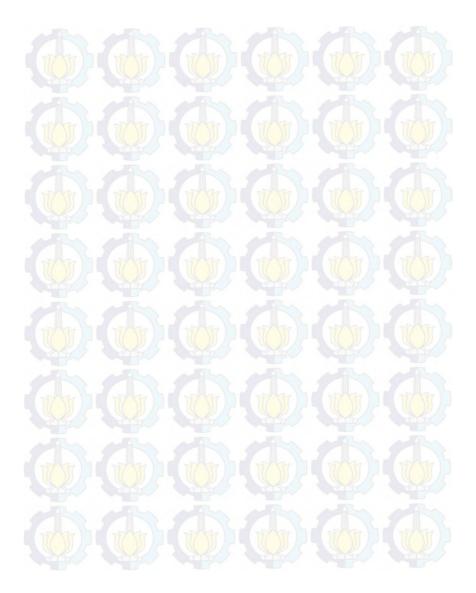
Surabaya Single Window (SSW)

Surabaya Single Window (SSW) merupakan layanan terpadu bersifat online yang dimiliki Pemerintah Kota Surabaya sebagai bentuk pelaksanaan e-Government untuk meningkatkan aksesibilitas warga Surabaya dalam menggunakan layanan publik. Surabaya Single Window (SSW) berisi layanan publik administratif yang terintegrasi dan berbasis website, dengan alamat ssw.surabaya.go.id. Mekanisme pemrosesan program SSW dapat dilakukan secara paket maupun parsial mandiri. Terdapat 24 (dua puluh empat) layanan publik administratif (perijinan maupun non perijinan) yang sudah terintegrasi dalam SSW khususnya pada mekanisme pendaftaran parsial mandiri. Mekanisme investasi paket berisi 2 pendaftaran SKRK sampai dengan TDUP dan 8 paket investasi lainnya. Berikut merupakan tampilan dari SSW.



Gambar 2. 6 Tampilan SSW

Halaman ini sengaja dikosongkan



BAB III METODOLOGI

Bab ini menjelaskan mengenai metodologi yang digunakan dalam pengerjaan tugas akhir ini. Metodologi tersebut berisi tahap yang memiliki input, proses, output, yang diperlukan sebagai panduan secara sistematis dalam pengerjaan tugas akhir.

Metode Pengerjaan

Metode pengerjaan tugas akhir dapat dilihat pada Gambar 3. 1 berikut.

TAHAP PERANCANGAN			
Input	Proses	Output	
> Buku > Jurnal > Paper > Penelitian sebelumnya	Desk observation	> Teori pendukung penelitian > Kajian konseptual model > Interview protocol	

TAHAP IMPLEMENTASI			
Input	Proses	Output	
Interview protocol	Pengumpulan data	 Alur manajemen portfolio aplikasi layanan publik berbasis online kekinian Isu lokalitas Kebutuhan organisasi 	

TAHAP PEMBAHASAN HASIL					
Input	Proses	Output			
 Teori pendukung penelitian Kajian konseptual model Alur manajemen portfolio aplikasi layanan publik berbasis online kekinian Isu lokalitas Kebutuhan organisasi 	 Sintesis kerangka Modifikasi kriteria penilaian Penentuan bobot kriteria Penyusunan perangkat penilaian Pengujian perangkat penilaian 	Usulan alur manajemen portfolio aplikasi layanan publik berbasis online Usulan metode seleksi dan prioritisasi di dalam usulan alur manajemen portfolio Perangkat penilaian Hasil pengujian perangkat penilaian			

Gambar 3. 1 Metode pengerjaan penelitian

Bahan

Identifikasi bahan pada masing-masing tahapan dilakukan untuk mempermudah eksekusi metodologi sehingga dapat dilaksanakan dengan baik. Bahan yang dimaksudkan dapat berupa dokumen, laporan, *paper*, dan lain-lain yang dinilai relevan dengan tujuan tahapan itu sendiri. Bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan metodologi yang direncanakan dalam tugas akhir ditunjukkan pada Tabel 3. 1.

T<mark>abel 3.</mark> 1 Baha<mark>n pene</mark>litian

No	Tujuan	Bahan
	Tujuan tugas akhir (2): Menghasilkan alur manajemen portfolio aplikasi layanan publik berbasis online yang diusulkan untuk Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan kajian literatur, isu lokalitas dan kebutuhan organisasi	Penelitian sebelumnya: Application Portfolio Management – An Integrated Framework and a Software Tool Evaluation Approach, oleh Daniel Simon, Kai Fischbach, Detlef Schoder. Penelitian sebelumnya: Application Portfolio Management from an Enterprise Architecture Perspective, oleh E.A van Ramshorst.
2	Tujuan penelitian (3): Menghasilkan usulan metode proses seleksi dan prioritisasi yang berada di dalam kerangka manajemen portfolio aplikasi layanan publik berbasis online untuk Pemerintah Kota Surabaya	Penelitian sebelumnya: An Integrated Framework for Project Portfolio Selection, oleh NP. Archer, Ghasemzadeh. F.

No	Tujuan	Bahan	
3	Tujuan penelitian (4): Menghasilkan perangkat penilaian dalam metode seleksi dan prioritisasi	Penelitian sebelumnya: Information System Project-Selection Criteria Variations within Strategic Classes, James J. Jiang, Gary Klein.	
4	Tujuan penelitian (5): Mengetahui hasil pengujian perangkat penilaian dalam metode seleksi dan prioritisasi	Hasil survey layanan publik Bappeko tahun 2013 untuk menentukan input dari pengujian perangkat penilaian.	

> Peralatan

Untuk dapat mempermudah eksekusi metodologi sehingga dapat dilaksanakan dengan baik, maka perlu adanya identifikasi peralatan yang diperlukan. Dalam tugas akhir ini, peralatan yang dimaksud adalah:

- 1. Microsoft Word
- 2. Microsoft Excel

Berikut merupakan penjelasan masing-masing tahap dalam metodologi penelitian tugas akhir.

3.1. Tahap perancangan

Tahap perancangan merupakan awal dalam penelitian ini. Pada tahap perancangan, dilakukan *desk observation*, yaitu melakukan kajian dokumen pendukung tanpa melakukan observasi ke studi kasus atau lapangan. *Desk observation* dilakukan untuk mempersiapkan dan memperkaya pengetahuan mengenai konsep-konsep yang dapat menunjang pengerjaan tugas akhir melalui sumber buku, internet dan penelitian sebelumnya. Hal yang dilakukan dalam tahap perancangan termasuk analisis perbandingan, analisis keterkaitan dan *pairwise comparison* mengenai teori-teori yang mendasari dari pengerjaan tugas akhir ini.

3.2. Tahap implementasi

Tahap implementasi bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi terkait yang dibutuhkan dalam pengerjaan tugas akhir, khususnya mengenai gambaran alur manajemen portfolio aplikasi layanan publik berbasis online kekinian (yang termasuk di dalamnya terdapat prioritisasi) yang diidentifikasi melalui wawancara dengan pihak yang terkait di Pemerintah Kota Surabaya. Pengumpulan data digunakan untuk mengangkat isu-isu lokalitas yang menjadi pendorong dari pembuatan kerangka usulan yang baru.

3.3. Tahap pembahasan hasil

Tahap pembahasan hasil dilakukan untuk menjawab rumusan masalah dalam pengerjaan tugas akhir. Terdapat 3 (tiga) proses yang perlu dilakukan dalam tahap pembahasan hasil, yaitu:

- Sintesis kerangka
- Penyusunan perangkat penilaian
- Pengujian perangkat penilaian

3.3.1. Sintesis kerangka

Sintesis adalah suatu aktivitas untuk mengintegrasikan dua atau lebih elemen yang ada, sehingga dapat menghasilkan sebuah hasil baru. Pada proses sintesis kerangka, kerangka yang dimaksudkan adalah kerangka-kerangka manajemen portfolio aplikasi dan kerangka seleksi & prioritisasi terhadap portfolio yang menjadi fokus utama pengerjaan tugas akhir ini. Dalam menyintesis kerangka, langkah-langkah yang dilakukan secara berurutan yaitu:

- 1. Analisis situasi implementasi dan identifikasi kebutuhan
- 2. Memilih kandidat metode yang memenuhi kebutuhan
- 3. Analisis kandidat metode yang bakal dijadikan metode dasar
- 4. Memilih metode yang berguna dan memodifikasi & *fit-in* agar sesuai dengan kondisi situasional organisasi.

Untuk menyintesis kerangka manajemen portfolio aplikasi, diperlukan gambaran alur manajemen portfolio aplikasi layanan publik berbasis online kekinian yang didapatkan selama penggalian informasi melalui wawancara. Selain itu, perlu adanya pemilihan kandidat metode atau kerangka manajemen portfolio aplikasi dari beberapa referensi melalui proses *desk observation*. Hal yang sama juga dilakukan terhadap sintesis kerangka seleksi dan prioritisasi portfolio. Luaran dari sintesis ini adalah alur manajemen portfolio aplikasi layanan publik yang diusulkan untuk Pemerintah Kota Surabaya dan metode seleksi dan prioritisasi yang didasari kondisi situasional organisasi namun tetap mengacu pada referensi yang dapat dipertanggungjawabkan.

3.3.2. Modifikasi kriteria penilaian

Dalam rangka menentukan kriteria penilaian, dilakukan modifikasi terhadap kriteria penilaian dari penelitian atau pendapat para ahli. Modifikasi merupakan langkah yang tepat untuk menghasilkan kriteria karena tidak semua kriteria dari referensi cocok dengan kondisi dan situasi organisasi, yaitu Pemerintah Kota Surabaya. Perlu ada penyesuaian dan *fit-in* dari kriteria-kriteria yang dikembangkan beberapa peneliti agar pada saat implementasi ke depannya, tim penilai akan lebih menguasai baik secara konsep dan konten, namun tetap memiliki dasar teoritis yang terverifikasi.

3.3.3. Penentuan bobot kriteria

Bobot masing-masing kriteria akan ditentukan berdasar keputusan Pemerintah Kota Surabaya yang dalam hal ini diwakili oleh Bappeko dan Diskominfo, agar dapat memberi justifikasi melalui pertimbangan tingkat *urgency* tiap faktor dan nilai kontribusinya dalam menjadikan penilaian yang diusulkan menjadi lebih berimbang dan sesuai dengan harapan.

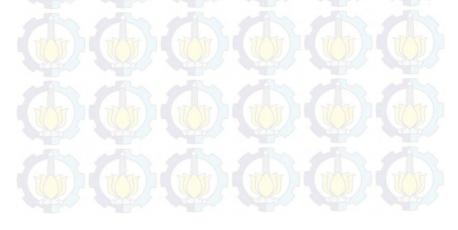
3.3.4. Penyusunan perangkat penilaian

Perangkat penilaian merupakan instrumen yang digunakan untuk menilai sebuah obyek dengan kriteria, bobot, pedoman

penilaian dan rekomendasi pilihan jawaban tertentu, dengan mekanisme yang telah disediakan. Terdapat dua luaran dari tahapan sebelumnya yaitu usulan alur manajemen portfolio aplikasi dan metode seleksi dan prioritisasi, yang merupakan hasil dari proses sintesis kerangka. Perangkat penilaian yang dimaksudkan adalah perangkat untuk menilai setiap aplikasi layanan publik, dalam rangka proses seleksi dan prioritisasi. Untuk memudahkan penggunaan perangkat penilaian, baik pada saat pengujian maupun penggunaan di Bappeko dan Diskominfo, maka perangkat penilaian akan disajikan dalam bentuk softcopy, dengan peralatan Microsoft Excel. Dalam perangkat tersebut, terdapat kriteria dan bobot yang akan ditentukan dengan teknik tertentu.

3.3.5. Pengujian perangkat penilaian

Pengujian perangkat penilaian akan dilakukan dengan menilai aplikasi layanan publik terhadap kriteria-kriteria penilaian yang masing-masing kriteria tersebut memiliki bobot yang berbedabeda, dengan data yang disediakan Bappeko dan Diskominfo. Penilaian akan dilakukan oleh aktor-aktor yang direkomendasikan, sehingga pengujian perangkat penilaian sekaligus mencakup uji validitas perangkat.



BAB IV PERANCANGAN

Bab ini menjelaskan tentang perancangan penelitian dalam tugas akhir sebagai penjelasan lanjutan dari setiap proses dalam metodologi tugas akhir, yang meliputi: *desk observation*, pengumpulan data, sintesis kerangka, penyusunan perangkat penilaian, dan pengujian perangkat penilaian. Tujuan dari perancangan ini adalah untuk mengidentifikasi teknik proses, kebutuhan proses, fokus proses dan strategi pelaksanaan.

4.1. Desk observation

Proses pertama dalam metodologi pengerjaan tugas akhir yaitu desk observation. Desk observation dilakukan dengan teknik kajian dokumen atau literatur yang dapat membantu dalam rangka pengusulan alur manajemen portfolio aplikasi layanan publik berbasis online dan metode seleksi dan prioritisasi yang dikembangkan dari berbagai ahli atau referensi. Ringkasan dari perancangan proses ini terdapat pada Tabel 4. 1.

Tabel 4. 1 Deskripsi perancangan proses desk observation

Na <mark>ma</mark> proses	Desk observation			
Teknik	Kajian dokumen Kajian dokumen merupakan aktivitas untuk menyelidiki data dari dokumen, catatan, file, dan hal lain yang tersebar di berbagai media atau sumber pengetahuan.			
Kebutuhan proses	Buku literatur pendukung, paper/ jurnal, penelitian sebelumnya, hasil survey terkait dengan e-Government di Kota Surabaya.			
Fokus <mark>pros</mark> es	Hal yang harus menjadi luaran utama dari prosesini adalah kajian literatur mengenai: Layanan publik Manajemen portfolio aplikasi Kerangka seleksi dan prioritisasi Kriteria penilaian E-Government Kota Surabaya			

Strategi pelaksanaan	 Mencari teori pendukung dari beberapa sumber (buku, paper, internet, jurnal) Meminta dokumen yang terkait dengan pengelolaan <i>e-Government</i> di Kota Surabaya kepada SKPD terkait Mengkaji dokumen dan teori pendukung Menganalisis kajian konseptual mengenai teori yang tersedia
THE CO	Mengidentifikasi korelasi antar teori pendukung

4.2. Pengumpulan data

Proses kedua yaitu pengumpulan data dengan teknik *in-depth interview* atau wawancara, yang akan dilaksanakan terhadap pihak-pihak yang dapat mewakili Pemerintah Kota Surabaya, yaitu Bappeko dan Diskominfo sesuai dengan kepentingannya. Ringkasan dari perancangan proses ini terdapat pada Tabel 4. 2.

Tabel 4. 2 Deskripsi perancangan proses pengumpulan data

Nama proses	Pengumpulan data	
Teknik	Wawancara Wawancara merupakan aktivitas penggalian data dengan percakapan secara langsung kepada obyek penelitian, untuk menghasilkan poin, kesimpulan atau gambaran tertentu. Wawancara umumnya menggunakan format tanya jawab yang terencana, sehingga analis dapat memahami tujuan-tujuan, informasi, pendapat dan hal informal lain yang dapat mendukung kelengkapan informasi sebelum diolah atau dianalisis. Jenis wawancara yang digunakan dalam pengerjaan tugas akhir ini adalah wawancara terstruktur, yaitu dengan mempersiapkan pertanyaan dan alternatif jawaban yang telah ditetapkan.	
Obyek	Bappeko dan Diskominfo Kota Surabaya	
Strategi pelaksanaan	Untuk mengumpulkan data melalui wawancara dengan Bappeko dan Diskominfo, perlu dirumuskan strategi pelaksanaan agar pada saat	

Nama proses	Pengumpulan data
	wawancara tidak ditemui hambatan. Strategi tersebut dapat berupa urutan tahapan yang dapat dilakukan untuk mempersiapkan wawancara.
	Menetapkan tujuan wawancara
	Membuat interview protocol
	Memutuskan interviewee

Berikut merupakan penjelasan mengenai strategi pelaksanaan dari proses pengumpulan data.

1. Tujuan wawancara

Tujuan wawancara perlu ditetapkan agar menjadi pedoman dalam perumusan pertanyaan wawancara, sehingga wawancara dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan yang dapat kebutuhan penelitian. Pada Tabel 4. 3 di bawah ini berisi informasi obyek wawancara dan tujuan wawancara yang direncanakan.

Tabel 4. 3 Tujuan wawancara

Wawa <mark>ncar</mark> a ke-	Obyek	Tujuan <mark>waw</mark> ancara
	Bappeko	Penggalian informasi pengembangan e-Government Kota Surabaya.
2	Bappeko	Penggalian informasi alur manajemen portfolio aplikasi layanan publik berbasis online, termasuk seleksi dan prioritisasi kekinian serta permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaannya.
3	Diskominfo	Penggalian informasi alur manajemen portfolio aplikasi layanan publik berbasis online

Wawancara ke-	Obyek	Tujuan wawancara
		yang dilaksanakan oleh Diskominfo, termasuk seleksi dan prioritisasi kekinian serta permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaannya
4	Bappeko	Penggalian informasi kebutuhan dan gambaran ideal yang diharapkan pada metode seleksi dan prioritisasi.
5	Bappeko	Koordinasi & diskusi dalam rangka penyusunan perangkat penilaian, terkait dengan penilaian organisasi mengenai kriteria dan bobot yang diusulkan.

2. Membuat interview protocol

Interview protocol adalah daftar pertanyaan yang akan diajukan pada saat wawancara dengan interviewee. Dalam pengerjaan tugas akhir ini, interview protocol akan dibuat dalam rangka wawancara dengan Bappeko dan Diskominfo, yang berpedoman pada tujuan wawancara yang sudah ditentukan. Garis besar interview protocol dibuat pada tahap perancangan namun diperdalam sehingga dapat menjadi pertanyaan yang kritis untuk menggali informasi yang diharapkan. Berikut merupakan kisi-kisi pertanyaan yang akan diajukan pada saat wawancara.

Tabel 4. 4 Kisi-kisi pertanyaan wawancara

No.	Tujuan pertanyaan	Kisi-kisi pertanyaan	
T	Penggalian informasi pengembangan e- Government Kota Surabaya	 Dasar hukum Tujuan e-Government Latar belakang e-Government Kota Surabaya Area bisnis e-Government Kota 	

No.	Tujuan pertanyaan	Kisi-kisi pertanyaan
		 Permasalahan pembangunan TIK yang mendukung e-Government Kota Surabaya Keberadaan mekanisme pengelolaan manajemen portfolio aplikasi, khususnya aplikasi layanan publik berbasis online
	Identifikasi gambaran alur manajemen portfolio aplikasi layanan publik berbasis online kekinian dan permasalahan yang dihadapi	Tujuan migrasi layanan publik dari offline ke online Pemanfaatan teknologi informasi dalam mengupayakan layanan publik yang optimal di tiap SKPD Jumlah layanan publik Jumlah layanan publik online Jumlah layanan publik offline Kecenderungan pemanfaatan aplikasi layanan publik berbasis online oleh masyarakat Peraturan/ dasar hukum yang mengatur pengelolaan portfolio aplikasi Mekanisme pengusulan aplikasi layanan publik Aktor pengusul, perencana & pengambil keputusan Peraturan/ dasar hukum yang mengatur penyeleksian atau prioritisasi layanan publik Aktor yang berhak memprioritisasi layanan prioritisasi layanan publik Kriteria prioritisasi Perangkat prioritisasi Permasalahan dalam prioritisasi
3	Identifikasi gambaran alur manajemen portfolio	Konfirmasi mekanisme pengelolaan aplikasi kepada

No.	Tujuan pertanyaan	Kisi-kisi pertanyaan
	aplikasi layanan publik berbasis online kekinian yang dilaksanakan di Diskominfo	SKPD teknis selaku implementator Peran/ tugas/ fungsi SKPD teknis dalam mekanisme pengelolaan aplikasi Teknik/ mekanisme prioritisasi Kriteria prioritisasi Perangkat prioritisasi Permasalahan yang dihadapi SKPD teknis dalam pengelolaan portfolio aplikasi
4	Penggalian informasi kebutuhan dan gambaran ideal yang diharapkan pada metode prioritisasi	 Latar belakang penggantian mekanisme Tujuan penggantian mekanisme Kebutuhan dasar mekanisme yang akan diusulkan (perspektif studi kasus)
5	Koordinasi & diskusi dalam rangka penyusunan perangkat penilaian, terkait dengan kriteria, bobot, pedoman penilaian dan rekomendasi pilihan jawaban	 Bobot kriteria Penyajian perangkat penilaian Tingkat implementatif kriteria penilaian untuk digunakan di waktu selanjutnya Ketersediaan kebutuhan proses Feedback

3. Menentukan interviewee

Obyek wawancara atau *interviewee* harus ditetapkan untuk memudahkan proses pengumpulan data. Dalam penetapan pihak *interviewee* perlu dipertimbangkan perihal kapasitas obyek dalam kewenangannya memberi informasi yang valid, apakah pertanyaan yang dirumuskan relevan dengan pengetahuan *interviewee* atau tidak.

Pada proses ketiga, terdapat 3 (tiga) subproses di dalamnya, yaitu: (1) sintesis kerangka yang dilakukan untuk menghasilkan usulan alur manajemen portfolio aplikasi layanan publik

berbasis online dan metode seleksi dan prioritisasi, (2) penyusunan perangkat penilaian dan (3) pengujian perangkat penilaian untuk mengetahui hasil penilaian dari masing-masing input agar dapat diketahui hasil prioritisasinya.

4.3. Sintesis kerangka

Ringkasan dari perancangan proses penyusunan perangkat penilaian terdapat pada Tabel 4. 5.

Tabel 4. 5 Deskripsi proses sintesis kerangka

Nama proses	Sintesis kerangka	
Teknik	Method engineering Method engineering menurut Sjaak Brinkkemper adalah disiplin rekayasa untuk mendesain, mengkonstruksi dan mengadaptasi metode, teknik dan tools untuk pengembangan sistem informasi [35]. Tujuan dari teknik ini adalah untuk meningkatkan kegunaan metode pengembangan sistem informasi dengan menciptakan kerangka yang adaptif dengan situasi organisasi tertentu, sehingga dalam pengimplementasiannya dapat berjalan dengan lebih mudah dan solutif dalam permasalahan yang dihadapi organisasi tersebut.	
Obyek • Kerangka manajemen portfolio apli beberapa referensi Kerangka seleksi dan prioritisasi probeberapa referensi		
Strategi pelak <mark>sana</mark> an	Menurut De Weerd et.al [36], terdapat 4 (empat) langkah yang dapat digunakan untuk menghasilkan metode baru melalui method engineering adalah sebagai berikut.	

Nama proses	Sintesis kerangka	
	Analisis situasi implementasi dan identifikasi kebutuhan	
	Memilih kandidat metode yang memenuhi kebutuhan	
	Analisis kandidat metode yang bakal dijadikan metode dasar	
	Memilih metode yang berguna dan memodifikasi & fit-in agar sesuai dengan kondisi situasional organisasi	

4.4. Penyusunan perangkat penilaian

Ringkasan dari perancangan proses penyusunan perangkat penilaian terdapat pada Tabel 4. 6.

Tabel 4. 6 Deskripsi proses penyusunan perangkat penilaian

Nama Penyusunan perangkat penilaia proses 1) Modifikasi kriteria penilaian		
Teknik	Method engineering Method engineering menurut Sjaak Brinkkemper adalah disiplin rekayasa untuk mendesain, mengkonstruksi dan mengadaptasi metode, teknik dan tools untuk pengembangan sistem informasi [35]. Tujuan dari teknik ini adalah untuk meningkatkan kegunaan metode pengembangan sistem informasi dengan menciptakan kerangka yang adaptif dengan situasi organisasi tertentu, sehingga dalam pengimplementasiannya dapat berjalan dengan lebih mudah dan solutif dalam permasalahan yang dihadapi organisasi tersebut.	
Obyek	Kriteria penilaian dari Jiang & Klein	

	Strategi pelaksanaan	Pengkuantifikasian skor prioritas menjadi bobot akhir tiap kriteria		
		Penggalian pandangan organisasi dalam menentukan prioritas/ urutan kriteria dari yang		
	Obyek	Kriteria penilaian		
	Teknik	Wawancara Wawancara merupakan aktivitas penggalian data dengan percakapan secara langsung kepada obyek penelitian, untuk menghasilkan poin, kesimpulan atau gambaran tertentu. Wawancara yang kana dilakukan dalam proses ini akan secara langsung meminta pihak terkait untuk memberi nomor prioritas atau urutan tiap-tiap kriteria berdasarkan pandagan pihak tersebut terhadap nilai kepentingannya.		
	Nama proses	Penyusunan perangkat penilaian: 2) Penentuan bobot kriteria penilaian		
		Memilih kriteria yang berguna dan memodifikasi & fit-in agar sesuai dengan kondisi situasional organisasi		
	Strategi pelaksanaan	and and any		
		Analisis kandidat kriteria yang bakal dijadikan metode dasar		
		Memilih kandidat kriteria yang memenuhi kebutuhan		
		Analisis situasi implementasi dan identifikasi kebutuhan		

	3) Penentuan pilihan jawaban pendukung kriteria		
Teknik	Wawancara, analisis keselarasan kriteria terhadap alternatif pilihan jawaban		
O byek	Kriteria penilaian terverifikasi		
Strategi pelaksanaan	Perekomendasian pilihan jawaban berdasarkan kajian literatur Verifikasi pilihan jawaban kepada Pemerintah Kota Surabaya		

4.5. Pengujian perangkat penilaian

Deskripsi mengenai perancangan pengujian perangkat penilaian terdapat pada Tabel 4. 7.

Tabel 4. 7 Deskripsi proses pengujian perangkat penilaian

Nama proses	Pengujian perangkat penilaian	
Teknik	Weighting and scoring method Merupakan sebuah analisis dengan beberapa atribut atau multi kriteria yang melibatkan identifikasi fator-faktor yang relevan terhadap proyek. Pengalokasian bobot terhadap masingmasing atribut atau kriteria bertujuan untuk merefleksikan tingkat kepentinganya. Pemberian nilai terhadap setiap opsi mencerminkan bagaimana hal tersebut berhubungan terhadap masing-masing atribut.	
Obyek	Input penilaian	

Nama proses	Pengujian perangkat penilaian		
Strategi pelaksanaan	Persiapan penguijan Pengujian perangkat penilaian		
	Penyampaian hasil pengujian		

4.6. Obyek penelitian

Pengerjaan tugas akhir mengenai metode seleksi dan prioritisasi portfolio aplikasi layanan publik berbasis online untuk Pemerintah Kota Surabaya, berada di bawah arahan Bappeko dan Diskominfo selaku institusi pemerintahan yang memiliki hubungan dan koordinasi terhadap perencanaan dan pengembangan TIK di Pemerintah Kota Surabaya.

Bappeko selaku badan perencana memiliki tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah (sesuai dengan tupoksi Bappeko pada Lampiran B). Kebijakan untuk memprioritisasikan aplikasi merupakan salah satu bentuk perencanaan pembangunan, khususnya pembangunan fisik dan prasarana di lingkungan Kota Surabaya. Untuk menyasar hal tersebut, maka pengerjaan tugas akhir ini memfokuskan obyek pengerjaan tugas akhir yaitu fungsional yang berada di naungan Bidang Fisik dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya. Posisi perencanaan TI berada dalam satu sub bidang Perhubungan dan Pematusan.

Diskominfo selaku SKPD teknis yang memiliki tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika di tataran Kota, perlu dijadikan obyek kedua dalam pengerjaan tugas akhir ini. Hal ini disebabkan oleh adanya koordinasi Bappeko dan Diskominfo dalam perencanaan pembangunan TIK di Kota Surabaya. Dengan demikian, Diskominfo dapat memberikan

informasi terkait dengan pengelolaan manajemen portfolio aplikasi namun dalam perspektif yang berbeda dengan Bappeko. Pengembangan aplikasi merupakan salah satu tugas **Bidang Aplikasi dan Database**, sehingga obyek pengerjaan tugas akhir secara spesifik harus ditargetkan berasal dari Bidang Aplikasi dan Database.

Tabel 4. 8 Obyek penelitian

Bappeko	Diskominfo
• Bidang Fisik dan Prasarana	Bidang Aplikasi dan Database
Sub bidang Perhubungan dan Pematusan	



BAB V IMPLEMENTASI

Bab ini menjelaskan tentang implementasi setiap tahap dan proses-proses di dalam metodologi pengerjaan tugas akhir, yang dapat berupa hasil, waktu pelaksanaan dan lampiran terkait yang memuat pencatatan tertentu terhadap kondisi pengimplementasi proses itu sendiri.

5.1. Desk observation

Implementasi *desk observation* dengan menggunakan teknik kajian dokumen menghasilkan penjelasan mengenai teori pendukung pengerjaan tugas akhir ini. Pada perancangan proses ini, teori pendukung yang dimaksudkan adalah:

- Layanan publik
- Manajemen portfolio aplikasi
- Kerangka manajemen portfolio aplikasi
- Kerangka seleksi dan prioritisasi
- Kriteria penilaian

Keempat kajian tersebut disajikan pada bab II pengerjaan tugas akhir ini. Bab II Tinjauan Pustaka sudah meliputi seluruh teori pendukung yang dihasilkan proses *desk observation*, bahkan lebih karena sifatnya sebagai pendukung saja. Berikut merupakan daftar hasil kajian, baik dari dokumen: buku, paper, jurnal, maupun dokumen yang dimiliki Pemerintah Kota Surabaya terkait dengan pengembangan *e-Government* Kota Surabaya.

Tabel 5. 1 Implementasi Desk observation

Rencana kajian teori	Realisasi	Ceklis
Layanan publik	Pelayanan publik	V
Manajemen Application Portfolio portfolio aplikasi Management		v
Kerangka manajemen portfolio aplikasi	Kerangka APM oleh Simon et.al Kerangka APM oleh Erik van Ramshorst	v
Kerangka seleksi dan prioritisasi	Kerangka seleksi porftolio proyek oleh NP Archer & Ghasemzadeh Model seleksi dan prioritisasi oleh Olivia Renanda	v
Kriteria penilaian Kriteria seleksi portfolio		V

5.2. Pengumpulan data

Implementasi proses pengumpulan data adalah wawancara dengan obyek penelitian tugas akhir yang sudah ditetapkan, dengan mengacu pada tujuan wawancara dan *interview protocol* yang sudah dirumuskan. Hasil implementasi proses ini adalah sebagai berikut.

5.2.1. Waktu

Pada Tabel 5. 2 di bawah ini menunjukkan waktu pelaksanaan proses pengumpulan data, dalam bentuk wawancara terhadap obyek pengerjaan tugas akhir yang sudah dicantumkan pada bab sebelumnya.

Tabel 5. 2 Waktu pelaksanaan wawancara

Wawan cara ke-	Hari/ tanggal	Lokasi	Interviewee
1	Senin, 17 November 2014	Kantor Bappeko Surabaya (Jalan Pacar No. 8 Surabaya)	Rizka Fadillah, S.T

Wawan cara ke-	Hari/ tanggal	Lokasi	Interviewee
2	Rabu, 26 November 2014	Kantor Bappeko Surabaya (Jalan Pacar No. 8 Surabaya)	> Rizka Fadillah, S.T, > M. Ali Rakhmadi, S.Kom
3	Kamis, 15 Januari 2015	Diskominfo Kota Surabaya (Jalan Jimerto No. 25 – 27 Lantai V – Surabaya)	Yudho Febriadi, S.Kom, M.T
4	Jumat, 6 Februari 2015	Kantor Bappeko Surabaya (Jalan Pacar No. 8 Surabaya)	Rizka Fadillah, S.T,
5	Senin, 2 Maret 2015	Kantor Bappeko Surabaya (Jalan Pacar No. 8 Surabaya)	 Rizka Fadillah, S.T, M. Ali Rakhmadi, S.Kom

5.2.2. Profil Interviewee

Tabel berikut berisi profil *interviewee* dalam pengerjaan tugas akhir di Pemerintah Kota Surabaya.

Tabel 5. 3 Profil interviewee

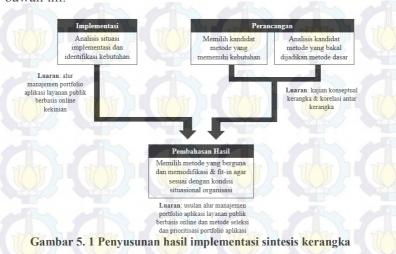
Nama	Jabatan	
M. Ali Rakhmadi, S.Kom	Staf Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya	
Rizka Fadillah, S.T	Staf Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya	
Yudho Febriadi, S.Kom, M.T	Kepala Seksi Aplikasi dan Telematika (APTEL) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya	

5.2.3. Hasil wawancara

Hasil wawancara yang sudah dilakukan dalam proses pengumpulan data dituliskan dalam tabel yang terdapat pada halaman Lampiran C.

5.3. Sintesis Kerangka

Implementasi dari proses sintesis kerangka menghasilkan alur manajemen portfolio aplikasi layanan publik berbasis online dan metode seleksi dan prioritisasi secara dasar merupakan bagian dari alur manajemen portfolio tersebut. Strategi pelaksanaan sintesis kerangka dijadikan panduan dalam menghasilkan kerangka yang diinginkan. Masing-masing strategi tersebut dipetakan berdasarkan bab-bab dalam pengerjaan tugas akhir yang digambarkan dalam gambar di bawah ini.



5.4. Penyusunan perangkat penilaian

Penyusunan perangkat penilaian menghasilkan perangkat penilaian, yaitu kriteria, bobot dan pilihan jawaban yang sudah terverifikasi. Hasil dari proses ini terdapat pada Bagian 6. 4 Perangkat penilaian.

BAB VI HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan yang didapatkan dari pengerjaan tugas akhir ini agar dapat menjawab rumusan masalah. Hal-hal yang termuat dalam bab ini adalah penyampaian hasil dan pembahasan mengenai: manajemen portfolio aplikasi layanan publik berbasis online kekinian, mekanisme manajemen portfolio aplikasi, mekanisme proses seleksi dan prioritisasi, perangkat penilaian dan hasil pengujian perangkat penilaian.

6.1. Manajemen portfolio aplikasi layanan publik berbasis online kekinian di Pemerintah Kota Surabaya

Pengembangan e-Government dilihat sebagai sebuah provek besar yang melibatkan pihak manajemen dan teknis untuk dapat bersama-sama berkoordinasi, merencanakan, membangun, mengelola dan mengawasi proses pengerjaannya. lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, pengembangan e-Government merupakan bagian dari pembangunan infrastruktur kota yang harus direncanakan dan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan standar prosedur yang diterapkan. Dengan melihat tupoksi Bappeko yaitu melaksanakan penyusunan dan kebijakan Daerah pelaksanaan bidang perencanaan pembangunan dan pengembangan, Bappeko wajib membuat perencanaan terhadap keberlanjutan e-Government Kota Surabaya agar dapat responsif terhadap kebutuhan serta aspirasi masyarakat dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku sesuai dengan tuntutan global.

Di sisi teknis, **Diskominfo bertanggungjawab dalam** pengembangan TIK atau yang dalam hal ini adalah *e-aplikasi Government*. Hal ini didasari atas adanya tupoksi Diskominfo untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan

azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika.

Aplikasi e-Government yang dimaksudkan adalah aplikasi yang berfungsi untuk mendukung keberlangsungan e-Government. Merujuk pada Peraturan Walikota Surabaya nomor 5 tahun 2013 tentang Pedoman Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah [34] yang meliputi tiga kelompok berdasarkan orientasi pengguna yang dilayani, yaitu:

- 1. Aplikasi *e-Government* yang berorientasi untuk melayani kebutuhan dan kepentingan masyarakat disebut dengan *Government to Citizen* (G2C)
- 2. Aplikasi *e-Government* yang berorientasi melayani kebutuhan dan kepentingan kalangan bisnis disebut dengan *Government to Business* (G2B)
- 3. Aplikasi *e-Government* yang orientasi fungsinya melayani kebutuhan internal lembaga kepemerintahan, atau kebutuhan dari pemerintah daerah lainnya disebut dengan *Government to Government* (G2G).

Aplikasi e-Government yang disebutkan di atas, dibutuhkan untuk mendukung kedua kelompok aktivitas penerapan e-Government yang saling berkaitan, yaitu: 1) peningkatan kualitas pengolahan data, pengelolaan informasi, perbaikan sistem manajemen dan proses kerja, dan 2) peningkatan kualitas layanan publik sehingga dapat mendorong adanya efisiensi, kenyamanan dan aksesibilitas yang lebih baik [34].

Dalam rangka peningkatan kualitas layanan publik, Pemerintah Kota Surabaya mewujudkannya dengan meng-online-kan layanan publik yang dimiliki di SKPD, khususnya layanan publik yang bersifat administratif. Pembangunan aplikasi layanan publik berbasis online menjadi agenda besar dalam lingkup pemanfaatan TIK sebagai bentuk penerapan *e-Government* yang optimal.

Layanan publik berbasis online merupakan layanan publik yang diselenggarakan dengan sistem online, sehingga dapat diakses oleh pemohon dimana saja dan kapan saja. Layanan publik berbasis online dapat mengurangi intensitas pertemuan antara penyelenggara layanan dengan pemohon, sehingga dapat menekan jumlah KKN berupa retribusi liar maupun penyimpangan proses-proses di dalam penyelenggaraan layanan oleh karena adanya kepentingan tertentu di dalamnya.

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, pengembangan e-Government melibatkan pihak Bappeko dan Diskominfo. Dalam pembangunan aplikasi layanan publik berbasis online, terdapat aktivitas-aktivitas tertentu yang secara terus-menerus dijalankan untuk mewujudkan pengembangan pembangunan, mulai dari tahapan hingga eksekusi, oleh Bappeko perencananan Diskominfo. Aktivitas tersebut kemudian disebut dengan alur manajemen portfolio aplikasi layanan publik berbasis online.

Berikut merupakan penjelasan detil mengenai tahap-tahap yang terdapat di dalam manajemen portfolio aplikasi layanan publik berbasis online di Pemerintah Kota Surabaya.

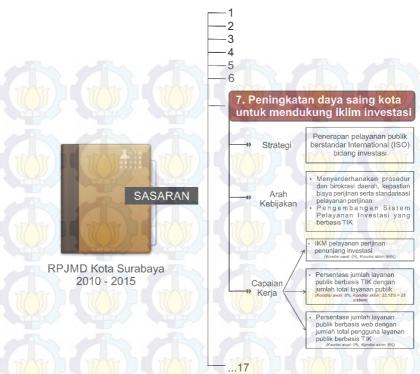
Sesuai dengan kewenangan Bappeko untuk melakukan perencanaan pembangunan Kota Surabaya baik dalam jangka pendek (tertuang dalam RKPD), menengah (tertuang dalam RPJMD) maupun panjang (tertuang dalam RPJPD), Bappeko diharuskan untuk melakukan analisis dalam rangka pengambilan keputusan terkait dengan 5 (lima) layanan yang lolos pertimbangan untuk dibangun sistem online-nya. Dalam hal ini, Bappeko secara mandiri melakukan hal tersebut untuk menghindari adanya intervensi dari pihak lain yang tidak memiliki wewenang. Namun yang terdapat beberapa batasan yang dihadapi Bappeko untuk melakukan perencanaan pembangunan aplikasi, utamanya masalah waktu.



Gambar 6. 1 Urutan perencanaan pembangunan daerah

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Sedangkan RPKD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun. Pada RPJMD Kota Surabaya Tahun 2010 – 2015, terdapat program prioritas. Program prioritas adalah program yang bersifat menyentuh langsung kepentingan publik, bersifat monumental, lintas urusan, berskala besar dan memiliki *urgency* yang tinggi serta memberikan dampak luas pada masyarakat [37].





Gambar 6. 2 Program prioritas RPJMD Kota Surabaya 2010-2015

Pada program prioritas tersebut, terdapat sasaran, strategi, arah kebijakan, indikator kinerja (outcome), capaian kerja dan SKPD penanggungjawab. Dalam kaitannya dengan pemanfaatan TIK khususnya untuk layanan publik seperti yang sudah dijelaskan di atas, pada sasaran ketujuh, yaitu Peningkatan Daya Saing Kota untuk Mendukung Iklim Investasi, diagendakan untuk menghasilkan capaian kerja berupa 25 sistem tersebut dalam kurun waktu 5 tahun. Sistem tersebut merupakan sistem layanan publik berbasis TIK dari total layanan publik sejumlah 154.

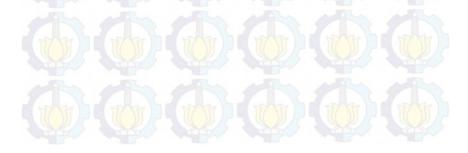
Dengan adanya tuntutan untuk membangun sistem atau aplikasi layanan publik berbasis online tersebut, Bappeko dituntut untuk dapat melakukan perencanaan terhadap proses

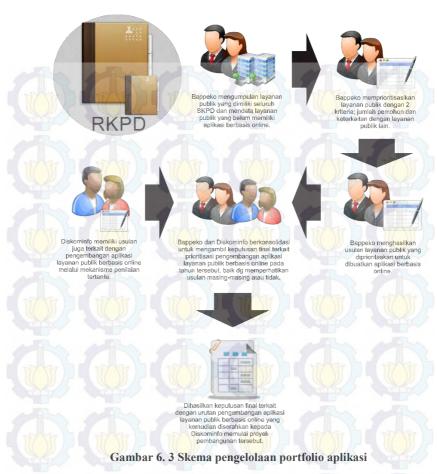
pengembangannya, mulai dari memilih layanan yang akan dionline-kan, hingga mengawasi proses pembangunan yang secara normatif ada di pihak Diskominfo selaku SKPD teknis. Perencanaan pembangunan aplikasi tersebut akan terdefinisi lebih detil pada dokumen RKPD yang setiap tahun akan dikeluarkan sesuai dengan petunjuk dan arahan Walikota Surabaya.

Untuk dapat mewujudkan capaian kerja tersebut, Bappeko membaginya menjadi 5 (karena rentang waktu RPJMD sebelum nantinya dipertanggungjawabkan adalah 5 tahun). Maka, tiap tahunnya Diskominfo harus menghasilkan paling tidak 5 (lima) aplikasi layanan publik berbasis online yang harus dikoordinasikan dengan Bappeko terkait dengan perencanaannya.

Di setiap waktu pembuatan RKPD, Bappeko memberikan rekomendasi terhadap layanan publik yang dibangun di tahun tersebut. Rekomendasi tersebut termasuk memuat urutan prioritas terhadap layanan yang didasarkan oleh pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Diagram di bawah ini menggambarkan alur mekanisme pengembangan aplikasi khususnya aplikasi *e-Government* untuk layanan publik online, yang dilihat dari 2 (dua) aktor yang melakukan, yaitu Bappeko dan Diskominfo.

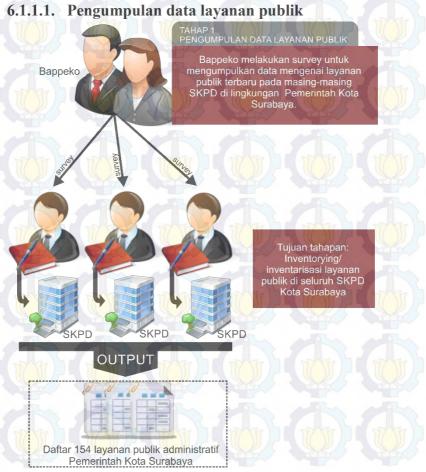




Pembahasan mengenai manajemen portfolio aplikasi layanan publik berbasis online yang diterapkan di Pemerintah Kota Surabaya terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu: (1) penjelasan mengenai alur manajemen portfolio dan (2) isu lokalitas yang muncul selama manajemen portfolio. Berikut merupakan pembahasan yang telah disusun mengenai manajemen portfolio aplikasi layanan publik berbasis online.

6.1.1. Alur manajemen portfolio aplikasi layanan publik berbasis online kekinian

Secara detil, berikut merupakan penjelasan dari aktivitas yang Bappeko dan Diskominfo lakukan terkait dengan pengembangan aplikasi layanan publik berbasis online Pemerintah Kota Surabaya.



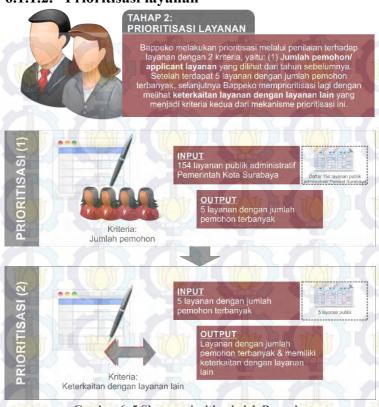
Gambar 6. 4 Skema pengumpulan data oleh Bappeko

Pada Gambar 6. 4, digambarkan alur pengumpulan data yang dilakukan Bappeko dalam bentuk skema. Selama ini, **Bappeko mendapat input berupa daftar layanan publik dari masing-masing SKPD** melalui survey, dengan demikian Bappeko menggunakan cara *manual data collection*. Layanan publik yang didata tersebut adalah layanan publik administratif dimiliki di seluruh SKPD.

Dari daftar yang sudah dihasilkan, Bappeko melakukan pemetaan terhadap layanan publik yang sudah terintegrasi dengan sistem online SSW (yang kemudian disebut dengan layanan publik online) dan sisanya yang disebut dengan layanan publik offline.

Selama ini, dari portfolio layanan publik yang sudah dimiliki Bappeko melalui survey, **Bappeko melakukan prioritisasi dengan melihat aspek-aspek yang sederhana dan sifatnya lokal.** Artinya, aspek tersebut hanya digunakan di lingkungan Bappeko saja dan diambil berdasarkan pemahaman tim penyeleksi sendiri, tidak dari sumber teori tertentu.

6.1.1.2. Prioritisasi layanan



Gambar 6. 5 Skema prioritisasi oleh Bappeko

Seperti ditunjukkan pada Gambar 6. 5, setelah memiliki daftar atau inventori layanan publik administratif, kemudian Bappeko memprioritisasikan layanan publik tersebut dengan melihat jumlah pemohon layanan secara offline atau manual pada tahun sebelumnya dan keterkaitan dengan layanan lain. Kedua tahapan di dalam mekanisme prioritisasi ini menjadi hal yang harus menjadi perhatian, karena kemunculan aspek ini tidak didasari dukungan teoritis yang dapat memberi justifikasi kebenaran aspek. Jumlah pemohon layanan offline merupakan kriteria utama yang menjadi patokan Bappeko untuk melihat tingkat urgency dan importance layanan

untuk dapat di-online-kan. Melalui kriteria ini, Bappeko mengambil 5 (lima) layanan dengan jumlah pemohon tertinggi. Tahap inilah yang disebut dengan prioritisasi berdasarkan isu lokal. Namun, satu hal yang perlu berbeda dalam prioritisasi Bappeko ini adalah Bappeko tidak menghapus layanan yang tidak terpilih untuk dimigrasikan kedalam sistem online tahun mendatang. Layanan yang tidak terpilih tersebut akan tetap di proses sebagai input dari prioritisasi di tahun selanjutnya.

Setelah mendapat 5 (lima) layanan publik yang memiliki histori jumlah pemohon terbanyak dari waktu-waktu sebelumnya, Bappeko menjadi hal ini sebagai input untuk tahap kedua dalam prioritisasi, atau yang kemudian disebut dengan prioritisasi pengembangan.

Pada tahap kedua ini, Bappeko menggunakan atribut keterkaitan layanan dalam 'Top 5' hasil dari prioritisasi pertama, dengan layanan lain. Beberapa layanan publik administratif, baik perijinan maupun non perijinan yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya bisa saja membentuk satu rangkaian dimana output dari layanan publik tersebut merupakan input dari sebuah layanan publik yang sifatnya mayor atau besar. Dengan demikian, secara logika dapat disimpulan bahwa, jika satu layanan publik yang mayor tersebut ingin dibangun, maka perlu dipersiapkan dulu layanan-layanan pendukungnya.

Setelah menganalisis keterkaitan layanan dengan layanan lain, Bappeko lantas memiliki data layanan publik yang memiliki jumlah pemohon terbanyak (disebut dengan 5 besar layanan publik) dan layanan publik yang memiliki keterkaitan dengan 5 (lima) besar layanan publik. Jika terdapat kondisi demikian, Bappeko secara otomatis memasukkan layanan publik pendukung tersebut tepat dibawah urutan layanan publik mayor-nya. Hal ini mengakibatkan adanya perubahan jumlah serta urutan layanan yang akan di-online-kan.

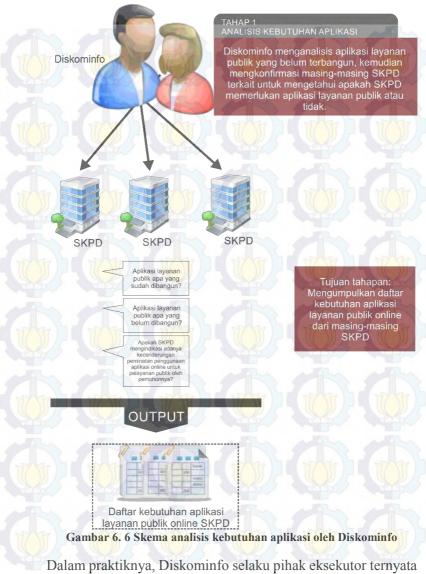
Daftar layanan publik hasil dari tahap kedua pada mekanisme prioritisasi, kemudian berstatus siap untuk direkomendasikan sebagai portfolio aplikasi layanan publik online versi Bappeko yang akan dieksekusi oleh SKPD teknis, yang pada lingkungan Pemerintah Kota Surabaya diwewenangi oleh Diskominfo.

Oleh karena proses pengembangan *e-Government*, khususnya pada pembangunan aplikasi tidak hanya melibatkan satu pihak saja, Diskominfo dalam hal ini sebagai SKPD teknis ternyata juga melakukan mekanisme tertentu yang bertujuan sama seperti Bappeko, yaitu menghasilkan rekomendasi portfolio aplikasi layanan publik. Dari rekomendasi tersebut, akan dilanjutkan tahap selanjutnya yaitu eksekusi pengembangan yang ada di tangan Diskominfo juga.

Dalam rangka pembuatan rekomendasi aplikasi layanan publik yang terprioritisasi menurut kriteria-kriteria khas atau 'signature' dari perspektif Diskominfo, Diskominfo melaksanakan beberapa tahapan. Tahapan tersebut digambarkan dalam Gambar 6. 6 di bawah ini.



6.1.1.3. Analisis kebutuhan aplikasi



Dalam praktiknya, Diskominfo selaku pihak eksekutor ternyata juga secara bersamaan melakukan pengumpulan data dan

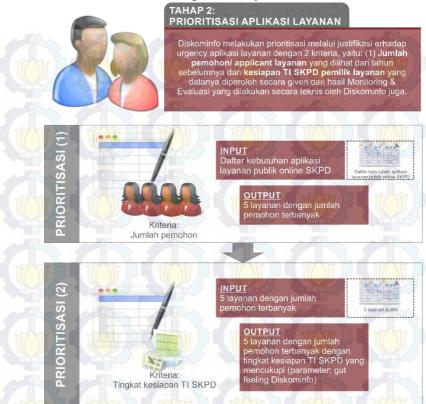
analisis seperti yang Bappeko lakukan, namun dengan tujuan dan mekanisme yang 'signature'.

Diskominfo melakukan pengumpulan data bertujuan untuk mengetahui sistem apa saja yang sudah dibangun di waktu sebelumnya, mengkonfirmasi kepada SPKD terkait apakah perlu adanya penambahan layanan publik online yang dapat memberikan nilai tambah bagi SKPD dalam mewujudkan layanan publik yang prima bagi masyarakat. Setelah terkumpul mengenai informasi layanan publik yang masih offline atau manual dan diusulkan untuk dionlinekan, selanjutnya Diskominfo melakukan prioritisasi terhadap daftar tersebut. Hal yang membedakan antara prioritisasi yang Bappeko dan Diskominfo lakukan adalah scope penilaian. Bappeko melakukan prioritisasi dengan melihat aspek strategis, sedangkan Diskominfo melihat dari sisi teknis pengembangan aplikasi.

Dalam konteks pengumpulan data ini, terdapat adanya extencive process, yaitu proses yang dilakukan dengan tujuan yang sama namun dengan sumber daya dan waktu yang berbeda. Meskipun jika dilihat dari obyek dan tujuan tahapan, kedua hal ini menunjukkan fokus yang berbeda. Pengumpulan data yang dilakukan Bappeko bertujuan untuk inventorying atau inventarisasi layanan publik yang ada di seluruh SKPD Kota Surabaya sehingga memunculkan adanya daftar 154 layanan publik. Sedangkan yang menjadi fokus dari pengumpulan data oleh Diskominfo adalah kebutuhan aplikasi layanan publik, yang lebih spesifik daripada layanan publik itu sendiri.

Untuk melakukan prioritisasi, terdapat beberapa atribut yang menjadi pertimbangan Diskominfo. Gambaran prioritisasi yang dilakukan Diskominfo terdapat pada Gambar 6. 7 di bawah ini.

6.1.1.4. Prioritisasi aplikasi layanan



Gambar 6. 7 Skema prioritisasi oleh Diskominfo

Diskominfo memprioritisasikan layanan publik dengan kategori besarnya jumlah pemohon layanan. Sama seperti yang dilakukan Bappeko, Diskominfo kemudian mengambil 5 (lima) layanan dengan jumlah pemohon terbanyak dan mereprioritisasikan kembali dengan mengukur nilai kesiapan SKPD dalam menggunakan sistem, yang Diskominfo sebut dengan tingkat kesiapan TI SKPD. Data mengenai tingkat kesiapan TI yang Diskominfo gunakan diambil dari hasil Tahap Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang merupakan bagian dari pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaran pemerintahan. Hasilnya berupa kategori

kematangan TIK masing-masing SKPD, yaitu kategori 1, 2 dan 3.

Diskominfo mempergunakan aspek kesiapan TI SKPD didasarkan oleh fakta lapangan sebelum-sebelumnya yaitu seringkali ditemui kasus SKPD ternyata belum siap secara TIK padahal aplikasi layanan publik yang harus mereka kelola sudah jadi. Hasilnya, Diskominfo harus mempersiapkan dan meningkatkan kualitas TIK yang SKPD miliki dan berdampak pada ketidakmaksimalan penggunaan aplikasi layanan publik online karena terhambat oleh beberapa masalah. Kasus tersebut berpeluang terjadi karena tidak semua SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya memiliki infrastruktur atau sumber daya TI dan sumber daya manusia di bidang TI, memiliki tingkat kematangan atau standar yang sama. Hal ini tentu akan berpengaruh langsung terhadap bagaimana penggunaan layanan publik yang dimigrasikan ke dalam sistem online, sekalipun secara dasar keberhasilan sistem online layanan publik ini bergantung pada penggunanya sendiri, yaitu masyarakat luas. Namun pertimbangan kematangan TI di SKPD dinilai Diskominfo memiliki pengaruh yang signifikan.

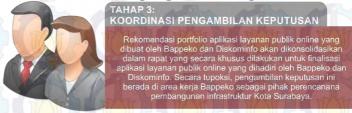
> Simpulan

Dalam konteks prioritisasi ini, terdapat adanya *extencive process*, seperti halnya pada konteks pengumpulan data yang mengandung adanya redundansi proses sehingga dapat menghabiskan sumber daya. Meskipun jika dilihat dari kriteria penilaian serta input proses terdapat perbedaan, yaitu masing-masing aktor yaitu Bappeko dan Diskominfo memiliki *signature assessment* sendiri. Prioritisasi yang Bappeko lakukan dengan melakukan penilaian terhadap kriteria jumlah pemohon dan keterkaitan dengan sistem lain menggunakan input 154 layanan publik. Sedangkan prioritisasi yang Diskominfo lakukan menggunakan kriteria jumlah pemohon dan kesiapan TI SKPD yang datanya diperoleh secara *given*, hasil dari tahap Monitoring dan Evaluasi yang menjadi bagian

dari keseluruhan tahapan pengembangan *e-Government* Kota Surabaya.

Dari tahap-tahap yang Bappeko dan Diskominfo lakukan terkait dengan prioritisasi aplikasi layanan publik berbasis online, selanjutnya akan dijelaskan tahap koordinasi antara kedua instansi pemerintahan tersebut untuk memutuskan rekomendasi yang terfinalisasi. Tahap ketiga tersebut digambarkan dalam bentuk skema pada Gambar 6. 8.

6.1.1.5. Koordinasi pengambilan keputusan





Gambar 6. 8 Skema konsolidasi pengambilan keputusan

Setelah Diskominfo menghasilkan daftar prioritas portfolio aplikasi layanan publik online, maka daftar tersebut akan diserahkan kepada Bappeko agar difinalisasi. Namun, dalam praktiknya, Bappeko harus berkoordinasi lagi kepada Diskominfo karena terdapat 2 hasil prioritisasi yang tidak

jarang berbeda oleh karena tatacara penilaian yang berbeda pula. Jika terjadi kondisi demikian, maka kedua pihak berdiskusi untuk menentukan titik tengah yang dapat menjembatani kebutuhan Bappeko sebagai perencana, yaitu mencari layanan publik yang memang memiliki tingkat urgency & importance terhadap kebutuhan masyarakat, dan Diskominfo yang juga memiliki pertimbangan di bidang yang lebih teknis terhadap keberlangsungan sistem dan efisiensi pengembangan. Biasanya, Bappeko dan Diskominfo melihat kembali Perda atau Perwali yang menginstruksikan pembenahan dan atau peningkatan di bidang pelayanan masyarakat tertentu untuk mencapai visi misi yang diagendakan dalam tahun periode masa kepemimpinan Walikota.

Dilihat dari status fungsional, posisi Bappeko dalam menentukan prioritas final layanan publik yang siap dibangun sistem online-nya lebih tinggi daripada Diskominfo didasarkan atas salah satu fungsi Bappeko yaitu penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah bidang fisik dan prasarana pada skala kota, namun tidak jarang Diskominfo memberi masukan yang lebih proporsional karena Diskominfo adalah pihak yang lebih mengerti teknis pembangunannya, sehingga mengetahui secara jelas apa saja yang mendukung dan menghambat proses pembangunan aplikasi layanan publik berbasis online itu sendiri.

Satu hal yang menarik dalam mekanisme prioritisasi layanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya adalah besarnya pengaruh instruksi Walikota untuk mendesak pembuatan sistem tertentu terkait dengan layanan publik secara online pada Bappeko maupun Diskominfo yang secara langsung akan mempengaruhi urutan prioritas yang sudah difinalisasi. Dengan demikian, Bappeko dan Diskominfo dapat menyusun strategi pembangunan sistem lanjutan untuk mengakomodasi keinginan atau instruksi Walikota, baik dengan sistem lebur maupun *outsourcing programmer* dan tenaga teknis lain yang terkait. Bisa disimpulkan dari gambaran

ini adalah pengaruh instruksi Walikota untuk mengintervensi prioritas pembuatan sistem online layanan publik sangat tinggi.

Kesesuaian manajemen portfolio aplikasi kekinian (existing) dengan kerangka APM

Mekanisme manajemen portfolio aplikasi khususnya pada aplikasi layanan publik online yang sudah dijalankan di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, yang berada di wewenang Bappeko dan Diskominfo, kemudian dipetakan sesuai dengan proses yang ada di *Application Portfolio Management* (APM). APM dipilih sebagai pendekatan portfolio terbaik untuk studi kasus ini karena memiliki korelasi yaitu kesamaan obyek yang dikelola, yaitu aplikasi, dan tujuan pengelolaan yaitu: (1) memaksimalkan nilai bisnis, (2) mengamankan *architectural fit*, (3) mendukung rencana transformasi dan (4) menimimasi risiko terhadap bisnis.

Analisis kesesuian dilakukan untuk menunjukkan pengelompokkan proses dalam manajemen portfolio aplikasi kekinian (existing) ke dalam proses APM yang dikembangkan oleh Daniel Simon, Kai Fishmach dan Detlef Schoder [8], yaitu: 1) Data Collection, 2) Analysis, 3) Decision Making dan 4) Optimization.

Pemetaan kesesuaian manajemen portfolio aplikasi kekinian (existing) ke dalam proses di dalam APM digambarkan dalam Gambar 6. 9 di bawah ini.



Gambar 6. 9 Skema pemetaan kesesuaian dengan kerangka APM

Justifikasi pemetaan mekanisme pengembangan aplikasi yang dilakukan oleh Bappeko dan Diskominfo ke dalam prosesproses pada APM didasarkan atas esensi dari tahapan dan melihat kesesuaian dengan fokus dan teknik yang digunakan dalam tahapan tersebut. Deskripsi mengenai justifikasi pemetaan ditunjukkan pada Tabel 6. 1 di bawah ini.

Tabel 6. 1 Deskripsi pemetaan kesesuaian dengan kerangka APM

Mekanisme kekinian (existing)	Proses dalam APM [8]	Justifikasi
Pengumpulan daftar layanan publik & Analisis kebutuhan aplikasi	Data collection	Tujuan dari data collection pada APM adalah untuk mengumpulkan informasi aplikasi organisasi secara terpusat. Dalam praktiknya, Bappeko dan Diskominfo samasama melakukan pengumpulan daftar layanan publik yang dimiliki tiap SKPD untuk mendata mana saja layanan publik yang sudah dibuatkan aplikasinya dan mana yang membutuhkan aplikasi online sehingga dapat diintegrasikan dalam SSW.
Penilaian dengan atribut: • Jumlah pemohon • Keterkaitan dengan sistem lain • Kesiapan TI SKPD	Analysis	Proses analisis dalam APM bertujuan untuk mengetahui portfolio aplikasi secara mendalam melalui beberapa atribut, yaitu business process support, strategic fit, value/benefits, costs, risk, lifecycle, dll. Pada pelaksanaan pengembangan aplikasi di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, Bappeko dan

		Diskominfo melakukan analisis terhadap portfolio tersebut dalam atribut: jumlah pemohon, keterkaitan dengan sistem lain. Serta nilai kesiapan TI SKPD yang sudah dimiliki berdasar tahap Monev yang pertahun dilakukan oleh Diskominfo terhadap seluruh SKPD di lingkungan Kota Surabaya.
Prioritisasi	Decision making	Proses decision making dalam APM bertujuan untuk perencanaan pengembangan portfolio aplikasi untuk direalisasikan, dengan salah teknik yang disarankan adalah prioritisasi.
Pengembangan aplikasi	Optimization	Proses optimiazation dalam APM bertujuan untuk mengeksekusi portfolio untuk menghasilkan produk. Dalam praktiknya, tahap optimisasi diimplementasikan dengan menggunakan hasil dari decision making (yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak) untuk kemudian dibangun dalam sebuah fase pengembangan perangkat lunak.

	Tahapan ini termasuk tahapan teknis yang ada di area kewenangan Diskominfo selaku SKPD teknis.
--	--

6.1.2. Isu lokalitas dalam alur manajemen portfolio aplikasi layanan publik berbasis online kekinian

Isu lokalitas yang d<mark>apat</mark> diangkat dari alur manajemen portfolio aplikasi layanan publik berbasis online di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya adalah:

- 1. Tidak adanya pemisahan wewenang secara organisasional, yang dipahami dan dilaksanakan secara disiplin oleh Bappeko dan Diskominfo terkait dengan manajemen portfolio aplikasi, sehingga berakibat pada munculnya tumpang tindih pelaksanaan peran masing-masing aktor
- 2. Tidak tersedianya panduan mekanisme prioritisasi yang terdokumentasi dan bersumber dari kajian ilmiah atau literatur yang terverifikasi
- 3. Ketidakjelasan mekanisme pengambilan keputusan melalui konsolidasi dalam bentuk rapat yang mempertemukan Bappeko dan Diskominfo. Dikhawatirkan akan muncul sebuah kondisi yang membingungkan ketika Bappeko dan Diskominfo akan sama-sama membawa rekomendasi mereka yang kemungkinan berbeda sehingga akan berdampak pada sulitnya proses pengambilan keputusan untuk finalisasi portfolio aplikasi layanan publik yang menjadi prioritisas untuk dikembangkan tersebut
- 4. Adanya perbedaan perspektif dalam prioritisasi yang terdapat pada mekanisme manajemen portfolio aplikasi, yaitu Bappeko melihat dari *urgency* layanan sedangkan Diskominfo melihat dari sisi efisiensi pembangunan aplikasi dan hal teknis lain yang terkait
- 5. Adanya extensive process, atau redundancy process, sebuah kondisi dimana pelaksanaan suatu proses terjadi dua kali atau lebih, dimaksudkan dengan tujuan yang sama namun oleh pelaku yang berbeda di waktu yang bersamaan

pula. Mekanisme prioritisasi yang dilakukan Bappeko dan Diskominfo seperti yang sudah dijelaskan di atas membuktikan bahwa oleh karena ketiadaan pemisahan wewenang dalam mekanisme prioritisasi itu sendiri membuat kedua aktor tersebut sama-sama membawa signature assessment-nya untuk menghasilkan rekomendasi dengan jalur prioritisasi yang tepat. Hal ini dapat membuang-buang sumber daya, waktu dan biaya serta memunculkan adanya persepsi tentang ketiadaan koordinasi dua arah antara Bappeko dan Diskominfo yang tidak disadari terjadi padahal sesungguhnya hal tersebut perlu dihindari

6. Pemunculan kriteria yang sekarang digunakan berasal dari gut feeling dan pengetahuan yang terbatas yang dimiliki oleh tim yang tidak didasarkan teori pendukung yang relevan atau kajian empiris tertentu, sehingga kriteria yang digunakan belum dapat terjamin kebenarannya.

Kebutuhan organisasi terkait manajemen portfolio aplikasi layanan publik berbasis online

Dengan adanya isu lokalitas yang diangkat, maka dapat dihasilkan kebutuhan organisasi, yaitu Pemerintah Kota Surabaya terhadap adanya pengaturan ulang atau rearrangement terhadap manajemen portfolio aplikasi layanan publik berbasis online yang selama ini dijalankan.

- Kajian manajemen portfolio aplikasi khususnya yang dapat mengakomodasi kepentingan antar aktor atau pihak yang terlibat berdasarkan wewenang atau tugas dan fungsi masing-masing
- 2. Pengaturan ulang manajemen portfolio aplikasi yang terstruktur dengan mekanisme pembagian wewenang dan pendistribusian input output yang berkelanjutan
- 3. Mekanisme penilaian yang dapat dioperasionalisasikan atau diimplementasikan dengan batasan ketersediaan informasi di organisasi, serta dapat mengakomodasi kepentingan dan pandangan organisasi yaitu Pemerintah Kota Surabaya terhadap penilaian tersebut

- 4. Penetapan kriteria penilaian yang memuat unsur ilmiah atau teoritis dan lokal, sehingga kriteria tersebut dapat adaptif dengan kondisi Pemerintah Kota Surabaya
- 5. Perlunya publikasi hasil penilaian untuk memberi transparansi terhadap penilaian yang sudah dilakukan sehingga keputusan yang dihasilkan merupakan keputusan yang harus dan dapat diterima oleh semua pihak.

6.2. Usulan alur manajemen portfolio aplikasi layanan publik berbasis online untuk Pemerintah Kota Surabaya

Kajian pustaka mengenai kerangka Application Portfolio Management (APM) yang diusulkan pada penelitian yang dilakukan oleh Daniel Simon, Kai Fisbach dan Detlef Schoder serta penelitian Erik van Ramshorst, yang didukung dengan adanya pemetaan kesesuaian manajemen portfolio aplikasi kekinian, dijadikan panduan untuk membuat usulan alur manajemen portfolio aplikasi yang baru untuk memenuhi kebutuhan.

Secara dasar, penentuan proses dalam mekanisme manajemen portfolio aplikasi vang diusulkan ini didasari oleh kerangka acuan utama, yaitu APM oleh Daniel Simon, Kai Fisbach dan Detlef Schoder dalam bukunya yang berjudul "Application Portfolio Management -AnFramework and a Software Tool Evaluation Approach". Hal ini dilatarbelakangi oleh kejelasan kerangka yang diidentifikasi mengandung pendekatan terbaik terhadap mekanisme manajemen portfolio aplikasi yang selama ini dijalankan (existing). Diharapkan ke depannya tidak akan terjadi perubahan *behavior* secara besar-besaran vang memunculkan risiko kegagalan pelaksanaan. Namun beberapa hal yang menjadi perhatian adalah penggantian nama untuk masing-masing proses, dengan tujuan untuk mempermudah pihak yang terlibat untuk dapat memahami dan menjalankannya serta spesifikasi tahapan di dalamnya serta penyesuaian

tahapan dan kebutuhan perangkat yang mengacu pada kerangka APM oleh Erik van Ramshorst.

Pendefinisian tahapan di dalam proses-proses yang diusulkan dalam alur manajemen portfolio aplikasi mengacu pada tahapan-tahapan dalam kerangka APM milik Erik van Ramshorst. Diketahui bahwa kerangka APM dari Simon et.al dan Erik van Ramshorst memiliki kesesuaian, sehingga hal ini dapat mendukung penetapan tahapan-tahapan yang relevan dengan proses yang sesuai. Namun, tahapan tersebut akan dimodifikasikan dengan tahapan lain atas dasar pertimbangkan kultur organisasi, serta histori dari pelaksanaan mekanisme sebelumnya. Usulan kerangka manajemen portfolio aplikasi khususnya untuk aplikasi layanan publik online di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, yang melibatkan instansi Bappeko dan Diskominfo yaitu pada Gambar 6. 10.





Gambar 6. 10 Alur manajemen portfolio aplikasi layanan publik berbasis online

Kerangka manajemen portfolio aplikasi layanan publik berbasis online untuk Pemerintah Kota Surabaya terdiri dari 3 proses, yaitu: (1) pengumpulan data, (2) seleksi dan prioritisasi dan (3) eksekusi dan pengawasan. Masing-masing proses memiliki input dan output yang berbeda-beda, serta tahapan-tahapan di dalamnya yang disesuaikan untuk mendukung tujuan proses. Berikut merupakan penjelasan masing-masing proses dalam kerangka manajemen portfolio aplikasi layanan publik berbasis online.



Pengumpulan data

Seleksi & ` prioritisasi Eksekusi & pengawasan

Gambar 6. 11 Proses-proses dalam alur manajemen portfolio aplikasi layanan publik berbasis online Kota Surabaya

6.2.1. Pengumpulan data

Deskripsi proses

Proses awal dalam alur manajemen portfolio aplikasi yang diusulkan untuk Pemerintah Kota Surabaya adalah pengumpulan data.

Tujuan dari proses pengumpulan data adalah untuk mengumpulkan beberapa data yang diperlukan untuk proses-proses selanjutnya. Data tersebut adalah: daftar layanan publik administratif dari seluruh SKPD, daftar aplikasi layanan publik berbasis online serta penggalian informasi yang diperlukan sebagai panduan atau pedoman justifikasi pemberian nilai pada proses seleksi dan prioritisasi. Setiap output yang dihasilkan dalam proses pengumpulan data adalah penting. Hal disebabkan karena output tersebut akan digunakan sebagai input dalam proses selanjutnya.

Secara garis besar, tujuan utama dalam proses ini adalah menginventarisasi layanan publik, menginventarisasi aplikasi layanan publik online dan menggali informasi pedoman penilaian untuk keperluan proses selanjutnya. Perlu diketahui, proses ini merupakan hasil sintesis dari proses data collection pada kerangka APM yang dikembangkan oleh Simon et.al, namun terdapat beberapa perubahan terkait dengan tujuan dan pendetailan tahapan di dalamnya.



Gambar 6. 12 Detil tahapan proses pengumpulan data

Perbandingan dengan proses kekinian

Dengan melihat kondisi kekinian dari alur manajemen portfolio yang sudah dilakukan, khususnya yang terkait dengan pengumpulan data, terjadi perubahan terkait dengan nama, tujuan dan tahapan di dalamnya. Seperti pada Gambar 6. 9 Skema pemetaan kesesuaian dengan kerangka APM, terlihat bahwa antara Bappeko dan Diskominfo melakukan hal yang sama, yaitu pengumpulan daftar layanan publik. Namun perbedaan antara pengumpulan daftar layanan publik yang dilakukan Bappeko dan Diskominfo adalah input dan outputnya. Seperti pada bahasan Pengumpulan data layanan publik, dijelaskan bahwa Bappeko membuat daftar (inventory) layanan publik di seluruh SKPD Kota Surabaya. Dalam tahapan ini, output yang dihasilkan adalah daftar layanan publik secara keseluruhan. Sedangkan Diskominfo melakukan pengumpulan data secara lebih terfokus, yaitu hanya mengumpulkan daftar layanan publik offline, atau yang belum memiliki aplikasi. Seperti pada justifikasi yang terdapat di dalam pembahasan tersebut, Diskominfo melakukan pengumpulan informasi yang lebih spesifik dan mendukung tujuan utama dari APM ini yaitu pengembangan aplikasi layanan publik berbasis online. Dengan demikian, adanya pengusulan perbaikan pada proses ini diharapkan dalam menyelesaikan isu lokalitas, vaitu redundancy pelaksanaan proses.

Penyusunan proses

Untuk memberi penjelasan yang lebih detil terkait dengan proses pengumpulan data dalam alur manajemen portfolio aplikasi layanan publik berbasis online di Kota Surabaya ini, tersedia Tabel 6. 2 yang berisi detil informasi yang ditentukan berdasarkan hasil sintesis kerangka dan modifikasi/ penyesuaian dengan kultur organisasi.

Tabel 6. 2 Penyusunan proses: pengumpulan data

Nama proses	Pengumpulan data Pengumpulan data
Input proses	 Layanan publik administratif di seluruh SKPD Kota Surabaya Aplikasi layanan publik berbasis online existing Daftar kebutuhan informasi pedoman penilaian
Output proses	 Daftar (inventory) layanan publik administratif Daftar (inventory) aplikasi layanan publik berbasis online existing Informasi pedoman penilaian
Referensi sintesis kerangka	 Kerangka APM oleh Simon et.al, (Proses: Data Collection) Kerangka APM oleh Erik van Ramshorst (Proses: Pembuatan inventori aplikasi (create application inventory)))
Aktor	Bappeko, SKPD terkait
Kebutuhan perangkat proses	 Prosedur dan surat perintah pengumpulan data/ survey Kuesioner/ form pendataan layanan publik Daftar kebutuhan informasi pedoman penilaian
Aktivitas	a) Inventarisasi layanan publik administratif b) Inventarisasi aplikasi layanan publik berbasis online existing c) Pemenuhan kebutuhan informasi pedoman penilaian

> Detil aktivitas

Masing-masing tahapan dalam proses pengumpulan data akan terdefinisikan secara jelas dalam Tabel 6. 3 di bawah ini.

					1		
Tabel 6	. 3 De <mark>til t</mark> ahap	an proses pen	gump <mark>ulan</mark> data	The state of the s			

Aktivitas	Referensi	Deskripsi	Kebutuhan informasi	Frekuensi pelaksanaan
A. Inventarisasi layanan publik	Peneliti	Melakukan pendataan seluruh layanan publik yang dimiliki seluruh SKPD di Kota Surabaya	 Nama layanan publik Dasar hukum SKPD penyedia layanan Jenis luaran Jenis pengguna layanan publik Jumlah pemohon 5 tahun terakhir 	2 tahun sekali
B. Inventarisasi aplikasi layanan publik berbasis online yang existing	Peneliti	Melakukan pendataan terhadap aplikasi layanan publik berbasis online yang sudah dibangun dan atau dijalankan (yang terintegrasi dengan SSW)	 Nama aplikasi Jenis aplikasi Tahun implementasi Tahun pemeliharaan Developer Jenis Database 	2 tahun sekali

Aktivitas	Referensi	Deskripsi	Kebutuhan informasi	Fr <mark>ekue</mark> nsi pelaksanaan
C. Pengumpulan informasi pedoman enilaian yang dibutuhkan	Peneliti	Melakukan pengumpulan terhadap informasi yang dibutuhkan untuk tahapan penilaian di proses selanjuntya, sehingga dapat	Informasi yang dibutuhkan pada masing-masing kriteria di tahapan penilaian makro dan mikro pada proses seleksi dan prioritisasi yang tidak terakomodasi dalam inventori layanan publik. Informasi yang dibutuhkan tersebut yaitu:	Sekali dalam implementasi manajemen portfolio aplikasi
uloutunkan		mempermudah penilaian itu sendiri.	 Kesiapan TI SKPD Standar pelayanan minimal pusat Surat permintaan aplikasi layanan publik online 	

6.2.2. Seleksi dan prioritisasi

Deskripsi proses

Dalam pelaksanaan tugas sebagai badan perencana, Bappeko secara fungsional berhak melakukan analisis untuk menentukan layanan publik mana yang dapat dibangun aplikasi berbasis online-nya. Dalam Gambar 6. 1, digambarkan bahwa Bappeko melakukan analisis utamanya ditujukan untuk mendukung prioritisasi aplikasi yang lebih seimbang dengan menggunakan faktor-faktor lokalitas yang sudah lama ada di lingkungan Bappeko. Dapat disimpulkan, bahwa tujuan dari proses ini adalah menilai aplikasi dalam beberapa kriteria yang sudah ditetapkan agar memenuhi kebutuhan secara teori maupun kultural organisasi, yang dalam hal ini diambil dari nilai-nilai lokalitas

Proses dalam mekanisme yang diusulkan ini merupakan hasil sintesis proses analysis dan decision making dalam kerangka APM yang dikembangkan oleh Daniel Simon, Kai Fisbach dan Detlef Schoder [8]. Namun, dengan alasan efisiensi proses, perubahan tujuan, dan spesifikasi tahapan di dalamnya, maka dilakukan penggabungan kedua proses tersebut. Selain itu, diharapkan dengan adanya penggabungan kedua proses, dapat menghilangkan isu lokalitas dalam hal ketidakjelasan mekanisme pengambilan keputusan, ketidakkonsistensian penggunaan atribut penilaian, dan utamanya adalah memberi kejelasan wewenang Bappeko dan Diskominfo dalam memberikan penilaian sesuai dengan pengetahuan yang mereka miliki.



Gambar 6. 13 Detil tahapan proses seleksi & prioritisasi

> Perbandingan dengan mekanisme proses kekinian

Dalam pembahasan sebelumnya diketahui bahwa salah satu isu lokalitas adalah tidak adanya alur prioritisasi yang terstruktur dan terstandar. Alur yang tidak terstruktur terindikasi dari proses-proses yang masing-masing instansi lakukan selama ini tidak dikoordinasikan dengan baik sehingga muncul redundansi proses. Selain itu, ketiadaan pedoman khusus yang mendasari pelaksanannya mengakibatkan pada pendokumentasian dan pengorganisasian output masing-masing proses menjadi tidak tersebar dengan baik.

Penggunaan kriteria penilaian yang hanya menggunakan gut feeling dan pengalaman-pengalaman sebelumnya sulit dibuktikan kebenarannya, sehingga hal ini berdampak pada hasil prioritisasi yang tidak berimbang. Jika dibandingkan dengan manajemen portfolio aplikasi kekinian, yaitu analisis dalam rangka prioritisasi yang diketahui dilakukan oleh Bappeko dan Diskominfo dengan idealism masing-masing, terdapat perubahan yang signifikan. Beberapa tahapan memerlukan perangkat penilaian, yang berisi kategori, kriteria dan bobot. Dengan demikian, proses pengambilan keputusan akan berlangsung didasarkan oleh hasil analisis yang secara transparan dan obyektif diberikan kepada masing-masing portfolio aplikasi layanan publik.

> Penyusunan proses

Tabel 6. 4 berisi detil informasi proses seleksi dan prioritisasi, yang ditentukan berdasarkan hasil sintesis kerangka dan modifikasi/ penyesuaian dengan kultur organisasi.

Nama proses	Seleksi dan prioritisasi
Input proses	 Daftar (inventory) layanan publik administratif Daftar (inventory) aplikasi layanan publik berbasis online existing Informasi pedoman penilaian
Output proses	Urutan pengembangan aplikasi layanan publik berbasis online
Referensi sintesis kerangka	 Kerangka APM oleh Simon et.al (Proses: analisis dan pengambilan keputusan (analysis dan decision making)) Kerangka seleksi portfolio proyek oleh NP Archer & Ghasemzadeh
Aktor	Bappeko, Diskominfo
Kebutuhan perangkat proses	Perangkat penilaian
Tahapan	a) Penyaringan input b) Penilaian aspek strategis c) Seleksi layanan d) Penilaian aspek teknis e) Prioritisasi pengembangan f) Rekapitulasi dan publikasi

> Detil Tahapan

Dalam proses seleksi dan prioritisasi portfolio, terhitung terdapat 6 (enam) tahapan yang harus dilaksanakan secara seri atau berurutan oleh Bappeko dan Diskominfo. Masing-masing tahapan dalam proses pengumpulan data akan terdefinisikan secara jelas dalam tabel di bawah ini.

Tabel 6. 5 Detil tahapan proses seleksi dan prioritisasi

Tahapan	Referensi	Deskripsi	Kebutuhan informasi	F <mark>reku</mark> ensi pelaksanaan
A. Penyaringan input	Kerangka seleksi portfolio proyek oleh Archer & Ghasemzadeh	Penyaringan input merupakan tahapan untuk menyaring input yang relevan untuk keperluan seleksi dan prioritisasi, yaitu layanan publik yang belum memiliki aplikasi berbasis online-nya atau bisa disebut dengan layanan publik offline.	 Daftar (inventory) layanan publik administratif Daftar (inventory) aplikasi layanan publik berbasis online existing 	Sekali dalam proses seleksi dan prioritisasi
B. Penilaian aspek strategis	Peneliti	Bappeko melakukan penilaian di level strategis, dalam beberapa atribut yang relevan dengan obyektif penilaian. Perspektif penilaian ini dilihat dari layanan publik mana yang memungkinkan untuk adanya dukungan TI (dalam bentuk yang spesifik adalah aplikasi layanan publik berbasis online) dalam waktu dekat.	Kesesuaian dengan prioritas pembangunan kota Kesiapan SKPD penyedia layanan Kategori jumlah pemohon layanan Pemenuhan terhadap peraturan pusat	Sekali dalam proses seleksi dan prioritisasi

Tabel 6. 5 Detil tahapan proses seleksi dan prioritisasi

Tahapan	Referensi	Deskripsi	Kebutuhan informasi	Frekuensi pelaksanaan
			 Responsi terhadap kompetisi e-Government Adanya permintaan SKPD Relasi terhadap publik 	
C. Seleksi layanan	Peneliti	Bappeko melakukan seleksi terhadap hasil penilaian aspek strategis untuk mencari layanan publik yang lolos di tahap penilaian tersebut (ditunjukkan dengan mengurutkan total nilai masing-masing layanan publik dari yang tertinggi ke terendah) untuk selanjutnya dinilai lagi dalam penilaian di level selanjutnya. Layanan publik yang lolos dan masuk ke dalam penilaian aspek teknis	Nilai total penilaian aspek strategis pada masing-masing layanan	Sekali dalam proses seleksi dan prioritisasi

Tabel 6. 5 Detil tahapan proses seleksi dan prioritisasi

Tahapan	Referensi	Deskripsi	Kebutuhan informasi	F <mark>reku</mark> ensi pelaksanaan
		merupakan layanan publik yang memenuhi syarat masuk kategori 1, yaitu dengan total nilai antara 2.85 – 3.8 (preferensi Pemerintah Kota Surabaya).		
D. Penilaian aspek teknis	Peneliti	Layanan publik yang dihasilkan dari penilaian aspek strategis bisa dikatakan merupakan layanan publik yang paling berpotensi untuk dikembangkan dalam sebuah aplikasi berbasis online. Diskominfo melakukan penilaian terhadap layanan publik yang lolos pada seleksi layanan, dengan melihat kriteria yang sifatnya terkait dengan manajemen proyek pengembangan aplikasi. Perspektif penilaian ini dilihat dari urutan pengembangan	 Jenis pengembangan aplikasi Kompleksitas aplikasi Potensi integrasi dengan existing system Ketersediaan fungsional SI/TI di SKPD penyedia layanan Ketersediaan teknologi yang dibutuhkan di 	Sekali dalam proses seleksi dan prioritisasi

Tabel 6. 5 Detil tahapan proses seleksi dan prioritisasi

Tahapan	Referensi	Deskripsi	Kebutuhan informasi	F <mark>reku</mark> ensi pelaksanaan
		aplikasi layanan publik yang dapat dibangun dalam waktu dekat oleh Diskominfo.	SKPD penyedia layanan • Risiko teknis • Efisiensi pengembangan	
E. Prioritisasi pengembangan	Peneliti	Diskominfo melakukan prioritisasi terhadap hasil penilaian aspek teknis untuk mencari urutan aplikasi dalam tahap pengembangan aplikasi yang dikelola oleh Diskominfo sendiri. Hasil prioritisasi kedua ini merupakan hasil final yang telah menjadi kesepakatan antara Bappeko dan Diskominfo setelah melalui metode penilaian dengan dua aspek yang berbeda.	Nilai total penilaian aspek teknis pada masing-masing layanan	Sekali dalam proses seleksi dan prioritisasi
F. Rekapitulasi <mark>dan publikas</mark> i	Model Konseptual Sel <mark>eksi P</mark> royek TI di Bank	Bappeko melakukan rekapitulasi terhadap keseluruhan hasil penilaian dan mempublikasikan hasil tersebut dalam bentuk	Hasil prioritisasi pengembangan	Sekali dalam proses seleksi dan prioritisasi

Tahapan	Referensi	Deskripsi	Kebutuhan informasi	Frekuensi pelaksanaan
	Indonesia oleh Olivia Renanda	daftar final yang akan diserahkan kepada Diskominfo untuk pelaksanaan tahap eksekusi, serta penginformasian hasil terhadap seluruh SKPD sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengambilan keputusan seleksi dan prioritisasi portfolio aplikasi layanan publik berbasis online.		
	la par	is the state of th		

6.2.3. Eksekusi dan pengawasan

Selaku SKPD teknis yang memiliki tupoksi untuk mengembangkan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang kota, **Diskominfo memiliki kewenangan khusus dalam menentukan sendiri tahapan pengembangan aplikasi.** Selama ini Diskominfo mengeksekusi pengembangan aplikasi berdasarkan hasil konsolidasi penentuan prioritas pengembangan yang dilakukan oleh Bappeko dan Diskominfo.

Proses eksekusi dan pengawasan ini merupakan hasil sintesis proses optimization pada kerangka APM milik Simon et.al. Tujuan dari proses optimization itu sendiri adalah mengeksekusi hasil pengambilan keputusan sehingga dapat menghasilkan sebuah produk atau layanan yang unik. Proses ini sangat erat kaitannya dengan PPM (Project Portfolio Management) karena perubahan dalam portfolio aplikasi membutuhkan implementasi proyek yang besar.



Gambar 6. 14 Detil tahapan proses eksekusi portfolio & pengawasan

Perbandingan dengan mekanisme proses kekinian
Proses eksekusi dan pengawasan yang sejatinya hanya
melingkupi pembangunan aplikasi lanjutan, diusulkan
untuk diperbaiki mengingat pentingnya pengawasan yang
dapat menekan risiko penyalahgunaan wewenang sehingga
menghambat proses pembangunan itu sendiri. Selain itu,
fungsi pengawasan juga dapat menghubungkan dua instansi
terkait, yaitu Bappeko dan Diskominfo untuk saling bekerja
sama dan berkonsolidasi dalam mewujudkan pembangunan
aplikasi yang berkelanjutan dan sesuai dengan prosedur yang
berlaku. Proses optimisasi yang APM maksudkan akan diisi

beberapa tahapan utama, yaitu eksekusi dan pengawasan yang masing-masing akan dilaksanakan oleh Diskominfo dan Bappeko.

> Penyusunan proses

Untuk memberi penjelasan yang lebih detil terkait dengan proses eksekusi dan pengawasan, tersedia Tabel 6. 6 yang berisi detil informasi yang ditentukan berdasarkan hasil sintesis kerangka dan modifikasi/ penyesuaian dengan kultur organisasi.

Tabel 6. 6 Eksekusi dan pengawasan

Nama proses	Eksekusi dan pengawasan	
Input proses Urutan pengembangan aplikasi layanan berbasis online		
Output proses	Aplikasi, laporan progres	
Referensi	Kerangka APM oleh Erik van Ramshorst (Proses: eksekusi dan pengawasan roadmap portfolio aplikasi (execute and monitor application portfolio roadmap))	
Aktor	Diskominfo	
Tahapan	a) Eksekusib) Pengawasan eksekusi	

6.3. Metode seleksi dan prioritisasi

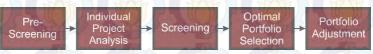
Proses seleksi dan prioritisasi yang menjadi fokus dalam pengerjaan tugas akhir ini, memiliki rangkaian tahapan yang di dalamnya membutuhkan perangkat penilaian, dengan menggunakan kriteria yang didasarkan oleh penelitian dan teori-teori pendukung yang relevan. Keseluruhan hal pendukung tersebut kemudian disebut dengan metode seleksi dan prioritisasi.



Gambar 6. 15 Fokus proses pada penelitian

Sumber referensi sintesis kerangka

Dalam rangka perumusan metode seleksi dan prioritisasi, diawali dengan menentukan kerangka acuan yang memiliki kecukupan informasi pendukung. Dalam hal ini, kerangka seleksi dan prioritisasi proyek oleh Archer dan Ghasemzadeh menjadi kerangka acuan sebelum nantinya dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dalam kerangka tersebut terdapat 5 tahapan yaitu: 1) Pre-screening, 2) Individual project analysis, 3) Screening, 4) Optimal portfolio selection, 5) Portfolio adjustment [30].



Gambar 6. 16 Tahapan dalam kerangka seleksi dan prioritisasi proyek

Identifikasi korelasi proses kerangka seleksi proyek dengan kebutuhan organisasi

Berdasarkan kerangka yang dikembangkan oleh Archer dan Ghasemzadeh mengenai *Project Portfolio Selection*, terdapat hal-hal yang menjadi eksepsi untuk diaplikasikan secara tepat untuk proses seleksi dan prioritisasi di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Eksepsi tersebut merupakan hasil dari identifikasi korelasi antara proses yang dikembangkan dengan kebutuhan organisasi atau dalam hal ini diwakili oleh Bappeko. Kebutuhan tersebut didasarkan dari kultur organisasi, pandangan dan kesesuaian tujuan proses antara tahapan dalam kerangka milik Archer dan Ghasemzadeh dengan tujuan proses yang Bappeko inginkan, yang disebutkan dalam Tabel 6. 7 di bawah ini.

Tabel 6. 7 Identifikasi korelasi proses dan kebutuhan Pemkot Surabaya Identifikasi korelasi proses dengan kebutuhan Pemkot Surabaya terkait **Proses** manajemen portfolio aplikasi Tujuan tahapan pre-screening yaitu untuk mempertimbangkan fokus strategis sebagai langkah awal untuk memfilter proyek, dinilai dapat direalisasikan Bappeko penilaian lain yang lebih executable (seperti Premenggunakan kriteria atau indikator yang screening lebih operasional). Selain itu, perlu adanya analisis yang lebih dalam sehingga input dan output dari proses ini bisa digambarkan dengan ielas. Individual project analysis memiliki kecocokan dengan pemahaman Bappeko mengenai analisis masing-masing usulan aplikasi dalam beberapa atribut yang sifatnya matematis. Dengan demikian, hal ini bisa direalisasikan namun harus dipastikan bahwa kriteria yang digunakan untuk Individual analisis telah sesuai dengan kebutuhan dan project ketersediaan informasi yang sifatnya analysis dimiliki Bappeko dan terbatas vang Diskominfo mengenai kalkulasi tersebut. Serta wewenang masing-masing aktor yang terlibat manajemen portfolio aplikasi yaitu Bappeko dan Diskominfo dalam memberikan justifikasinya perlu disinkronisasi dengan proses analisis atau penilaian yang ditetapkan. Bappeko sepaham dengan tujuan screening, vaitu untuk melakukan pemeriksaan secara singkat terhadap kriteria yang dinilai dari Screening tahapan sebelumnya serta histori analisis pada tahapan tersebut. Hal ini disebabkan karena Bappeko menginginkan adanya hasil analisis yang obyektif dan realistis sehingga pada

Proses	Identifikasi korelasi proses dengan kebutuhan Pemkot Surabaya terkait manajemen portfolio aplikasi		
THE THE	saat penilaian selanjutnya akan dimudahkan.		
Optimal portfolio selection	Pentingnya usulan aplikasi untuk dinilai menurut kriteria, yang menjadi tujuan dari tahapan ini dipahami baik oleh Bappeko. Tahapan inilah yang menjadi fokus utama keseluruhan framework. Bappeko menginginkan untuk adanya perbedaan antara korelasi antara tahapan kedua, yaitu Individual project analysis dengan tahapan ini. Selain itu, konteks prioritisasi mungkinkan muncul di salah satu tahapan tersebut.		
Portfolio adjustment	Untuk mewujudkan transparansi terhadap penilaian yang diberikan, Bappeko sepaham untuk memberikan visualisasi dan publikasi atas keseluruhan penilaian kepada pihak yang terkait yaitu SKPD. Dikhawatirkan nantinya akan ada gejolak dari SKPD yang merasa iri karena tidak dibuatkan aplikasi layanan publik online. Diharapkan dengan adanya visualisasi tersebut, dapat memberikan alasan yang logis atas keputusan final yang Bappeko ambil terkait dengan pemilihan aplikasi layanan publik online.		

Solusi hasil identifikasi korelasi

Dengan adanya identifikasi korelasi proses dalam kerangka seleksi proyek yang dikembangkan oleh Archer & Ghasemzadeh pada Tabel 6. 7, maka perlu adanya solusi yang dapat mengatasi kebutuhan organisasi, yaitu Pemerintah Kota Surabaya. Solusi tersebut menjadi pedoman dalam perumusan metode seleksi dan prioritisasi portfolio aplikasi layanan publik berbasis online untuk Pemerintah Kota Surabaya bawah ini.

Tujuan <i>pre-screening</i> yaitu untuk	Penetapan tujuan <i>pre-screening</i> yang disintesiskan ke dalam proses seleksi dan prioritisasi portfolio aplikasi harus disesuaikan dengan proses sebelum dan sesudahnya, sehingga akan ada korelasi antara
langkah awal untuk memfilter proyek, dinilai Bappeko dapat direalisasikan melalui penilaian lain yang lebih possible (seperti menggunakan kriteria atau indikator yang lebih operasional). Selain itu, perlu adanya analisis yang lebih dalam sehingga input dan output dari proses ini bisa digambarkan dengan jelas.	Proses sebelum dan sesudah dari proses ini sendiri. Proses yang berada sebelum proses ini dilakukan adalah pengumpulan data dengan output adalah inventarisasi layanan publik dan aplikasi layanan publik online existing, serta informasi pedoman penilaian. Sedangkan tahapan selanjutnya dalam kerangka seleksi dan prioritisasi adalah individual project analysis. Tahapan tersebut memerlukan input berupa layanan publik yang belum memiliki aplikasi berbasis online (bisa disebut offline) untuk keperluan penilaian sehingga akan terseleksi dan terpioritisasi layanan publik yang dapat dimigrasikan ke dalam sebuah aplikasi berbasis online. Dengan demikian, muncul adanya kebutuhan proses untuk memfilter output dari tahapan pengumpulan data

Tabel 6. 8 Solusi hasil identifikasi korelasi

No.	Id <mark>enti</mark> fikasi korelasi	Solusi
		sehingga dapat dijadikan input untuk analisis tersebut. Maka dari itu, pre-screening akan disintesiskan menjadi proses penyaringan input. Namun, secara tujuan proses kedua hal tersebut berbeda.
2	Individual project analysis memiliki kecocokan dengan pemahaman Bappeko mengenai analisis masing-masing usulan aplikasi dalam beberapa atribut yang sifatnya matematis. Dengan demikian, hal ini bisa direalisasikan namun harus dipastikan bahwa atribut yang digunakan untuk analisis telah sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan informasi yang sifatnya terbatas yang dimiliki Bappeko dan Diskominfo mengenai kalkulasi tersebut. Serta wewenang masing-masing aktor yang terlibat mekanisme manajemen portfolio aplikasi	Identifikasi korelasi ini terkait dengan identifikasi nomor 4, yaitu perbedaan antara proses analisis dengan seleksi. Selain terkait dengan tujuan tahapan, yang perlu dipisahkan adalah wewenang Bappeko dan Diskominfo untuk memberi penilaian menurut perspektif yang mereka miliki. Untuk mewujudkan kedua hal tersebut, maka pada tahapan Individual project analysis akan diubah menjadi proses penilaian yang menggunakan perspektif strategis. Tujuan pelevelan terhadap penilaian adalah untuk menghimpun perspektif dari masingmasing aktor yang terlibat sesuai dengan bidang area yang mereka miliki untuk kemudian disatukan dalam sebuah penilaian yang utuh. Diharapkan,

Tabel 6. 8 Solusi hasil identifikasi korelasi

No.	Identifikasi korelasi	Solusi	
	yaitu Bappeko dan Diskominfo dalam memberikan justifikasinya perlu disinkronisasi dengan analisis penilaian yang ditetapkan.	tidak akan terjadi tumpang tindih wewenang terhadap penilaian itu sendiri serta kegagalan seorang aktor utama untuk memberi penilaian disebabkan karena keterbatasan pengetahuan terkait dengan kriteria penilaian tersebut.	
3	Bappeko sepaham dengan tujuan screening, yaitu untuk melakukan pemeriksaan secara singkat terhadap kriteria yang dinilai dari tahapan sebelumnya serta histori analisis pada tahapan tersebut. Hal ini disebabkan karena Bappeko menginginkan adanya hasil analisis yang obyektif dan realistis sehingga pada saat penilaian selanjutnya akan dimudahkan.	dalam metode seleksi dan prioritisasi portfoli aplikasi yaitu dengan adanya seleksi yan menjadi jembatan antara tahapan sebelum da sesudah tahapan ini, optimal project selection Seleksi layanan ini akan menggunakan input da penilaian aspek strategis dan akan menghasilka output berupa layanan publik yang lolos penilaia	
4	Oleh karena diangkat isu pelevelan terhadap penilaian, maka setelah dikembangkan penilaian makro (yang berada di level strategis) harus ada	Oleh karena adanya sistem pelevelan terhadap penilaian, maka setelah dikembangkan penilaian aspek strategis harus ada kelanjutan yang relevan. Penilaian dengan aspek teknis disertakan	

No.	Identifikasi korelasi	Solusi
	kelanjutan yang relevan. Penilaian mikro disarankan untuk disertakan dalam penilaian ini, dalam rangka mengakomodasi kepentingan SKPD teknis dalam memberikan justifikasi menurut perspektif yang dimiliki, yaitu persoalan teknis. Diharapkan sebuah kondisi dimana intervensi tidak terjadi sehingga SKPD teknis tetap dapat diikutsertakan dalam penilaian namun tetap dibatasi areanya. Selaku pihak eksekutor, perspektif SKPD teknis terhadap prioritisasi aplikasi akan terakomodasi melalui kriteria-kritera yang dipilih.	dalam penilaian ini, untuk mengakomodasi kepentingan SKPD teknis dalam memberikan justifikasi persoalan teknis pengembangan aplikasi. Diharapkan sebuah kondisi dimana intervensi tidak terjadi sehingga SKPD teknis tetap dapat diikutsertakan dalam penilaian namun tetap dibatasi areanya. Selaku pihak eksekutor, perspektif SKPD teknis terhadap prioritisasi pengembangan aplikasi akan terakomodasi melalui kriteria-kritera yang dipilih.

No.	Id <mark>enti</mark> fikasi k <mark>orel</mark> asi	Solusi
	Untuk mewujudkan transparansi terhadap penilaian yang diberikan, Bappeko sepaham untuk memberikan visualisasi atas keseluruhan penilaian kepada pihak yang terkait yaitu SKPD. Dikhawatirkan nantinya akan ada gejolak dari SKPD yang merasa iri karena tidak dibuatkan aplikasi layanan publik online. Diharapkan dengan adanya visualisasi tersebut, dapat memberikan alasan yang logis atas keputusan final yang Bappeko ambil terkait dengan pemilihan aplikasi layanan publik online.	Dengan dasar teori yang kuat serta keinginan Bappeko untuk mewujudkan transparansi terhadap penilaian yang diberikan, maka tahap <i>Portfolio Adjustment</i> akan dijalankan melalui tahap rekapitulasi dan publikasi.

Dengan mempertimbangkan korelasi proses dan kebutuhan organisasi yang diajukan terhadap rangkaian tahapan dalam framework project selection yang diusulkan Archer dan Ghasemzadeh, maka usulan metode seleksi dan prioritisasi portfolio aplikasi layanan publik online di Pemerintah Kota Surabaya seperti pada Gambar 6. 17 di bawah ini.



6.3.1. Penyaringan input

Tahapan awal ini dilakukan untuk mempersiapkan input utama dalam metode seleksi dan prioritisasi portfolio, yaitu layanan publik yang belum memiliki aplikasi berbasis online atau yang kemudian disebut dengan layanan publik offline. Untuk mendukung tujuan tersebut, diberikan penjabaran tahapan yang relevan, jenis input yang harus tersedia serta persyaratan output yang harus dihasilkan.



Pengumpulan data Seleksi & prioritisasi Output: Inventori layanan publik administratif Inventori aplikasi layanan publik existing Penyaringan input Penilaian aspek strategis Penilaian aspek teknis

Gambar 6. 18 Keterhubungan proses dalam alur manajemen portfolio aplikasi dan metode seleksi & prioritisasi

Sesuai dengan Gambar 6. 18 di atas, diketahui bahwa tahapan awal dalam keseluruhan kerangka manajemen portfolio aplikasi di Pemerintah Kota Surabaya adalah pengumpulan data. Proses tersebut menghasilkan daftar (inventory) layanan publik dan aplikasi layanan publik berbasis online existing, serta informasi pedoman penilaian. Jika proses tersebut selesai dilaksanakan, maka dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu pada proses seleksi & prioritisasi. Output proses pengumpulan data yang berupa daftar (inventory) layanan publik administratif dan inventori apliaksi layanan publik existing digunakan sebagai input tahapan penyaringan input dalam proses seleksi dan prioritisasi. Dengan adanya tahapan ini, dimaksudkan agar dapat menyaring layanan publik offline dari inventori layanan publik dan aplikasi layanan publik berbasis online. Secara singkat, ringkasan dari tahapan ini ada di Tabel 6. 9 berikut.

Tabel 6. 9 Detil tahapan penyaringan input

Nama tahapan	Penyaringan input				
Input proses	 Daftar (inventory) layanan publik administratif Daftar (inventory) aplikasi layanan publik berbasis online existing 				
Output proses	Daftar (inventory) layanan publik offline				
Referensi	Peneliti				
Aktor	Bappeko / / / / /				
Aktivitas	Memetakan layanan publik yang belum didukung aplikasi berbasis online dari 2 inventori yang berbeda.				

6.3.2. Penilaian aspek strategis

Tujuan dari tahapan ini adalah menilai masing-masing layanan publik offline berdasarkan aspek strategis melalui kriteria-kriteria yang disesuaikan. Pihak yang berwenang untuk melakukan penilaian ini adalah Bappeko selaku badan perencana yang dalam tatanan organisasional Pemerintah Kota Surabaya berada di posisi strategis. Penilaian di level ini mengambil perspektif layanan publik-nya, artinya menilai layanan publik mana yang memungkinkan dan penting untuk didukung TI melalui aplikasi berbasis online. Ouput yang dihasilkan tahap penyaringan input menjadi input dari tahapan penilaian aspek strategis.

Penilaian aspek strategis memiliki kriteria dan bobot yang disesuaikan dengan tujuan penilaian. Berikut merupakan kriteria yang ditetapkan pada penilaian aspek strategis.

6.3.2.1. Kriteria penilaian aspek strategis

Poin utama dari metode seleksi dan prioritisasi adalah kriteria penilaian. Dalam metode seleksi dan prioritisasi ini, kriteria-kriteria yang ditetapkan merupakan pandangan terbaik mengenai kontribusi parameter dalam sebuah portfolio, sehingga dapat memisahkan portfolio yang prioritas dan tidak prioritas.

Kriteria yang digunakan dalam penilaian portfolio dalam pengerjaan tugas akhir ini adalah kriteria dari Jiang & Klein. Hal ini didasarkan beberapa alasan yaitu:

- Kriteria Jiang & Klein merupakan kriteria seleksi untuk proyek sistem informasi, seperti yang dituliskan dalam penelitian Douglas Wheeler, sehingga hal ini sesuai dengan big-line dari obyek pengerjaan tugas akhir, yaitu aplikasi
- Terdapat 6 kategori untuk penilaian, yaitu: 1) financial, 2) organizational, 3) competing environment, 4) technical, 5) risk dan 6) management. Oleh karena penilaian yang digunakan dalam proses seleksi dan prioritisasi menggunakan sistem pelevelan yaitu aspek teknis dan strategis, berdasarkan analisis kategori evaluasi yang dikemukakan oleh Jiang & Klein tersebut dapat dipetakan menjadi 2 level seperti apa yang tahap penilaian maksudkan. Kategori organisasional, management dan financial dapat mendukung penilaian aspek strategis, sedangkan kategori competing environment technical dan risk mendukung penilaian aspek teknis
- Masing-masing kategori evaluasi memiliki antara 4 sampai 7 kriteria. Hal ini akan mempermudah pendefinisian kriteria yang sesuai dengan kebutuhan Pemkot Surabaya terhadap manajemen portfolio aplikasi dan obyek penilaian itu sendiri, yaitu aplikasi layanan publik
- Hasil dari pemetaan kriteria dari beberapa teori, menunjukkan bahwa adanya keseragaman konsep atau garis besar kriteria yang digunakan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kategori & kriteria penilaian yang dikembangkan oleh Jiang & Klein tidak menyalahi aturan manapun dan penentuan akhirnya bersifat preferensi peneliti.

Dengan demikian, kriteria penilaian yang digunakan dalam proses seleksi dan prioritisasi didasari oleh:

• Kategorisasi menurut kriteria evaluasi proyek sistem informasi yang dikembangkan oleh Jiang & Klein

- Penyesuaian kriteria dengan lingkungan manajemen portfolio aplikasi di lingkungan pemerintahan, dengan mengeliminisasi kriteria yang tidak diperlukan serta perubahan nama agar implementatif pada saat pelaksanaannya
- Unsur lokalitas organisasi
- Batasan wewenang terhadap pemberian penilaian dari masing-masing aktor yang dilibatkan akibat penilaian dengan sistem pelevelan.

Adapun kriteria penilaian yang digunakan dalam metode seleksi dan prioritisasi khususnya pada penilaian aspek strategis seperti pada Tabel 6. 10.

Tabel 6. 10 Kriteria penilaian aspek strategis

Penilaian aspek strategis				
Kategori Dasar kriteria (Jiang & Klein) [32]		Kriteria penilaian (Peneliti)		
Organisations	Contribution to organizational goals/ objective	Kesesuaian dengan prioritas pembangunan kota		
Management	End user understanding, cooperation and commitment to project	Kesiapan SKPD penyedia layanan		
	Match with users' interest	Kategori jumlah pemohon layanan		
Competing environment	Required by regulation	Pemenuhan terhadap peraturan pusat		
	Response to competition	Responsi terhadap kompetisi e- Government		

Penilaian aspek strategis			
Kategori	Dasar kriteria (Jiang & Klein) [32]	Kriteria penilaian (Peneliti)	
	Required by customers/suppliers	Adanya permintaan SKPD penyedia layanan	
WITH THE	Public relation effect	Relasi terhadap publik	

Berikut merupakan deskripsi masing-masing kriteria penilaian aspek strategis.

Kriteria A: Kesesuaian dengan prioritas pembangunan kota

Deskripsi

Dalam lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, terdapat prioritas pembangunan yang dibuat Pembangunan Tema berdasarkan Kota Surabaya. Prioritas pembangunan tersebut kemudian dijabarkan lagi menjadi kebijakan dan program pembangunan yang diselesaikan pada tahun tersebut. Dengan adanya layanan publik online yang dihasilkan, diharapkan dapat mendukung dengan masingmasing program pembangunan kota agar dapat terwujud sesuai dengan target dan harapan. Setiap layanan publik yang dinilai akan dianalisis keselarasannya dalam prioritas pembangunan, yang masing-masing prioritas tersebut memiliki bobot tersendiri.

Kriteria B: Kesiapan SKPD penyedia layanan

Deskripsi

SKPD penyedia layanan sebagai ujung tombak dari penyelenggaraan layanan publik perlu kesiapannya mengetahui dinilai untuk seberapa besar SKPD memiliki persiapan yang matang dan kemampuan untuk menjalankan berbasis dengan layanan publik online memberdayakan sumber daya vang dimilikinya. Penilaian ini menggunakan nilai e-Readiness, yaitu nilai kesiapan pemanfataan TIK di masing-masing SKPD dengan kriteria yaitu yang disebut dengan P3I3 model. Kriteria tersebut yaitu:

- a. IT/e-governance preparadness
- b. Policy
- c. People
- d. IT infrastructure
- e. Process
- f. IT benefits

Kriteria C: Kategori jumlah pemohon layanan

Deskripsi

Tujuan dari kriteria ini adalah mengetahui sejauh mana tingkat urgency dari layanan publik dilihat dari histori penggunaan atau permohonan oleh masyarakat. Dengan menggunakan logika, layanan publik yang pemohon terbanyak memiliki iumlah menunjukkan bahwa layanan publik tersebut memiliki nilai lebih di mata masyarakat (sering digunakan dan penting), kriteria ini dinilai penting untuk menunjukkan urgency tersebut.

Kriteria D: Pemenuhan terhadap peraturan pusat

Deskripsi

Kriteria dalam perangkat penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui layanan publik yang dituntut untuk memiliki aplikasi berbasis online untuk menghasilkan pencapaian-pencapaian tertentu, sesuai dengan amanat atau peraturan pusat. Peraturan pusat dapat direlevansikan ke dalam dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Kriteria E: Responsi terhadap kompetisi e-Government

Deskripsi

Kriteria dalam perangkat ini bertujuan untuk menggali adanya peluang yang sama terhadap kesuksesan penyediaan layanan berbasis online di *e-Government* pemerintah daerah lain (dalam bentuk portal pelayanan publik online melalui website). Dalam dunia e-Government, tentu terdapat lingkungan yang dimana masing-masing kompetitif Government pemerintah daerah bersaing untuk memberi pelayanan publik online yang banyak diminati, memiliki manfaat atau dampak yang besar terhadap masyarakat serta mengefisiensi waktu dan biaya. Dengan mengidentifikasi layanan publik apa saja yang sudah online di e-Government pemerintah daerah lain, Pemerintah Kota Surabaya hendaknya menjadikan hal tersebut sebagai masukan melalui gambaran bahwa layanan publik yang dimilikinya (yang serupa dengan layanan publik yang sudah online di e-Government lain) patut di online-kan juga.

Kriteria F: Adanya permintaan SKPD penyedia layanan

Deskripsi

Kriteria ini diadaptasi dari kriteria yang dikembangkan oleh Jiang & Klein yaitu required by customers/suppliers. Dalam hal ini, customer diibaratkan sebagai SKPD pemilik layanan. Permintaan SKPD terhadap sebuah aplikasi layanan publik berbasis online menunjukkan adanya willingness atau kemauan dari SKPD tersebut untuk

menjalankannya, serta SKPD merasa hal tersebut dibutuhkan oleh kesiapan untuk mengelola aplikasi layanan tersebut dan atau pertimbangan tertentu.

Kriteria G: Relasi terhadap publik

Deskripsi

Relasi terhadap publik dapat diartikan dengan penerimaan layanan publik oleh pengguna layanan. Relasi ini dapat dikaitkan berdasarkan jenis luaran yang dihasilkan atau orientasi pengguna yang dilayani, seperti yang sudah disebutkan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 5 tahun 2013 bahwa terdapat 3 kelompok yang membedakan aplikasi e-Government, yaitu: Government to Citizen (G2C), Government to Business (G2B) atau Government to Government (G2G). Pada perangkat penilaian yang dibuat dalam penelitian ini, layanan publik yang menjadi input dapat dibedakan berdasarkan: jenis luaran (perijinan dan non perijinan) dan orientasi pengguna lavanan (G2C dan G2B). G2G tidak dimasukkan sebagai salah satu kelompok orientasi pengguna karena aplikasi G2G berfungsi melayani kebutuhan internal lembaga kepemerintahan.

6.3.2.2. Bobot kriteria penilaian aspek strategis

Bobot kriteria penilaian ditentukan dengan cara memberi kesempatan Pemerintah Kota Surabaya untuk menjustifikasi sendiri bobot masing-masing kriteria menurut pandangannya.

Menurut Marjan, dalam mengaplikasikan sebuah model pengambilan keputusan, seorang pengambil keputusan harus dapat memberikan preferensinya, yaitu terkait dengan pemilihan kriteria yang memiliki nilai trade-off yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan prioritisasi atau pembobotan

antara kriteria yang ditentukan [38]. Hal tersebut yang mendasari mengapa bobot kriteria dalam metode seleksi dan prioriritasi ditentukan oleh Pemerintah Kota Surabaya sendiri, yang diwakili oleh Bappeko dan Diskominfo.

Dalam wawancara yang dilakukan untuk menggali bobot kriteria pada aspek strategis, Bappeko harus memberi urutan prioritas masing-masing kriteria. Dari hasil wawancara diketahui urutan prioritas masing-masing kriteria menurut pandangan Bappeko yang kemudian dikuantifikasian menjadi nilai bobot yang sesuai dengan besar-kecilnya prioritas yang diberikan. Tabel berikut berisi hasil pengurutan dan pengkuantifikasian kriteria tersebut sehingga menjadi bobot akhir.

Tabel 6. 11 Pengkuantifikasian bobot kriteria penilaian aspek strategis

Kriteria	Prioritas (x)	Bobot (7-x)	Kuantifikasi bobot (bobot/total bobot)	Bobot akhir
Relasi terhadap publik	1	6	6/27	22%
Kesesuaian dengan prioritas pembangunan kota	1	6	6/27	22%
Kesiapan SKPD penyedia layanan	2	5	5/27	19%
Kategori jumlah pemohon layanan	3	4	4/27	15%
Pemenuhan terhadap peraturan pusat	6	1	1/27	4%
Responsi terhadap kompetisi	4	3	3/27	11%
Permintaan SKPD penyedia layanan	5	2	2/27	7%
			TOTAL	100%

Berikut merupakan tabel yang berisi bobot kriteria penilaian aspek strategis yang sudah terverifikasi oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui Bappeko Surabaya.

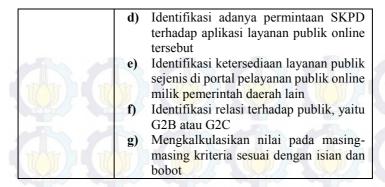
Tabel 6. 12 Bobot kriteria penilaian aspek strategis

Kriteri <mark>a pen</mark> ilaian	Bobot kriteria	
Relasi terhadap publik	22%	
Kesesuaian dengan prioritas pembangunan kota	22%	
Kesiapan SKPD penyedia layanan	19%	
Kategori jumlah pemohon layanan	15%	
Pemenuhan terhadap peraturan pusat	4%	
Responsi terhadap kompetisi	11%	
Permintaan SKPD penyedia layanan	7%	

Secara singkat, ringkasan dari tahapan ini ada di Tabel 6. 13.

Tabel 6. 13 Detil tahap<mark>an pe</mark>nilaian a<mark>spek s</mark>trategis

Nama tahapan	Penilaian aspek strategis		
Input proses	Daftar (inventory) layanan publik offline, informasi pedoman penilaian		
Output proses	 Nilai pada masing-masing kriteria sesuai dengan isian dan pedoman penilaian Nilai total penilaian aspek strategis pada masing-masing layanan 		
Referensi	Peneliti		
Aktor	Bappeko		
	a) Identifikasi daya dukung layanan publik terhadap salah satu prioritas pembangunan kota		
Aktivitas	b) Kategorisasi data jumlah pemohon yang tersedia sesuai dengan pedoman perangkat penilaian		
	c) Identifikasi daya dukung layanan dalam memenuhi peraturan tertentu		



6.3.3. Seleksi layanan

Tujuan dari tahapan ini adalah menyeleksi layanan publik dengan mempertimbangkan nilai total penilaian aspek strategis terhadap batas ambang yang ditentukan, sehingga dihasilkan daftar layanan publik offline yang akan dibangunkan aplikasi berbasis online-nya.

Seleksi layanan dapat dilaksanakan dengan mengurutkan layanan publik dengan nilai total penilaian aspek strategis dari yang tertinggi ke terendah kemudian mengambil layanan publik dengan nilai total diantara 2.85 sampai 3.8. Batas nilai (threshold) sebesar 2.85 – 3.8 sudah terverifikasi Bappeko yang mewakili Pemerintah Kota Surabaya. Layanan publik yang lolo dalam batas nilai tersebut berhak dinilai dalam penilaian aspek teknis. Secara singkat, ringkasan dari tahapan ini ada di Tabel 6. 14.

Tabel 6. 14 Detil tahapan seleksi layanan

Nama tahapan	Seleksi layanan		
Input proses	Nilai total penilaian aspek strategis pada masing- masing layanan		
Output proses	Layanan publik yang memiliki total nilai diantara 2.85 – 3.8 yang disebut dengan seleksi layanan		
Referensi	Peneliti		
Aktor	Bappeko		

	a)	Pengurutan	nilai	total	penilaian	aspek
Tahapan	b)	strategis Seleksi layar – 3.8	nan pub	lik den	gan batas ni	lai 2.85

6.3.4. Penilaian aspek teknis

Tujuan dari tahapan ini adalah untuk menilai layanan publik yang lolos pada tahapan seleksi layanan. Penilaian di level ini mengambil perspektif teknis pengembangan aplikasi layanan publik. Penilaian aspek teknis bertujuan untuk memprioritisasikan aplikasi layanan publik berbasis online yang secara berurutan dapat dibangun dalam waktu dekat oleh Diskominfo. Hal ini disebabkan karena beberapa SKPD memiliki kemampuan untuk membangun sendiri aplikasi layanan publik.

6.3.4.1. Kriteria penilaian aspek teknis

Sama seperti penentuan kriteria penilaian aspek teknis yang mengacu pada kriteria Jiang & Klein, penilaian kriteria aspek teknis mengambil kriteria *technical*, *risk dan benefit*. Adapun kriteria penilaian yang digunakan dalam proses seleksi dan prioritisasi seperti pada Tabel 6. 15.

Tabel 6. 15 Kriteria penilaian aspek teknis

Penilaian aspek teknis				
Kategori	Dasar kriteria (Jiang & Klein)	K <mark>riter</mark> ia penil <mark>aian</mark> (Peneliti)		
	Isolated, simple and modular project	Jenis pengembangan aplikasi		
Taskaisal	High visibility of project	Kompleksitas aplikasi		
Technical	Basic subsystem to system	Potensi integrasi dengan existing system		
	Availability of skilled IS personnel	Ketersediaan fungsional SI/TI di		

Kriteria H:

Penilaian aspek teknis			
Kategori	Dasar kriteria (Jiang & Klein)	Kriteria penilaian (Peneliti)	
AP TO THE	TO THE T	SKPD penyedia layanan	
	Availability of needed technology	Ketersediaan infrastruktur SI/TI yang dibutuhkan di SKPD penyedia layanan	
Risk	Technical risk	Risiko teknis	
Financial/ benefit	Benefit	Efisiensi pengembangan	

Penjelasan berikut merupakan deskripsi masing-masing kriteria penilaian aspek teknis.

Jenis pengembangan aplikasi

Deskripsi Kriteria ini bertujuan untuk mengetahui jenis atau tipe pengembangan perangkat lunak (atau aplikasi). Menurut database CSBSG yang dikutip dalam paper yang berjudul "Phase Distribution of Software Development Effort" [39], terdapat 3 tipe pengembangan perangkat lunak, yaitu: new development (Baru), re-development (Re-Dev) dan enhancement (Enhance). Bobot jenis proyek enhancement akan lebih besar daripada jenis lainnya mengingat jenis proyek sebanding dengan effort yang diberikan, sehingga proyek enhancement berarti memerlukan effort yang lebih sedikit dibanding proyek pembangunan baru dari

awal. Begitu dengan *re-development* akan dinilai lebih tinggi daripada jenis *new development* atau pengembangan awal.

Kriteria I:

Kompleksitas aplikasi

Deskripsi

Kriteria ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kompleksitas aplikasi dilihat dari fungsi-fungsi yang diperlukan. Besarnya fungsional aplikasi ditunjukkan dari rumitnya flow atau alur proses aplikasi dan banyaknya form yang diperlukan dalam sebuah layanan.

Dalam paper, dijelaskan bahwa terdapat 2 definisi tentang kompleksitas perancangan aplikasi, yaitu: structural design complexity dan functional design complexity [40]. Dalam kriteria ini, dibatasi parameter penilaian hanya melingkup hal yang terdapat dalam functional design complexity saja, dengan alasan untuk menyesuaikan dengan tujuan kriteria yaitu mengetahui tingkat kompleksitas *functional* requirements dengan parameter kelompok 1 yang disebut dengan Low, kelompok 2 atau Medium dan kelompok teratas yaitu High. Kompleksitas tersebut dapat digambarkan dari besar biaya pengembangan, fungsionalitas yang dibutuhkan, alur atau *flow* aplikasi. Penentuan kompleksitas akan dilakukan secara independen oleh Diskominfo.

Kriteria J: Deskripsi

Potensi integrasi dengan existing system

Kriteria ini merupakan hasil terjemahan dari kriteria yang digunakan Jiang & Klein pada kategori *Technical*, yaitu *basic subsystem to system* (subsistem dasar terhadap sistem). Dalam hal ini, direlevansikan dengan kemampuan sebuah aplikasi untuk dapat diintegrasikan dengan sistem atau aplikasi yang lebih besar yang sudah ada, oleh karena adanya kesamaan tujuan,

penggunaan data bersama, keterkaitan layanan. Diharapkan dengan adanya pengintegrasian tersebut sehingga dapat mengurangi pengeluaran biaya atau hal teknis tertentu.

Kriteria K: Ketersediaan fungsional SI/TI di SKPD penyedia layanan

Deskripsi

Kriteria ini bertujuan untuk mengetahui jumlah fungsional TI yang ada di SKPD penyedia layanan, dalam hal ini adalah SKPD pemilik layanan itu sendiri. Diskominfo menjustifikasi bahwa layanan publik yang dimiliki SKPD dengan jumlah fungsional SI/TI yang berpengalaman functional) (skilled IS/IT seperti programmer dengan jumlah sedikit atau bahkan tidak ada, memiliki peluang untuk dibangun oleh Diskominfo. Sebaliknya, layanan publik yang dimiliki SKPD dengan jumlah fungsional TI yang banyak memiliki peluang untuk membangun aplikasinya sendiri (namun hal ini butuh perlakuan lebih lanjut, karena tidak semua fungsional TI memiliki kemampuan pemrograman yang baik).

Kriteria L: Ketersediaan infrastruktur SI/TI yang dibutuhkan di SKPD penyedia layanan

Deskripsi

Kriteria ini penting untuk dimasukkan dalam kriteria penilaian karena dengan SKPD yang memiliki teknologi SI/TI yang baik, diharapkan dapat mempercepat adaptasi perubahan proses, dari yang semula offline menjadi online sehingga tidak diperlukan lagi peningkatan SI/TI dalam wujud pembelian atau pengadaan yang jelas

akan membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit.

Kriteria M:

Pencegahan risiko teknis

Deskripsi

Tujuan kriteria ini adalah untuk menilai seberapa besar risiko kegagalan terhadap pengembangan dapat ditekan oleh karena ketidakjelasan proses perencanaan. Indikator kriteria ini adalah kejelasan metodologi pengerjaan, rencana kerja serta penganggaran. Hal tersebut seharusnya sudah dijabarkan terlebih dahulu sebelum nantinya dieksekusi oleh SKPD penyedia lavanan maupun Diskominfo melalui mekanisme dan koordinasi tertentu. Dengan adanya kejelasan beberapa dokumen yan dibutuhkan, dapat menggambar tinggi rendahnya strategi atau hal-hal yang dapat mengurangi risiko teknis untuk terjadi selama proses pengembangan perangkat lunak

Kriteria N:

Efisiensi pengembangan

Deskripsi

Tujuan dari kriteria ini adalah untuk mengetahui efisiensi dari proses pengembangan itu sendiri. Efisiensi tersebut meliputi: biaya, SDM dan waktu. Efisiensi dapat ditunjukkan dari analisis beberapa kriteria yang diisi sebelumnya, yang diasumsikan organisasi relevan untuk memvisualisasikan besarnya efisiensi yang dihasilkan.

6.3.4.2. Bobot kriteria penilaian aspek teknis

Bobot kriteria penilaian ditentukan dengan cara memberi kesempatan Pemerintah Kota Surabaya untuk menjustifikasi sendiri bobot masing-masing kriteria menurut pandangannya.

Dalam wawancara yang dilakukan untuk menggali bobot kriteria, Pemerintah Kota Surabaya yang dalam hal ini diwakili oleh Diskominfo Kota Surabaya harus memberi urutan prioritas masing-masing kriteria. Dari hasil wawancara diketahui bahwa prioritas masing-masing kriteria penilaian aspek teknis adalah sebagai berikut.

Tabel 6. 16 Pengkuantifikasian bobot kriteria penilaian aspek teknis

Kriteria	Prioritas (x)	Bobot (4-x)	Kuantifikasi bobot (bobot/total bobot)	Bobot akhir
Jenis Pengembangan aplikasi	1	3	3/15	20%
Kompleksitas aplikasi	1	3	3/15	20%
Potensi integrasi	1	3	3/15	20%
Ketersediaan fungsional SI/TI di SKPD penyedia layanan	2	2	2/15	13%
Ketersediaan infrastruktur SI/TI yang dibutuhkan di SKPD penyedia layanan	2	2	2/15	13%
Pencegahan risiko teknis	3	17	1/15	7%
Efisiensi pengembangan	3		1/15	7%
	10	100	TOTAL	100%

Berikut merupakan tabel yang berisi bobot kriteria penilaian aspek teknis yang sudah terverifikasi oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui Diskominfo Kota Surabaya.

Tabel 6, 17 Bobot kriteria penilaian aspek teknis

Kriteria penilaian	Bobot kriteria
Jenis Pengembangan aplikasi	20%
Kompleksitas aplikasi	20%

Kriteria penilaian	Bobot kriteria
Potensi integrasi	20%
Ketersediaan fungsional SI/TI di SKPD penyedia layanan	13%
Ketersediaan infrastruktur SI/TI yang dibutuhkan di SKPD penyedia layanan	13%
Pencegahan risiko teknis	7%
Efisiensi pengembangan	7%

Secara singkat, ringkasan dari tahapan penilaian aspek teknis ada di Tabel 6. 18.

Tabel 6. 18 Detil tahapan penilaian aspek teknis

Nama tahapan	Penil <mark>aian</mark> aspek teknis			
Input proses	Hasil seleksi layanan			
Output proses	 Nilai pada masing-masing kriteria sesuai dengan isian dan pedoman penilaian Nilai total masing-masing layanan 			
Referensi	Peneliti			
Aktor	Diskominfo			
Tahapan	 a) Identifikasi jenis pengembangan aplikasi b) Identifikasi kompleksitas aplikasi c) Identifikasi potensi integrase dan keterkaitan dengan layanan lain d) Identifikasi jumlah fungsional SI/TI yang memiliki kemampuan programming e) Identifikasi ketersediaan teknologi (server, router, switcher) di SKPD penyedia layanan f) Identifikasi ketersediaan dokumen penunjang pencegahan risiko teknis g) Identifikasi efisiensi Pengembangan h) Mengkalkulasikan nilai pada masing-masing kriteria sesuai dengan isian dan bobot 			

6.3.5. Prioritisasi pengembangan

Tujuan dari tahapan ini adalah menghasilkan prioritas portfolio aplikasi layanan publik berbasis online dengan melihat nilai total penilaian aspek teknis. Hal ini dapat dilaksanakan dengan mengurutkan layanan publik dengan nilai total penilaian aspek teknis dari yang tertinggi ke terendah. Portfolio aplikasi yang diurutkan dari 1 sampai akhir tersebut merupakan portfolio aplikasi sudah menunjukkan keputusan final sebagai prioritas pengembangan aplikasi layanan publik di tahap selanjutnya.

Keputusan yang dihasilkan dalam prioritisasi pengembangan ini merupakan keputusan akhir yang menjadi luaran utama yang diharapkan dalam metode ini. Urutan 1 sampai akhir dari daftar yang dihasilkan menjadi rekomendasi yang diperuntukkan bagi Diskominfo untuk membangun aplikasi berbasis online. Secara singkat, ringkasan dari tahapan ini ada di Tabel 6. 19.

Tabel 6. 19 Detil tahapan prioritisasi pengembangan

Nama tahapan	Prioritisasi pengembangan			
Input proses	 Nilai pada masing-masing kriteria sesuai dengan isian dan pedoman penilaian Nilai total masing-masing layanan 			
Output proses	Urutan pengembangan aplikasi layanan publil berbasis online yang disebut dengan hasi prioritisasi pengembangan			
Referensi	Peneliti			
Aktor	Diskominfo			
Tahapan	Pengurutan skor			

6.3.6. Rekapitulasi dan publikasi

Tujuan tahapan ini adalah untuk membuat rekapan terhadap seluruh penilaian yang sudah dilaksanakan oleh Bappeko dan Diskominfo dan mempublikasikan hasil prioritisasi aspek teknis kepada SKPD sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penilaian yang telah dilakukan. Dengan demikian, transparansi penilaian akan terwujud untuk menghadapi potensi intervensi dan ketidaksetujuan dari masing-masing SKPD atas pemilihan portfolio aplikasi layanan publik yang akan direalisasikan di proses selanjutnya. Pihak yang berwenang dalam tahapan ini adalah Bappeko selaku

badan yang punya otoritas untuk mengambil keputusan terkait dengan program pembangunan kota di Pemerintah Kota Surabaya. Secara singkat, ringkasan dari tahapan ini ada pada Tabel 6. 20 berikut.

Tabel 6, 20 Detil tahap<mark>an re</mark>kapitulas<mark>i dan</mark> publikasi

Nama tahapan	Rekapitulasi dan publikasi		
Input proses	Hasil prioritisasi pengembangan		
Output proses	 Rekapan keseluruhan penilaian Urutan pengembangan aplikasi layanan publik berbasis online 		
Referensi	Peneliti		
Aktor	Bappeko		
Tahapan	 a) Membuat rekapan penilaian aspek strategis dan aspek teknis b) Membuat surat mengenai instruksi Pengembangan aplikasi layanan publik berbasis online c) Mendistribusikan rekapan keseluruhan penilaian kepada SKPD d) Menyerahkan surat mengenai instruksi Pengembangan aplikasi layanan publik berbasis online kepada Diskominfo 		

Perubahan tahapan dalam metode seleksi dan prioritisasi yang mengacu pada kerangka seleksi portfolio proyek oleh Archer & Ghasemzadeh, baik secara urutan maupun teknik di dalamnya, didasarkan atas pedoman dalam proposisi-prosisi dalam kerangka tersebut. Melalui proposisi-proposisi yang diberikan, maka kerangka seleksi yang asli dikembangkan oleh Archer & Ghasemzadeh dapat dimodifikasi agar dapat memenuhi kondisi dan kebutuhan Pemkot terkait dengan manajemen portfolio aplikasi. Pada Tabel 6. 21 disajikan proposisi yang diturunkan dari kerangka seleksi dan prioritisasi proyek oleh Archer & Ghasemzadeh dengan bentuk pemenuhannya melalui metode seleksi dan prioritisasi yang dihasilkan penelitian ini.

Tabel 6. 21 Pemenuhan proposisi kerangka seleksi & prioritisasi

No	Proposisi	Pemenuhan		
	Keputusan strategis yang terkait dengan portfolio dan pertimbangan biaya keseluruhan harus dibuat dalam sebuah konteks yang luas, yang menggunakan faktor bisnis internal dan eksternal, sebelum portfolio diseleksi.	Setiap metodologi yang digunakan organisasi memiliki keunikannya masing-masing karena membawa kultur dan pandangan organisasi mengenai kompetensi portfolio untuk dapat terpilih. Termasuk usulan proses seleksi dan prioritisasi ini yang memiliki tahapan-tahapan penting di dalamnya yang bersifat unik dan khas untuk lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, khususnya terkait dengan pengembangan aplikasi layanan publik berbasis online. Serta dalam usulan ini melibatkan konteks bisnis dari dua sisi yang diwakilkan melalui perspektif strategis (yaitu Bappeko) dan teknis (yaitu Diskominfo).		
2	Sebuah kerangka kerja seleksi proyek harus dapat fleksibel sehingga memudahkan stakeholder agar dapat memilih teknik atau metodologi tertentu yang mereka kuasai dan anggap relevan, dalam rangka analisis data dan pembuatan keputusan proyek yang akan direalisasikan.	Kerangka seleksi portfolio proyek tidak menentukan secara strict metodologi dan teknik yang digunakan untuk penggunanya. Dengan demikian, pengubahan tahapan dan pemodifikasian teknik yang mendukung tujuan tahapan merupakan hal yang diperbolehkan selama hal tersebut didasarkan oleh studi analisis tertentu serta berorientasi pada kemudahan pengguna akhir.		

Tabel 6. 21 Pemenuhan proposisi kerangka seleksi & prioritisasi

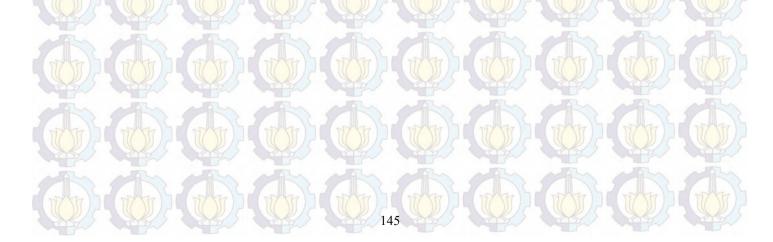
No	Proposisi	Pemenuhan Pengorganisasian tahapan yang secara runtut dituntut dalam metodologi atau mekanisme ditekankan melalui proposisi tersebut. Dalam usulan proses seleksi dan prioritisasi, bisa dikatakan sudah memenuhi proposisi tersebut dengan adanya tahapan yang urut, baik secara urutan maupun penggunaan input output nya. Penyusunan tahapan yang urut tersebut akan berujung pada pengambilan keputusan terkait dengan prioritisasi aplikasi layanan publik online seperti yang diinginkan organisasi.		
3	Untuk menyederhanakan proses seleksi portfolio, perlu adanya rangkaian tahapan yang terorganisasi, yang dapat memudahkan para pengambil keputusan untuk berpikir dan bergerak secara logis dalam mempertimbangkan proyek yang dapat direalisasikan berdasarkan model secara teoretis.			
4	Pengguna tidak boleh mengalami overload terhadap data-data yang tidak dibutuhkan, namun harus tetap memiliki kemudahan untuk mengakses data ketika diperlukan.	Dalam proses seleksi dan prioritisasi portfolio, dalam setiap tahapan akan memiliki kebutuhan informasi masingmasing, yang harus dipenuhi oleh pihak yang terkait. Sesuai dengan hasil verifikasi, dinyatakan bahwa masingmasing pihak yang terkait dapat mengakomodasi kebutuhan informasi.		
5	Perhitungan umum harus dipilih sehingga dapat menghitung setiap proyek melalui pertimbangan tertentu secara terpisah. Hal ini dapat mewujudkan adanya perbandingan yang adil dari proyek selama proses seleksi tersebut.	Penggunaan penilaian dengan pelevelan diperbolehkan dengan adanya proposisi tersebut. Penilaian aspek strategis dan teknis yang memiliki tujuan masing-masing disajikan secara terpisah dan memiliki kriteria tersendiri.		

Tabel 6. 21 Pemenuhan proposisi kerangka seleksi & prioritisasi

No	Proposisi	Pemenuhan
6	Proyek-proyek tertentu yang telah mencapai milestone utama harus di evaluasi ulang di waktu yang sama.	
7	Screening harus digunakan berdasarkan kriteria yang dispesifikasikan, dengan tujuan untuk menghilangkan proyek yang sudah berjalan dari daftar pertimbangan untuk pelaksanaan seleksi portfolio.	Terdapat tahapan penyaringan input untuk menyaring input penilaian, yaitu hanya layanan publik yang masih offline saja yang akan menjadi obyek penilaian.
8	Interaksi proyek terhadap dependensi atau kompetisi sumb <mark>er d</mark> aya haru <mark>s dipertimbangan</mark> dal <mark>am se</mark> leksi portfolio.	Dalam kriteria yang digunakan di penilaian aspek strategis dan teknis, terdapat kriteria yang menyangkut tentang interaksi dan dependensi antar satu layanan dengan layanan lain, serta kompetisi sumber daya menjadi satu kriteria yang nantinya akan dilengkapi dengan atribut penilaian yang relevan.
9	Seleksi portfolio harus mempertimbangkan ketergantungan terhadap waktu yang secara tidak langsung berdampak pada penggunaan sumber daya proyek.	

Tabel 6. 21 Pemenuhan proposisi kerangka seleksi & prioritisasi

No	Proposisi	Pemenuhan
10	Pengambil keputusan harus disediakan mekanisme yang interaktif, yang ditujukan untuk controlling dan overriding seleksi portfolio yang dihasilkan dari berbagai model, serta mereka harus menerima feedback sebagai konsekuensi dari perubahan tersebut.	
11	Seleksi portfolio harus dapat diadaptasi oleh lingkungan kelompok pengambil keputusan.	Usulan proses seleksi dan prioritisasi sudah divalidasi dan verifikasi oleh pengguna selaku pengambil keputusan.



Dengan adanya kesesuaian antara proposisi dengan usulan proses seleksi dan prioritisasi portfolio tersebut, menunjukkan bahwa secara teori pengubahan atau penyesuaian tahapan di dalamnya adalah hal yang dibenarkan dan secara keseluruhan tahapan ini memenuhi proposisi yang ditentukan oleh kerangka seleksi portfolio yang asli, yang dikembangkan oleh Archer & Ghasemzadeh.

6.4. Perangkat penilaian

Perangkat penilaian yang menjadi *deliverable* utama dalam penilaian ini berisi kriteria penilaian dan bobot kriteria yang sudah ditentukan dan terverifikasi oleh Pemerintah Kota Surabaya, yang dalam hal ini diwakili oleh Bappeko Surabaya dan Diskominfo Kota Surabaya.

Sesuai dengan kebutuhan organisasi yang tersaji pada Tabel 6. 7, bahwa Pemerintah Kota Surabaya menginginkan adanya vang executable atau dapat dieksekusi/ penilaian dioperasionalisasikan. Hal ini harus diupayakan agar dapat menghindari adanya misunderstanding dan mengurangi adanya subvektifitas penilaian pada saat penilaian. Kebutuhan Pemkot terkait manajemen portfolio aplikasi menginginkan untuk adanya cara penilaian harus terjustifikasi dengan baik berdasarkan data dan informasi yang dimiliki Pemerintah Kota Surabaya, dalam hal ini adalah Bappeko dan Diskominfo.

Kedua kebutuhan Pemkot Surabaya terkait manajemen portfolio aplikasi tersebut dapat diupayakan melalui sebuah perangkat penilaian yang executable atau dapat di operasionalisasikan dan berpedoman, sehingga penilai dapat dengan mudah memberi nilai sesuai dengan fakta dan informasi yang valid yang disediakan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Berikut merupakan perangkat penilaian yang diberikan untuk mendukung metode seleksi dan prioritisasi portfolio aplikasi layanan publik berbasis online di Pemerintah Kota Surabaya,

yang dilengkapi dengan hasil verifikasi oleh Pemerintah Kota Surabaya.

6.4.1. Penyusunan perangkat penilaian aspek

Perangkat penilaian aspek strategis berisi kriteria dan bobot yang sudah ditentukan dan terverifikasi oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui Bappeko. Namun untuk mengurangi tingkat subyektifitas penilaian dan menyamakan persepsi penilai terhadap kriteria yang disajikan, perangkat penilaian akan dilengkapi dengan pilihan jawaban yang relevan dengan deskripsi kriteria seperti yang sudah dijelaskan. Selain itu, disediakan pedoman penilaian yang didapat pada saat proses pengumpulan data. Pedoman penilaian tersebut dapat berupa dokumen atau indikator yang relevan dengan rekomendasi pilihan jawaban.



Tabel 6. 22 Detil penyusunan perangkat penilaian aspek strategis

	PENILAIAN ASPEK STRATEGIS				
Kriteria	Deskripsi	Rekomendasi pilihan jawaban	Pedoman penilaian	Status verifikasi organisasi	
A. Kesesuaian dengan prioritas pembangunan kota	Untuk memberi penilaian terhadap kriteria kesesuaian dengan prioritas pembangunan kota, disediakan pilihan dari angka 1 sampai dengan 10, yang menunjukkan urutan prioritas pembangunan kota Surabaya.	1 sampai dengan	 Urutan prioritas pembangunan kota Surabaya didapat dari RPJMD Kota Surabaya Indikator prioritas program pembangunan 	Terverifikasi	
B. Kesiapan SKPD penyedia layanan	Untuk memberi penilaian terhadap kriteria kesiapan TI SKPD penyedia layanan, diperlukan data mengenai e-Readiness SKPD penyedia layanan, yang kemudian terkategorisasi berdasarkan pandangan organisasi.	(1) Kategori 1 (2) Kategori 2 (3) Kategori 3	Kategori kesiapan TI SKPD (e-Readiness) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya.	Terverifikasi	

Tabel 6. 22 Detil penyusunan perangkat penilaian aspek strategis

	PENILAIAN ASPEK STRATEGIS					
Kriteria	Deskripsi	Rekomendasi pilihan jawaban	Pedoman penilaian	Status verifikasi organisasi		
C. Kategori jumlah pemohon layanan	Untuk memberi penilaian terhadap kriteria kategori jumlah pemohon layanan, diperlukan kategorisasi terhadap data jumlah pemohon layanan yang telah diakuisisi oleh organisasi.	(1) Low (2) Medium (3) High Penentuan rentang masing- masing kategori dapat dilakukan oleh organisasi (yaitu Pemkot Surabaya).	 Jumlah pemohon layanan publik Kategori jumlah pemohon layanan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kota Surabaya 	Terverifikasi		
D. Pemenuhan terhadap peraturan pusat	Untuk dapat memberi penilaian terhadap kriteria pemenuhan terhadap peraturan pusat, diperlukan analisis mengenai daya dukung sebuah layanan publik untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang	(0)untuk jawaban Tidak (1)untuk jawaban Ya	Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Terverifikasi		

Tabel 6. 22 Detil penyusunan perangkat penilaian aspek strategis

OK TOK	PENILAIAN ASPEK STRATEGIS					
Kriteria	Deskripsi	Rekomendasi pilihan jawaban	Pedoman penilaian	Status verifikasi organisasi		
	sudah ditentukan oleh pemerintah pusat.					
E. Responsi terhadap kompetisi e- Government	Untuk dapat memberi penilaian terhadap kriteria responsi terhadap kompetisi e-Government, diperlukan adanya benchmark terhadap beberapa portal pelayanan publik online beberapa pemerintah daerah di Indonesia.	(0)untuk jawaban Tidak (1)untuk jawaban Ya	Portal pelayanan publik berbasis online pemerintah daerah (kabupaten/kota) di Indonesia.	Terverifikasi		
G. Relasi terhadap publik	Untuk dapat memberi penilaian terhadap kriteria ini, diperlukan data mengenai karakteristik sebuah layanan publik berdasarkan: luaran yang dihasilkan dan orientasi pengguna.	Berdasarkan luaran yang dihasilkan: (1) Perijinan (2) Non-perijinan Berdasarkan orientasi pengguna: (1) G2C	Inventori layanan publik administratif	Pemerintah Kota Surabaya memandang kriteria relasi terhadap publik dapat direfleksikan oleh kelompok orientasi pengguna, yaitu G2C dan G2B.		

Tabel 6. 22 Detil penyusunan perangkat penilaian aspek strategis

	PENILA	IAN ASPEK STRATE	GIS	
Kriteria	Deskripsi	Rekomendasi pilihan jawaban	Pedoman penilaian	Status verifikasi organisasi
DIC DUC D		(2) G2B	Sels Sel	S SEL SE

Gambar berikut merupakan tampilan dari perangkat penilaian aspek strategis.

NAMA LAYANAN	Relasi terhadap publik	Kesesuaian dengan prioritas pembangunan kota	Kesiapan SKPD penyedia layanan	Kategori jumlah pemohon	Pemenuhan terhadap peraturan pusat	Responsi terhadap kompetisi e- Gov	Adanya permintaan SKPD penyedia layanan	TOTAL
PUBLIK	Pilihan jawaban:						TOTAL	
	(1) G2C (2) G2B	1=10	(1) Kategori 1 (2) Kategori 2 (3) Kategori 3	(1) Low (0-100) (2) Medium (101-500) (3) High (>500)	(0) Tidak (1) Ya	(0) Tidak (1) Ya	(0) Tidak (1) Ya	
	Isian (A)	Isian (B)	Isian (C)	Isian (D)	Isian (E)	Isian (F)	Isian (G)	
(diisi dengan layan <mark>an pu</mark> blik)	Nilai (2) > (1)	Nilai (1)>(2)>(3) dst	Nilai (1)>(2)>(3)	Nilai (3)>(2)>(1)	Nilai (1)>(0)	Nilai (1)>(0)	Nilai (1)>(0)	Jumlah dari (A)+(G
(diisi dengan layanan publik) (diisi dengan	(diisi dengan isian berdasarkan pilihan jawaban yang ditentukan, justifikasi ditentukan berdasarkan pedoman penilaian)							



6.4.2. Penyusunan perangkat penilaian aspek teknis

Perangkat penilaian aspek teknis berisi kriteria dan bobot yang sudah ditentukan dan terverifikasi oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui Diskominfo. Untuk mengurangi tingkat subyektifitas penilaian dan menyamakan persepsi penilai terhadap kriteria yang disajikan, maka perangkat penilaian aspek teknis akan dilengkapi dengan pilihan jawaban yang relevan dengan deskripsi kriteria seperti yang sudah dijelaskan serta pedoman penilaian yang menjadi referensi penilai untuk mengisi isian nilai pada masing-masing kolom. Perangkat penilaian aspek teknis yang diusulkan kemudian diverifikasi oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui Diskominfo.



Tabel 6. 23 Detil penyusunan perangkat penilaian aspek teknis

PENILAIAN ASPEK TEKNIS					
Kriteria	Deskripsi	Rekomendasi pilihan jawaban	Pedoman penilaian	Status verifikasi organisasi	
H. Jenis bengembangan aplikasi	Untuk memberi penilaian terhadap kriteria jenis pengembangan aplikasi, diperlukan pengidentifikasian ketersediaan aplikasi (offline) pada sebuah layanan publik yang dinilai di SKPD penyedia layanan. Dengan demikian diketahui bahwa jika sebuah layanan publik belum memiliki aplikasi offline maka dapat terjustifikasi jenis pengembangan aplikasi yang harus dilakukan adalah new development. Jika sebuah layanan publik teridentifikasi memiliki aplikasi namun belum digunakan oleh karena adanya hambatan atau proses pengembangan yang terhenti, maka dapat terjustifikasi	(1) New development (2) Redevelopment (3) Enhancement	Informasi ketersediaan aplikasi pendukung di SKPD penyedia layanan.	Pemerintah Kota Surabaya membatas pilihan jawabar hanya untuk pilihar (1) dan (3) dengar alasan bahwa kasus pada kategori (2) jarang dijumpai.	

Tabel 6. 23 Detil penyusunan perangkat penilaian aspek teknis

PENILAIAN ASPEK TEKNIS					
Kriteria	Deskripsi	Rekomendasi pilihan jawaban	Pedoman penilaian	Status verifikasi organisasi	
	bahwa jenis pengembangan aplikasi yang tepat adalah <i>re-development</i> . Sedangkan jenis pengembangan <i>enhancement</i> diperuntukkan pada aplikasi layanan publik yang belum lengkap di segi fungsionalitas (modul, fungsi) namun sudah digunakan.				
I. Kompleksitas aplikasi	Untuk memberi penilaian terhadap kriteria kompleksitas aplikasi, diperlukan data mengenai flow/alur atau proses bisnis layanan publik.	(1) Low (2) Medium (3) High	 Proses bisnis layanan publikk Functional requirement aplikasi layanan publik online (analisis Diskominfo) 	Terverifikasi	

Tabel 6. 23 Detil penyusunan perangkat penilaian aspek teknis

	PENILAIAN ASPEK TEKNIS						
Kriteria	Deskripsi	Rekomendasi pilihan jawaban	Pedoman penilaian	Status verifikasi organisasi			
J. Potensi integrasi dengan existing system	Untuk memberi penilaian terhadap kriteria potensi integrasi dengan existing system, diperlukan analisis mengenai keterkaitan satu layanan dengan layanan lain sehingga dapat diintegrasikan, baik dari segi proses bisnis, environment, penggunaan data, dan hal terkait lain yang menjadi pertimbangan expert judgment.	(1) Ada	Expert judgment	Terverifikasi			
K. Ketersediaan fungsional SI/TI SKPD penyedia layanan	Untuk memberi penilaian terhadap kriteria ketersediaan fungsional SI/TI SKPD penyedia layanan, diperlukan data jumlah fungsional SI/TI yang memiliki kemampuan di bidang programming (skilled IS/IT personal) pada SKPD penyedia layanan.	(1) Ada (2) Tidak ada	Informasi ketersediaan fungsional khususnya menguasai bidang programming di SKPD penyedia layanan masing-	Terverifikasi			

Tabel 6. 23 Detil penyusunan perangkat penilaian aspek teknis

PENILAIAN ASPEK TEKNIS					
Kriteria	Deskripsi	Rekomendasi pilihan jawaban	Pedoman penilaian	Status verifikasi organisasi	
		3 1 1	masing layanan publik.		
L. Ketersediaan infrastruktur SI/TI yang dibutuhkan di SKPD penyedia layanan	Untuk memberi penilaian terhadap kriteria ketersediaan teknologi SKPD penyedia layanan untuk implementasi aplikasi layanan publik ke depannya, diperlukan informasi ketersediaan teknologi seperti server, swith, router. Kemudian penilain harus dapat menjustifikasi kecukupan teknologi yang ada tersebut, apakah layanan disebut 'Ada' atau 'Tidak'.	(1) Ada (2) Tidak ada	Informasi ketersediaan server, router, switch dan komputer di SKPD penyedia layanan masing-masing layanan publik.	Terverifikasi	
M. Pencegahan risiko teknis	Untuk dapat memberi penilaian terhadap kriteria pencegahan risiko terknis, perlu adanya pengecekan terhadap kejelasan beberapa hal; yaitu metodologi pengerjaan, rencana kerja dan anggaran yang	Pemberian ceklis terhadap masing- masing indikator penilaian, yaitu:	Informasi kejelasan dokumen yang ditentukan.	Terverifikasi	

Tabel 6. 23 Detil penyusunan perangkat penilaian aspek teknis

PENILAIAN ASPEK TEKNIS					
Kriteria	Deskripsi	Rekomendasi pilihan jawaban	Pedoman penilaian	Status verifikasi organisasi	
	diakusisi dari SKPD penyedia layanan.	(V)kejelasan metodologi pengerjaan (V)kejelasan rencana kerja (V)kejelasan anggaran			
N. Efisiensi pengembangan	Untuk dapat memberi penilaian terhadap kriteria efisiensi pengembangan yang dilihat dari adanya efisiensi biaya, SDM dan waktu. Penilaian efisiensi ini diberikan oleh expert judgment atau dalam hal ini adalah staf khusus di lingkungan Diskominfo Kota Surabaya. Efisiensi pengembangan secara tidak langsung dipengaruhi kriteria-kriteria lain dalam perangkat ini sehingga pemberian	Pemberian ceklis terhadap masing- masing indikator penilaian, yaitu: (V) efisiensi biaya (V) efisiensi SDM (V) efisiensi waktu	Expert judgment	Terverifikasi	

Tabel 6. 23 Detil penyusunan perangkat penilaian aspek teknis

	PENILAIAN	N ASPEK TEKNI	S	THE THE
Kriteria	Deskripsi	Rekomendasi pilihan ja <mark>wab</mark> an	Pedoman penilaian	Status verifikasi organisasi
	nilai melalui expert judgment tersebut dapat mereferensi dari penilaian pada kriteria lain yang relevan dan terkait.			

159



	S OF		KR	ITERIA P	ENILAIAI	N ASPEK	K TEKNI	S	7		9	
NAMA LAYAN AN PUBLIK	Jenis pengembangan aplikasi	Kompleks itas aplikasi	Potensi integrasi dengan existing system	Ketersediaan fungsional SI/TI di SKPD penyedia layanan	Ketersediaan infrastruktur SI/TI yang dibutuhkan di SKPD penyedia layanan	Pence	gahan risiko	teknis	Efisier	nsi pengemb	pangan	TOTAL
	(1) New development (2) Enhancement	(1) Low (2) Medium (3) High	(0) Tidak ada (1) Ada	(0) Tidak ada (1) Ada	(0) Tidak ada (1) Ada	Kejelasan metodologi pengerjaan	K <mark>ejelasan</mark> rencana kerja	Kejelas <mark>an</mark> anggaran	Efisiensi biaya	Efisiensi SDM	Efisiensi waktu	25
	ISIAN (A)	ISIAN (B)	ISIAN (C)	ISIAN (D)	ISIAN (E)		ISIAN (F)			ISIAN (G)		
(diisi dengan layan <mark>an</mark> publik	Nilai (2) (1)	Nilai (3)≥(2)>(1)	Nilai (1)>(0)	Nilai (0)>(1)	Nilai (0)>(1)		Vildi V9>(-)	Nilai (V)>(-)	Nilai (V)>(-)	Nilai (V) Z (-)	Nilai (V)>(-)	Jumlah (A)++(G
(diisi dengan			W. 197						*			*
layanan publik (diisi			(d		<mark>ian b</mark> erdasark ditentukan be				an,	Nagy (
dengan layanan												
publik				<u> </u>					<u> </u>			7//////////////////////////////////////

Gambar 6. 20 Perangkat penilaian aspek teknis



6.5. Hasil pengujian perangkat penilaian

Berikut merupakan hasil pengujian perangkat penilaian, melalui pemberian nilai pada setiap kriteria yang sudah ditentukan dan tervalidasi, baik penilaian aspek strategis maupun teknis.

6.5.1. Penilaian aspek strategis

Penilaian aspek strategis dengan perangkat yang sudah disediakan dilakukan oleh tim penilai, yang terdiri dari staf Bappeko dan peneliti. Berikut merupakan hasil pengujian terhadap perangkat pada masing-masing kriteria pada penilaian aspek strategis.

6.5.1.1. Kesesuaian dengan prioritas pembangunan kota

Pada bagian ini akan dijelaskan persiapan penilaian yang harus dilakukan untuk dapat mengisi penilaian terhadap kriteria kesesuaian dengan prioritas pembangunan kota, serta hasil penilaian yang dilakukan oleh peneliti dan Bappeko.

> Persiapan penilaian

Untuk memberi penilaian pada masing-masing layanan publik terhadap kriteria kesesuaian dengan prioritas pembangunan kota, maka diperlukan pedoman berupa Prioritas Pembangunan Kota Surabaya yang didapat dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya yang keluar dalam setiap 5 tahun sekali, mengikuti pergantian pemimpin daerah atau Walikota. Dalam dokumen RPJMD, terdapat prioritas-prioritas yang menjadi fokus pembangunan daerah khususnya dalam masa kepemimpinan Walikota tersebut.

Oleh karena RPJMD Kota Surabaya yang masih berlaku tahun ini akan segera berakhir karena menuju masa akhir jabatan Walikota yang sekarang memimpin, maka dalam penilaian ini prioritas pembangunan menggunakan dokumen RPMJD tahun 2011-2015. Secara subtansial, penilaian dalam kriteria ini

belum dapat memenuhi keinginan Bappeko untuk membuat rencana pembangunan aplikasi layanan publik berbasis online untuk jangka waktu 5 tahun mendatang demi memenuhi tuntutan RPJMD selanjutnya (tahun 2015-2019). Namun, hal ini dapat dimaklumi Bappeko, dengan alasan ketidaktersediaan dokumen yang dibutuhkan sebagai pedoman penilaian.

Terdapat 10 prioritas pembangunan Kota Surabaya hasil dari pemetaan RPJMD tahun 2011-2015, yaitu bidang:

- 1. Infrastruktur
- 2. Pelayanan pendidikan
- 3. Pelayanan kesehatan
- 4. Kesejahteraan sosial masyarakat
- 5. Kualitas koperasi dan UMKM
- 6. Kemandirian kerja dan perluasan kerja
- 7. Reformasi birokrasi dan peningkatan layanan publik
- 8. Peran pemuda, pengembangan pariwisata, seni budaya dan olahraga
- 9. Pengelolaan lingkungan hidup
- 10. Peningkatan kualitas peran perempuan dan kesetaraan gender

Pada saat pemberian justifikasi pada kriteria kesesuaian dengan prioritas pembangunan kota, maka tim penilai harus dapat memetakan kemampuan setiap layanan publik untuk dapat mendukung pencapaian prioritas pembangunan tertentu yang tertuang dalam poin-poin bidang prioritas pembangunan daerah. Dengan demikian, dalam penilaian ini dibutuhkan analisis kesesuaian yang menghasilkan justifikasi dan tervalidasi oleh Bappeko.

> Hasil penilaian

Pada Tabel 6. 24 disajikan cara penilaian setiap layanan dalam kriteria kesesuaian dengan prioritas pembangunan kota.

NAMA LAYANAN	HASIL IDENTIFIKASI	ISIAN PENILAIAN 1 sampai dengan 10	SKOR KRITERIA Isian x bobot (22%)
Kajian drainase (rekomendasi)	Infrastruktur	1	2.2
Justifikasi	Layanan kajian di pemberian rekor (saluran pembua drainase merupak Kota. Layanan pengendalian b program yaitu sarana prasarana	nendasi terhac ungan air) ya kan salah satu ini menduku yanjir, denga peningkatan p	dap drainase ng notabene infrastruktur ng program n indikator
Izin pembuangan limb <mark>ah tin</mark> ja	Pengelolaan lingkungan hidup	9	1.98
Justifikasi	Layanan izin berhubungan den pencemaran dan pengan indikat pelayanan pengel Kota Surabaya. tersebut sudah layanan izin penkaitannya denglingkungan hidup	gan program perusakan lingk or adanya lolaan air limb Program p jelas terdefini nbuangan limb gan wujud	peningkatan peningkatan pah domestik pembangunan si, sehingga ah tinja erat pengelolaan
Legalisasi badan hukum koperasi	Kualitas koperasi dan UMKM	5	1.32
Justifikasi	Dengan adanya badan hukum diharapkan dapa program peningk koperasi, khusus fasilitas kemudal baru. Hal ini se pembangunan kua	koperasi berb at mendorong atan kualitas anya menduku an pendirian suai dengan a	pasis online, tercapainya kelembagaan ng indikator unit koperasi area prioritas

Hasil penilaian seluruh layanan publik yang menjadi input penilaian secara keseluruhan terhadap kriteria kesesuaian terhadap prioritas pembangunan terdapat pada Lampiran F - A. Kesesuaian dengan prioritas pembangunan kota.

6.5.1.2. Kesiapan SKPD penyedia layanan

Pada bagian ini dijelaskan persiapan penilaian yang harus dilakukan untuk dapat mengisi penilaian terhadap kriteria kesiapan SKPD penyedia layanan, serta hasil penilaian yang dilakukan oleh peneliti dan Bappeko.

> Persiapan penilaian

Untuk memberi penilaian terhadap kriteria kesiapan SKPD penyedia layanan, hal yang harus dipersiapkan adalah skor *e-Readiness* yang masing-masing SKPD miliki sesuai dengan hasil penilaian tertentu (Monitoring dan Evaluasi; Monev). Namun oleh karena skor *e-Readiness* yang diharapkan belum tersedia, maka pada pengujian in digunakan data ketersediaan sumber daya manusia TI dan ketersediaan perangkat/infrastruktur TI yang dinilai relevan hubungannya dengan aplikasi layanan berbasis online, yaitu *server*, *router* dan *switch*. Data-data yang diperlukan tersebut didapat dari hasil survey yang sudah dilakukan pada bulan April – Mei 2014, dalam rangka Kegiatan "Penyusunan Evaluasi RPJMD 2010-2015 dan Penyusunan RPJMD 2015-2020 Urusan Komunikasi dan Informatika Bidang TIK".

Dari data yang terdapat dalam dokumen tersebut, Bappeko kemudian mengkategorisasi SKPD berdasarkan tingkat kesiapan TI yang dimilikinya ke dalam 3 (tiga) kategori, yaitu kategori 1, 2 dan 3. Data kondisi terkini teknologi informasi pada SKPD yang diambil dari Laporan Penyusunan Evaluasi RPJMD 2010-2015 dan penyusunan RPJMD 2015-2020 Urusan Komunikasi dan Informatika Bidang TIK [41] terdapat pada Lampiran D.

Tabel 6. 25 Kategori kesiapan TI SKPD

NAMA SKPD	KATEGORI
Dinas Komunikasi dan Informatika	1
Dinas Pendidikan	1
Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah	1
Dinas Kesehatan	
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1
Dinas Kebersihan dan Pertamanan	2
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2
Dinas Pemuda dan Olah Raga	2
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	2
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	2
Badan Lingkungan Hidup	2
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	3
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	3
Dinas Perhubungan	3
Dinas Sosial	3
Dinas Pertanian	3
Dinas Kebakaran	3
Dinas Tenaga Kerja	3
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	3

Setiap isian yang dimasukkan memiliki nilai yang berbedabeda. Tujuan pengkategorian adalah untuk menunjukkan derajat nilai. Kategori 1 lebih tinggi daripada kategori 2, kategori 2 lebih tinggi daripada kategori 3 dan begitupun sebaliknya. Pada saat penilai mengisi pada kolom isian penilaian dengan nomor kategori kesiapan TI SKPD, maka secara otomatis isian tersebut menunjukkan nilai yang dimaksudkan yang akan langsung dikalikan dengan bobot kriteria yang diketahui sebesar 19%.

> Hasil penilaian

Pada Tabel 6. 26, disajikan cara penilaian setiap layanan dalam kriteria kesiapan SKPD penyedia layanan.

Tabel 6. 26 Contoh pengujian perangkat penilaian (2)

		ISIAN PENILAIAN	SKOR KRITERIA Isian x bobot (19%)	
NAMA LAYANAN	HASIL IDENTIFIKASI	(1) Kategori 1, (2) Kategori 2, (3) Kategori 3		
Kajian drainase (rekomendasi)	Layanan publik ini dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum yang merupakan SKPD dengan kategori kesiapan TI kategori 1.	3	0.19	
Izin pembuangan limbah tinja	Layanan publik ini dimiliki oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang merupakan SKPD dengan kategori kesiapan TI kategori 2.	2	0.57	
Legalisasi badan hukum koperasi	Layanan publik ini dimiliki oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang merupakan SKPD dengan kategori kesiapan TI kategori 2.		0.57	

Hasil penilaian seluruh layanan publik yang menjadi input penilaian secara keseluruhan terhadap kriteria kesiapan SKPD penyedia layanan terdapat pada Lampiran F-B. Kesiapan SKPD penyedia layanan.

6.5.1.3. Kategori jumlah pemohon layanan

Pada bagian ini dijelaskan persiapan penilaian yang harus dilakukan untuk dapat mengisi penilaian terhadap kriteria kategori jumlah pemohon layanan, serta hasil penilaian yang dilakukan oleh peneliti dan Bappeko.

Persiapan penilaian

Untuk memberi penilaian terhadap kriteria kategori jumlah pemohon layanan, diperlukan data tentang jumlah pemohon pengguna layanan dalam kurun waktu idealnya 5 (lima) tahun terakhir. Data yang dimaksudkan dapat diakuisisi dari masingmasing SKPD penyedia layanan.

Oleh karena ketidaktersediaan data yang lengkap selama 5 (lima) tahun terakhir pada masing-masing layanan secara keseluruhan, maka dalam penelitian ini dibatasi hanya menggunakan data jumlah pemohon yang dimiliki oleh Bappeko. Jika terdapat sebuah kondisi dimana data jumlah pemohon pada layanan publik tertentu tidak tersedia, maka hal tersebut dituliskan dengan symbol "N/A" atau *not available*. Dengan demikian, dalam rangka pengujian perangkat ini, tim penilai hanya menuliskan data yang riil dimiliki Bappeko, tanpa melakukan usaha khusus untuk mengakuisisi data-data yang dibutuhkan.

Dalam mengisi penilaian, disediakan pedoman pemberian nilai, dalam bentuk kategorisasi. Kategorisasi dilakukan untuk mengelompokkan layanan publik yang memiliki jumlah pemohon yang bersifat *low, medium* dan *high*. Pada masingmasing kategori tersebut memiliki *range* jumlah pemohon masing-masing. Penentuan range sepenuhnya berada di tangan Bappeko dengan melihat jarak antara data jumlah pemohon yang tersedia.

Kategori kategori jumlah pemohon layanan yang telah ditentukan adalah:

- Low, jika jumlah pemohon antara 0 100
- Medium, jika jumlah pemohon antara 101 500
- High, jika jumlah pemohon > 500

Hasil penilaian

Pada Tabel 6. 27 berikut, disajikan cara penilaian setiap layanan dalam kriteria kategori jumlah pemohon layanan.

Tabel 6. 27 Contoh pengujian perangkat penilaian (3)

NIAMA LANAMAN	HASIL	ISIAN PENILAIAN	SKOR KRITERIA
NAMA LAYANAN	IDENTIFIKASI	(1) Low (2) Medium (3) high	Isian x bobot (15%)
Kajian drainase (rekomendasi)	Tidak tersedia data kategori jumlah pemohon layanan kajian drainase	N/A	0
Kartu izin penduduk musiman dan surat keterangan orang terlantar	Tercatat terdapat 11346 pemohon sesuai dengan data yang dimiliki Bappeko	3	0.45
Tanda dagang industri	Tercatat terdapat 232 pemohon sesuai dengan data yang dimiliki Bappeko	2	0.3

Hasil penilaian seluruh layanan publik yang menjadi input penilaian secara keseluruhan terhadap kriteria kategori jumlah pemohon layanan terdapat pada lampiran Lampiran F.

6.5.1.4. Pemenuhan terhadap peraturan pusat

Pada bagian ini akan dijelaskan persiapan penilaian yang harus dilakukan untuk dapat mengisi penilaian terhadap kriteria pemenuhan terhadap peraturan pusat, serta hasil penilaian yang dilakukan oleh peneliti dan Bappeko.

> Persiapan penilaian

Untuk memberi penilaian terhadap kriteria pemenuhan terhadap peraturan pusat, diperlukan adanya data mengenai peraturan dari pemerintah pusat yang mengatur tentang penyediaan layanan publik secara online. Peraturan pusat yang digunakan dalam penilaian ini adalah adanya standar pelayanan minimal (SPM) sebagai sebuah arahan dari Pemerintah pusat yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Dalam PP Nomor 65 Tahun 2005 tersebut, dijelaskan bahwa: "Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh oleh warga secara minimal." [42]

Dalam rangka proses pengujian untuk kriteria pemenuhan dengan peraturan pusat, maka penilai harus mampu mengidentifikasi setiap layanan publik yang dinilai apakah terkait langsung dengan SPM yang ditetapkan pemerintah daerah/ kota, yang dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Surabaya. Pada Lampiran E, dilampirkan SPM yang dimiliki Pemerintah Kota Surabaya. Jika terdapat keterkaitan, maka penilai harus mengisi jawaban "Ya", dan begitu sebaliknya untuk jawaban "Tidak".

Setiap isian yang dimasukkan memiliki nilai yang berbedabeda. Isian "Ya" tentu memiliki nilai yang lebih besar dibanding isian "Tidak". Hal ini disebabkan karena isian Ya berarti layanan publik tersebut merupakan salah bentuk pendukung indikator ketercapaian SPM yang dianggap merupakan peraturan pusat. Jika pada isian diisi dengan "Ya" maka skor kriteria akan langsung menghasilkan angka 1 yang menggambarkan jawaban "Ya" dikalikan dengan bobot kriteria yaitu sebesar 4%.

Hasil penilaian

Pada Tabel 6. 28 berikut, disajikan cara penilaian setiap layanan dalam kriteria pemenuhan terhadap peraturan pusat.

Tabel 6. 28 Contoh pengujian perangkat penilaian (4)

NAMA LAYANAN	HASIL	ISIAN PENILAIAN	SKOR KRITERIA
NAMA LATANAN	IDENTIFIKASI	(0) Tidak (1) Ya	Isian x bobot (4%)
Kajian drainase (rekomendasi)	Terdapat poin SPM yang menghendaki adanya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota yang merupakan indikator dari jenis pelayanan dasar Penyehatan lingkungan permukiman dalam SPM.		0.04
Kartu izin penduduk musiman dan irat keterangan orang terlantar	Tidak ada pernyataan dalam SPM yang berhubungan dengan layanan publik tersebut.	0	0
tin pembuangan limbah tinja	Terdapat poin SPM yang menghendaki tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan, yang menjadi indikator dari jenis pelayanan penyehatan lingkungan permukiman khususnya untuk		0.04

NAMA LAYANAN	HASIL	ISIAN PENILAIAN	SKOR KRITERIA
NAMA LATANAN	IDENTIFIKASI	(0) Tidak (1) Ya	Isian x bobot (4%)
J. W.J.	pengelolaan sampah.		

Hasil penilaian seluruh layanan publik yang menjadi input penilaian secara keseluruhan terhadap pemenuhan terhadap peraturan pusat terdapat pada Lampiran F.

6.5.1.5. Responsi terhadap kompetisi *e-Government* Pada bagian ini dijelaskan persiapan penilaian yang harus dilakukan untuk dapat mengisi penilaian terhadap kriteria responsi terhadap kompetisi *e-Government*, serta hasil penilaian yang dilakukan oleh peneliti dan Bappeko.

> Persiapan penilaian

Untuk memberi penilaian terhadap kriteria responsi terhadap kompetisi yang dalam hal ini adalah kompetisi antar e-Government, penilai harus mampu mengidentifikasi layananlayanan publik yang terintegrasi dari portal pelayanan publik online yang dimiliki Pemerintah Kota/Kabupaten se-Indonesia. Konsep kompetisi yang dimaksudkan ditunjukkan dengan kompetisi antar portal SSW yang dimiliki Kota Surabaya dengan portal sejenis pemerintah kota/daerah lain, dengan melihat layanan-layanan apa saja yang sudah online pada portal pelayanan publik online milik pemerintah kota/ daerah tersebut, dengan asumsi semakin lengkap layanan publik online yang terintegrasi di portal tersebut, maka semakin meningkat pula daya saing antara portal tersebut dengan portal SSW. Selain itu, dugaan bahwa terdapat alasan-alasan tertentu menyebabkan dipilihnya layanan-layanan publik tersebut sehingga bisa menjadi layanan publik berbasis online, seperti: jumlah pemohon yang besar yang menunjukkan minat, instruksi peraturan pusat, menjadi masukan bagi Bappeko untuk

mempertimbangkan hal yang sama sekalipun lingkungan kepemerintahan yang berbeda antar satu dengan yang lainnya.

Dalam mengisi kriteria ini, terdapat 2 pilihan jawaban, yaitu ya dan tidak. Setiap isian yang dimasukkan memiliki nilai yang berbeda-beda. Isian "Ya" tentu memiliki nilai yang lebih besar dibanding isian "Tidak". Isian yang diberikan, yang disimbolisasikan ke dalam angka 0 atau 1 (angka 0 menunjukkan jawaban Tidak, sedangkan 1 menunjukkan jawaban Ya) akan dikalikan oleh bobot kriteria yaitu sebesar 11%.

> Hasil penilaian

Pada Tabel 6. 29 berikut, disajikan cara penilaian setiap layanan dalam kriteria responsi terhadap kompetisi *e-Government*.

Tabel 6. 29 Contoh pengujian perangkat penilaian (5)

NAMA LAYANAN	HASIL	ISIAN PENILAIAN	SKOR KRITERIA Isian x bobot (11%)	
NAMA LAYANAN	IDENTIFIKASI	(0) Tidak (1) Ya		
Kajian drainase (rekomendasi)	Terdapat layanan publik mengenai kajian drainase di portal layanan publik online Pemerintah Kota Bontang.		0.125	
Kartu izin penduduk musiman dan surat keterangan orang terlantar	Terdapat layanan publik mengenai kajian drainase di portal layanan publik online Pemerintah Kabupaten Sleman.		0.125	
Izin pembuangan limbah tinja (PLT)	Tidak ditemukan layanan publik sejenis yang	0	0	

NAMA LAVANAN	HASIL	ISIAN PENILAIAN	SKOR KRITERIA	
NAMA LAYANAN	IDENTIFIKASI	(0) Tidak (1) Ya		
	bersifat online di berbagai portal layanan publik online instansi pemerintahan se- Indonesia.			

Hasil penilaian seluruh layanan publik yang menjadi input penilaian secara keseluruhan terhadap responsi terhadap kompetisi *e-Government* terdapat pada Lampiran F.

6.5.1.6. Adanya permintaan dari SKPD penyedia

Pada bagian ini akan dijelaskan persiapan penilaian yang harus dilakukan untuk dapat mengisi penilaian terhadap kriteria adanya permintaan dari SKPD penyedia layanan, serta hasil penilaian yang dilakukan oleh peneliti dan Bappeko.

> Persiapan penilaian

Untuk memberi penilaian terhadap kriteria adanya permintaan dari SKPD penyedia layanan, tim penilai meminta input berupa surat permintaan (atau bentuk yang lain; seperti hasil rapat, dll.) untuk aplikasi layanan publik online yang dimiliki Diskominfo. Kemudian data tersebut dijadikan pedoman dalam penentuan ada tidaknya permintaan SKPD penyedia layanan terhadap sebuah aplikasi layanan publik.

Data yang diterima penulis tidak dipublikasikan untuk menjaga kerahasiaan data seperti yang diminta oleh Diskominfo.

Setiap isian yang dimasukkan, entah 1 atau 0 memiliki nilai yang berbeda-beda. Melalui adanya persetujuan dengan Bappeko yang melihat bahwa permintaan dari SKPD menunjukkan willingness atau keinginan yang kuat terhadap

adanya layanan publik berbasis online, maka nilai jawaban 'Ada' atau yang disimbolisasikan dengan isian (1) akan lebih tinggi disbanding jawaban 'Tidak'. Nilai tersebut ecara otomatis dikalikan dengan bobot kriteria, yaitu sebesar 7%.

Hasil penilaian

Pada berikut, disajikan cara penilaian setiap layanan dalam kriteria adanya permintaan dari SKPD pemilik layanan.

Tabel 6. 30 Contoh pengujian perangkat penilaian (6)

NAMA LAYANAN	HASIL	ISIAN PENILAIAN	SKOR KRITERIA Isian x bobot (7%)	
NAMA LAYANAN	IDENTIFIKASI	(0) Tidak (1) Ya		
Kajian drainase (rekomendasi)	Diketahui terdapat permintaan SKPD pemilik layanan	1	0.07	
Kartu izin penduduk musiman dan surat keterangan orang terlantar	Diketahui tidak terdapat permintaan SKPD pemilik layanan	0	0	
Izin pembuangan limbah tinja (PLT)	Diketahui tidak terdapat permintaan SKPD pemilik layanan	0	0	

Hasil penilaian seluruh layanan publik yang menjadi input penilaian secara keseluruhan terhadap kriteria adanya pemintaan SKPD pemilik layanan terdapat pada Lampiran F-F. Adanya permintaan dari SKPD pemilik layanan.

6.5.1.7. Relasi terhadap publik

Pada bagian ini dijelaskan persiapan penilaian yang harus dilakukan untuk dapat mengisi penilaian terhadap kriteria relasi terhadap publik, serta hasil penilaian yang dilakukan oleh peneliti dan Bappeko.

Persiapan penilaian

Untuk memberi penilaian terhadap kriteria relasi terhadap publik, penilai memerlukan data mengenai jenis pengguna layanan publik, yaitu antara *Government to Citizen* (G2C) atau *Government to Business* (G2B). Data-data yang diperlukan tersebut didapat dari hasil survey yang sudah dilakukan pada bulan April – Mei 2014, dalam rangka Kegiatan "Penyusunan Evaluasi RPJMD 2010-2015 dan Penyusunan RPJMD 2015-2020 Urusan Komunikasi dan Informatika Bidang TIK".

Oleh karena visi dan misi Pemerintah Kota Surabaya berhubungan dengan perdagangan, serta konsentrasi Pemerintah Kota Surabaya untuk meningkatkan iklim investasi, maka dijadikan pedoman bahwa layanan publik yang berhubungan dengan bisnis (G2B) akan lebih diutamakan jika dibandingkan dengan layanan publik untuk kepentingan kemasyarakatan (G2C). Hal inilah yang menjadi dasar adanya perbedaan bobot pada masing-masing isian kriteria penilaian relasi terhadap publik.

> Hasil penilaian

Pada Tabel 6. 31 berikut, disajikan cara penilaian setiap layanan dalam kriteria sifat layanan publik.

Tabel 6. 31 Contoh pengujian perangkat penilaian (7)

NAMA LAYANAN	HASIL	ISIAN PENILAIAN	SKOR KRITERIA
	IDENTIFIKASI	(1) G2C (2) G2B	Isian x bobot (22%)
Kajian drainase (rekomendasi)	G2B	2	0.44
Ijin utilitas (penggalian)	G2B	2	0.44
Pra <mark>saran</mark> a, Sarana, dan Utilitas	G2B	2	0.44

6.5.1.8. Hasil penilaian aspek strategis keseluruhan

Dengan adanya penjelasan mengenai cara pemberian nilai pada masing-masing kriteria dalam perangkat penilaian serta pemberian nilai pada seluruh layanan publik yang disajikan pada bagian 6.5.1.8 *Hasil penilaian aspek strategis keseluruhan*, maka pada Tabel 6. 32 berikut menunjukkan nilai total masing-masing layanan publik yang telah dinilai melalui pengujian perangkat penilaian.

Tabel 6. 32 Hasil penilaian aspek strategis keseluruhan

NO	O NAMA LAYANAN	
11	Kajian drainase (rekomendasi)	3.05
2	Ijin utilitas (penggalian)	2.94
3	Prasarana, sarana, dan utilitas	2.94
4	Pelayanan perijinan	2.88
5	Izin pendirian dan penutupan sekolah	2.99
6	Izin pendirian dan penutupan lembaga kursus	2.99
7	Izin pembuangan limbah tinja	1.3
8	Izin ruang terbuka hijau	1.3
9	Izin pemakaman	2.4
10	Izin pembuangan sampah ke TPA	1.3
11	Rekomendasi sistem proteksi gedung bertingkat	2.21
12	Kartu keluarga	2.16
13	Kartu tanda penduduk	2.16
14	Kartu izin penduduk musiman dan surat keterangan orang terlantar	2.23
15	Pendaftaran pindah datang dalam wilayah negara kesatuan RI	1.67
16	Pendaftaran pindah datang antar negara	1.78
17	Pencatatan kelahiran	2.16
18	Pencatatan lahir mati	2.12
19	Pencatatan kematian	2.16
20	Pencatatan perkawinan bagi WNI/orang asing	1.67

NO	NAMA LAYANAN	NILAI TOTAL	
21	Pencatatan perceraian	1.67	
22	Pelaporan peristiwa penting WNI di luar negeri	1.67	
23	Pencatatan pengesahan anak	1.67	
24	Kutipan ke-ii dan seterusnya akta-akta catatan sipil	2.16	
25	Salinan akta-akta catatan sipil	2.16	
26	Perubahan akta-akta catatan sipil bagi WNI	1.71	
27	Pembatalan akta-akta catatan sipil	1.71	
28	Penatausahaan hasil hutan	2.35	
29	Rekomendasi instalasi karantina hewan sementara	2.24	
30	Rekomendasi sertifikasi nomor kontrol veteriner	2.24	
31	Perizinan pelayanan kesehatan hewan (izin praktik dr. Hewan)	2.13	
32	Surat izin usaha penangkapan	2.35	
33	Surat ijin pengelolaan ikan	2.35	
34	Surat ijin pembudidayaan ikan	2.35	
35	Surat ijin kapal pengangkut ikan	2.35	
36	Rekomendasi andalalin	2.24	
37	Ijin trayek/operasi	2.32	
38	Ijin penyelenggaraan parkir	2.58	
39	Surat tanda pendaftaran waralaba	2.29	
40	Izin usaha pengelolaan pasar tradisional (IUPPT)	2.25	
41	Izin usaha pusat perbelanjaan	2.25	
42	Izin usaha toko modern	2.25	
43	Tanda daftar gudang (TDG)	2.55	
44	Tanda dagang industri	2.59	
45	Penyelenggaraan pameran dagang	2.55	
46	Pelayanan rekomendasi perpanjangan ijin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja (PPJP)	1.77	

NO	O NAMA LAYANAN	
47	Pelayanan pengesahan peraturan perusahaan	1.73
48	Pelayanan pendaftaran perjanjian kerja sama (PKB)	1.77
49	Pelayanan pencatatan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT)	1.73
50	Pengesahan P2K3 (panitia pembina keselamatan & kesehatan kerja)	1.73
51	Pengesahan pemakaian peralatan K3	1.84
52	Pengesahan wajib lapor ketenagakerjaan	1.73
53	Rekomendasi PJK3	1.73
54	Rekomendasi katering	1.73
55	Perijinan tempat penampungan calon tenaga kerja indonesia (TKI)	1.8
56	Rekomendasi paspor calon TKI ke luar negeri	1.51
57	Rekomendasi pendirian cabang pelaksana penempatan tenaga kerja indonesia swasta (PPTKIS)	1.73
58	Lembaga penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS)	1.73
59	Persetujuan bursa kerja khusus (BKK)	1.73
60	Perizinan & pendaftaran lembaga pelatihan kerja swasta (LPKS)	1.73
61	Kartu nomor induk kesenian	1.3
62	Rekomendasi bantuan organisasi keagamaan /sosial	2.14
63	Rekomendasi undian gratis berhadiah (RUGB)	2.1
64	Rekomendasi adopsi	2.1
65	Rekomendasi ijin pengumpulan uang atau barang	2.1
66	Penerbitan surat tanda pendirian organisasi sosial	2.29
67	Penerbitan surat tanda pendaftaran ulang organisasi sosial	2.29
68	Surat rekomendasi pemulangan orang terlantar	1.99
69	Pemberian suarat rekomendasi pembebasan biaya pengobatan orang terlantar	2.14

NO	NAMA LAYANAN	NILAI TOTAL
70	Pengesahan akta perubahan anggaran dasar koperasi	1.95
71	Pengesahan akta pendirian koperasi	1.95
72	Legalisasi badan hukum koperasi	1.95
73	Pembubaran koperasi	1.95
74	Rekomendasi pendirian koperasi tingkat provinsi	1.95
75	Rekomendasi pembukaan kantor cabang koperasi	1.95
76	Surat keterangan kepengurusan koperasi/legalitas	1.95
77	Perijinan layanan	1.26
78	Ijin pemakaian bangunan	1.67
79	Rekomendasi UKL-UPL	1.26
80	Rekomendasi analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL)	1.44
81	Izin pembuangan limbah cair (IPLC)	1.52
82	Pengelolaan limbah B3	1.26
83	Izin pengelolaan air bawah tanah	1.37
84	Layanan survey, magang, PKL	2.59
85	Penerbitan surat keterangan terdaftar ormas*	2.29
86	Perijinan pendirian rumah ibadah*	2.14

Untuk menuju ke penilaian aspek teknis, maka perlu adanya kategorisasi terhadap hasil penilaian aspek strategis untuk dapat menentukan layanan publik mana yang dapat dinilai pada penilaian aspek teknis. Berikut merupakan pedoman kategorisasi terhadap hasil penilaian aspek strategis yang disetujui Pemerintah Kota Surabaya melalui Bappeko.

Kategori	Rentang nilai
Kategori 1	2.85 - 3.8
Kategori 2	1.9–2.84
Kategori 3	0.95 - 1.89
Kategori 4	0 - 0.94

Tabel 6. 33 Pedoman kategorisasi prioritisasi aspek strategis

6.5.1.9. Seleksi layanan

Seleksi layanan dilakukan dengan mengambil layanan publik yang memenuhin syarat kategori dengan rentang nilai antara 2.85 sampai 3.8. Tabel 6. 34 merupakan hasil seleksi layanan berdasarkan penilaian aspek strategis yang sudah dilakukan.

Tabel 6. 34 Hasil seleksi layanan

NO	NAMA LAYANAN	TOTAL
1	1 KAJIAN DRAINASE (REKOMENDASI)	
5	IZIN PENDIRIAN DAN PENUTUPAN SEKOLAH; 1. KELOMPOK BERMAIN; 2. TAMAN PENDIDIKAN ANAK; 3. SATUAN PAUD SEJENIS; 4. TAMAN KANAK- KANAK; 5. SWASTA (SD, SMP, SMA, SMK); 6. KEJAR PAKET	2.99
6	IZIN PENDIRIAN DAN PENUTUPAN LEMBAGA KURSUS	2.99
4	PELAYANAN PERIJINAN TENAGA MEDIS & KEFARMASIAN	2.94
2	IJIN UTILITAS (PENGGALIAN)	2.94
3	PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS	2.88

Keenam layanan publik yang dihasilkan akan menjadi input untuk penilaian aspek teknis oleh Diskominfo. Berikut merupakan pembahasan pada pengujian perangkat penilaian aspek teknis.

6.5.2. Penilaian aspek teknis

Penilaian aspek teknis merupakan penilaian lanjutan dari penilaian aspek strategis, karena input penilaian ini berasal dari

output penilaian aspek strategis yang masuk batas nilai. Dalam penilaian aspek teknis, pemberian nilai pada masing-masing input terhadap kriteria dilakukan oleh Diskominfo. Berikut merupakan penjelasan mengenai pengujian perangkat penilaian aspek teknis.

6.5.2.1. Jenis pengembangan aplikasi

Pada bagian ini dijelaskan persiapan penilaian yang harus dilakukan untuk dapat mengisi penilaian terhadap jenis pengembangan aplikasi serta hasil penilaian yang dilakukan sepenuhnya oleh Diskominfo Kota Surabaya melalui staf yang terkait dengan penelitian ini.

Persiapan penilaian

Untuk memberi penilaian terhadap kriteria jenis pengembangan aplikasi, Diskominfo perlu menganalisis layanan input penilaian aspek teknis mengenai jenis pengembangan perangkat lunak. Analisis yang dimaksudkan adalah identifikasi ketersediaan aplikasi layanan publik (namun masih offline; belum tergabung dalam SSW) yang sudah ada di SKPD penyedia layanan. Identifikasi tersebut melihat ketersediaan (ada atau tidak), cakupan aplikasi (dengan modul yang lengkap atau belum lengkap), dan *progress* pengembangan jika memang aplikasi ini sedang *on-going* di fase peningkatan, utamanya jika dilakukan oleh SKPD penyedia layanan yang secara mandiri membangun aplikasi tersebut.

Hasil penilaian

Pada Tabel 6. 35 berikut disajikan cara penilaian setiap layanan dalam kriteria jenis pengembangan aplikasi.

Tabel 6. 35 Contoh pengujian perangkat penilaian (8)

NAMA	HASIL IDENTIFIKASI	ISIAN PENILAIAN	SKOR KRITERIA
LAYANAN		(1) New development (2) Enhancement	Isian x bobot (20%)
zin pendirian an penutupan sekolah	Sudah ada aplikasi untuk penyediaan layanan kajian drainase di SKPD penyedia layanan, namun belum online dan modul yang terdapat dalam aplikasi tersebut belum lengkap.		0.4
Pelayanan perijinan	Sudah ada aplikasi untuk pelayanan perijinan mengenai tenaga medis di Dinas Kesehatan sebelumnya. Namun sementara ini aplikasi yang tersedia belum lengkap untuk semua modul yang dibutuhkan, sehingga butuh adanya penyempurnaan aplikasi agar layanan online yang dihasilkan dapat memuat modul modul yang lengkap yang dibutuhkan oleh tenaga medis		0.4

Hasil penilaian seluruh layanan publik yang menjadi input penilaian secara keseluruhan terhadap kriteria jenis pengembangan aplikasi terdapat pada Lampiran F-H. Jenis pengembangan aplikasi.

6.5.2.2. Kompleksitas aplikasi

Pada bagian ini dijelaskan persiapan penilaian yang harus dilakukan untuk dapat mengisi penilaian terhadap kriteria kompleksitas aplikasi serta hasil penilaian yang dilakukan sepenuhnya oleh Diskominfo Kota Surabaya melalui staf yang terkait dengan penelitian ini.

> Persiapan penilaian

Untuk memberi penilaian terhadap kriteria kompleksitas aplikasi, Diskominfo perlu menganalisis beberapa hal untuk mengidentifikasi tingkat kerumitan atau komplekitas aplikasi, seperti *flow* dari aplikasi yang akan dibangun, biaya yang dialokasikan, dan fungsionalitas yang dibutuhkan.

> Hasil penilaian

Pada Tabel 6. 36 berikut disajikan cara penilaian setiap layanan dalam kriteria kompleksitas aplikasi.

Tabel 6. 36 Contoh pengujian perangkat penilaian (9)

	HASIL IDENTIFIKASI	ISIAN PENILAIAN	SKOR KRIT <mark>ERI</mark> A	
NAMA LAYANAN		(1) Low (2) Medium (3) High	Isian x bobot (20%)	
Kajian drainase	Terdapat banyak proses bisnis yang harus diakomodasi dalam aplikasi layanan publik untuk layanan kajian drainase.	3	0.6	
Pelayanan perijinan	Secara umum, persyaratan untuk perijinan di Dinas	1	0.2	

NA MA	HASIL IDENTIFIKASI	ISIAN PENILAIAN	SKOR KRITERIA
NAMA LAYANAN		(1) Low (2) Medium (3) High	Isian x bobot (20%)
	Kesehatan sifatnya sama, yang membedakan adalah subyek pemohon dan beberapa surat keterangan khusus sesuai keprofesian yang didaftarkan. Hal ini disimpulkan		

Hasil penilaian seluruh layanan publik yang menjadi input penilaian secara keseluruhan terhadap kriteria kompleksitas aplikasi terdapat pada Lampiran F-I. Kompleksitas aplikasi.

6.5.2.3. Potensi integrasi dengan existing system

Pada bagian ini akan dijelaskan persiapan penilaian yang harus dilakukan untuk dapat mengisi penilaian terhadap kriteria kompleksitas aplikasi serta hasil penilaian.

> Persiapan penilaian

Untuk memberi penilaian terhadap kriteria potensi integrasi dengan existing system, Diskominfo perlu menganalisis keterkaitan aplikasi layanan publik dengan aplikasi lainnya yang sudah ada sebelumnya.

Hasil penilaian

Pada tabel berikut disajikan cara penilaian setiap layanan dalam kriteria potensi integrasi dengan *existing system*.

NAMA	HASIL IDENTIFIKASI	ISIAN PENILAIAN	SKOR KRITERIA
LAYANAN	THE TOTAL STATE OF THE STATE OF	(0) Tidak ada (1) ada	Isian x bobot (20%)
Kajian drainase	Layanan kajian drainase memiliki keterkaitan dengan layanan IMB dan SKRK. Dalam kondisi nyata, sudah terdapat aplikasi layanan publik online untuk IMB dan SKRK yang terdapat pada SSW. Hal ini menyebabkan adanya potensi integrasi aplikasi kajian drainase dengan aplikasi lain.		0.2
Pelayanan perijinan	Layanan perijinan di Dinas Kesehatan secara umum merupakan aplikasi yang besar. Sifat dari pengembangan aplikasi yang dinilai ini adalah peningkatan atau enhancement, sehingga hal ini menghasilkan potensi integrasi.		0.2

Hasil penilaian seluruh layanan publik yang menjadi input penilaian secara keseluruhan terhadap kriteria potensi integrasi dengan *existing system* terdapat pada Lampiran F-J. Potensi integrasi dengan existing system.

6.5.2.4. Ketersediaan fungsional SI/TI di SKPD penyedia layanan

Pada bagian ini dijelaskan persiapan penilaian yang harus dilakukan untuk dapat mengisi penilaian terhadap kriteria ketersediaan fungsional SI/TI di SKPD penyedia layanan serta hasil penilaian.

> Persiapan penilaian

Untuk memberi penilaian terhadap ketersediaan fungsional SI/TI SKPD penyedia layanan, Diskominfo menggunakan pedoman pada hasil survey layanan publik yang sudah dilakukan sebelumnya, yang salah satunya berisi data kondisi terkini SI/TI SKPD dan konfirmasi dengan SKPD terkait. Setelah Diskominfo mengetahui jumlah fungsional TI, lalu Diskominfo memasukkan nilai kategori dari hasil yang diketahui sesuai dengan *judgment* yang mereka miliki.

Hasil penilaian

Pada tabel berikut disajikan cara penilaian setiap layanan dalam kriteria ketersediaan fungsional SI/TI SKPD penyedia layanan.

Tabel 6. 38 Contoh pengujian perangkat penilaian (11)

NAMA LAYANAN	HASIL	ISIAN PENILAIAN	SKOR KRITERIA	
	IDENTIFIKASI	(0) Tidak ada (1) Ada	Isian x bobot (13%)	
Kajian drainase	(judgement)	0	0.13	
Pelayanan perijinan tenaga medis & kefarmasian	(ju <mark>dgem</mark> ent)	1	0	

Hasil penilaian seluruh layanan publik yang menjadi input penilaian secara keseluruhan terhadap kriteria ketersediaan fungsional SI/TI terdapat pada Lampiran F-K. Ketersediaan fungsional SI/TI di SKPD penyedia layanan.

6.5.2.5. Ketersediaan infrastruktur SI/TI yang dibutuhkan di SKPD penyedia layanan

Pada bagian ini dijelaskan persiapan penilaian yang harus dilakukan untuk dapat mengisi kriteria ketersediaan teknologi yang dibutuhkan dalam rangka penerapan layanan publik berbasis online.

> Persiapan penilaian

Untuk memberi penilaian terhadap ketersediaan teknologi yang dibutuhkan, Diskominfo menggunakan pedoman pada hasil survey layanan publik yang sudah dilakukan sebelumnya dan *expert judgment* berdasarkan hasil konfirmasi terhadap SKPD terkait yang dilakukan sendiri oleh Diskominfo.

> Hasil penilaian

Pada tabel berikut disajikan cara penilaian setiap layanan dalam kriteria ketersediaan teknologi yang dibutuhkan di SKPD penyedia layanan.

Tabel 6. 39 Contoh pengujian perangkat penilaian (12)

NAMA LAYANAN	HASIL	ISIAN PENILAIAN	SKOR KRITERIA Isian x bobot (13%)	
NAMA LATANAN	IDENTIFIKASI	(0) Tidak ada (1) Ada		
Kajian drainase	(judgement)	0	0.13	
Pelayanan perijinan tenaga medis & kefarmasian	(judgement)	1	0	

Hasil penilaian seluruh layanan publik yang menjadi input penilaian secara keseluruhan terhadap kriteria ketersediaan teknologi terdapat pada Lampiran F-L. Ketersediaan teknologi yang dibutuhkan.

6.5.2.6. Pencegahan risiko teknis

Pada bagian ini akan dijelaskan persiapan penilaian yang harus dilakukan untuk dapat mengisi kriteria pencegahan risiko teknis. Pada kriteria ini, diberikan 3 (tiga) parameter penilaian yang dianggap memiliki peranan penting agar dapat mengurangi pencegahan risiko teknis pengembangan aplikasi.

Pencegahan risiko teknis SKPD penyedia layanan serta hasil penilaian yang dilakukan sepenuhnya oleh Diskominfo Kota Surabaya melalui staf yang terkait dengan penelitian ini.

> Persiapan penilaian

Untuk memberi penilaian terhadap kriteria ini, Diskominfo melalui staf terkait dengan penelitian ini memberikan justifikasinya terhadap ketersediaan dokumen yang dijadikan parameter kriteria.

Hasil penilaian

Pada tabel berikut disajikan cara penilaian setiap layanan dalam kriteria ketersediaan TI SKPD penyedia layanan.

Tabel 6. 40 Contoh pengujian perangkat penilaian (13)

NAMA	HASIL	ISIAN PENILAIAN			SKOR KRITER IA
LAYANAN IDE	IDENTIFIKASI	Kejelasan metodologi pengerjaan	Kejelasan rencana kerja	Kejelasan anggaran	Isian x bobot (7%)
Kajian drainase	(judgement)	V			0.07
Pelayanan perijinan tenaga medis & kefarmasia	(judgement)	v			0.07

Hasil penilaian seluruh layanan publik yang menjadi input penilaian secara keseluruhan terhadap kriteria pencegahan risiko teknis terdapat pada Lampiran F-M. Pencegahan risiko teknis

6.5.2.7. Efisiensi pengembangan

Pada bagian ini akan dijelaskan persiapan penilaian yang harus dilakukan untuk dapat mengisi kriteria pencegahan risiko teknis. Pada kriteria ini, diberikan 3 (tiga) parameter penilaian yang dianggap menunjukkan efisiensi yang dapat dirasakan pihak Diskominfo.

> Persiapan penilaian

Untuk memberi penilaian terhadap kriteria ini, Diskominfo melalui staf terkait dengan penelitian ini menganalisis sendiri apakah masing-masing efisiensi yang menjadi parameter penilaian mungkin dirasakan oleh Diskominfo dengan melihat penilaian pada kriteria lainnya.

Hasil penilaian

Pada tabel berikut disajikan cara penilaian setiap layanan dalam kriteria efisiensi pengembangan.

Tabel 6. 41 Contoh pengujian perangkat penilaian (14)

NAMA LAYANAN	HASIL IDENTIFIKASI	ISIAN PENILAIAN			SKOR KRITERIA
		Efisiensi biaya	Efisiensi SDM	Efisiensi waktu	Isian x bobot (7%)
Kajian drainase	(judgement)		3.6		0.00
Pelayanan perijinan tenaga medis & kefarmasian	(judgement)		3-2		0.00

Hasil penilaian seluruh layanan publik yang menjadi input penilaian secara keseluruhan terhadap kriteria efisiensi pengembangan terdapat pada Lampiran F-N. Efisiensi pengembangan.

6.5.2.8. Hasil penilaian aspek teknis keseluruhan

Dengan adanya penjelasan mengenai cara pemberian nilai pada masing-masing kriteria dalam perangkat penilaian serta pemberian nilai pada seluruh layanan publik yang disajikan pada 6.5.2.8 *Hasil penilaian aspek teknis keseluruhan*, maka pada Tabel 6. 42 berikut menunjukkan nilai total masingmasing layanan publik yang telah dinilai melalui pengujian perangkat penilaian aspek teknis.

Tabel 6. 42 Hasil penilaian aspek teknis keseluruhan

NO	NAMA LAYANAN	NILAI TOTAL
1	Kajian drainase (rekomendasi)	1.53
2	Izin pendirian dan penutupan sekolah	0.94
3	Izin pendirian dan penutupan lembaga kursus	0.94
4	Pelayanan perijinan tenaga medis & kefarmasian	0.87
5	Ijin utilitas (penggalian)	1.26
6	Prasarana, sarana, dan utilitas	1.13

6.5.2.9. Prioritisasi pengembangan

Prioritisasi pengembangan dilakukan dengan mengurutkan layanan publik dalam penilaian aspek teknis berdasarkan nilai tertinggi ke nilai terendah. Tabel 6. 43 merupakan hasil prioritisasi pengembangan.

Tabel 6. 43 Hasil prioritisasi pengembangan

NO	NAMA LAYANAN	TOTAL
12	Kajian drainase (rekomendasi)	1.53
2	Izin pendirian dan penutupan sekolah	1.26
3	Izin pendirian dan penutupan lembaga kursus	1.13
4	Pelayanan perijinan tenaga medis & kefarmasian	0.94
5	Ijin utilitas (penggalian)	0.94
6	Prasarana, sarana, dan utilitas	0.87

Melalui pengujian perangkat penilaian tersebut, dapat diketahui hasil seleksi layanan dan prioritisasi pengembangan menunjukkan urutan yang berbeda. Seperti ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 6. 44 Hasil seleksi layanan dan prioritisasi pengembangan

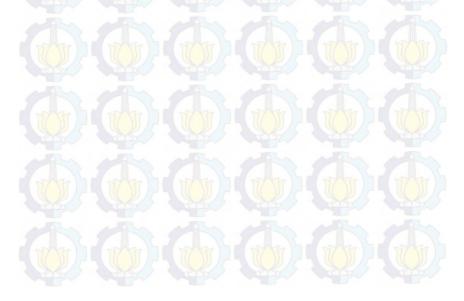
Seleksi layanan	Prioritisasi pengembangan		
Kajian drainase (rekomendasi)	Kajian drainase (rekomendasi)		
Izin pendirian dan penutupan sekolah;	Ijin utilitas (penggalian)		
Izin pendirian dan penutupan lembaga kursus	Prasarana, sarana, dan utilitas		
Pelayanan perijinan tenaga medis & kefarmasian	Izin pendirian dan penutupan sekolah;		
Ijin utilitas (penggalian)	Izin pendirian dan penutupan lembaga kursus		
Prasarana, sarana, dan utilitas	Pelayanan perijinan tenaga medis & kefarmasian		

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat perubahan urutan hasil seleksi layanan dan prioritisasi pengembangan. Hal tersebut disebabkan oleh karena adanya penilaian lanjut setelah layanan publik offline diseleksi, yaitu dengan penilaian aspek teknis yang dilaksanakan oleh Diskominfo.

Pada tabel diketahui bahwa layanan kajian drainase mendapat prioritas pertama, baik berdasarkan hasil seleksi layanan maupun keputusan prioritisasi pengembangan. Urutan kedua prioritas pengembangan adalah ijin utilitas, yang meskipun dilihat dari hasil seleksi layanan berada di urutan kelima, namun layanan ijin utilitas ini berada di posisi kedua dalam urutan prioritas pengembangan. Hal ini tepat karena kedua layanan tersebut memiliki keterkaitan dan dimiliki oleh SKPD yang sama, sehingga koordinasi Diskominfo dengan SKPD tersebut akan lebih mudah.

Ketiga layanan publik yang telah memiliki prioritas pengembangan tinggi merupakan layanan publik yang akan dibangun aplikasi berbasis online oleh Diskominfo sendiri. Hal ini tercermin dari ketidakmampuan SKPD pemilik layanan untuk membangun aplikasi layanan publik berbasis online secara mandiri, sehingga Diskominfo berkewenangan untuk Ketiga publik membuat. layanan dengan prioritas pengembangan terendah juga merupakan layanan publik yang memiliki kemungkinan kecil untuk dibangun oleh Diskominfo. Hal ini tercermin dari SKPD pemilik layanan yang mampu dan telah terbiasa untuk membangun aplikasi, baik berupa aplikasi layanan publik berbasis online maupun aplikasi pendukung operasional SKPD.

Urutan prioritas pengembangan menjadi keputusan akhir yang akan direkomendasikan oleh peneliti kepada pihak terkait, yaitu Bappeko dan Diskominfo sebagai urutan pembangunan aplikasi layanan publik berbasis online untuk rencana pembangunan Pemerintah Kota Surabaya, khususnya terkait dengan pengembangan SSW.



BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN

7.1. Kesimpulan

Berdasarkan proses dan tahapan yang telah dilakukan dalam pengerjaan tugas akhir ini, maka dapat diambil kesimpulan-kesimpulan yang menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan, yaitu:

- 1. Manajemen portfolio aplikasi layanan publik berbasis online pada Pemerintah Kota Surabaya dilakukan oleh Badan Perencana Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Surabaya sebagai pihak yang masing-masing memiliki tugas fungsi sebagai perencana dan SKPD teknis yang bertanggungjawab terhadap pengembangan TIK di Pemerintah Kota Surabaya. Dalam pelaksanaan manajemen portfolio aplikasi kekinian, terdapat isu-isu lokalitas. Isu lokalitas yang paling signifikan adalah adanya tumpang tindih kewenangan oleh karena masing-masing pihak menjalankan sesuai dengan kepentingannya.
- 2. Alur manajemen portfolio aplikasi layanan publik berbasis online yang diusulkan untuk diimplementasikan di Pemkot Surabaya terdiri dari 3 proses, yaitu: (1) pengumpulan data, (2) seleksi dan prioritisasi, dan (3) eksekusi dan pengawasan. Untuk mengakomodasi isu lokalitas dan kebutuhan Pemkot Surabaya terkait manajemen portfolio aplikasi, maka dilakukan pemisahan aktor atau pelaku masing-masing proses berdasarkan tugas fungsi.
- 3. Di dalam alur manajemen portfolio aplikasi layanan publik berbasis online, proses seleksi dan prioritisasi menjadi proses utama dalam penelitian. Dalam metode seleksi dan prioritisasi, terdapat 6 tahapan, yaitu: (1) penyaringan input, (2) penilaian aspek strategis, (3) seleksi layanan, (4) penilaian aspek teknis, (5) prioritisasi pengembangan, dan (6) rekapitulasi & publikasi.

- 4. Metode seleksi dan prioritisasi didukung oleh perangkat penilaian, yaitu perangkat penilaian aspek strategis dan perangkat penilaian aspek teknis. Pada perangkat penilaian aspek strategis, tersusun atas 7 kriteria. Kriteria dengan bobot tertinggi yaitu: (1) relasi terhadap publik dan (2) kesesuaian dengan prioritas pembangunan kota yang masing-masingnya berbobot 22%. Sedangkan pada perangkat penilaian aspek teknis terdiri dari 7 kriteria. Kriteria dengan bobot tertinggi yaitu: (1) jenis pengembangan aplikasi, (2) kompleksitas aplikasi dan (3) potensi integrasi. Masing-masing kriteria berbobot 20%. Bobot kriteria ditentukan oleh Pemkot Surabaya melalui Bappeko dan Diskominfo.
- 5. Melalui pengujian perangkat penilaian yang dilakukan oleh Bappeko dan Diskominfo dengan data yang tersedia, maka diketahui bahwa terdapat 6 layanan publik yang masuk dalam standar seleksi layanan. Prioritisasi aspek teknis atau prioritisasi pengembangan menghasilkan urutan pengembangan aplikasi berdasarkan faktor teknis yang ada di Diskominfo.

7.2. Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan terhadap penelitian selanjutnya adalah:

- 1. Proses pengumpulan pada mekanisme manajemen portfolio aplikasi layanan publik berbasis online ditujukan untuk mengambil data primer yang relevan sesuai dengan kebutuhan perangkat proses. Salah satu data primer yang diharapkan adalah data mengenai kesiapan TI SKPD, dengan rekomendasi menggunakan *e-Readiness* sebagai metode penentuan kesiapan TI SKPD yang dilihat dari perspektif SKPD penyedia layanan, bukan justifikasi penilai
- 2. Penentuan bobot kriteria penilaian dapat dilakukan dengan teknik lain, seperti teknik pembobotan bertingkat dengan AHP (*Analytical Hierarchy Process*).

DAFTAR PUSTAKA

- [1] E. S. Holle, "Pelayanan Publik Melalui Electronic Government: Upaya Meminimalisir Praktek dalam Administrasi dalam Meningkatkan Public Service," *Jurnal SASI*, vol. 17, pp. 21-30, 2011.
- [2] O. Renanda, "Kajian Strategis Proses Seleksi dan Prioritisasi Investasi Proyek Teknologi Informasi," Surabaya, 2014.
- [3] G. Riempp and S. Gieffers-Ankel, "Application Portfolio Management— A Decision Oriented View of Enterprise Architecture," *International Journal of Information Systems and e-Business Management*, 2007.
- [4] B. Maizlish and R. Handler, IT Portfolio Management Step-by-Step: Unlocking the Business Value of Technology, 2005.
- [5] Republik Indonesia, "Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik," Jakarta, 2009.
- [6] H. Markowitz, "Portfolio Selection," *Journal of Finance*, 1952.

- [7] M. Adamsson, Developing an integrated conceptual model for portfolio-based IT management; A comparative case study of Volvo Group Portfolio Management Framework, Gothenburg, 2013.
- [8] D. Simon, K. Fischbach and D. Schoder, "Application Portfolio Management—An Integrated Framework and a Software Tool Evaluation Approach," *Communications of the Association for Information Systems*, vol. 26, no. 3, pp. 35-56, 2010.
- [9] P. Weill and M. Vitale, "Assessing the Health of an Information Systems Applications Portfolio: An Example from Process Manufacturing," *MIS Quarterly*, vol. 23, no. 4, pp. 601-624, 1999.
- [10] C. Betz, Architecture and Patterns for IT Service Management, Resource Planning, and Governance Making Shoes for the Cobbler's Children, 1 ed., San Fransisco: Morgan Kaufmann, 2007.
- [11] G. Dern, Management von IT–Architekturen:
 Informationssysteme im Fokus von Architekturplanung
 und entwicklung, 2006.
- [12] B. Maizlish and R. Handler, IT Portfolio Management Step-by-Step; Unlocking the Business Value of Technology, John Wiley & Sons, Inc., 2005.
- [13] H. Smith and J. McKeen, "Developments in Practice VII: Developing and Delivering the IT Value Proposition," *Communications of the Association for*

- *Information Systems*, vol. 11, no. 438-450, pp. 438-450, 2003.
- [14] K. Niemann, From Enterprise Architecture to IT Governance—Elements of Effective IT Management, 2006.
- [15] J. Bloem, M. van Doorn and P. Mittal, Making IT Governance Work in a Sarbanes-Oxley World, 1 ed., Hoboken: Wiley, 2006.
- [16] W. Keller, IT-Unternehmensarchitektur: Von der Geschäftsstrategie zur ptimalen IT-Unterstützung, 1 ed., Heidelberg: dpunkt, 2007.
- [17] R. Benson, T. Bugnitz and W. Walton, From Business Strategy to IT Action: Right Decisions for a Better Bottom Line, 1 ed., Hoboken: Wiley, 2004.
- [18] S. Leimeister, T. Böhmann and H. Kremar, "IS Outsourcing Governance in Innovation-Focused Relationships—An Empirical Investigation," 2008.
- [19] E. v. Ramshorst, "Application Portfolio Management from an Enterprise Architecture Perspective; Reducing the IT Landscape Complexity," Utrecht, 2013.
- [20] PMI, A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide), 2013.
- [21] M. Engwall and A. Jerbrant, "The Resource Allocation Syndrome: The Prime Challenge of Multiproject

- Management," *International Journal of Project Management*, pp. 403-409, 2003.
- [22] R. E. Indrajit, "Menentukan Prioritas Portfolio Proyek Electronic Government," 2002.
- [23] J. Martino, R&D Project Selection, New York: Wiley, 1995.
- [24] F. Ghasemzadeh and A. N.P., Project Portfolio Selection Through Decision Support, 2000.
- [25] I. Stamelos and L. Angelis, "Managing Uncertainty in Project Portfolio Cost Estimation," *Information & Software Technology*, vol. 43, no. 13, pp. 759-768, 2001.
- [26] M. Dickinson, A. Thornton and S. Graves, "Technology Portfolio Management: Optimizing Interdependent Projects Over Multiple Time Periods," *IEEE Transactions on Engineering Management*, vol. 48, no. 4, pp. 518-527, 2001.
- [27] C. Loch and S. Kavadias, "Dynamic Portfolio Selection of NPD Programs Using Marginal Returns,"

 Management, vol. 48, no. 10, pp. 1227-1241, 2002.
- [28] I. Bardhan, S. Bagchi and R. Sougstad, "Prioritizing a Portfolio of Information Technology Investment Projects," *Journal of Management Information Systems*, vol. 21, no. 2, 2004.
- [29] F. Bannister and D. Remenyi, "Acts of Faith: Instinct, Value and IT Investment Decisions," *Journal of*

- information Technology, vol. 15, no. 3, pp. 231-241, 2000.
- [30] N. Archer and F. Ghasemzadeh, "An integrated framework for project portfolio selection," *International Journal of Project Management*, vol. 17, no. 4, pp. 207-216, 1999.
- [31] J. Meredith and S. Mantel, Project Management A Managerial Approach, Seventh Edition, John Wiley & Sons, Inc, 2009.
- [32] J. Jiang and G. Klein, "Project Selection Criteria by Strategic Orientation," *Information and Management*, vol. 36, pp. 63-75, 1999.
- [33] S. Puthamont and C. Charoenngam, "Strategic Project Selection in Public Sector: Construction Projects of the Ministry of Defence in Thailand," *International Journal* of Project Management, vol. 25, pp. 178-188, 2006.
- [34] Pemerintah Kota Surabaya, "Perwali Kota Surabaya Nomor 5 tahun 2013 tentang Pedoman Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaran pemerintahan daerah," Surabaya, 2013.
- [35] S. Brinkkemper, "Method Engineering: Engineering of Information Systems Development Methods and Tools," *Information and Software Technology*, vol. 38, pp. 275-280, 1996.
- [36] I. v. d. Weerd, J. Versendaal and S. Brinkkemper, "A Product Software Knowledge Infrastructure for

- Situational Capability Maturation: Vision and Case Studies in Product Management," Luxembourg, 2006.
- [37] Pemerintah Kota Surabaya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2011-2015, 2011.
- [38] M. v. Herwijnen, "Weighted Summation (WSum)".
- [39] M. H. M. L. Q. i. W. B. B. Ye Yang, "Phase Distribution of Software Development Effort," USA, 2008.
- [40] D. Braha and O. Maimon, "The Measurement of a Designn Structural and Functional Complexity," *IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics*, vol. 28, p. 527, 1998.
- [41] Pemerintah Kota Surabaya, "Laporan Penyusunan Evaluasi RPJMD 2010-2015 dan penyusunan RPJMD 2015-2020 Urusan Komunikasi dan Informatika Bidang TIK," Surabaya, 2014.
- [42] Pemerintah Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal," 2006.

Lampiran A

Tabel berikut merupakan daftar layanan publik administratif atau yang disebut dengan Inventori layanan publik administratif yang didapat dari hasil survey layanan publik Bappeko tahun 2014 [40].

Tabel A. 1 Daftar layanan publik administratif Pemkot Surabaya

Nama SKPD	Nama layanan publik administratif
Dinas Pekerjaan Umum	Kajian drainase (rekomendasi)
Bina Marga Dan Pematusan (DPU)	Ijin utilitas (penggalian)
	Surat keterangan rencana kota
Dinas Cipta Karya Dan Tata	Ijin penyelenggaraan reklame terbatas
Ruang (DCTKR)	Izin mendirikan bangunan
(DCTKR)	Prasarana, sarana, dan utilitas
	Ijin usaha j <mark>asa k</mark> onstruksi
Dinas Kesehatan (DINKES)	Pelayanan perijinan
Dinas Pendidikan (DISPENDIK)	Izin pendirian dan penutupan sekolah; 1. Kelompok bermain; 2. Taman pendidikan anak; 3. Satuan PAUD sejenis; 4. Taman kanak- kanak; 5. Swasta (SD, SMP, SMA, SMK); 6. Kejar paket
	Izin pendirian dan penutupan lembaga kursus
THE THE	Izin pembuangan limbah tinja (IPLT)
Dinas Kebersihan dan	Izin ruang terbuka hijau (RTH)
Pertamanan	Penebangan pohon
(DKP)	Izin pemakaman
The state of the s	Izin pembuangan sampah ke TPA
D <mark>inas</mark> Kebakar <mark>an</mark> (DINKAR)	Rekomendasi sistem proteksi gedung bertingkat
Dinas Kependudukan dan	Kartu keluarga
Catatan Sipil	Kartu tanda penduduk

Nama SKPD	Nama layanan publik administratif
(DISPENDUKCAPIL)	
	Kartu izin penduduk musiman dan surat keterangan orang terlantar
	Pendaftaran pindah datang dalam wilayah negara kesatuan RI
	Pendaftaran pindah datang antar negara
	Pencatatan kelahiran
	Pencatatan lahir mati
	Pencatatan kematian
	Pencatatan perkawinan bagi WNI/orang asing
	Pencatatan perceraian
	Pelaporan peristiwa penting WNI di luar negeri
	Pencatatan pengesahan anak
	Kutipan ke-ii dan seterusnya akta- akta catatan sipil
	Salinan akta-akta catatan sipil
	Perubahan akta-akta catatan sipil bagi WNI
	Pembatalan akta-akta catatan sipil
Dinas Komunikasi Dan	Jasa titipan Jasa
Informatika	Jasa telekomunikasi
(DISKOMINFO)	Menara telekomunikasi
	Penatausahaan hasil hutan
	Rekomendasi instalasi karantina hewan sementara
Dinas Pertanian (DISPERTAN)	Rekomendasi sertifikasi nomor kontrol veteriner
	Perizinan pelayanan kesehatan hewan (izin praktik dr. Hewan)
	Surat izin usaha penangkapan
	Surat ijin pengelolaan ikan

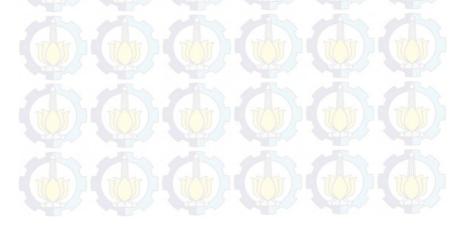
Nama SKPD	Nama layanan publik administratif
	Surat ijin pembudidayaan ikan
	Surat ijin kapal pengangkut ikan
	Rekomendasi andalalin
	Ijin trayek/operasi
	Ijin penyelenggaraan parkir
Dinas Perhubungan	Uji berkala pertama kali
(DISHUB)	Uji berk <mark>ala p</mark> eriodik
	Mutasi uji kendaraan
	Numpang uji
	Pelayanan di bidang perdagangan dan perindustrian: surat izin usaha perdagangan
	Pelayanan di bidang perdagangan dan perindustrian: surat tanda pendaftaran waralaba
	Izin usaha pengelolaan pasar tradisional (IUPPT)
	Izin usaha pusat perbelanjaan
Dinas Perdagangan dan	Izin usaha toko modern
Perindustrian (DISPERINDAGIN)	Surat izin usaha pengedar tumbuhan dan satwa liar (UPTSL)
	Tanda daftar gudang (TDG)
	Tanda da <mark>gang</mark> industri
	Izin usaha industry
	Izin perluasan industri
	Persetujuan prinsip
	Penyelenggaraan pameran dagang
	Tanda daftar perusahaan
Dinas Tenaga Kerja (DISNAKERTRANS)	Pelayanan rekomendasi perpanjangan ijinoperasional perusahaan penyedia jasa pekerja (PPJP)
	Pelayanan pengesahan peraturan perusahaan

Nama SKPD	Nama layanan publik administratif
	Pelayanan pendaftaran perjanjian kerja sama (PKB)
	Pelayanan pencatatan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT)
	Pengesahan P2K3 (panitia pembina keselamatan & kesehatan kerja)
	Pengesahan pemakaian peralatan K3
	Pengesahan wajib lapor ketenagakerjaan
	P <mark>enan</mark> ganan kasus ketenagakerjaan
	Pencatatan bukti laporan kecelakaan kerja
	Rekomendasi PJK3
	Rekomendasi katering
	Perijinan tempat penampungan calon tenaga kerja indonesia (TKI
	Rekomendasi paspor calon tki ke luar negeri
	Rekomendasi pendirian cabang pelaksana penempatan tenaga kerja indonesia swasta (PPTKIS)
	Lembaga penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS)
	Persetujuan bursa kerja khusus (BKK)
	Legalisir kartu AK-1
	Kartu ak-1
	Perizinan & pendaftaran lembaga pelatihan kerja swasta (LPKS)
udayaan dan	Izin cagar budaya
wisata	Kartu nomor induk kesenian

Nama SKPD	Nama layanan publik administratif
(DISBUDPAR)	Tanda daftar usaha pariwisata
	Rekomendasi bantuan organisasi keagamaan /sosial
	Rekomendasi undian gratis berhadiah (RUGB)
	Rekomendasi adopsi
	Rekomendasi ijin pengumpulan uang atau barang
Dinas Sosial (DINSOS)	Penerbitan surat tanda pendirian organisasi sosial
	Penerbitan surat tanda pendaftaran ulang organisasi sosial
	Surat rekomendasi pemulangan orang terlantar
	Pemberian suarat rekomendasi pembebasan biaya pengobatan orang terlantar
	Pengesahan akta perubahan anggaran dasar koperasi
	Pengesahan akta pendirian koperasi
	Legalisasi badan hukum koperasi
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Pembubaran koperasi
(DISKOP)	Rekomendasi pendirian koperasi tingkat provinsi
	Rekomendasi pembukaan kantor cabang koperasi
	Surat keterangan kepengurusan koperasi/legalitas
Dinas Pemuda dan Olah Raga (DISPORA)	Perijinan layanan
Dinas Pengelolaan	Ijin pemakaian tanah
Bangunan dan Tanah (DPBT)	Ijin pemakaian bangunan

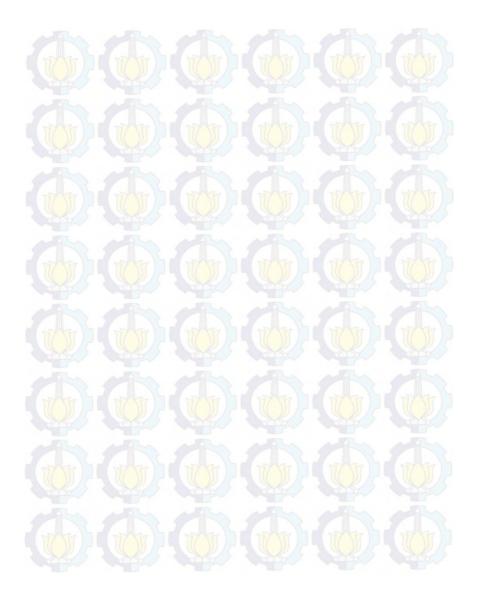
Nama SKPD	Nama layanan publik administratif
Badan Lingkungan Hidup (BLH)	Izin gangguan (HO)
	Rekomendasi UKL-PL
	Rekomendasi analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL)
	Izin pembuangan limbah cair (IPLC)
	Pengelolaan limbah B3
	Izin pengelolaan air bawah tanah
Badan Kesatuan Bangsa,	Layanan survey, magang, PKL
Politik dan Perlindungan Masyarakat	Penerbitan surat keterangan terdaftar ormas*
(BAKESBANGLINMAS)	Perijinan pendirian rumah ibadah*

Tabel A. 2 berikut merupakan daftar layanan publik yang sudah terakomodasi dalam Surabaya Single Window (SSW) atau yang disebut dengan Inventori aplikasi layanan publik berbasis online *existing*. Daftar ini didapat dari website resmi SSW, yaitu ssw.surabaya.go.id



Nama layanan	
Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK)	
Izin Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	
Izin Gangguan (HO)	
Perpanjangan Izin Pemakaian Tanah (IPT)	
Kartu Tanda Pencari Kerja (TPK)	
Rekomendasi menara	
Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	
Izin Persetujuan Prinsip	
Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	
Izin Reklame	1000
Rekomendasi izin penyelenggaraan pos	
Izin tenaga keperawatan	
Izin sarana kesehatan	
Tanda daftar usaha pariwisata	THE WAY
Izin tenaga kefarmasian	
Izin perluasan industri	
Izin usaha industry	
Izin tanda daftar industry	
Izin praktek tenaga medis	136
Izin jasa telekomunikasi	
Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)	
Izin cagar budaya (())	7
Izin tenaga penunjang medis	
Izin usaha pengedar tumbuhan dan satwa liar	

Halaman ini sengaja dikosongkan



Lampiran B

Dalam lampiran ini, disertakan dasar hukum dan tupoksi organisasi, yaitu Bappeko dan Diskominfo yang diketahui dari website resmi masing-masing instansi pemerintahan tersebut.

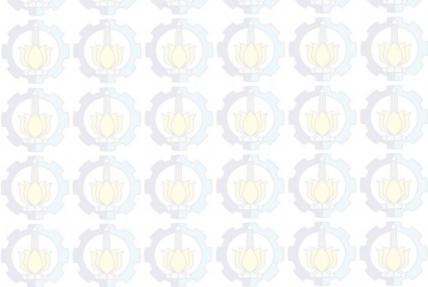
Bappeko	
Dasar hukum organisasi	 Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Bab II Pasal 3 bagian (5)) Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Bab III Bagian Keempat Paragraf 1 Pasal 36) Peraturan Walikota Surabaya No. 93 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya
	Badan Perencanaan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah bidang perencanaan pembangunan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Perencanaan Pembangunan, melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang:
Tugas pokok dan fungsi organisasi	 pekerjaan umum; perumahan; penataan ruang; perencanaan pembangunan; otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian; dan statistik. Badan Perencanaan Pembangunan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi : perumusan kebijakan teknis perencanaan;

	7
	pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perangan pembangunan:
	perencanaan pembangunan;
	pengelolaan ketatausahaan;
	pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan
	oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan
	fungsi <mark>nya.</mark>
	1. Badan
	2. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
	a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
	b. Sub bagian Data dan Penyusunan Rencana
	Kerja
	3. Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur
	Pemerintahan, terdiri dari:
	a. Sub bidang Kesejahteraan Rakyat
	b. Sub bidang Aparatur Pemerintahan dan
Struktur	Kependudukan
organisasi	4. Bidang Fisik dan Prasarana, terdiri dari:
	a. Sub bidang Lingkungan Hidup dan Tata
	Ruang Wilayahtu
	b. Sub bidang Perhubungan dan Pematusan
	5. Bidang Ekonomi, terdiri dari:
	a. Sub bidang Pertanian, Kelautan dan
	Pariwisata Pariwisata
	b. Sub bidang Pembangunan Dunia Usaha
	6. Unit Pelaksana Teknis Badan
	7. Jabatan Fungsional Tertentu
	1

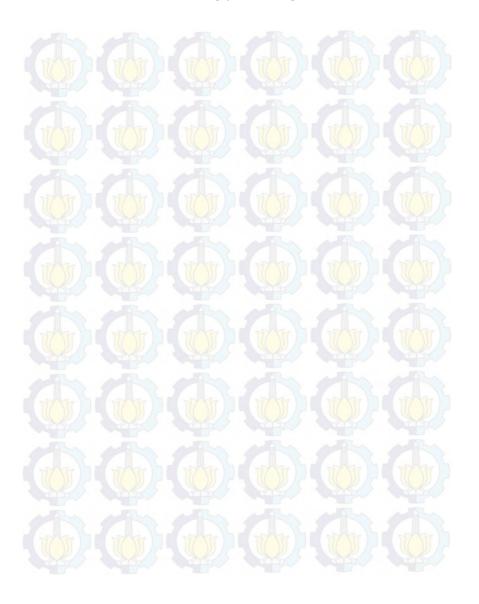
Tabel B. 2 Dasar hukum dan tupoksi Diskominfo Kota Surabaya

Diskomin	fo
Tugas pokok dan fungsi organisasi	Pasal 118
	Sesuai dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011, Dinas Komunikasi dan Informatika
	mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas
	pembantuan di bidang komunikasi dan informatika. Pasal 119
	Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, Dinas Komunikasi dan
	Informatika mempunyai fungsi:

	 a. perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika;
	b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum;
	c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sebagaiman <mark>a dim</mark> aksud d <mark>alam</mark> Pasal 1 <mark>18;</mark>
	d. pengelolaan ketatausahaan Dinas;dane. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
The same	e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
	Secara umum, Dinkominfo membawahi 50 personil yang terbagi dalam 4 (empat) bidang, yaitu: • sekretariat
Struktur organisasi	bidang sarana komunikasi dan diseminasi informasi (SKDI)
	bidang aplikasi dan telematika (APTEL)bidang pos dan telekomunikasi (POSTEL)



Halaman ini sengaja dikosongkan



Lampiran C

Lampiran berikut berisi dokumentasi wawancara, yang meliputi pertanyaan dan jawaban yang diberikan dari interviewee.

Tabel C. 1 Daftar pertanyaan dan jawaban wawancar	Tabel C. 1	Daftar pertany	yaan dan jawaban	wawancara
---	------------	----------------	------------------	-----------

Tujuan pertanyaan:					
Penggalian informasi pengembangan e-Government Kota					
Surab	Surabaya				
Interviewee: Bappeko Surabaya Melalui Rizka Fadhillah, S.T					
No	Pertanyaan	Jawaban			
1	Apa yang dimaksud dengan e-Government Kota Surabaya?	Bentuk pemanfaatan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk meningkatkan pelayanan publik			
2	Apa dasar hukum pengembangan e-Government di Surabaya?	Peraturan Walikota Surabaya Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			
3	Apa tujuan pengembangan e-Government di Kota Surabaya?	E-Government di Kota Surabaya dilakukan dengan pemanfaatan TIK untuk meningkatkan kualitas pengolahan data, pengelolaan informasi, perbaikan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan Pemerintah Daerah. Serta pemanfatan TIK untuk meningkatkan kualitas layanan publik berupa peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih			

		baik. Sehingga dapat mewujudkan layanan prima bagi masyarakat kota Surabaya dan pemangku kepentingan lain.
4	Adakah spesifikasi area bisnis e-Government di Kota Surabaya?	Dalam pemerintahan, area bisnis yang dimaksud bisa disebut dengan kelompok aktivitas. Penerapan e-Government di Kota Surabaya terbagi atas 2 kelompok aktivitas yang saling berkaita, yaitu: pemanfaatan TIK untuk meningkatkan pengelolaan informasi, perbaikan sistem manajemen dan proses kerja. Serta pemanfaatan TIK untuk meningkatkan kualitas layanan publik.
5	Adakah permasalahan yang meliputi selama proses pengambangan e-Government tersebut?	Permasalahan umum dalam pengembangkan e-Government tidak jauh-jauh terkait dengan proses, data dan informasi, organisasi dan birokrasi dan SDM.
6	Apakah terdapat mekanisme pengelolaan manajemen portfolio aplikasi yang terdokumentasi dan terstruktur dengan baik?	Tidak ada aturan khusus yang mengatur hal itu, selama ini Bappeko dan SKPD teknis, yaitu Diskominfo dan SKPD lainnya yang memiliki layanan publik tersebut hanya berkoordinasi untuk melakukan hal-hal yang dibutuhkan saja, misalnya mengumpulkan data, analisis.

Tujuan pertanyaan:

Penggalian informasi alur manajemen portfolio aplikasi layanan publik berbasis online, termasuk seleksi dan prioritisasi kekinian serta permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaannya

Interviewee:

Bappeko Surabaya

No	alui Rizka Fadhillah, S.T dan M. Pertanyaan	Jawaban	
	Pada dasarnya, apakah tujuan dari migrasi layanan publik dari yang semula offline menjadi online seperti apa yang diupayakan Pemkot Surabaya ini?	Tujuan dari upaya migrasi sistem tersebut adalah mewujudkan adanya layanan publik yang transparan, efisien waktu dan biaya serta memberi kemudahan kepada masyarakat Kota Surabaya dalam menggunakan layanan publik tersebut. Hal ini sesuai dengan petunjuk Walikota Surabaya, Ibu Risma Tri Harini yang dalam Visi Misi nya memang menginginkan hal itu.	
2	Bagaimana kondisi pelaksanaan layanan publik sebelum masa kepemimpinan Ibu Risma Tri Harini?	Sebelum masa kepemimpinan Ibu Risma, teknologi informasi tidak menjadi hal yang difokuskan oleh walikota sebelumnya. Teknologi informasi digunakan oleh hanya beberapa SKPD yang memiliki posisi strategis dan kesadaran untuk mengupayakan TI dengan lebih baik. Hal itu diwujudkan dengan adanya beberapa sistem informasi internal, namun sifatnya hanya untuk mempermudah dan mempercepat layanan	

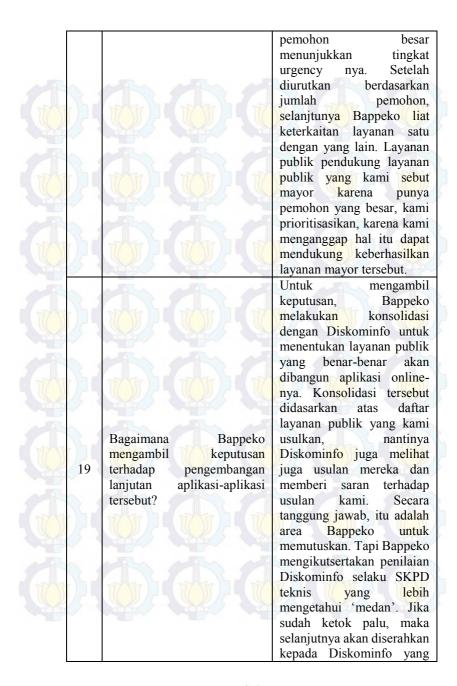
	Sampai saat ini, ada	publik yang diberikan masyarakat, bukan penggunaan aplikasi atau sistem oleh masyarakat- nya. Terdapat 154 layanan
3	berapakah jumlah layanan publik yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Surabaya?	publik, perijinan maupun non-perijinan.
4	Layanan publik apa sajakah yang direncanakan untuk dimigrasikan menjadi sistem online?	Yang akan dionlinekan adalah layanan perijinan dan non perijinan, dimana tercatat terdapat 154 layanan publik administratif (daftar terlampir). Sampai tahun 2014 ini, tercatat 24 layanan publik yang sudah memiliki aplikasi onlinenya, dimana ke-24 aplikasi layanan publik online tersebut dimiliki 9 SKPD.
5	Apakah satu layanan akan menjadi satu aplikasi untuk sistem online-nya?	Ya, satu layanan akan dibuat aplikasi online-nya. Dimana nanti aplikasi online tersebut akan terintegrasi dalam satu portal yang selama ini disebut dengan SSW (Surabaya Single Window).
6	Berapa target layanan yang tahun ini akan dionline-kan?	Sesuai dengan RPJMD tahun 2010 – 2015, disebutkan bahwa target selama 5 tahun tersebut adalah pembangunan 25 sistem/aplikasi online untuk layanan publik, sehingga keputusannya 25 aplikasi tersebut akan dibagi dalam kurun waktu 5 tahun dimana hasilnya adalah setiap tahunnya harus dibangun

		minimal 5 aplikasi. Hal tersebut nantinya akan terjelawantahkan dalam RKPD setiap tahun.
7	SKPD manakah yang memiliki sumber daya TI paling siap untuk menjalankan aplikasi layanan publik online?	Sesuai dengan survey tahun 2013, dengan hanya melihat jumlah infrastruktur TI dan fungsional TI yang mendukung, terdapat 3 SKPD yang bisa dibilang memiliki sumber daya TI yang lebih baik daripada SKPD lain, yaitu Dinas Kesehatan, Komunikasi Informatika dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
8	Apakah ada peraturan tertentu yang mengatur tentang mekanisme pengembangan aplikasi, mulai dari perencanaan hingga tahap development nya?	Tidak ada Masing-masing dari kami (Bappeko dan Diskominfo) selaku pihak yang terkait dengan urusan perencanaan hingga development TI hanya menggunakan gut feeling dan pengetahuan yang terbatas untuk melaksanakannya.
9	Apakah mekanisme pengembangan aplikasi dari awal sampai akhir tersebut dirasa sudah baik atau efektif?	Kalau baik mungkin belum karena beberapa kendala masih sering kami temui. Kami menyadari bahwa hal yang kami lakukan ini tidak memiliki dasar keilmuan, sehingga berakibat pada ketidakkonsistensian dalam proses-proses yang kami lakukan.
10	Apakah pada Bappeko juga melakukan pengumpulan data terhadap aplikasi	Ya, Bappeko melakukan survey untuk mengetahui seluruh layanan publik yang

khususnya dalam rangka migrasi sistem manual ke sistem online ini untuk layanan publik?	ada di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
Bagaimana mekanisme pengusulan layanan publik untuk dimigrasikan menjadi sistem online?	Setelah daftar layanan publik tersebut kami dapat, selanjutnya kami memfilter mana saja yang sudah memiliki aplikasi onlinenya. Masing-masing layanan publik yang belum punya aplikasi tersebut kami prioritisasikan dengan melihat jumlah pemohon. Layanan publik yang memiliki jumlah pemohon yang besar dan meningkat tiap tahunnya kami prioritisasikan, dengan mengambil 5 layanan dengan pemohon tertinggi. Selanjutnya, kami juga melihat keterkaitan masingmasing dari kelima layanan tersebut yang sudah disaring, dengan layanan lain. Kami menganggap bahwa jika satu layanan punya keterkaitan dengan layanan lain, hal itu harus ditangani membangun seluruhnya. Disitulah muncul kelemahannya, yaitu dimungkinkan kami harus membangun lebih dari 5 aplikasi layanan publik oleh karena ada layanan lainnya. Singkatnya, kami

		menjadikan daftar tersebut sebagai usulan pengembangan yang akan dikonsolidasikan kepada Diskominfo. Perlu diketahui juga, Diskominfo juga melakukan prioritisasi dan menghasilkan usulan juga, meskipun mekanismenya berbeda. Hal ini juga yang menjadi kendala kami karena ada dua analisis yang berbeda di waktu yang bersamaan.
12	Siapa saja aktor-aktor yang berperan dalam pengusulan tersebut?	Bappeko dan Diskominfo, meskipun secara tanggung jawab, pengusulan itu termasuk dalam konteks perencanaan, dan itu adalah kewenangan Bappeko.
13	Apakah dalam fase pengumpulan informasi layanan publik yang dionline kan tersebut, sudah termasuk pengumpulan informasi karakteristik dari aplikasinya? Atau hanya sekedar usulan yang kemudian menjadi area Diskominfo untuk membangun arsitektur aplikasinya?	Tidak. Pengumpulan informasi tersebut hanya meliputi nama layanan publik, pemilik layanan publik, proses bisnis, dasar hukum, waktu pemrosesan.
14	Setelah fase pengumpulan informasi layanan publik tersebut, lalu apakah Bappeko menyeleksi? Jika ya, apakah ada aturan atau dasar hukum yang menetapkan hal tersebut?	Setelah diketahui layanan publik yang akan di-online-kan, maka selanjutnya Bappeko memprioritisasikan dengan pertimbangan tertentu. Tidak ada dasar hukum yang mengatur hal tersebut.

		Ya, sama. Bappeko dan
15	Dalam konteks prioritisasi, siapa aktor yang terlibat? Apakah sama seperti pada mekanisme manajemen portfolio aplikasi?	Diskominfo sama-sama melakukan prioritisasi dengan cara kami sendirisendiri. Bappeko punya pertimbangan, Diskominfo juga. Jadi selama ini, kadang-kadang hal yang kami hasilkan itu berbeda.
16	Secara aturan, apakah ada pemisahan kewenangan antara Bappeko dan Diskominfo untuk melakukan hal itu? Mengapa bisa sampai melakukan hal yang sama?	Secara dasar, yang berhak menentukan perencanaan pembangunan aplikasi adalah Bappeko, karena Bappeko adalah badan perencana. Tapi Bappeko di sisi lain punya keterbatasan dalam memahami kondisi riil pembangunan aplikasi tersebut, dimana hal itu sudah ada di area Diskominfo.
17	Setelah didapat informasi aplikasi layanan publik online tersebut, apakah Bappeko melakukan analisis terhadap: - Business process support? - Strategic fit? - Value/ benefits? - Cost? - Risk? - Lifecycle? - Relation and dependencies?	Dari indikator tersebut, yang kami gunakan hanya Relation, dimana konteks relasi tersebut erat kaitannya apa yang kami sebut dengan keterkaitan dengan layanan lain.
18	Hal apa saja yang Bappeko pertimbangan untuk menilai, layanan mana yang lebih prioritas?	Bappeko menggunakan faktor kategori jumlah pemohon layanan yang tiap tahun kami update. Layanan publik yang punya



20	Apakah Bappeko pernah mengeliminasi aplikasi tersebut jika ternyata tidak sesuai dengan pertimbangan tertentu? Artinya Bappeko berhak melakukan seleksi dengan sistem gugur, mungkin?	sesuai kewenangannya untuk membangun aplikasi tersebut. Tidak, kami tidak menggunakan sistem gugur jika yang dimaksud gugur tersebut adalah dihapus dari daftar. Sesuai dengan instruksi walikota, bahwa seluruh layanan publik akan dibuatkan aplikasi onlinenya. Namun karena keterbatasan waktu dan anggaran, maka kami selaku badan perencana harus dapat merencanakan pengembangan tiap tahun dengan baik. Kami hanya menunda pembuatan aplikasi, namun pada gilirannya seluruh layanan publik akan memiliki aplikasi online-nya yang akan terintegrasikan dalam SSW.
21	Apakah Diskominfo berhak melakukan pengaturan ulang terhadap urutan pengerjaan aplikasi?	Ya, oleh karena konsolidasi yang mempertemukan usulan Bappeko dan Diskominfo, otomatis akan ada risiko untuk merubah hasil prioritisasi yang kami sudah lakukan. Hal tersebut disebabkan karena Diskominfo memiliki pandangan lain yang sifatnya lebih teknis yang tidak kami cover dalam prioritisasi yang kami lakukan.
22	Jika Bappeko dalam pengambilan keputusan	Secara tertulis, kami tidak punya mekanisme filterisasi

	mempertimbangkan visi misi atau kebijakan walikota, bagaimana memfilter keselarasan strategis dari aplikasi terhadap rencana pembangunan walikota?	keselarasan tersebut. Tapi kami menggunakan gut feeling untuk menebak, layanan yang selaras dengan kebijakan Walikota untuk meningkatkan hal-hal terstentu. Tapi secara garis besar, itu tidak besar bobotnya.
23	Apakah Bappeko mempertimbangkan masalah benefit, tangible maupun intangible dalam pengambilan keputusan pengembangan aplikasi?	Tidak
24	Jika suatu SKPD yang memiliki layanan tersebut ternyata belum memiliki kecukupan SI/TI, namun layanan tersebut urgent, apakah Bappeko tetap mengupayakan pengembangan aplikasi tersebut atau membenahi terlebih dahulu SI/TI SKPD tersebut?	Selama ini, tidak melihat kesiapan SDTI dan SDM dari masing-masing SKPD dalam migrasi layanan publik. Sehingga jika ada kondisi suatu layanan dari SKPD X sudah jadi, namun ternyata SKPD tersebut belum memiliki kesiapan SDM/ SDTI, maka SKPD tersebut akan didorong untuk memperbaikinya.
25	Apakah faktor di bawah ini mempengaruhi prioritisasi? - Scope - Strategic match - Resource - Time - Risk - Technical	Tidak.
26	Isu-isu apa sajakah yang dapat mendorong prioritisasi yang dilakukan Bappeko ini menjadi berhasil?	Adanya proses yang dua kali dilakukan oleh dua pihak yang berbeda, tumpeng tindih kewenangan, Bappeko

	memiliki posisi yang lemah		
	untuk	mempe	rtahankan
	usulan	karena	tidak
	memiliki	model	penilaian
	yang	konsiste	n dan
	terdokum	entasi.	

Tujuan pertanyaan:

Penggalian informasi alur manajemen portfolio aplikasi layanan publik berbasis online yang dilaksanakan oleh Diskominfo, termasuk seleksi dan prioritisasi kekinian serta permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaannya

Interviewee:

Diskominfo Surabaya

Melalui Yudho Febriadi, S.Kom, M.T

No	Pertanyaan () //	Jawab <mark>an</mark>
Dalam rangka pengembangan aplikasi layanan publik online di Kota Surabaya, apa peran Diskominfo? Diskominfo? Diskoteknis salah menge inform denga kota. posisi pembaterseb diingi		Diskominfo selaku SKPD teknis mempunyai tupoksi salah satunya yaitu untuk mengembangkan sistem informasi yang terkait dengan infrastruktur tata kota. Jadi, bisa dipastikan, posisi Diskominfo adalah pembangun dari sistem tersebut, jika aplikasi yang diinginkan tidak diserahkan kepada vendor.
2	Apakah Diskominfo tidak campur tangan terhadap prioritisasi pembangunan aplikasi tersebut?	Diskominfo tetap memiliki peran dalam priorioritisasi, khususnya dalam memberi usulan terhadap pengambilan keputusan yang secara sah ada di tangan Bappeko. Namun usulan kami sifatnya sekunder, artinya kami hanya mengusulkan. Biar Bappeko yang memutuskan.

	Seperti apa bentuk usulan tersebut? Bagaimana proses perumusannya?	Secara tertulis, kami tidak diwajibkan untuk membuat usulan seperti itu. Tidak ada pedoman khusus yang kami acu untuk merumuskannya. Kami menggunakan jalur analisis kebutuhan aplikasi, jadi kami analisis layanan publik mana yang belum punya aplikasi berbasis online nya di tiap-tiap SKPD. Sehingga kami tahu, bahwa layanan publik tersebut harus diprioritisasikan menurut pandangan kami. Setelah kami mendapat daftarnya, kami lalu melihat jumlah pemohonnya. Mana yang terbanyak, kami ambil. Alasan kami menggunakan jumlah pemohon adalah kami menganggap bahwa hal tersebut menunjukkan tingkat kebutuhan masyarakat. Hal lain yang kami analisis juga adalah kematangan TI SKPD.
4	Apakah Diskominfo juga mempertimbangkan masalah teknis lain yang dilihat dari perspektif aplikasi layanan publik itu sendiri?	Kami tidak ada batasan untuk hal itu. Misalnya waktu, kami menerima saja jika waktu yang dibutuhkan ternyata overdate atau lebih dari jadwal. Kami hanya tinggal menambah programmer. Ya intinya kami punya banyak strategi untuk menyiasati masalah teknis tersebut.
5	Jika Diskominfo sudah mendapat hasil prioritisasi	Kami mengusulkan daftar tersebut ke Bappeko. Nah

	atau seleksi tadi, lalu apa langkah selanjutnya?	selanjutnya kami berkonsolidasi dengan Bappeko untuk menentukan atau mengambil hasil final.	
6	Seperti yang saya tahu, bahwa Bappeko juga menggunakan analisis untuk menentukan prioritisasi aplikasi. Bagaimana Diskominfo menyikapi adanya usulan tersebut?	Kami menghormati usulan Bappeko karena tentu itu berdasar analisis tersebut yang sudah Bappeko pikirkan. Tapi kami juga berhak menilai menurut pandangan kami. Intinya kami menghormati usulan tersebut, namun pada saat konsolidasi, masing-masing dari kami berhak memberi pandangan, saran atau komentar.	
7	Apakah ada campur tangan dari walikota terkait pembangunan aplikasi?	Wah itu jelas ada, bahkan sangat kuat. Pada dasarnya kami mengikuti instruksi walikota untuk membangun aplikasi layanan publik apa. Kalau ada kasus, misalnya kami sudah punya jadwal sendiri, tiba-tiba ada instruksi dari Walikota, mau tidak mau kami harus memprioritaskan perintah Walikota dan menunda pengerjaan sebelumnya.	
Peng	an pertanyaan: galian informasi kebutuhan apkan pada metode seleksi dan	dan gambaran ideal yang prioritisasi	
Inter Bapp	viewee: eko Surabaya Ilui Rizka Fadhillah, S.T	A Chi	
No	Pertanyaan Pertanyaan	Jawaban	
210	Menurut Bappeko, mengapa	Ya memang harus diganti	
1	mekanisme prioritisasi yang selama ini dijalankan harus diganti?	karena selama ini Bappeko tidak menggunakan dasar teori apa-apa untuk	

		prioritisasinya. Hal ini berakibat pada lemahnya posisi kami untuk mempertahankan pendapat tentang urutan prioritas layanan yang akan dibangunkan aplikasi berbasis onlinenya. Selain itu, kami ingin menegaskan posisi kami selaku pihak perencana, bahwa yang kami putuskan adalah hasil final. Sehingga tidak akan terjadi kasus-kasus penggantian urutan prioritisas oleh karena adanya kepentingan dari luar. Bappeko mendorong untuk
	Apa keinginan Bappeko yang ingin diusung dalam mekanisme yang baru ini?	adanya mekanisme prioritisasi yang punya dasar teori yang kuat, sehingga hal tersebut dapat dipertanggunjawabkan validitasnya. Selain itu, dalam mekanisme ini kalau bisa melihat dari berbagai perspektif, sehingga kepentingan Diskominfo juga bisa di cover namun dengan cara yang berbeda dan tidak akan ada lagi aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan secara parallel oleh 2 subyek yang berbeda.
3	Apakah Bappeko setuju terhadap adanya panduan dalam menjustifikasi atau memberi penilaian ketika nantinya di proses prioritisasi tersebut ada	Ide bagus. Hal itu mohon agar dapat diupayakan karena kami tidak ingin sembarang dalam memunculkan nilai. Atau jangan sampai ada potensi

aktivitas penilaian pada	
masing-masing layanan?	ketika nantinya mekanisme
	ini dilaksanakan oleh orang
	yang berbeda. Kami
	menginginkan adanya
	sta <mark>ndari</mark> sasi ata <mark>u pa</mark> nduan
	dalam memberi nilai.

Tujuan pertanyaan:

Koordinasi & diskusi dalam rangka penyusunan perangkat penilaian, terkait dengan penilaian organisasi mengenai kriteria dan bobot yang diusulkan

Interviewee:

Bappeko Surabaya Melalui Rizka Fadhillah S T dan M. Ali Rakh

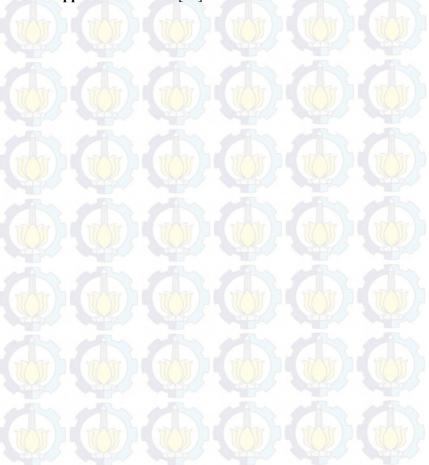
No	Pert anyaan Pert	Jawab <mark>an</mark> Jawaban
	Apakah kriteria penilaian yang disajikan sudah memenuhi kebutuhan Bappeko?	Ya sudah, kebutuhan organisasi yaitu Bappeko sudah terwakili dari kriteria penilaian tersebut. Untuk mekanisme yang diusulkan, Bappeko juga setuju karena kebutuhan Bappeko juga sudah terpenuhi.
2	Apakah kebutuhan informasi yang harus disediakan dalam tiap-tiap aktivitas dapat dipenuhi oleh Bappeko?	Sebagian besar sudah, namun kadang-kadang kendala bagi kami adalah kepemilikan dokumen yang dibutuhkan secara lapangan yang tidak di kami. Namun kami bisa mengusahakannya.
3	Apakah masukan yang Bappeko dapat berikan untuk perbaikan kriteria penilaian?	Dalam penamaan kriteria, sebisa mungkin untuk menghindari penggunaan kata-kata serapan dari luar (bahasa inggris) karena ada kemungkinan suatu saat kalau bukan dari kami yang menilai, akan muncul kebingungan. Serta penamaan yang umum

3		namun tepat sasaran untuk menggambarkan tujuan pengambilan nilai, diharapkan bisa memberi kesan 'membumi' terhadap organisasi.
4	Bagaimana menurut Bappeko pembobotan yang tepat terhadap kriteria tersebut? (sajikan usulan pembobotan yang menjadi referensi; dari Jiang & Klein)	Secara umum, kami setuju terhadap proporsi bobot tiap kriteria. Namun kami menekankan pada pentingnya penilaian yang utama dengan melihat jumlah pemohon dan kesiapan TI SKPD. Mungkin hal tersebut bisa menjadi pertimbangan peneliti dalam mengkomposisikan bobot tiap-tiap indikator. Namun secara umum, kami setuju terhadap usulan tersebut.
5	Adakan preferensi cara lain yang menurut Bappeko lebih baik dalam pembobotan?	Kami tidak memiliki ide lain bagaimana cara yang tepat untuk pembobotan. Kami rasa, usulan bobot baik yang berasal dari Jiang & Klein sudah dapat mewakili tingkat urgensi masing-masing kriteria. Hanya saja perlu adanya penyesuaian terhadap besar dari masing-masing kriteria sesuai dengan fokus penilaian organisasi, atau dalam hal ini adalah Bappeko. Pendekatan yang bisa kami lakukan adalah dengan mengurutkan berdasarkan tingkat kepentingan masing-masing kriteria.

6	Apakah Bappeko berkenan untuk melakukan pembobotan terhadap kriteria penilaian dengan pendekatan urutan berdasarkan urutan terakhir yang menurut Bappeko kurang penting?	Relasi terhadap publik Kesesuaian dengan prioritas pembangunan kota Kesiapan SKPD penyedia layanan Kategori jumlah pemohon layanan Pemenuhan terhadap peraturan pusat Responsi terhadap kompetisi Permintaan SKPD pemilik layanan	1 1 2 3 6
			5

Lampiran D

Lampiran berikut berisi hasil penilaian kesiapan TI SKPD yang dilakukan oleh peneliti dan Bappeko. Penilaian TI SKPD yang dilakukan melihat jumlah ketersediaan sumber daya manusia TI dan infrastruktur pendukung, yaitu server dan router. Data yang tertampil merupakan bagian dari hasil survey layanan publik Bappeko tahun 2014 [41].



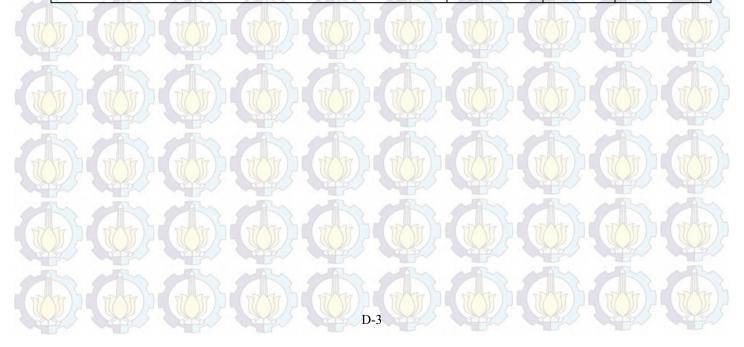
Tabel D. 1 Nilai kesiapan TI SKPD oleh Diskominfo

NAMA SKPD	NILAI E- READINESS	PERING KAT	KATEGORI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	193		275
DINAS PENDIDIKAN	60	2	
DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH	26	3	1
DINAS KESEHATAN	22	4 7	THE THE
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	18	5	257
DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	16	6	
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	15	7	
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	14	8	THE DESIGNATION OF THE PARTY OF
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	12	9	2
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	12	9	
BADAN LINGKUNGAN HIDUP	10	10	THE WAY
DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	9	11	All In
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH	6	12	1
DINAS PERHUBUNGAN	6	12	3
DINAS SOSIAL	6	12	2/5
DINAS PERTANIAN	4	13	
DINAS KEBAKARAN	2	14	

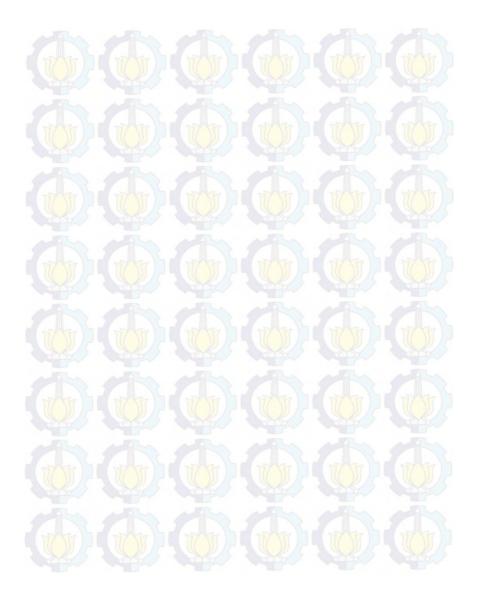


Tabel D. 1 Nilai kesiapan TI SKPD oleh Diskominfo

NAMA SKPD	NILAI E- READINESS	PERING KAT	KATEGORI
DINAS TENAGA KERJA	2/5	14	25
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PEMATUSAN	0	15	



Halaman ini sengaja dikosongkan



Lampiran E

Pada lampiran berikut, terdapat tabel daftar Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dalam penyajiannya, tabel berikut hanya menyebutkan bdang, jenis pelayanan dasar, dan standar pelayanan minimal berdasarkan dokumen Target dan Panduan Operasional SPM di Kabupaten/Kota, yang memiiki keterkaitan dengan pioritas pembangunan Kota Surabaya.

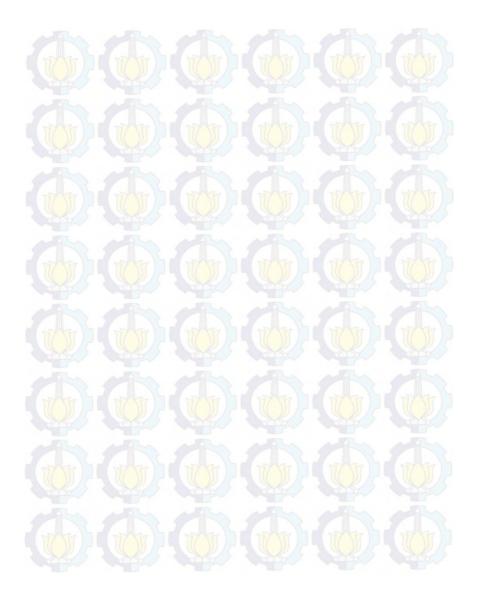
	-		~ .		
Tabel	Ю.	1	Standar	Pelayanan	Minimal

No	Bidang	Jenis pelayanan dasar
i	Kesehatan	 Pelayanan kesehatan dasar Pelayanan kesehatan rujukan Penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan kejadian luar biasa/ KLB Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
2	Lingkungan	 Pelayanan informasi status mutu air Pelayanan informasi status mutu udara ambien Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup Pelayanan pencegahan pencemaran air Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup
3	Pemerintah dalam negeri	Pelayanan kependudukanPemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat

		Penanggulangan bencana kebakaran
	Sosial	 Pelaksanaan program/ kegiatan bidang sosial a) Pemberian bantuan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial skala kab/kota b) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala kab/kota Penyediaan sarana dan prasarana sosial a) Penyediaan sarana prasarana panti sosial skala kab/kota b) Penyediaan sarana prasarana panti sosial skala kab/kota b) Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala kab/kota Penanggulangan korban bencana a) Bantuan sosial bagi korban bencana skala kab/kota
5	Layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan	 Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan Rehabilitas sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan Penegakan dan bantuan hokum bagi perempuan dan anak korban kekerasan Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan
6	Pendidikan dasar	 Pelayanan pendidikan dasar oleh kab/kota Pelayanan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan

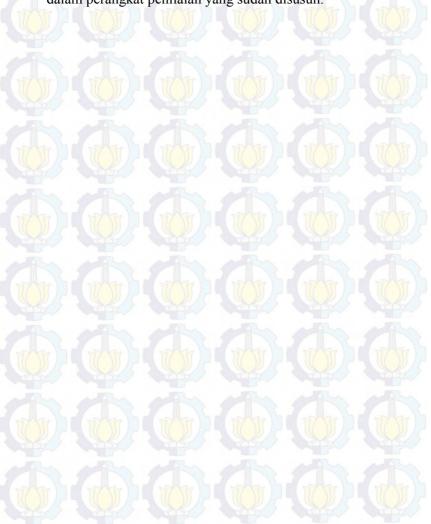
	Pekerjaan umum dan penataan ruang	Sumber daya air Prioritas utama penyediaan air untuk kebutuhan masyarakat Penyehatan lingkungan permukiman (sanitasi lingkungan dan persampahan) Penanganan permukiman kumuh perkotaan Penataan bangunan dan lingkungan a) Izin mendiirkan b) Harga standar Jasa konstruksi a) Izin usaha jasa kontruksi (IUJK) b) Sistem informasi jasa konstruksi Penataan ruang a) Informasi penataan ruang b) Pelibatan peran masyarakat dalam proses penyusunan RTR c) Izin pemanfaatan ruang d) Pelayanan pengaduan pelanggaran tata ruang e) Penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) publik
8	Ketenagakerjaa n	 Pelayanan pelatihan kerja Pelayanan penempatan tenaga kerja Pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial Pelayanann kepesertaan jamsostek Pelayanan pengawasan ketenagakerjaan
9	Kesenian	 Perlindungan, Pengembangan dan pemanfaatan bidang kesenian Sarana dan prasarana

Halaman ini sengaja dikosongkan



Lampiran F

Lampiran berikut berisi tabel hasil penilaian masing-masing layanan publik administratif yang menjadi input penilaian, dalam perangkat penilaian yang sudah disusun.



A. Kesesuaian dengan prioritas pembangunan kota

Tabel F. 1 Hasil penilaian kriteria A

7	Kesesuaian dengan prioritas pembangunan kota						
No	NAMA LAYANAN	HASIL IDENTIFIKASI	ISIAN PENILAIAN	SKOR KRITERIA			
1	when when when	Way Way	1 sampai dengan 10	Isian x bobot (22%)			
1 //	Kajian drainase (rekomendasi)	// Infrastruktur	D/Ci	2.2			
2	Ijin utilitas (penggalian)	Infrastruktur	1	2.2			
3	Prasarana, sarana, dan utilitas	Infrastruktur	1 1	2.2			
4	Pelayanan perijinan	Pelayanan kesehatan	3	1.76			
5	Izin pendirian dan penutupan sekolah	Pelayanan pendidikan	2	1.98			
6	Izin pendirian dan penutupan lembaga kursus	Pelayanan pendidikan	2	1.98			
7	Izin pembuangan limbah tinja	Lingkungan hidup serta penataan ruang	9	0.44			
8	Izin ruang terbuka hijau	Lingkungan hidup serta penataan ruang	9 7	0.44			
9	Izin pemakaman	Kesejahteraan sosial masyarakat	4	1.54			
10	Izin pembuangan sampah ke TPA	Lingkungan hidup serta penataan ruang	9	0.44			
11	Rekomendasi sistem proteksi gedung bertingkat	Kesejahteraan sosial masyarakat	4	1.54			

Keses <mark>uaia</mark> n deng <mark>an p</mark> rioritas pembangunan kota						
No	NAMA LAYANAN	HASIL IDENTIFIKASI	ISIAN PENILAIAN	SKOR KRITERIA		
اج(را			1 sampai dengan 10	Isian x bobot (22%)		
12	Kartu keluarga	Reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	7	0.88		
13	Kartu tanda penduduk	Reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	7 7	0.88		
14	Kartu izin penduduk musiman dan surat keterangan orang terlantar	Reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	7	0.88		
15	Pendaftaran pindah datang dalam wilayah negara kesatuan ri	Reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	7	0.88		
16	Pendaftaran pindah datang antar negara	Reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	7	0.88		
17	Pencatatan kelahiran	Reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	7	0.88		
18	Pencatatan lahir mati	Reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	7)7	0.88		
19	Pencatatan kematian	Reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	7	0.88		
20	Pencatatan perkawinan bagi wni/orang asing	Reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	7	0.88		

175	Keses <mark>uaia</mark> n deng <mark>an p</mark> rioritas pembangunan kota Kesesuaian dengan prioritas pembangunan kota						
No	No NAMA LAYANAN	HASIL IDENTIFIKASI	ISIAN PENILAIAN	SKOR KRITERIA			
اج(را			1 sampai dengan 10	Isian x bobot (22%)			
21	Pencatatan perceraian	Reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	7	0.88			
22	Pelaporan peristiwa penting wni di luar negeri	Reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	7 7	0.88			
23	Pencatatan pengesahan anak	Reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	7	0.88			
24	Kutipan ke-ii dan seterusnya akta-akta catatan sipil	Reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	7	0.88			
25	Salinan akta-akta catatan sipil	Reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	7	0.88			
26	Perubahan akta-akta catatan sipil bagi wni	Reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	7	0.88			
27	Pembatalan akta-akta catatan sipil	Reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	7) 7 (7	0.88			
28	Penatausahaan hasil hutan	Kesejahteraan sosial masyarakat	4	1.54			
29	Rekomendasi instalasi karantina hewan sementara	Kesejahteraan sosial masyarakat	4	1.54			
30	Rekomendasi sertifikasi nomor kontrol veteriner	Kesejahteraan sosial masyarakat	4	1.54			
31	Perizinan pelayanan kesehatan hewan (izin praktik dr. Hewan)	Kesejahteraan sosial masyarakat	1) 4	1.54			

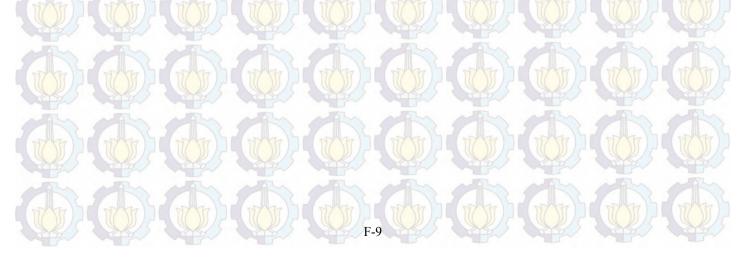
2/5"	Keses <mark>uaian dengan p</mark> rioritas pemban <mark>guna</mark> n kota						
No	NAMA LAYANAN	HASIL IDENTIFIKASI	ISIAN PENILAIAN	SKOR KRITERIA			
اج(را			1 sampai dengan 10	Isian x bobot (22%)			
32	Surat izin usaha penangkapan	Kesejahteraan sosial masyarakat	4	1.54			
33	Surat ijin pengelolaan ikan	Kesejahteraan sosial masyarakat	4	1.54			
34	Surat ijin pembudidayaan ikan	Kesejahteraan sosial masyarakat	4	1.54			
35	Surat ijin kapal pengangkut ikan	Kesejahteraan sosial masyarakat	4	1.54			
36	Rekomendasi andalalin	Kesejahteraan sosial masyarakat	4	1.54			
37	Ijin trayek/operasi	Kesejahteraan sosial masyarakat	4	1.54			
38	Ijin penyelenggaraan parkir	Kesejahteraan sosial masyarakat	4	1.54			
39	Surat tanda pendaftaran waralaba	Kualitas koperasi dan UMKM	5	1.32			
40	Izin usaha pengelolaan pasar tradisional (IUPPT)	Kualitas koperasi dan UMKM	5	1.32			
41	Izin usaha pusat perbelanjaan	Kualitas koperasi dan UMKM	5	1.32			
42	Izin usaha toko modern	Kualitas koperasi dan UMKM	5	1.32			
43	Tanda daftar gudang (TDG)	Kualitas koperasi dan UMKM	5	1.32			
44	Tanda dagang industri	Kualitas koperasi dan UMKM	5	1.32			
45	Penyelenggaraan pameran dagang	Kualitas koperasi dan UMKM	5	1.32			
46	Pelayanan rekomendasi perpanjangan ijinoperasional perusahaan penyedia jasa pekerja (PPJP)	Kemandirian kerja dan perluasan lapangan kerja	6	1.1			
47	Pelayanan pengesahan peraturan perusahaan	Kemandirian kerja dan perluasan lapangan kerja	6	1.1			

2/5"	Keses <mark>uaia</mark> n den <mark>gan p</mark> riorita <mark>s pe</mark> mban <mark>guna</mark> n kota						
No	NAMA LAYANAN	HASIL IDENTIFIKASI	ISIAN PENILAIAN	SKOR KRITERIA			
ا چ (را			1 sampai dengan 10	Isian x bobot (22%)			
48	Pelayanan pendaftaran perjanjian kerja sama (PKB)	Kemandirian kerja dan perluasan lapangan kerja	6	1.1			
49	Pelayanan pencatatan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT)	Kemandirian kerja dan perluasan lapangan kerja	6	1.1			
50	Pengesahan P2K3 (panitia pembina keselamatan & kesehatan kerja)	Kemandirian kerja dan perluasan lapangan kerja	6	1.1			
51	Pengesahan pemakaian peralatan K3	Kemandirian kerja dan perluasan lapangan kerja	6	1.1			
52	Pengesahan wajib lapor ketenagakerjaan	Ke <mark>mand</mark> irian kerj <mark>a dan</mark> perluasan lapangan kerja	6	1.1			
53	Rekomendasi PJK3	Kemandirian kerja dan perluasan lapangan kerja	6	1.1			
54	Rekomendasi katering	Kemandirian kerja dan perluasan lapangan kerja	J) 6 T	1.1			
55	Perijinan tempat penampungan calon tenaga kerja indonesia (TKI)	Kemandirian kerja dan perluasan lapangan kerja	6	1.1			
56	Rekomendasi paspor calon tki ke luar negeri	Kemandirian kerja dan perluasan lapangan kerja	6	1.1			

Keses <mark>uaia</mark> n deng <mark>an p</mark> rioritas pembangunan kota						
No	NAMA LAYANAN	HASIL IDENTIFIKASI	ISIAN PENILAIAN	SKOR KRITERIA		
ا چ (را			1 sampai dengan 10	Isian x bobot (22%)		
57	Rekomendasi pendirian cabang pelaksana penempatan tenaga kerja indonesia swasta (PPTKIS)	Kemandirian kerja dan perluasan lapangan kerja	6	1.1		
58	Lembaga penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS)	Kemandirian kerja dan perluasan lapangan kerja	6	117		
59	Persetujuan bursa kerja khusus (BKK)	Kemandirian kerja dan perluasan lapangan kerja	6	1.1		
60	Perizinan & pendaftaran lembaga pelatihan kerja swasta (LPKS)	Kemandirian kerja dan perluasan lapangan kerja	6	1.1		
61	Kartu nomor induk kesenian	Peran pemuda serta pengembangan seni, budaya dan olahraga	8	0.66		
62	Rekomendasi bantuan organisasi keagamaan /sosial	Kesejahteraan sosial masyarakat	4	1.54		
63	Rekomendasi undian gratis berhadiah (RUGB)	Kesejahteraan sosial masyarakat	4	1.54		
64	Rekomendasi adopsi	Kesejahteraan sosial masyarakat	4	1.54		
65	Rekomendasi ijin pengumpulan uang atau barang	Kesejahteraan sosial masyarakat	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1.54		
66	Penerbitan surat tanda pendirian organisasi sosial	Kesejahteraan sosial masyarakat	4	1.54		
67	Penerbitan surat tanda pendaftaran ulang organisasi sosial	Kesejahteraan sosial masyarakat	4	1.54		
68	Surat rekomendasi pemulangan orang terlantar	Kesejahteraan sosial masyarakat	4	1.54		

2/5"	Keses <mark>uaia</mark> n deng <mark>an p</mark> ri	orita <mark>s pe</mark> mban <mark>guna</mark> n kota	25	4/5
No	NAMA LAYANAN	HASIL IDENTIFIKASI	ISIAN PENILAIAN	SKOR KRITERIA
			1 sampai dengan 10	Isian x bobot (22%)
69	Pemberian suarat rekomendasi pembebasan biaya pengobatan orang terlantar	Kesejahteraan sosial masyarakat	4	1.54
70	Pengesahan akta perubahan anggaran dasar koperasi	Kualitas koperasi dan UMKM	5	1.32
71	Pengesahan akta pendirian koperasi	Kualitas koperasi dan UMKM	5	1.32
72	Legalisasi badan hukum koperasi	Kualitas koperasi dan UMKM	5 5	1.32
73	Pembubaran koperasi	Kualitas koperasi dan UMKM	5	1.32
74	Rekomendasi pendirian koperasi tingkat provinsi	Kualitas koperasi dan UMKM	5	1.32
75	Rekomendasi pembukaan kantor cabang koperasi	Kualitas koperasi dan UMKM	5	1.32
76	Surat keterangan kepengurusan koperasi/legalitas	Kualitas koperasi dan UMKM	5	1.32
77	Perijinan layanan	Peran pemuda serta pengembangan seni, budaya dan olahraga	8	0.66
78	Ijin pemakaian bangunan	Reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	7	0.88
79	Rekomendasi ukl-upl	Lingkungan hidup serta penataan ruang	9	0.44
80	Rekomendasi analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL)	Lingkungan hidup serta penataan ruang	9	0.44
81	Izin pembuangan limbah cair (IPLC)	Lingkungan hidup serta penataan ruang	9 (0.44

2/5"	Keses <mark>uaian dengan prioritas pe</mark> mbangunan kota					
No	NAMA LAYANAN	HASIL IDENTIFIKASI	ISIAN PENILAIAN	SKOR KRITERIA		
			1 sampai dengan 10	Isian x bobot (22%)		
82	Pengelolaan limbah B3	Lingkungan hidup serta penataan ruang	9	0.44		
83	Izin pengelolaan air bawah tanah	Lingkungan hidup serta penataan ruang	9	0.44		
84	Layanan survey, magang, pkl	Kesejahteraan sosial masyarakat	4	1.54		
85	Penerbitan surat keterangan terdaftar ormas*	Kesejahteraan sosial masyarakat	4	1.54		
86	Perijinan pendirian rumah ibadah*	Kesejahteraan sosial masyarakat	4	1.54		
7.7						



B. Kesiapan SKPD penyedia layanan

Tabel F. 2 Hasil penilaian kriteria B

TO	Kesiapan SKPD	peny <mark>edi</mark> a layanan	7777	77
No	NAMA LAYANAN	HASIL IDENTIFIKASI	ISIAN PENILAIAN	SKOR KRITERIA
	TANKA EA TANAN	(SKPD penyedia layanan)	(1) Kategori 1, (2) Kategori 2, (3) Kategori 3	Isian x bobot (19%)
	Kajian drainase (rekomendasi)	DPU	3	0.19
2	Ijin utilitas (penggalian)	DPU	3	0.19
3	Prasarana, sarana, dan utilitas	DCKTR	3	0.19
4	Pelayanan perijinan	DINKES	THE PARTY OF THE P	0.57
5	Izin pendirian dan penutupan sekolah	DISPENDIK	1	0.57
6	Izin pendirian dan penutupan lembaga kursus	DISPENDIK		0.57
7	Izin pembuangan limbah tinja	DKP	2	0.38
8	Izin ruang terbuka hijau	DKP	2	0.38
9	Izin pemakaman	DKP DKP	2	0.38
10	Izin pembuangan sampah ke TPA	DKP	2	0.38
11	Rekomendasi sistem proteksi gedung bertingkat	DINKAR	3	0.19
12	Kartu keluarga	DISPENDUKCAPIL		0.57
13	Kartu tanda penduduk	DISPENDUKCAPIL	114	0.57
14	Kartu izin penduduk musiman dan surat keterangan orang terlantar	DISPENDUKCAPIL	1/	0.57

2/5"	Kesiapan SKPD) peny <mark>edia</mark> layan <mark>an</mark>	3,8/5	3615
No	NAMA LAYANAN	HASIL IDENTIFIKASI	ISIAN PENILAIAN	SKOR KRITERIA
		(SKPD penyedia layanan)	(1) Kategori 1, (2) Kategori 2, (3) Kategori 3	Isian x bobot (19%)
15	Pendaftaran pindah datang dalam wilayah negara kesatuan RI	DISPENDUKCAPIL	1	0.57
16	Pendaftaran pindah datang antar negara	DISPENDUKCAPIL	17	0.57
17	Pencatatan kelahiran	DISPENDUKCAPIL	1	0.57
18	Pencatatan lahir mati	DISPENDUKCAPIL		0.57
19	Pencatatan kematian	DISPENDUKCAPIL	-11	0.57
20	Pencatatan perkawinan bagi WNI/orang asing	DISPENDUKCAPIL	1	0.57_
21	Pencatatan perceraian	DISPENDUKCAPIL	1	0.57
22	Pelaporan peristiwa penting WNI di luar negeri	DISPENDUKCAPIL	1	0.57
23	Pencatatan pengesahan anak	DISPENDUKCAPIL	1	0.57
24	Kutipan ke-ii dan seterusnya akta-akta catatan sipil	DISPENDUKCAPIL		0.57
25	Salinan akta-akta catatan sipil	DISPENDUKCAPIL	1	0.57
26	Perubahan akta-akta catatan sipil bagi WNI	DISPENDUKCAPIL		0.57
27	Pembatalan akta-akta catatan sipil	DISPENDUKCAPIL	1	0.57
28	Penatausahaan hasil hutan	DISPERTAN	3	0.19
29	Rekomendasi instalasi karantina hewan sementara	DISPERTAN	3	0.19
30	Rekomendasi sertifikasi nomor kontrol veteriner	DISPERTAN	3	0.19

2/5"	Kesiapan SKPD	peny <mark>edia</mark> layanan	1965	365
No	NAMA LAYANAN	HASIL IDENTIFIKASI (SKPD penyedia layanan)	ISIAN PENILAIAN	SKOR KRITERIA
			(1) Kategori 1, (2) Kategori 2, (3) Kategori 3	Isian x bobot (19%)
31	Perizinan pelayanan kesehatan hewan (izin praktik dr. Hewan)	DISPERTAN	3	0.19
32	Surat izin usaha penangkapan	DISPERTAN	3	0.19
33	Surat ijin pengelolaan ikan	DISPERTAN	3	0.19
34	Surat ijin pembudidayaan ikan	DISPERTAN	3	0.19
35	Surat ijin kapal pengangkut ikan	DISPERTAN	3	0.19
36	Rekomendasi andalalin	DISHUB	3	0.19
37	Ijin trayek/operasi	DISHUB	3	0.19
38	Ijin penyelenggaraan parkir	DISHUB	3	0.19
39	Surat tanda pendaftaran waralaba	DISPERDAGIN	2	0.38
40	Izin usaha pengelolaan pasar tradisional (IUPPT)	DISPERDAGIN	2	0.38
41	Izin usaha pusat perbelanjaan	DISPERDAGIN	2	0.38
42	Izin usaha toko modern	- DISPERDAGIN	2 / -	0.38
43	Tanda daftar gudang (TDG)	DISPERDAGIN	2	0.38
44	Tanda dagang industri	DISPERDAGIN	2	0.38
45	Penyelenggaraan pameran dagang	DISPERDAGIN	2	0.38

11/5	Kesiapan SKPD penyedia layanan Kesiapan SKPD penyedia layanan						
No	NAMA LAYANAN	HASIL IDENTIFIKASI	ISIAN PENILAIAN	SKOR KRITERIA			
	NAMA LA TANAN	(SKPD penyedia layanan)	penyedia layanan) (1) Kategori 1, (2) Kategori 2, (3) Kategori 3	Isian x bobot (19%)			
46	Pelayanan rekomendasi perpanjangan ijin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja (PPJP)	DISNAKER	3	0.19			
47	Pelayanan pengesahan peraturan perusahaan	DISNAKER	3	0.19			
48	Pelayanan pendaftaran perjanjian kerja sama (PKB)	DISNAKER	3	0.19			
49	Pelayanan pencatatan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT)	DISNAKER	3	0.19			
50	Pengesahan P2K3 (panitia pembina keselamatan & kesehatan kerja)	DISNAKER	3	0.19			
51	Pengesahan pemakaian peralatan K3	DISNAKER	3	0.19			
52	Pengesahan wajib lapor ketenagakerjaan	DISNAKER	3	0.19			
53	Rekomendasi PJK3	DISNAKER	3	0.19			
54	Rekomendasi katering // // //	DISNAKER	3	0.19			
55	Perijinan tempat penampungan calon tenaga kerja indonesia (TKI)	DISNAKER	3	0.19			
56	Rekomendasi paspor calon TKI ke luar negeri	DISNAKER	3	0.19			
57	Rekomendasi pendirian cabang pelaksana penempatan tenaga kerja indonesia swasta (PPTKIS)	DISNAKER	3	0.19			

2/5"	Kesiapan SKPD	penyedia layanan	198/57	3615
No	NAMA LAYANAN	HASIL IDENTIFIKASI	ISIAN PENILAIAN	SKOR KRITERIA
	NAMA LATANAN	(SKPD penyedia layanan)	(1) Kategori 1, (2) Kategori 2, (3) Kategori 3	Isian x bobot (19%)
58	Lembaga penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS)	DISNAKER	3	0.19
59	Persetujuan bursa kerja khusus (BKK)	DISNAKER	3	0.19
60	Perizinan & pendaftaran lembaga pelatihan kerja swasta (LPKS)	DISNAKER	3	0.19
61	Kartu nomor induk kesenian	DISBUDPAR	2	0.38
62	Rekomendasi bantuan organisasi keagamaan /sosial	DINSOS	3	0.19
63	Rekomendasi undian gratis berhadiah (RUGB)	DINSOS	3	0.19
64	Rekomendasi adopsi	DINSOS	3	0.19
65	Rekomendasi ijin pengumpulan uang atau barang	DINSOS	3	0.19
66	Penerbitan surat tanda pendirian organisasi sosial	DINSOS	3	0.19
67	Penerbitan surat tanda pendaftaran ulang organisasi sosial	DINSOS	3	0.19
68	Surat rekomendasi pemulangan orang terlantar	DINSOS	3	0.19
69	Pemberian suarat rekomendasi pembebasan biaya pengobatan orang terlantar	DINSOS	3	0.19
70	Pengesahan akta perubahan anggaran dasar koperasi	DINKOP	3	0.19
71	Pengesahan akta pendirian koperasi	DINKOP	3	0.19
72	Legalisasi badan hukum koperasi	DINKOP	3/7	0.19

2/5"	Kesiapan SKPD	peny <mark>edia</mark> layanan	1965	365
No	NAMA LAYANAN	HASIL IDENTIFIKASI (SKPD penyedia layanan)	ISIAN PENILAIAN	SKOR KRITERIA
	TANKA BATANSI		(1) Kategori 1, (2) Kategori 2, (3) Kategori 3	Isian x bobot (19%)
73	Pembubaran koperasi	DINKOP	3	0.19
74	Rekomendasi pendirian koperasi tingkat provinsi	DINKOP	3	0.19
75	Rekomendasi pembukaan kantor cabang koperasi	DINKOP	3	0.19
76	Surat keterangan kepengurusan koperasi/legalitas	DINKOP	3	0.19
77	Perijinan layanan	DISPORA	2	0.38
78	Ijin pemakaian bangunan	DPBT	1	0.57
79	Rekomendasi ukl-upl	BLH	2	0.38
80	Rekomendasi analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL)	BLH	2	0.38
81	Izin pembuangan limbah cair (IPLC)	BLH	2	0.38
82	Pengelolaan limbah B3	BLH	2	0.38
83	Izin pengelolaan air bawah tanah	BLH BLH	2	0.38
84	Layanan survey, magang, PKL (BAKESBANGLINMAS -	(()2//-	0.38
85	Penerbitan surat keterangan terdaftar ormas*	BAKESBANGLINMAS	2	0.38
86	Perijinan pendirian rumah ibadah*	BAKESBANGLINMAS	2	0.38

C. Kategori jumlah pemohon layanan

Tabel F. 3 Hasil penilaian kriteria C

7	Kategori jumlah	pemohon layanan	THE DESIGNATION OF THE PARTY OF	TO TO
No	NAMA LAYANAN	HASIL IDENTIFIKASI	ISIAN PENILAIAN	SKOR KRITERIA
TNO	NAMA LA FANAN	(Jumlah pemohon)	(1) Low (2) Medium (3) high	Isian x bobot (15%)
\$1/5	Kajian drainase (rekomendasi)	N/A	N/A	0
2	Ijin utilitas (penggalian)	N/A	N/A	0
3	Prasarana, sarana, dan utilitas	N/A	N/A	0
4	Pelayanan perijinan	0,7	1 1	0.15
5	Izin pendirian dan penutupan sekolah	N/A	N/A	0/10
6	Izin pendirian dan penutupan lembaga kursus	N/A	N/A	0
7	Izin pembuangan limbah tinja	N/A	N/A	0
8	Izin ruang terbuka hijau	N/A	N/A	0
9	Izin pemakaman	07/77	7 7 1 1 77	0.15
10	Izin pembuangan sampah ke TPA	N/A	N/A	0
11	Rekomendasi sistem proteksi gedung bertingkat	N/A	N/A	0
12	Kartu keluarga		3	0.45
13	Kartu tanda penduduk		3	0.45
14	Kartu izin penduduk musiman dan surat keterangan orang terlantar	11346	3	0.45

275"	Kategori j <mark>um</mark> lah	pemohon layanan	18/5	4/5
NI.	NAMA LAVANAN	HASIL IDENTIFIKASI	ISIAN PENILAIAN	SKOR KRITERIA
No	NAMA LAYANAN	(Jumlah pemohon)	(1) Low (2) Medium (3) high	Isian x bobot (15%)
15	Pendaftaran pindah datang dalam wilayah negara kesatuan RI	N/A	N/A	0
16	Pendaftaran pindah datang antar negara	N/A	N/A	0
17	Pencatatan kelahiran		3	0.45
18	Pencatatan lahir mati		3	0.45
19	Pencatatan kematian		3	0.45
20	Pencatatan perkawinan bagi WNI/orang asing	N/A	N/A	0
21	Pencatatan perceraian ()	N/A	N/A) / 0
22	Pelaporan peristiwa penting WNI di luar negeri	N/A	N/A	0
23	Pencatatan pengesahan anak	N/A	N/A	0
24	Kutipan ke-ii dan seterusnya akta-akta catatan sipil	54792	3	0.45
25	Salinan akta-akta catatan sipil	54792	3	0.45
26	Perubahan akta-akta catatan sipil bagi WNI	N/A)	N/A	0
27	Pembatalan akta-akta catatan sipil	N/A	N/A	0
28	Penatausahaan hasil hutan	N/A	N/A	0
29	Rekomendasi instalasi karantina hewan sementara	N/A	N/A	0
30	Rekomendasi sertifikasi nomor kontrol veteriner	N/A	N/A	0

275"	Kategori j <mark>um</mark> lah p	oe <mark>moho</mark> n layanan	18/5	415
Nia		HASIL IDENTIFIKASI (Jumlah pemohon)	ISIAN PENILAIAN	SKOR KRITERIA
No	NAMA LAYANAN		(1) Low (2) Medium (3) high	Isian x bobot (15%)
31	Perizinan pelayanan kesehatan hewan (izin praktik dr. Hewan)	N/A	N/A	0
32	Surat izin usaha penangkapan	N/A/	N/A	0
33	Surat ijin pengelolaan ikan	N/A	N/A	0
34	Surat ijin pembudidayaan ikan	N/A	N/A	0
35	Surat ijin kapal pengangkut ikan	N/A	N/A	0
36	Rekomendasi andalalin	N/A	N/A	0
37	Ijin trayek/operasi (/)		N/A	0
38	Ijin penyelenggaraan parkir	104	2	0.3
39	Surat tanda pendaftaran waralaba	N/A	N/A	0
40	Izin usaha pengelolaan pasar tradisional (IUPPT)	N/A	N/A	0
41	Izin usaha pusat perbelanjaan	N/A	N/A	0
42	Izin usaha toko modern	N/A // / / / / / / / / / / / / / / / / /	N/A	0
43	Tanda daftar gudang (TDG)	103	2	0.3
44	Tanda dagang industri	232	2	0.3
45	Penyelenggaraan pameran dagang	168	2	0.3
46	Pelayanan rekomendasi perpanjangan ijin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja (PPJP)	N/A	N/A	0,0

1/5"	Kategori jumlah p	e <mark>moho</mark> n layanan	18/5	4/5
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		HASIL IDENTIFIKASI	ISIAN PENILAIAN	SKOR KRITERIA Isian x bobot (15%)
No	NAMA LAYANAN	(Jumlah pemohon)	(1) Low (2) Medium (3) high	
47	Pelayanan pengesahan peraturan perusahaan	N/A	N/A	0
48	Pelayanan pendaftaran perjanjian kerja sama (PKB)	N/A	N/A	0
49	Pelayanan pencatatan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT)	N/A	N/A	0
50	Pengesahan P2K3 (panitia pembina keselamatan & kesehatan kerja)	N/A	N/A	0
51	Pengesahan pemakaian peralatan K3	N/A	N/A	0
52	Pengesahan wajib lapor ketenagakerjaan	N/A)	N/A) / 0
53	Rekomendasi PJK3	N/A	N/A	0
54	Rekomendasi katering	N/A	N/A	0
55	Perijinan tempat penampungan calon tenaga kerja indonesia (TKI)	N/A	N/A	0
56	Rekomendasi paspor calon TKI ke luar negeri	(()) // N/A)) // T	N/A	0// 0
57	Rekomendasi pendirian cabang pelaksana penempatan tenaga kerja indonesia swasta (PPTKIS)	N/A	N/A	0
58	Lembaga penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS)	N/A	N/A	0
59	Persetujuan bursa kerja khusus (BKK)	N/A	N/A	0

2/5"	Kategori jumlah	pe <mark>moho</mark> n laya <mark>nan</mark>	16/5	4/5
N	NAMA LAYANAN	HASIL IDENTIFIKASI	ISIAN PENILAIAN	SKOR KRITERIA
No	NAMA LAYANAN	(Jumlah pemohon)		Isian x bobot (15%)
60	Perizinan & pendaftaran lembaga pelatihan kerja swasta (LPKS)	N/A	N/A	0
61	Kartu nomor induk kesenian	N/A	N/A	0
62	Rekomendasi bantuan organisasi keagamaan /sosial	45	1	0.15
63	Rekomendasi undian gratis berhadiah (RUGB)	36	1	0.15
64	Rekomendasi adopsi	33	1	0.15
65	Rekomendasi ijin pengumpulan uang atau barang	3	A I DA	0.15
66	Penerbitan surat tanda pendirian organisasi sosial	107())	2	0.3
67	Penerbitan surat tanda pendaftaran ulang organisasi sosial	107	2	0.3
68	Surat rekomendasi pemulangan orang terlantar	N/A	N/A	0
69	Pemberian suarat rekomendasi pembebasan biaya pengobatan orang terlantar			0.15
70	Pengesahan akta perubahan anggaran dasar koperasi	N/A	N/A	0
71	Pengesahan akta pendirian koperasi	N/A	N/A	0
72	Legalisasi badan hukum koperasi	N/A	N/A	0
73	Pembubaran koperasi	N/A	N/A	0
74	Rekomendasi pendirian koperasi tingkat provinsi	N/A	N/A	0

2/5	Kategori jumlah pemohon layanan					
No	NAMA LAYANAN	HASIL IDENTIFIKASI	ISIAN PENILAIAN (1) Low (2) Medium (3) high N/A	SKOR KRITERIA		
INO	NAMA LA LANAN	(Jumlah pemohon)	(2) Medium	Isian x bobot (15%)		
75	Rekomendasi pembukaan kantor cabang koperasi	N/A	N/A	0		
76	Surat keterangan kepengurusan koperasi/legalitas	N/A	N/A	0		
77	Perijinan layanan	N/A	N/A	0		
78	Ijin pemakaian bangunan	N/A	N/A	0		
79	Rekomendasi UKL-UPL	N/A	N/A	0		
80	Rekomendasi analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL)	N/A	N/A	0		
81	Izin pembuangan limbah cair (IPLC)	64	())) /- 1	0.15		
82	Pengelolaan limbah B3	N/A	N/A	0		
83	Izin pengelolaan air bawah tanah	N/A	N/A	0		
84	Layanan survey, magang, PKL		3	0.45		
85	Penerbitan surat keterangan terdaftar ormas*	29	77 7 7	0.15		
86	Perijinan pendirian rumah ibadah*	N/A	N/A	0		



D. Pemenuhan terhadap peraturan pusat

Tabel F. 4 Hasil penilaian kriteria D

7/5	Pemenuhan terhadap peraturan pusat					
No	o NAMA LAYANAN	HASIL IDENTIFIKASI	PENILAIAN KRITE (0) Tidak Isian (1) Ya bobot (1 0.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	SKOR KRITERIA		
7	The state of the state of	(Jumlah pemohon)		Isian x bobot (4%)		
	Kajian drainase (rekomendasi)	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun.		0.04		
2	Ijin utilitas (penggalian)	(Tidak ada)	0	0		
3	Prasarana, sarana, dan utilitas	(Tidak ada)	0	0		
4	Pelayanan perijinan	(Tidak ada)	0	0		
5	Izin pendirian dan penutupan sekolah	(Tidak ada)	0	0		
6	Izin pendirian dan penutupan lembaga kursus	(Tidak ada)	0	0		
7	Izin pembuangan limbah tinja	Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan.	1	0.04		
8	Izin ruang terbuka hijau	Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan.	j) i (T	0.04		

2/5"	P <mark>eme</mark> nuhan terha	dap <mark>peraturan pus</mark> at	2/5	4/5
No	NAMA LAYANAN	HASIL IDENTIFIKASI	ISIAN PENILAIAN	SKOR KRITERIA
7)		(Jumlah pemohon)	(0) Tidak (1) Ya	Isian x bobot (4%)
9	Izin pemakaman	(Tidak ada)	0	0
10	Izin pembuangan sampah ke TPA	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan.	1	0.04
11)	Rekomendasi sistem proteksi gedung bertingkat	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	1, 1	0.04
12	Kartu keluarga	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	1	0.04
13	Kartu tanda penduduk	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	i (T	0.04
14	Kartu izin penduduk musiman dan surat keterangan orang terlantar	(Tidak ada)	0	0
15	Pendaftaran pindah datang dalam wilayah negara kesatuan RI	(Tidak ada)	0	0
16	Pendaftaran pindah datang antar negara	(Tidak ada)	0/70	0
17	Pencatatan kelahiran	cakupan penerbitan akta kelahiran	1	0.04
18	Pencatatan lahir mati	(Tidak ada)	0	0
19	Pencatatan kematian	Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian	1 1	0.04
20	Pencatatan perkawinan bagi WNI/orang asing	(Tidak ada)	0	0

2/5"	Pemenuhan terha	dap <mark>pera</mark> turan pusat	25	45
No	NAMA LAYANAN	HASIL IDENTIFIKASI	1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	SKOR KRITERIA Isian x bobot (4%)
		(Jumlah pemohon)		
21	Pencatatan perceraian	(Tidak ada)	0	0
22	Pelaporan peristiwa penting WNI di luar negeri	(Tidak ada)	0	0
23	Pencatatan pengesahan anak	(Tidak ada)	0	0
24	Kutipan ke-ii dan seterusnya akta-akta catatan sipil	cakupan penerbitan akta kelahiran	1 ((0.04
25	Salinan akta-akta catatan sipil	cakupan penerbitan akta kelahiran	1	0.04
26	Perubahan akta-akta catatan sipil bagi WNI	cakupan penerbitan akta kelahiran	1	0.04
27	Pembatalan akta-akta catatan sipil	cakupan penerbitan akta kelahiran	1	0.04
28	Penatausahaan hasil hutan	(Tidak ada)	0	0
29	Rekomendasi instalasi karantina hewan sementara	(Tidak ada)	0	0
30	Rekomendasi sertifikasi nomor kontrol veteriner	(Tidak ada)	0	0
31	Perizinan pelayanan kesehatan hewan (izin praktik dr. Hewan)	(Tidak ada)	0	0
32	Surat izin usaha penangkapan	(Tidak ada)	0	0 7
33	Surat ijin pengelolaan ikan	(Tidak ada)	0	0
34	Surat ijin pembudidayaan ikan	(Tidak ada)	0	0
35	Surat ijin kapal pengangkut ikan	(Tidak ada)	0	0
36	Rekomendasi andalalin	(Tidak ada)	0	0
37	Ijin trayek/operasi	Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang) / I	0.04

175	Pemenuhan terh	adap <mark>pera</mark> turan pusat	25	4/3
No	NAMA LAYANAN	HASIL IDENTIFIKASI (Jumlah pemohon)	ISIAN PENILAIAN (0) Tidak (1) Ya	SKOR KRITERIA Isian x bobot (4%)
		menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota		
38	Ijin penyelenggaraan parkir	(Tidak ada)	0	0
39	Surat tanda pendaftaran waralaba	terselenggaranya pelayanan perijinan dan non perijinan bidang penanaman modal melalui pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal 100%		0.04
40	Izin usaha pengelolaan pasar tradisional (IUPPT)	(Tidak ada)	0	0
41	Izin usaha pusat perbelanjaan (())	(Tidak ada)) / 0) / 0 (
42	Izin usaha toko modern	(Tidak ada)	9000	0
43	Tanda daftar gudang (TDG)	(Tidak ada)	0	0
44	Tanda dagang industri	Terselenggaranya pelayanan perijinan dan non perijinan bidang penanaman modal melalui pelayanan Terpadu Satu Pintu		0.04

175	Pemenuhan terhad	lap peraturan pusat	25	45
No	NAMA LAYANAN	HASIL IDENTIFIKASI	ISIAN PENILAIAN (0) Tidak (1) Ya 0 1 0 1	SKOR KRITERIA
		(Jumlah pemohon)		Isian x bobot (4%)
		(PTSP) di bidang penanaman modal 100%		
45	Penyelenggaraan pameran dagang	(Tidak ada)	0	0
46	Pelayanan rekomendasi perpanjangan ijin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja (PPJP)	Be <mark>saran</mark> Pemeriks <mark>aan P</mark> erusahaan	1	0.04
47	Pelayanan pengesahan peraturan perusahaan	(Tidak ada)	0	0
48	Pelayanan pendaftaran perjanjian kerja sama (PKB)	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	1	0.04
49	Pelayanan pencatatan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT)	(Tidak ada)	0	0
50	Pengesahan P2K3 (panitia pembina keselamatan & kesehatan kerja)	(Tidak ada)	0	0
51	Pengesahan pemakaian peralatan K3	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	J))1(T	0.04
52	Pengesahan wajib lapor ketenagakerjaan	(Tidak ada)	0	0
53	Rekomendasi PJK3	(Tidak ada)	0	0
54	Rekomendasi katering	(Tidak ada)	0	0
55	Perijinan tempat penampungan calon tenaga kerja indonesia (TKI)	(Tidak ada)	0 0	0 (

2/5"	Pemenuhan terhac	lap peraturan pusat	25	415
No	NAMA LAYANAN	HASIL IDENTIFIKASI (Jumlah pemohon)	ISIAN PENILAIAN	SKOR KRITERIA
17/51			(0) Tidak (1) Ya	Isian x bobot (4%)
56	Rekomendasi paspor calon TKI ke luar negeri	(Tidak ada)	0	0
57	Rekomendasi pendirian cabang pelaksana penempatan tenaga kerja indonesia swasta (PPTKIS)	(Tidak ada)	0	0
58	Lembaga penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS)	(Tidak ada)	0	0
59	Persetujuan bursa kerja khusus (BKK)	(Tidak ada)	0	0
60	Perizinan & pendaftaran lembaga pelatihan kerja swasta (LPKS)	(Tidak ada)	0	0
61	Kartu nomor induk kesenian	Cakupan organisasi Pemerintah kabupaten/kota	T) I (T	0.04
62	Rekomendasi bantuan organisasi keagamaan /sosial	Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial. Untuk pemenuhan kebutuhan dasar.		0.04
63	Rekomendasi undian gratis berhadiah (RUGB)	(Tidak ada)	0 7	0
64	Rekomendasi adopsi	(Tidak ada)	0	0
65	Rekomendasi ijin pengumpulan uang atau barang	(Tidak ada)	0	0
66	Penerbitan surat tanda pendirian organisasi sosial	Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui	1	0.04

0/5	Pemenuhan terha	dap <mark>pera</mark> turan <mark>pus</mark> at	215	4/5
No	NAMA LAYANAN	HASIL IDENTIFIKASI (Jumlah pemohon)	ISIAN PENILAIAN (0) Tidak (1) Ya	SKOR KRITERIA Isian x bobot (4%)
		Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.		
67	Penerbitan surat tanda pendaftaran ulang organisasi sosial	Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.		0.04
68	Surat rekomendasi pemulangan orang terlantar	Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial.		0.04
69	Pemberian suarat rekomendasi pembebasan biaya pengobatan orang terlantar	Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial.	1	0.04
70	Pengesahan akta perubahan anggaran dasar koperasi	(Tidak ada)	0	0
71/-	Pengesahan akta pendirian koperasi	(Tidak <mark>ada)</mark>	0 ((0
72	Legalisasi badan hukum koperasi	(Tidak ada)	0	0

2/5"	Pemenuhan terhad	ap <mark>pera</mark> turan pusat	18/5	415
No	NAMA LAYANAN	HASIL IDENTIFIKASI (Jumlah pemohon)	ISIAN PENILAIAN	SKOR KRITERIA
			(0) Tidak (1) Ya	Isian x bobot (4%)
73	Pembubaran koperasi	(Tidak ada)	0	0
74	Rekomendasi pendirian koperasi tingkat provinsi	(Tidak ada)	0	0
75	Rekomendasi pembukaan kantor cabang koperasi	(Tidak ada)	0	0
76	Surat keterangan kepengurusan koperasi/legalitas	(Tidak ada)	0	0
77	Perijinan layanan	(Tidak ada)	0	0
78	Ijin pemakaian bangunan	(Tidak ada)	0	0
79	Rekomendasi UKL-UPL	(Tidak ada)	0	0
80	Rekomendasi analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL)	(Tidak ada)	0	
81	Izin pembuangan limbah cair (IPLC)	(Tidak ada)	0	0
82	Pengelolaan limbah B3	(Tidak ada)	0	0
83	Izin pengelolaan air bawah tanah	(Tidak ada)	0	0
84	Layanan survey, magang, PKL	(Tidak ada)	0 7	0
85	Penerbitan surat keterangan terdaftar ormas*	(Tidak ada)	0	0
86	Perijinan pendirian rumah ibadah*	(Tidak ada)	0	0

E. Responsi terhadap kompetisi

Tabel F. 5 Hasil penilaian kriteria E

abei r	. 5 Hasil penilaian kriteria E			
77	Pemenuhan terha	ndap peraturan pusat 🦳 🤍	TT I	17
No	NAMA LAYANAN	HASIL IDENTIFIKASI (Nama instansi pemerintahan pemilik portal pelayanan publik	ISIAN PENILAIAN	SKOR KRITERIA
	and and and	online)	(0) Tidak (1) Ya	Isian x bobot (11%)
1 /	Kajian drainase (rekomendasi)	Bontang Kota	U/C I	0.11
2	Ijin utilitas (penggalian)	Bontang Kota	1	0.11
3	Prasarana, sarana, dan utilitas	KPPT Palembang	1 1	0.11
4	Pelayanan perijinan	Pemkab Sleman, KPPT Palembang	1	0.11
5	Izin pendirian dan penutupan sekolah		0	0
6	Izin pendirian dan penutupan lembaga kursus	5 3 2 5 3 2 5 3 3	0	0
7	Izin pembuangan limbah tinja		0	0
8	Izin ruang terbuka hijau		0	0
9	Izin pemakaman	KPPT Palembang	1	0.11
10	Izin pembuangan sampah ke TPA		0	0 (
113	Rekomendasi sistem proteksi gedung bertingkat		0	0
12	Kartu keluarga		0	0
13	Kartu tanda penduduk		0	0
14	Kartu izin penduduk musiman dan surat keterangan orang terlantar	Pemkab Sleman	J)) I (((0.11

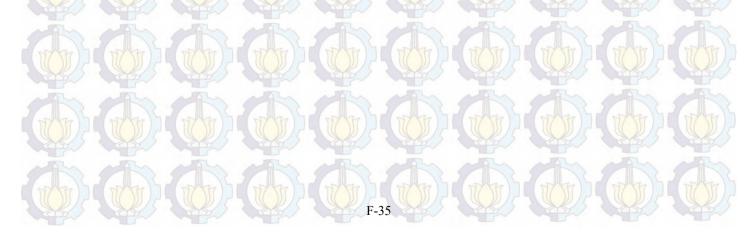
275	Pemenuhan terha	dap <mark>pera</mark> turan <mark>pus</mark> at	2/5	4/5
No	NAMA LAYANAN	HASIL IDENTIFIKASI (Nama instansi pemerintahan pemilik portal pelayanan publik	ISIAN PENILAIAN	SKOR KRITERIA
		online)	(0) Tidak (1) Ya	Isian x bobot (11%)
15	Pendaftaran pindah datang dalam wilayah negara kesatuan RI		0	0
16	Pendaftaran pindah datang antar negara	Pemkab Sleman, KPPT Palembang	1	0.11
17	Pencatatan kelahiran		0) - 0
18	Pencatatan lahir mati		0	0
19	Pencatatan kematian		0	0
20	Pencatatan perkawinan bagi WNI/orang asing		0	0
21	Pencatatan perceraian	and and a	0	0
22	Pelaporan peristiwa penting WNI di luar negeri		0 (0 (
23	Pencatatan pengesahan anak		0	0
24	Kutipan ke-ii dan seterusnya akta-akta catatan sipil		0	0
25	Salinan akta-akta catatan sipil		0	0
26	Perubahan akta-akta catatan sipil bagi WNI	AND AND AND	0	0 77
27	Pembatalan akta-akta catatan sipil		0	0
28	Penatausahaan hasil hutan	Bontang Kota	1	0.11
29	Rekomendasi instalasi karantina hewan sementara		0	0
30	Rekomendasi sertifikasi nomor kontrol veteriner		0	0
31	Perizinan pelayanan kesehatan hewan (izin praktik dr. Hewan)	Pemkab Sleman	1	0.11

	P <mark>eme</mark> nuhan terha	dap <mark>pera</mark> turan <mark>pus</mark> at	4/3	
No	NAMA LAYANAN	HASIL IDENTIFIKASI (Nama instansi pemerintahan	ISIAN PENILAIAN	SKOR KRITERIA
		pemilik portal pelayanan publik online)	(0) Tidak (1) Ya	Isian x bobot (11%)
32	Surat izin usaha penangkapan	KPPT Palembang		0.11
33	Surat ijin pengelolaan ikan	KPPT Palembang	1	0.11
34	Surat ijin pembudidayaan ikan	KPPT Palembang	1	0.11
35	Surat ijin kapal pengangkut ikan	KPPT Palembang	1 1 ((0.11
36	Rekomendasi andalalin		0	90
37	Ijin trayek/operasi	Bontang Kota, KPPT Palembang	1	0.11
38	Ijin penyelenggaraan parkir	Pemkab Sleman	1	0.11
39	Surat tanda pendaftaran waralaba	Pemkab Sleman	The last of the la	0.11
40	Izin usaha pengelolaan pasar tradisional (IUPPT)	Pemkab Sleman		0.11
41	Izin usaha pusat perbelanjaan	Pemkab Sleman	1	0.11
42	Izin usaha toko modern	Pemkab Sleman, KPPT Palembang	1	0.11
43	Tanda daftar gudang (TDG)	Pemkab Sleman	1	0.11
44	Tanda dagang industri	Pemkab Sleman, KPPT Palembang		0.11
45	Penyelenggaraan pameran dagang	Bontang Kota	1	0.11
46	Pelayanan rekomendasi perpanjangan ijin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja (PPJP)		0	0
47	Pelayanan pengesahan peraturan perusahaan		0	0
48	Pelayanan pendaftaran perjanjian kerja sama (PKB)	DATE DATE	0	0

	P <mark>eme</mark> nuhan terha	dap <mark>pera</mark> turan <mark>pus</mark> at	25	4/5
No	NAMA LAYANAN	HASIL IDENTIFIKASI (Nama instansi pemerintahan	ISIAN PENILAIAN	SKOR KRITERIA
		pemilik portal pelayanan publik online)	(0) Tidak (1) Ya	Isian x bobot (11%)
49	Pelayanan pencatatan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT)		0	0
50	Pengesahan P2K3 (panitia pembina keselamatan & kesehatan kerja)		0	0
51	Pengesahan pemakaian peralatan K3		0	0
52	Pengesahan wajib lapor ketenagakerjaan		0	0
53	Rekomendasi PJK3		0	0
54	Rekomendasi katering	and the state of the	0	0
55	Perijinan tempat penampungan calon tenaga kerja indonesia (TKI)		0	0
56	Rekomendasi paspor calon TKI ke luar negeri		0	0
57	Rekomendasi pendirian cabang pelaksana penempatan tenaga kerja indonesia swasta (PPTKIS)	and and a	0	0
58	Lembaga penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS)	TUDETUDETU	0/70	0
59	Persetujuan bursa kerja khusus (BKK)		0	0
60	Perizinan & pendaftaran lembaga pelatihan kerja swasta (LPKS)	A A A	0	0
61	Kartu nomor induk kesenian	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	0	0
62	Rekomendasi bantuan organisasi keagamaan /sosial		0 0	0

Pemenuhan terhadap peraturan pusat					
No	NAMA LAYANAN	HASIL IDENTIFIKASI (Nama instansi pemerintahan pemilik portal pelayanan publik	ISIAN PENILAIAN	SKOR KRITERIA	
1)/5"		online)	(1) Ya	bobot (11%)	
63	Rekomendasi undian gratis berhadiah (RUGB)		0	0	
64	Rekomendasi adopsi		0	0	
65	Rekomendasi ijin pengumpulan uang atau barang		0	0	
66	Penerbitan surat tanda pendirian organisasi sosial		0) / - 0	
67	Penerbitan surat tanda pendaftaran ulang organisasi sosial		0	0	
68	Surat rekomendasi pemulangan orang terlantar		0	0	
69	Pemberian suarat rekomendasi pembebasan biaya pengobatan orang terlantar		0 (
70	Pengesahan akta perubahan anggaran dasar koperasi		0	0	
71	Pengesahan akta pendirian koperasi		0	0	
72	Legalisasi badan hukum koperasi		0	0	
73	Pembubaran koperasi	THE THE PARTY OF T	0	0	
74	Rekomendasi pendirian koperasi tingkat provinsi		0	0	
75	Rekomendasi pembukaan kantor cabang koperasi		0	0	
76	Surat keterangan kepengurusan koperasi/legalitas		0	0	
77	Perijinan layanan		0	0	
78	Ijin pemakaian bangunan		0	0	
79	Rekomendasi UKL-UPL		0	0	

	Pemenuhan terha	idap <mark>pera</mark> turan <mark>pus</mark> at	45	415
No	NAMA LAYANAN	HASIL IDENTIFIKASI (Nama instansi pemerintahan	ISIAN PENILAIAN	SKOR KRITERIA
		pemilik portal pelayanan publik online)	(0) Tidak (1) Ya	Isian x bobot (11%)
80	Rekomendasi analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL)	KPPT Palembang	1	0.11
81	Izin pembuangan limbah cair (IPLC)	Bontang Kota, KPPT Palembang	1/1	0.11
82	Pengelolaan limbah B3		0	0 ((
83	Izin pengelolaan air bawah tanah	Bontang Kota	5 1	0.11
84	Layanan survey, magang, PKL		0	0
85	Penerbitan surat keterangan terdaftar ormas*		0	0
86	Perijinan pendirian rumah ibadah*	and I want of an	0	0



F. Adanya permintaan dari SKPD pemilik layanan

Tabel F. 6 Hasil penilaian kriteria F

7	Pemenuhan terhad	lap peraturan pusat	777	TO
No	NAMA LAYANAN	Ada Tidak ada	ISIAN PENILAIAN (0) Tidak (1) Ya	SKOR KRITERIA
	The same way			Isian x bobot (7%)
1 //	Kajian drainase (rekomendasi)	Ada	W/TI	0.07
2	Ijin utilitas (penggalian)	Tidak ada	0	0
3	Prasarana, sarana, dan utilitas	Tidak ada	0	0
4	Pelayanan perijinan	Ada	1	0.07
5	Izin pendirian dan penutupan sekolah	Tidak ada	0	0
6	Izin pendirian dan penutupan lembaga kursus	Tidak ada	0	0
7	Izin pembuangan limbah tinja	Tidak ada	0	0
8	Izin ruang terbuka hijau	Tidak ada	0	0
9	Izin pemakaman	Tidak ada	0	0
10	Izin pembuangan sampah ke TPA	Tidak ada	0	0 ((
113	Rekomendasi sistem proteksi gedung bertingkat	Tidak ada	0	0
12	Kartu keluarga	Tidak ada		0
13	Kartu tanda penduduk	Tidak ada		0
14	Kartu izin penduduk musiman dan surat keterangan orang terlantar	Tidak ada	0	0 0

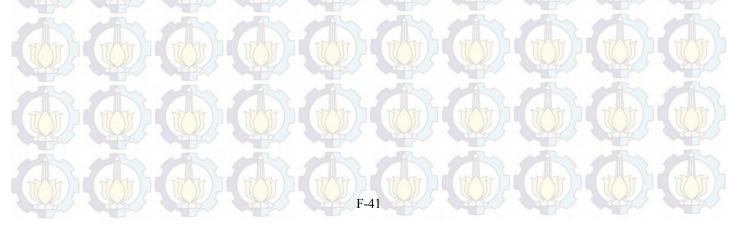
1)/5"	Pemenuhan terhac	lap <mark>per</mark> aturan <mark>pus</mark> at	145	4/5
No	NAMA LAYANAN	HASIL IDENTIFIKASI	ISIAN PENILAIAN	SKOR KRITERIA
			(0) Tidak (1) Ya	Isian x bobot (7%)
15	Pendaftaran pindah datang dalam wilayah negara kesatuan RI	Tidak ada	0	0
16	Pendaftaran pindah datang antar negara	Tidak ada	0	0
17	Pencatatan kelahiran	Tidak ada 🚺 🗸 👢	0	0_0
18	Pencatatan lahir mati	Tidak ada	0	0
19	Pencatatan kematian	Tidak ada	0	0
20	Pencatatan perkawinan bagi WNI/orang asing	Tidak ada	0	0
21	Pencatatan perceraian	Tidak ada	0	0
22	Pelaporan peristiwa penting WNI di luar negeri	Tidak <mark>ada</mark>	0 (0
23	Pencatatan pengesahan anak	Tidak ada	0	0
24	Kutipan ke-ii dan seterusnya akta-akta catatan sipil	Tidak ada	0	0
25	Salinan akta-akta catatan sipil	Tidak ada	0	0
26	Perubahan akta-akta catatan sipil bagi WNI	Tidak ada	0	0
27	Pembatalan akta-akta catatan sipil	Tidak ada	0	0
28	Penatausahaan hasil hutan	Ada	1	0.07
29	Rekomendasi instalasi karantina hewan sementara	Ada	1	0.07
30	Rekomendasi sertifikasi nomor kontrol veteriner	Ada	i T	0.07

175	Pemenuhan terhada	ap <mark>peraturan pus</mark> at	18/5	415
No	NAMA LAYANAN	HASIL IDENTIFIKASI	ISIAN PENILAIAN	SKOR KRITERIA
			(0) Tidak (1) Ya	Isian x bobot (7%)
31	Perizinan pelayanan kesehatan hewan (izin praktik dr. Hewan)	Ada	1	0.07
32	Surat izin usaha penangkapan	Ada	1	0.07
33	Surat ijin pengelolaan ikan	Ada Ada		0.07
34	Surat ijin pembudidayaan ikan	Ada	1	0.07
35	Surat ijin kapal pengangkut ikan	Ada	1	0.07
36	Rekomendasi andalalin	Ada	1	0.07
37	Ijin trayek/operasi	Tidak ada	0	0
38	Ijin penyelenggaraan parkir (())	Tidak <mark>ada</mark>	0 (() / 0
39	Surat tanda pendaftaran waralaba	Tidak ada	0	0
40	Izin usaha pengelolaan pasar tradisional (IUPPT)	Tidak ada	0	0
41	Izin usaha pusat perbelanjaan	Tidak ada	0	0
42	Izin usaha toko modern	Tidak ada	0 7	0 7
43	Tanda daftar gudang (TDG)	Tidak ada	0	0
44	Tanda dagang industri	Tidak ada	0	0
45	Penyelenggaraan pameran dagang	Tidak ada	0 0	0
46	Pelayanan rekomendasi perpanjangan ijin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja (PPJP)	Tidak ada	0	0
47	Pelayanan pengesahan peraturan perusahaan	Tidak ada	50	0

2/5"	Pemenuhan terhada	ip <mark>peraturan pus</mark> at	18/5	45
No	NAMA LAYANAN	HASIL IDENTIFIKASI	ISIAN PENILAIAN	SKOR KRITERIA
			(0) Tidak (1) Ya	Isian x bobot (7%)
48	Pelayanan pendaftaran perjanjian kerja sama (PKB)	Tidak ada	0	0
49	Pelayanan pencatatan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT)	Tidak ada	0	0
50	Pengesahan P2K3 (panitia pembina keselamatan & kesehatan kerja)	Tidak <mark>ada</mark>	0	0
51	Pengesahan pemakaian peralatan K3	Ada	1	0.07
52	Pengesahan wajib lapor ketenagakerjaan	Tidak ada	0	0
53	Rekomendasi PJK3	Tidak ada	0	0
54	Rekomendasi katering / (()) / - ((()) / -	Tidak ada) / T	0) / 0
55	Perijinan tempat penampungan calon tenaga kerja indonesia (TKI)	Ada	1	0.07
56	Rekomendasi paspor calon TKI ke luar negeri	Tidak ada	0	0
57	Rekomendasi pendirian cabang pelaksana penempatan tenaga kerja indonesia swasta (PPTKIS)	Tidak ada	0	
58	Lembaga penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS)	Tidak ada	0	0
59	Persetujuan bursa kerja khusus (BKK)	Tidak ada	0 0	0
60	Perizinan & pendaftaran lembaga pelatihan kerja swasta (LPKS)	Tidak ada	0	0
61	Kartu nomor induk kesenian	Tidak ada	5 0	0

2/5"	Pemenuhan terhad	ap <mark>pera</mark> turan pusat	18/5	4/5
No	NAMA LAYANAN	HASIL IDENTIFIKASI	ISIAN PENILAIAN	SKOR KRITERIA
			(0) Tidak (1) Ya	Isian x bobot (7%)
62	Rekomendasi bantuan organisasi keagamaan /sosial	Tidak ada	0	0
63	Rekomendasi undian gratis berhadiah (RUGB)	Tidak ada	0	0
64	Rekomendasi adopsi	Tidak ada	0	0
65	Rekomendasi ijin pengumpulan uang atau barang	Tidak ada	0) - 0
66	Penerbitan surat tanda pendirian organisasi sosial	Tidak ada	0	0
67	Penerbitan surat tanda pendaftaran ulang organisasi sosial	Tidak ada	0	0
68	Surat rekomendasi pemulangan orang terlantar	Tidak ada	0	0
69	Pemberian suarat rekomendasi pembebasan biaya pengobatan orang terlantar	Tidak ada	0	0
70	Pengesahan akta perubahan anggaran dasar koperasi	Tidak ada	0	0
71	Pengesahan akta pendirian koperasi	Tidak ada	0	0
72	Legalisasi badan hukum koperasi	Tidak ada	0 7	0
73	Pembubaran koperasi	Tidak ada	0	0
74	Rekomendasi pendirian koperasi tingkat provinsi	Tidak ada	0	0
75	Rekomendasi pembukaan kantor cabang koperasi	Tidak ada	0 0	0 ~
76	Surat keterangan kepengurusan koperasi/legalitas	Tidak ada	0	0
77	Perijinan layanan	Tidak ada	0	0
78	Ijin pemakaian bangunan	Tidak ada	0	0

P <mark>eme</mark> nuhan terhadap peraturan pusat					
No	NAMA LAYANAN	HASIL IDENTIFIKASI	ISIAN PENILAIAN	SKOR KRITERIA	
			(0) Tidak (1) Ya	Isian x bobot (7%)	
79	Rekomendasi UKL-UPL	Tidak ada	0	0	
80	Rekomendasi analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL)	Ada	1	0.07	
81	Izin pembuangan limbah cair (IPLC)	Tidak ada	0	0	
82	Pengelolaan limbah B3	Tidak ada	0	0	
83	Izin pengelolaan air bawah tanah	Tidak ada	0	0	
84	Layanan survey, magang, PKL	Tidak ada	0	0	
85	Penerbitan surat keterangan terdaftar ormas*	Tidak ada	0	0	
86	Perijinan pendirian rumah ibadah*	Tidak ada	0	0	



G. Relasi terhadap publik

Tabel F. 7 Hasil penilaian kriteria G

7/	Relasi terh	adap publik		TO
No	NAMA LAYANAN	HASIL IDENTIFIKASI	ISIAN PENILAIAN	SKOR KRITERIA
	way way way	CAR	(0) Tidak (1) Ya	Isian x bobot (22%)
1 /	Kajian drainase (rekomendasi)	G2B	2	0.44
2	Ijin utilitas (penggalian)	G2B	2	0.44
3	Prasarana, sarana, dan utilitas	G2B	2	0.44
4	Pelayanan perijinan	G2C	1	0.22
5	Izin pendirian dan penutupan sekolah	G2B	2	0.44
6	Izin pendirian dan penutupan lembaga kursus	G2B	2	0.44
7	Izin pembuangan limbah tinja	G2B	2	0.44
8	Izin ruang terbuka hijau	G2B	2	0.44
9	Izin pemakaman	G2C	1	0.22
10	Izin pembuangan sampah ke TPA	G2B	2	0.44
113	Rekomendasi sistem proteksi gedung bertingkat	G2B	2	0.44
12	Kartu keluarga	G2C	1	0.22
13	Kartu tanda penduduk	G2C	1	0.22
14	Kartu izin penduduk musiman dan surat keterangan orang terlantar	G2C		0.22

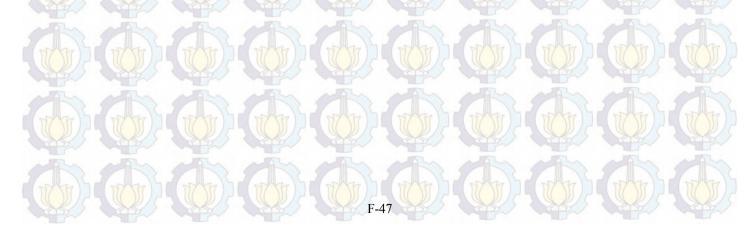
2/5"	Relasi terha	da <mark>p pu</mark> blik	18/5	415
No	NAMA LAYANAN	HASIL IDENTIFIKASI	ISIAN PENILAIAN	SKOR KRITERIA
			(0) Tidak (1) Ya	Isian x bobot (22%)
15	Pendaftaran pindah datang dalam wilayah negara kesatuan RI	G2C	1	0.22
16	Pendaftaran pindah datang antar negara	G2C	1	0.22
17	Pencatatan kelahiran	G2C		0.22
18	Pencatatan lahir mati	G2C	1	0.22
19	Pencatatan kematian	G2C	1	0.22
20	Pencatatan perkawinan bagi WNI/orang asing	G2C	1	0.22
21	Pencatatan perceraian	G2C	The state of the s	0.22
22	Pelaporan peristiwa penting WNI di luar negeri	G2C))) / F G		0.22
23	Pencatatan pengesahan anak	G2C	1	0.22
24	Kutipan ke-ii dan seterusnya akta-akta catatan sipil	G2C	1	0.22
25	Salinan akta-akta catatan sipil	G2C	1	0.22
26	Perubahan akta-akta catatan sipil bagi WNI	G2C	THE TOP	0.22
27	Pembatalan akta-akta catatan sipil	G2C	1	0.22
28	Penatausahaan hasil hutan	G2B	2	0.44
29	Rekomendasi instalasi karantina hewan sementara	G2B	2	0.44
30	Rekomendasi sertifikasi nomor kontrol veteriner	G2B	2	0.44
31	Perizinan pelayanan kesehatan hewan (izin praktik dr. Hewan)	G2C	1	0.22

Relasi terhadap publik						
No	NAMA LAYANAN	HASIL IDENTIFIKASI	ISIAN PENILAIAN	SKOR KRITERIA		
ا (را			(0) Tidak (1) Ya	Isian x bobot (22%)		
32	Surat izin usaha penangkapan	G2B	2	0.44		
33	Surat ijin pengelolaan ikan	G2B	2	0.44		
34	Surat ijin pembudidayaan ikan	G2B	2	0.44		
35	Surat ijin kapal pengangkut ikan	G2B \\\	2	0.44		
36	Rekomendasi andalalin	G2B	2	0.44		
37	Ijin trayek/operasi	G2B	2	0.44		
38	Ijin penyelenggaraan parkir	G2B	2	0.44		
39	Surat tanda pendaftaran waralaba	G2B	2	0.44		
40	Izin usaha pengelolaan pasar tradisional (IUPPT)	G2B))// G2B	2	0.44		
41	Izin usaha pusat perbelanjaan	G2B	2	0.44		
42	Izin usaha toko modern	G2B	2	0.44		
43	Tanda daftar gudang (TDG)	G2B	2	0.44		
44	Tanda dagang industri	G2B	2	0.44		
45	Penyelenggaraan pameran dagang	G2B	2	0.44		
46	Pelayanan rekomendasi perpanjangan ijin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja (PPJP)	G2B 2		0.44		
47	Pelayanan pengesahan peraturan perusahaan	G2B	2	0.44		
48	Pelayanan pendaftaran perjanjian kerja sama (PKB)	G2B	2	0.44		

2/5"	Relasi terha	da <mark>p pu</mark> blik	18/15	4/5
No	NAMA LAYANAN	HASIL IDENTIFIKASI	ISIAN PENILAIAN	SKOR KRITERIA
			(0) Tidak (1) Ya	Isian x bobot (22%)
49	Pelayanan pencatatan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT)	ja waktu tertentu G2B		0.44
50	Pengesahan P2K3 (panitia pembina keselamatan & kesehatan kerja)	G2B	2	0.44
51	Pengesahan pemakaian peralatan K3	G2B	2	0.44
52	Pengesahan wajib lapor ketenagakerjaan	G2B	2	0.44
53	Rekomendasi PJK3	G2B	2	0.44
54	Rekomendasi katering	G2B	2	0.44
55	Perijinan tempat penampungan calon tenaga kerja indonesia (TKI)	G2B	2	0.44
56	Rekomendasi paspor calon TKI ke luar negeri	G2C	1	0.22
57	Rekomendasi pendirian cabang pelaksana penempatan tenaga kerja indonesia swasta (PPTKIS)	G2B	2	0.44
58	Lembaga penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS)	G2B	2	0.44
59	Persetujuan bursa kerja khusus (BKK)	G2B	2	0.44
60	Perizinan & pendaftaran lembaga pelatihan kerja swasta (LPKS)	G2B	2	0.44
61	Kartu nomor induk kesenian	G2C		0.22
62	Rekomendasi bantuan organisasi keagamaan /sosial	G2C	1 1	0.22

2/5	Relasi terh	ada <mark>p pu</mark> blik	18/5	4/5
No	NAMA LAYANAN	HASIL IDENTIFIKASI	ISIAN PENILAIAN	SKOR KRITERIA
			(0) Tidak (1) Ya	Isian x bobot (22%
63	Rekomendasi undian gratis berhadiah (RUGB)	G2C	1	0.22
64	Rekomendasi adopsi	G2C	1	0.22
65	Rekomendasi ijin pengumpulan uang atau barang	G2C	1	0.22
66	Penerbitan surat tanda pendirian organisasi sosial	G2C	1 1	0.22
67	Penerbitan surat tanda pendaftaran ulang organisasi sosial	G2C	1	0.22
68	Surat rekomendasi pemulangan orang terlantar	G2C	1	0.22
69	Pemberian suarat rekomendasi pembebasan biaya pengobatan orang terlantar	G2C	1 (1	0.22
70	Pengesahan akta perubahan anggaran dasar koperasi	G2B	2	0.44
71	Pengesahan akta pendirian koperasi	G2B	2	0.44
72	Legalisasi badan hukum koperasi	G2B	2	0.44
73	Pembubaran koperasi	G2B	2	0.44
74	Rekomendasi pendirian koperasi tingkat provinsi	G2B	2	0.44
75	Rekomendasi pembukaan kantor cabang koperasi	G2B	2	0.44
76	Surat keterangan kepengurusan koperasi/legalitas	G2B	2	0.44
77	Perijinan layanan	G2C	1	0.22
78	Ijin pemakaian bangunan	G2C		0.22
79	Rekomendasi UKL-UPL	G2B	2	0.44

175	Relasi terha	ada <mark>p pu</mark> blik	18/15	4/5
No	NAMA LAYANAN	HASIL IDENTIFIKASI	ISIAN PENILAIAN	SKOR KRITERIA
			(0) Tidak (1) Ya	Isian x bobot (22%)
80	Rekomendasi analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL)	G2B	2	0.44
81	Izin pembuangan limbah cair (IPLC)	G2B	2	0.44
82	Pengelolaan limbah B3	G2B	2	0.44
83	Izin pengelolaan air bawah tanah	G2B	2	0.44
84	Layanan survey, magang, PKL	G2C	1	0.22
85	Penerbitan surat keterangan terdaftar ormas*	G2C	1	0.22
86	Perijinan pendirian rumah ibadah*	G2C	H	0.22



H. Jenis <mark>peng</mark>emban<mark>gan</mark> aplikasi

Tabel F. 8 Hasil penilaian kriteria H

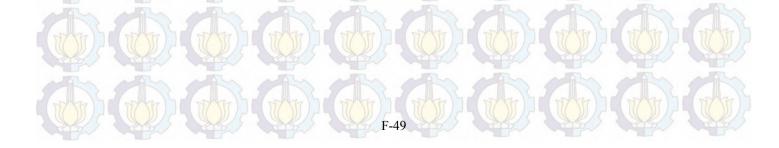
Jenis pengembangan aplikasi					
No	NAMA LAYANAN	HASIL	ISIAN PENILAIAN	SKOR KRITERIA	
		IDENTIFIKASI	(1) New development (2) Enhancement	Isian x bobot (20%)	
	Kajian drainase (rekomendasi)	Enhancement	2	0.4	
2	Izin pendirian dan penutupan sekolah	Enhancement	2	0.4	
3	Izin pendirian dan penutupan lembaga kursus	Enhancement	7277	0.4	
4/5	Pelayanan perijinan tenaga medis & kefarmasian	Enhancement	2	0.4	
5	Ijin utilitas (penggalian)	New development	The state of the s	0.2	
6	Prasarana, sarana, dan utilitas	New development		0.2	



I. Kompleksitas aplikasi

Tabel F. 9 Hasil penilaian kriteria I

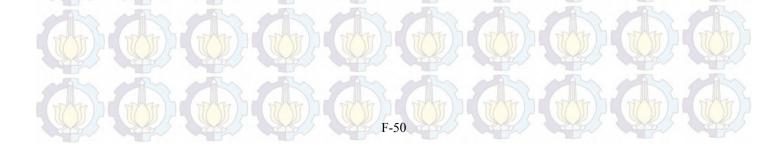
Kompleksitas aplikasi					
No	NAMA LAYANAN	HASIL	ISIAN PENILAIAN	SKOR KRITERIA	
7		IDENTIFIKASI	(1) Low, (2) Medium, (3) High	Isian x bobot (20%)	
1	Kajian drainase (rekomendasi)	High	3	0.6	
2	Izin pendirian dan penutupan sekolah	Low		0.2	
3	Izin pendirian dan penutupan lembaga kursus	Low	H TO THE STATE OF	0.2	
4/5	Pelayanan perijinan tenaga medis & kefarmasian	Low	1/1	0.2	
5	Ijin utilitas (penggalian)	Medium	3	0.6	
6	Prasarana, sarana, dan utilitas	Medium	3	0.6	



J. Potensi integrasi dengan existing system

Tabel F. 10 Hasil penilaian kriteria J

751	Potensi integrasi dengan existing system						
No	NAMA LAYANAN	HASIL	ISIAN PENILAIAN	SKOR KRITERIA			
		IDENTIFIKASI	(0) Tidak ada, (1) Ada	Isian x bobot (20%)			
1	Kajian drainase (rekomendasi)	Ada		0.2			
2	Izin pendirian dan penutupan sekolah	Ada		0.2			
3	Izin pendirian dan penutupan lembaga kursus	Ada	THE PARTY OF	0.2			
4/5	Pelayanan perijinan tenaga medis & kefarmasian	Ada	1/1	0.2			
5	Ijin utilitas (penggalian)	Ada	F	0.2			
6	Prasarana, sarana, dan utilitas	Ada		0.2			



K. Ketersediaan fungsional SI/TI di SKPD penyedia layanan

Tabel F. 11 Hasil penilaian kriteria K

7	Ketersediaan fungsional SI/TI di SKPD penyedia layanan					
No	NAMA LAYANAN	HASIL	ISIAN PENILAIAN	SKOR KRITERIA		
	TANALATANAN	IDENTIFIKASI		Isian x bobot (13%)		
1	Kajian drainase (rekomendasi)	Tidak ada	0	0.13		
2	Izin pendirian dan penutupan sekolah	Ada	The second	0		
3	Izin pendirian dan penutupan lembaga kursus	Ada	H TO THE STATE OF	0 0		
4/5	Pelayanan perijinan tenaga medis & kefarmasian	Ada	1/1/1/1	0		
5	Ijin utilitas (penggalian)	Tidak ada	0	0.13		
6	Prasarana, sarana, dan utilitas	Ada		0		



L. Ketersediaan teknologi yang dibutuhkan

Tabel F. 12 Hasil penilaian kriteria L

7	Ketersediaan teknologi yang dibutuhkan Ketersediaan teknologi yang dibutuhkan						
No	NAMA LAYANAN	HASIL	ISIAN PENILAIAN	SKOR KRITERIA			
	WANTA LATAMAN	IDENTIFIKASI		Isian x bobot (13%)			
1	Kajian drainase (rekomendasi)	Tidak ada	0	0.13			
2	Izin pendirian dan penutupan sekolah	Ada		0			
3	Izin pendirian dan penutupan lembaga kursus	Ada	H TO THE STATE OF	0			
4/5	Pelayanan perijinan tenaga medis & kefarmasian	Ada	1//	0			
5	Ijin utilitas (penggalian)	Tidak ada	0	0.13			
6	Prasarana, sarana, dan utilitas	Tidak ada	0	0.13			



M. Pence<mark>gaha</mark>n risik<mark>o te</mark>knis

Tabel F. 13 Hasil penilaian kriteria M

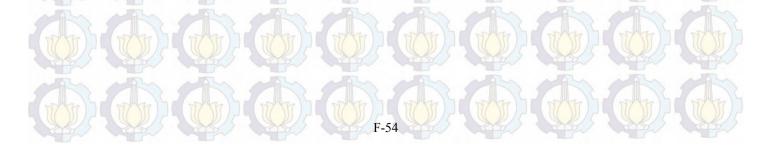
Pencegahan risiko teknis					
No		ISIAN PENILAIAN			SKOR
	NAMA LAYANAN	Kejelasan metodologi pengerjaan	Kejelasan rencana kerja	Kejelasan anggaran	(isian x 0.07)
1)	Kajian drainase (rekomendasi)	v		W/7-5-W	0.07
2	Izin pendirian dan penutupan sekolah	V	V		0.14
3	Izin pendirian dan penutupan lembaga kursus	V	V		0.14
4	Pelayanan perijinan tenaga medis & kefarmasian	V	17 17	Tr) Part	0.07
5	Ijin utilitas (penggalian)		1250		0
6	Prasarana, sarana, dan utilitas			Pho all	0



N. Efisiensi pengembangan

Tabel F. 14 Hasil penilaian kriteria N

Pencegahan risiko teknis						
No	NAMA LAYANAN	ISIAN PENILAIAN			SKOR (isian x	
		Efisiensi biaya	Efisiensi SDM	Efisien waktu	0.07)	
1	Kajian drainase (rekomendasi)				0	
2	Izin pendirian dan penutupan sekolah			1	10	
3	Izin pendirian dan penutupan lembaga kursus			WAR	0	
4	Pelayanan perijinan tenaga medis & kefarmasian				0	
5	Ijin utilitas (penggalian)	0		No	0	
6	Prasarana, sarana, dan utilitas	THE STATE OF THE S	THE THE	THE CONTRACTOR	0	



Lampiran G

Lampiran berikut berisi lembar validasi dan verifikasi pengerjaan tugas akhir yang melibatkan Pemerintah Kota Surabaya melalui Bappeko dan Diskominfo Kota Surabaya.



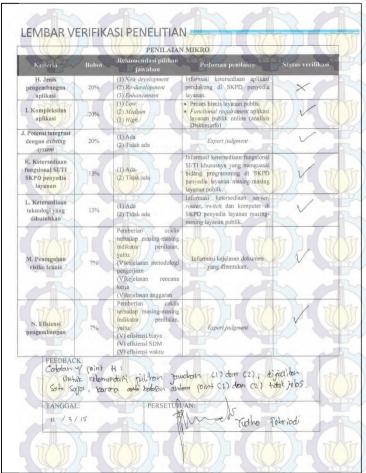
Gambar G. 1 Lembar verifikasi penelitian (1)

LEMBAR VERIFIKASI PENELITIAN -PENILAIAN MAKRO Kriteria Pedoman penilaian iawaban A. Kesesuaian · Urutan prioritas pembangunan kota Surabaya didapat dari dengan prioritas I sampai dengan 10 RPJMD Kota Surabaya pembangunan · Indikator prioritas program kota Kategori kesiapan TI SKPD (e-1) Kategori I B. Kesiapan SKPD Readiness) vang dikeluarkan oleh (2) Kategori 2 penyedia layanan (3) Kategori 3 Pemerintah Kota Surabaya (2) Medium Jumlah pemohon lavanan (3) High publik C. Kategori Penentuan rentang Kategori jumlah pemohon jumlah pemohon masing-masing kategori layanan yang telah ditentukan layanan dapat ditakukan oleh oleh Pemerintah Kota organisasi (yaitu Pemkot Surabaya Surabaya). D. Pemenuhau Standar Pelayanan Minimal (0) untuk jawaban Tidak terhadap (SPM) (1) untuk jawaban Ya peraturan pusat E. Responsi Portal pelayanan publik berbasis terhadap (0) untuk jawaban Tidak online pemerintah daerah kompetisi e-1) untuk jawaban Ya. (kabupaten/kota) di Indonesia. Government Berdasarkan luaran yang dihasilkan: (1) Perijinan G. Relasi terhadan Inventori lavanan publik (2) Non-perijinan administratif publik Berdasarkan orientasi pengguna: (2) G2B FEEDBACK: Catalan poin G : Kategori perijihan dan non-perijihan tidak perlu dipisah Karena merupakan bayanan Fublik Administratif pemerintah yang memiliki tingkat kepentingan yang sama TANGGAL Maret 2015 M ALI RAKHMADI

Gambar G. 3 Lembar verifikasi penelitian (2)



Gambar G. 2 Lembar verifikasi penelitian (3)



2/17		PENILAIAN	MIKRO	
Kriteria	Bobot	Rekomendasi pilihan jawaban	Pedoman penilaian	Status verifikasi
H. Jenis pengembangan aplikasi	20%	(1) New development (2) Enhancement	Informasi ketersediaan aplikasi pendukung di SKPD penyedia layanan.	
I. Kompleksitas aplikasi	20%	(1) Low (2) Medium (3) High	Proses bisnis layanan publik Functional requirement aplikasi layanan publik online (analisis Diskominfo)	
dengan existing system	20%	(1) Ada (2) Tidak ada	Expert judgment	V
K. Ketersediaan fungsional SI/TI SKPD penyedia layanan	13%	(1) Ada (2) Tidak ada	Informasi ketersediaan fungsional SUTI khususnya yang menguasai bidang programming di SKPD penyedia layanan masing-masing layanan publik.	
L. Ketersediaan teknologi yang dibutuhkan	13%	(1) Ada (2) Tidak ada	Informasi ketersediaan server, router, switch dan komputer di SKPD penyedia layanan masing- masing layanan publik.	
M. Pencegahan risiko teknis	7%	Pemberian ceklis terhadap masing-masing indikator penilaian, yaitu: (V)kejelasan metodologi pengerjaan (V)kejelasan rencana kerja (V)kejelasan anggaran	Informasi kejelasan dokumen yang ditentukan.	
N. Efisiensi pengembangan	7%	Pemberian ceklis terhadap masing-masing indikator penilalan, yaitu: (V) efisiensi biaya (V) efisiensi SDM (V) efisiensi waktu	Expert judgment	
FEEDBAC	K:			
TANGGAL		PERSETUL	JAN: What with febr	00
16/3	115	The state of the s	who tidho febr	icd

G-3

LEMBAR VALIDASI HASIL PENELITIAN

Sehubungan dengan penelitian untuk memenuhi tugas akhir di Jurusan Sistem Informasi – Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya oleh:

Nama : Maya Previana Syafitri NRP : 5211100143

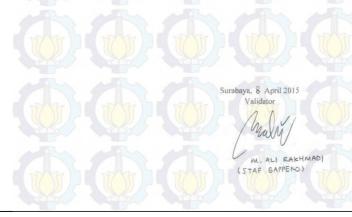
Waktu penelitian : November 2014 – April 2015

dinyatakan bahwa penelitian tersebut telah dilakukan dengan BAIK dan memberi sumbangsih terhadap Pemerintah Kota Surabaya, khususnya terkait dengan seleksi dan prioritisasi layanan publik berbasis online.

Melalui surat ini, kami nyatakan bahwa hasil penelitian yaitu perangkat penilaian telah tervalidasi dengan ketentuan sebagai berikut.

No	Pernyataan	Ceklis
1	Perangkat penilaian dapat dioperasionalisasikan berdasarkan kriteria dan bobot yang ditentukan, dan pedoman penilaian yang dapat diakomodasi pihak yang terkait terhadap penilaian tersebut.	1
2	Per <mark>angkat</mark> penilaian telah <mark>diuji</mark> dengan menggunakan data tertentu yang menjadi batasan pengujian.	/
3	Perangkat penilaian telah diuji oleh aktor yang direkomendasikan dan aktor tersebut telah melakukan tugasnya sesuai dengan petunjuk pengujian perangkat penilaian.	1
4	Pengujian perangkat penilaian tidak menemui masalah.	X
5	Hasil pengujian perangkat penilaian menunjukkan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.	1
6	Hasil pengujian perangkat penilaian dapat memenuhi kebutuhan organisasi, yaitu Pemerintah Kota Surabaya.	\checkmark
7	Perangkat penilaian dapat digunakan di masa mendatang oleh organisasi, yaitu Pemerintah Kota Surabaya untuk kepentingan tertentu.	V

Surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan diharapkan dapat dipergunakan dengan semestinya.



Gambar G. 6 Lembar validasi penelitian (1)

LEMBAR VALIDASI HASIL PENELITIAN

Sehubungan dengan penelitian untuk memenuhi tugas akhir di Jurusan Sistem Informasi — Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya oleh:

Nama Syafitri NRP Salah Syafitri Sal

dinyatakan bahwa penelitian tersebut telah dilakukan dengan BAIK dan memberi sumbangsih terhadap Pemerintah Kota Surabaya, khususnya terkait dengan seleksi dan prioritisasi layanan publik berbasis online.

Melalui surat ini, kami nyatakan bahwa hasil penelitian yaitu perangkat penilaian telah tervalidasi dengan ketentuan sebagai berikut.

No	Pernyataan	Ceklis	
1	Perangkat penilaian dapat dioperasionalisasikan berdasarkan kriteria dan bobot yang ditentukan, dan pedoman penilaian yang dapat diakomodasi pihak yang terkait terhadap penilaian tersebut.	1	
2	Perangkat penilaian telah diuji dengan menggunakan data tertentu yang menjadi batasan pengujian.	V	
3	Perangkat penilaian telah diuji oleh aktor yang direkomendasikan dan aktor tersebut telah melakukan tugasnya sesuai dengan petunjuk pengujian perangkat penilaian.		
4	Pengujian perangkat penilaian tidak menemui masalah.	V	
5	Hasil pengujian perangkat penilaian menunjukkan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.	V	
6	Hasil pengujian perangkat penilaian dapat memenuhi kebutuhan organisasi, yaitu Pemerintah Kota Surabaya.	V	
7	Perangkat penilaian dapat digunakan di masa mendatang oleh organisasi, yaitu Pemerintah Kota Surabaya untuk kepentingan tertentu.	V	

Surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan diharapkan dapat dipergunakan dengan semestinya.

Surabaya, & April 2015

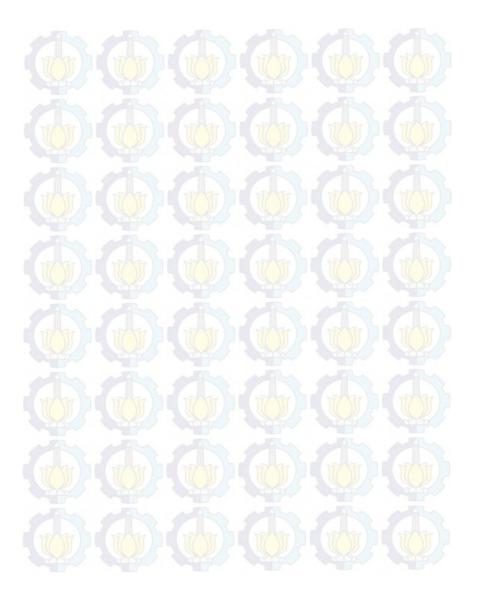
Validator

Mucho Febriodi

I STAF DISKOMINFO)

Gambar G. 7 Lembar validasi penelitian (2)

Halaman ini sengaja dikosongkan



BIODATA PENULIS



Penulis bernama lengkap Maya Previana Syafitri, atau biasa disapa dengan Maya. Penulis dilahirkan di Kebumen, 23 April 1994 dan merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Penulis telah menempuh pendidikan formal di SD Negeri Purworejo, SMP Negeri 2 Purworejo, dan SMA Negeri 1 Purworejo.

Pada tahun 2011, penulis diterima di Jurusan Sistem Informasi – Institut

Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya dan tercatat sebagai mahasiswi dengan NRP 5211100143. Selama masa perkuliahan, penulis aktif di bidang akademik dan organisasi. Penulis pernah menjadi asisten dosen pada mata kuliah Manajemen Organisasi dan Manajemen Layanan Teknologi Informasi. Di bidang non-akademik, penulis mengikuti organisasi mahasiswa. Penulis juga pernah melaksanakan kerja praktik di Bank Indonesia – Jakarta selama 2 bulan pada tahun 2014.

Di akhir tahun perkuliahannya, penulis mengambil konsentrasi pada bidang minat Pengembangan Perencanaan Sistem Informasi dengan topik tugas akhir di bidang *e-Government*. Untuk keperluan penelitian, dapat menghubungi penulis melalui email: previana.m@gmail.com.

